PENERBIT SATOE

Khairunnisa Musari

KATA PENGANTAR
Kepala KPwBI Provinsi Jawa Timur
Ketua DPW IAEI Jawa Timur
Ketua Umum MES PW Jawa Timur

10 TAHUN MENAKAR EKONOMI SYARIAH
DARI UJUNG JAWA TIMUR

01

Membangun Kekuatan Daerah

10 Tahun Menakar Ekonomi Syariah dari Ujung Jawa Timur: Seri 1, Membangun Kekuatan Daerah

Penulis: Khairunnisa Musari

ISBN: 978-623-93404-0-7

Editor: Niswahikmah

Layout dan cover: Tim Satoe

Penerbit: Satoe

Alamat Redaksi:
Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No. 30, Lebo
Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jatim, 61223.
e-mail: *penerbit.satoe@gmail.com*

Cetakan pertama: Maret 2020

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
Hak cipta ada pada penulis dan hak penerbitan ada pada penerbit.
Isi di luar tanggung jawab penerbit dan percetakan.

KATA PENGANTAR

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur

"EKONOMI SYARIAH SEBAGAI EKONOMI SILATURAHMI"

Memahami ekonomi ibarat menelusuri pendewasaan kita sebagai insan manusia. Kita belajar mengenal diri kita sendiri, baru kemudian belajar mengenal orang lain dan akhirnya berinteraksi atau bersilaturahmi sebagai masyarakat bersama berbagai manfaatnya, baik untuk sendiri maupun bersama-sama. Kita belajar ilmu ekonomi, berawal dari teori, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sosial kita dan akhirnya memadukan prinsip ekonomi dengan berbagai bidang ilmu yang lain guna memaksimalkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hal yang sama dan terlebih lagi dengan ekonomi syariah. Tambahan istilah syariah lebih memperkuat makna interaksi antar manusia, khususnya melalui jalur silaturahmi di atas. Saya menekankan sekali silaturahmi ini karena bagi saya, ekonomi syariah, atau boleh disebut juga ekonomi madani, adalah ekonomi silaturahmi. Silaturahmi menambah amal ibadah dan menghapus dosa. Oleh karenanya ekonomi syariah harus memberikan manfaat dan menghilangkan yang mudarat.

Apa manfaat dari ekonomi syariah? Untuk menjawabnya, saya jadi ingat akan sebuah kuis televisi yang pernah populer. Kuis ini intinya menanyakan persepsi pertama kita akan sebuah pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari yang jawabannya beragam, tergantung apa yang ada di benak kita pada saat itu.

Nah, kalau kuis itu adalah, *"Apa yang Anda tahu mengenai ekonomi syariah?"* Saya bisa tebak akan ada kumpulan jawaban atau istilah sebagai berikut: bank syariah, akad syariah, ekonomi madani, halal, wakaf, keadilan, berkah, dan lain sebagainya.

Anggap berbagai istilah ini sebagai kepingan *puzzle* dalam sebuah permainan *puzzle* waktu kita kecil dulu, maka kita akan mendapatkan berbagai kepingan istilah yang baru sebagian kecil menggambarkan ekonomi syariah. Namun, walaupun sepotong-sepotong, kepingan *puzzle* ini akan mengantarkan kita kepada gambaran menyeluruh. Oleh karenanya, permainan ini mengarahkan kita merangkaikan berbagai keping *puzzle* ini sampai jadi, mencapai gambaran akhir utuh yang diminta.

Proses menyusun *puzzle* inilah yang menjadi silaturahmi antar berbagai keping dan makna yang ada. Silaturahmi yang saling memperkuat dan melengkapi. Ibarat *puzzle* tadi, ekonomi syariah adalah silaturahmi bank syariah dengan halal, prinsip keadilan, wakaf, berkah, dan yang lain. Setelah semuanya saling melengkapi, maka kita bisa memperoleh gambaran indahnya ekonomi syariah atau ekonomi madani sebagai sebuah ekosistem. Ekosistem yang di dalamnya masing-masing individu memperoleh manfaat dari saling silaturahmi yang ada.

Inilah ekosistem yang di dalamnya individu dan masyarakat hidup secara madani, hidup dengan menyadari pentingnya ketergantungan, bukan saling mengeksploitasi. Adanya manfaat yang membuat anggota ekosistem termotivasi untuk saling menjaga agar berkesinambungan.

Harapan saya adalah bahwa pengembangan ekonomi syariah merupakan sebuah *road map,* yang dalam perjalanannya, menyambungkan berbagai kegiatan ekonomi syariah yang sudah, belum, dan juga yang akan ada. Sebuah *road map* menuju terbentuknya ekosistem.

Merupakan cita cita kita agar ekosistem ekonomi syariah ini bisa diwujudkan. Dan, agar bisa terwujud, tentunya *road map* ke arah ekosistem ini haruslah yang konkret dan dapat dirasakan kehadirannya.

Inilah yang menjadi fokus utama saya selaku Kepala Bank Indonesia Jawa Timur dalam pemberdayaan ekonomi syariah, khususnya di Jawa Timur. Dalam berbagai interaksi dan diskusi, saya selalu menantang para pegiat syariah untuk eksis dan konkret. Kegiatan ekonomi syariah yang tidak hanya teori, tetapi juga praktik yang dirasakan masyarakat.

Alhamdulillah, di Jawa Timur ini, saya bertemu banyak pegiat ekonomi syariah yang membuat saya semangat dan optimis akan masa depan masyarakat yang madani. Termasuk tentunya dengan penulis buku ini, Dr. Khairunnisa Musari, yang pertemuan pertamanya adalah di Jember, awal tahun 2017. Bersamaan dengan awal jabatan saya di Jawa Timur.

Saya bersyukur kesempatan saya di Jawa Timur ini adalah rencana Allah Swt. yang mempertemukan saya dengan Mbak Nisa dan teman-temannya dalam satu keluarga besar yang sangat hangat dan produktif. Satu keluarga yang tidak berhenti bersilaturahmi dan saling memberi inspirasi serta masukan.

Wa bil khusus dengan Mbak Nisa ini, saya merasakan getaran dan aura semangat yang luar biasa dalam mengembangkan ekonomi madani. Sebuah semangat dan tekad yang jauh melebihi batas-batas keterbatasan yang ada. Mbak Nisa adalah akademisi sekaligus praktisi yang menambah nilai seorang Khairunnisa dalam geliat ekosistem ekonomi syariah di Jawa Timur.

Tulisan-tulisan dan pemikiran Mbak Nisa ini menggambarkan gelombang semangat yang ada. Berbagai gelombang yang menjadikan buku ini ibarat sebuah sungai yang selalu mengalir, mengantarkan pemikiran menjadi perjalanan ke bahtera masyarakat madani.

Saya katakan sebuah sungai karena saya yakin masih banyak sungai yang lain yang saling menyambungkan silaturahmi menuju bahtera yang sama, bahtera *rahmatan lil alamin* yang selalu kita cita-citakan dan perjuangkan. Sungai yang tidak akan surut tetapi sebaliknya memberi manfaat bagi daratan yang dilaluinya.

Selamat ya, Mbak Nisa. Buku pertama ini adalah sebuah inspirasi dan langkah awal Mbak Nisa ke arah impian dan cita-cita kita bersama. Bagi pembaca, saya harapkan buku ini akan menjadi sumber inspirasi dan referensi yang membuat pembaca rindu akan karya-karya Mbak Nisa selanjutnya. Inspirasi yang tidak

hanya menghasilkan karya akademis, tapi juga karya nyata dalam masyarakat yang syariah dan madani. Maju terus dan berkah….

Difi Johansyah
Kepala Bank Indonesia Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah
Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia
Jawa Timur

Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia dari Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, akhirnya hasil goresan pena Mbak Khairunnisa Musari ini dapat hadir di tangan kita semua. Sebuah mahakarya yang luar biasa, karena dihasilkan oleh seorang perempuan yang luar biasa pula.

Karya yang dipersembahkan kepada para pembaca ini dibagi dalam dua seri. Buku "Membangun Kekuatan Daerah" adalah seri pertama dari Seri 10 Tahun Menakar Ekonomi Syariah dari Ujung Jawa Timur yang memuat 60 tulisan, dalam rentang waktu 2007-2012. Sedangkan buku "Membangun Masyarakat Madani" adalah seri kedua yang memuat 60 tulisan yang ditulis dalam rentang waktu 2013-2020. Kumpulan tulisan dalam kedua buku ini merupakan hasil kontemplasi dan respons penulisnya atas berbagai persoalan umat selama sepuluh tahun lebih, dari 2007 hingga 2020. Menurut penuturan penulisnya, tulisan-tulisan ini sejatinya mengangkat isu-isu nasional dan global, namun dikemas bercita rasa lokal dan regional, karena awalnya memang ditujukan kepada pembaca di wilayah Jawa Timur, khususnya di Tapal Kuda.

Buku seri pertama ingin mengajak pembacanya untuk mengenali kekuatan dan kapasitas sumber daya daerah untuk dikembangkan sehingga berdaya. Sedangkan buku seri kedua ingin mengajak pembacanya untuk berbuat lebih besar dengan melihat kekuatan dan kapasitas diri lebih luas lagi. *Think globally, act locally*, jelasnya. Banyak persoalan yang dihadapi dunia hari ini, sejatinya adalah persoalan yang sama yang dihadapi di sekitar kita. Pada tataran inilah, tulisan-tulisan pada buku "Membangun Masyarakat Madani" dapat menjadi *trigger* sekaligus peneguh untuk kita mau berbuat baik untuk sesama, terutama bagi kelompok masyarakat yang termarjinalkan, dan turut berpartisipasi membangun ekonomi halal, baik untuk pribadi, keluarga, juga masyarakat, tutur penulisnya.

Seperti disebutkan di awal, bahwa karya yang ada di tangan pembaca ini merupakan mahakarya yang luar biasa, karena dihasilkan oleh seorang perempuan yang luar biasa pula. Predikat "luar biasa" pantas disematkan buat karya-karya yang dihasilkan ini, karena lima alasan.

Pertama, buku ini langsung diterbitkan dalam dua seri sekaligus, seri pertama dan seri kedua. Seri pertama berjudul "Membangun Kekuatan Daerah", sedangkan seri kedua berjudul "Membangun Masyarakat Madani". Bagi sebagian penulis, terutama penulis pemula, meluncurkan dua buku sekaligus dalam satu tahun merupakan sebuah kebanggaan dan tidak banyak yang mampu melakukannya, meskipun ini merupakan kumpulan tulisan yang dihimpun dari tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya.

Kedua, jumlah tulisan yang ada dalam kedua buku ini, total berjumlah 120 tulisan dalam rentang waktu sekitar 12 tahun lebih. Ini artinya, penulisnya adalah penulis yang sangat produktif, di mana penulis rata-rata mampu menerbitkan 10 tulisan setiap tahunnya, dan ini berarti pula, penulis mampu mempersembahkan satu tulisan setiap bulannya. Tulisan yang bukan sekadar tulisan, tetapi tulisan yang kemudian dipublikasikan di media massa dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, dan ini tentu sesuatu yang luar biasa.

Ketiga, luasnya bidang yang dikaji, beragam dan meliputi berbagai aspek, mulai dari ekonomi makro, mikro, fiskal, moneter, kebijakan pemerintah, sosial, politik, ekonomi kerakyatan, dan problematika yang dihadapi umat, termasuk bidang ekonomi dan keuangan syariah, perbankan syariah, pariwisata syariah, koperasi syariah, *nanofinance*, umrah dan haji, ekonomi sosial Islam, filantropi Islam, syukuk dan wakaf, baik dari segi tataran teoretis maupun praksisnya di lapangan, sekaligus dilengkapi dengan tawaran solusinya.

Keempat, tema-tema tulisan yang diangkatkan sangat aktual dan solutif serta dihiasi dengan bahasa yang lugas, mudah dipahami, dan mengasyikkan pembacanya. Ketika menikmati satu demi satu tulisan yang ada di kedua buku ini, tidak terasa kita terhanyut dan menyatu dengan ide sang penulis, dan tanpa terasa waktu telah bergulir sedemikian jauhnya.

Kelima, karya-karya ini, ditulis oleh perempuan, bukan oleh pria. Bagi seorang perempuan yang harus berperan ganda dalam kehidupan—sebagai ibu sekaligus istri—melahirkan sebuah

tulisan bukanlah perkara mudah, karena waktunya telah habis di ruang dapur, sumur, dan kasur. Dalam konteks inilah, hadirnya tulisan-tulisan ini sangat mengagumkan kita semua. Kalau hanya sebagai perempuan biasa, tidak akan mungkin melahirkan karya-karya yang mengasyikkan ini. Jadi, dengan demikian, penulisnya masuk kategori "perempuan luar biasa".

Julukan tersebut memang pantas disematkan kepada penulis buku ini, karena perjalanan hidupnya penuh dengan seabrek aktivitas, amanah, dan karya. Selain sebagai dosen Ekonomi Syariah Pascasarjana dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, dalam waktu yang bersamaan, ia juga mengemban amanah sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Provinsi Jawa Timur 2017-2021, Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jember 2019-2022, dan Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Lumajang 2018-2021. Saat ini juga, ia adalah *reviewer* dan inisiator pendirian Rumah Qardhul Hassan untuk membantu pembiayaan masyarakat miskin melalui *nanofinance*.

Khusus di lingkungan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Provinsi Jawa Timur, sepanjang perkenalan saya dengan penulis buku ini—kurang lebih lima tahun lamanya—saya selalu kagum, salut, dan kadang tersipu malu atas komitmen dan perhatiannya, terutama dalam mensyiarkan dan memajukan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jawa Timur. Misalnya saja, dia tidak akan berpikir banyak, dan akan berangkat dari Lumajang menuju Surabaya atau ke tempat

lainnya, hanya untuk mewakili pengurus DPW IAEI Jawa Timur, karena tidak ada yang dapat mewakili. Contoh lainnya adalah, hampir semua kegiatan yang ada di lingkungan DPW IAEI Jawa Timur, semuanya adalah berkat sentuhan dan orkestrasi dari tangan beliau. Bila kemudian DPW IAEI Jawa Timur mendapatkan anugreah penghargaan dari DPP IAEI sebagai DPW terbaik dan teraktif selama dua periode berturut-turut, semuanya itu tiada lain karena komitmen, perhatian, dan kepiawaian Mbak Khairunnisa. Beliaulah yang sepantasnya menerima dua penghargaan itu. Terima kasih banyak Mbak Nisa atas semua dedikasi dan kontribusi yang telah dan akan terus disumbangkan buat kemajuan DPW IAEI Jawa Timur.

Khusus dalam bidang tulis-menulis, bila dihitung hingga awal tahun 2020, sudah dua ratusan tulisan dari alumni Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga ini yang sudah dipublikasikan oleh media cetak lokal dan nasional, majalah, jurnal internasional, serta *book chapter* nasional dan internasional. Ia juga telah mempresentasikan riset-risetnya pada sejumlah konferensi yang disponsori oleh Islamic Research & Training Institution (IRTI)–Islamic Development Bank (IDB). Melihat pada tulisan-tulisannya, aktivitas dan kontribusi dalam berbagai hal, maka dia pantas menyandang gelar perempuan luar biasa. Kalau di lingkungan perguruan tinggi, bila ada akademisi yang memiliki prestasi luar biasa, apalagi di bidang akademik, maka kepadanya sudah pantas dianugerahi gelar Guru Besar. Guru Besar bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kita doakan bersama, semoga gelar Guru Besar secara legal-formal, segera beliau dapatkan.

Sebagai pengakuan atas kiprah dan karya-karyanya, ia mendapat anugerah penghargaan "WOMANi 300 for 2019" sebagai *the Top 300 List of the Most Influential Women in Islamic Business and Finance* dari lembaga analisis keuangan asal Inggris, Cambridge-IFA, bersanding dengan para akademisi, praktisi keuangan syariah, penasihat, dan pelaku jasa syariah dari seluruh dunia. Dia terseleksi dalam "WOMANi 300 for 2019" berdasarkan tiga faktor dasar penilaian yang ditetapkan pihak Cambridge IFA, yaitu kepemimpinan, advokasi dan pengakuan dari industri, dan khusus bagi akademisi, penilaian juga difokuskan pada seberapa besar kontribusi keilmuan dan riset yang dilakukan.

Atas hadirnya buku ini di tangan kita semua, mewakili seluruh Keluarga Besar DPW IAEI Jawa Timur kami sampaikan salam hangat dan salut kepada Mbak Khairunnisa. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mampu mengikuti jejak beliau. Kami selalu berdoa, kiranya Mbak Khairunnisa Musari, bersama suami dan anak-anak semua, selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan berkah, serta semua yang dicita-citakan dan diimpikan mendapat rida dari Yang Mahakuasa. Sekali lagi, kami sampaikan selamat dan sukses selalu buat Mbak Khairunnisa Musari bersama keluarga.

Makarya Binangun, Waru,
Sidoarjo, 21.02.2020
Mewakili Keluarga Besar
DPW IAEI Jawa Timur
Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Pimpinan Wilayah Jawa Timur

"Dakwah Ekonomi"

Setiap muslim memiliki kewajiban dakwah. Tak terkecuali perempuan. Ini sesuai hadis Rasulullah Muhammad, *ballighuu 'anny walau aayatan. Fi'il amar* (perintah) ini bermakna umum, meski menggunakan *khitab* laki-laki.

Kesadaran itulah yang dimiliki penulis buku ini, Dr. Khairunnisa, yang saya kenal sejak tahun 2000-an, saat saya masih bekerja di Jawa Pos, dan Iis—panggilan akrabnya—masih berstatus mahasiswi Teknik Industri Ubaya. Saat bertemu lagi sekian tahun kemudian, saya lebih mengenal Iis sebagai pribadi yang menggebu-gebu. Menikah, ambil master dari ITS, semangatnya semakin menyala-nyala.

Awalnya, perjuangan Iis adalah "melawan" ketidakadilan dunia kerja terhadap perempuan. "Saya ingin membuktikan bahwa perempuan yang sudah menikah dan punya anak itu bisa bekerja profesional," begitu katanya. Maka, perjalanan perjuangan itu dimulai dengan bekerja jadi konsultan, lalu wartawan Jawa Pos, dan televisi di Jakarta, yang rata-rata "menolak" hanya karena

dia sudah menikah dan punya anak.

Singkat cerita, saya bertemu lagi saat sama-sama mengambil program doktor Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Saat itu, Iis kuliah di Surabaya sambil mengurus anak-anaknya sendiri, yang kini berjumlah lima. Luar biasa. Lulus pertama seangkatan, dia sempat hendak melanjutkan perjuangannya melalui partai dan berjuang untuk ekonomi Islam, namun akhirnya ia memilih berlabuh di IAIN Jember sebagai staf pengajar.

Tulisan-tulisan dalam buku ini adalah bagian dari dakwah ekonomi Iis. Sebagai mantan wartawan dan dosen ekonomi syariah, Iis mencoba berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dari daerah, utamanya Jember-Lumajang. Sebagian besar tulisannya pernah dimuat media lokal, Radar Jember, anak usaha Jawa Pos. Tulisan-tulisannya mencoba untuk mengkritisi hal-hal yang ada di masyarakat dan pemerintahan, sekaligus mencarikan solusinya.

Sebagai pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Lumajang, tampaknya, Iis begitu memahami motto MES. Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Di antara puluhan tulisannya, sebagian adalah bagian dari dakwah ekonomi Islam. Tulisannya ringan, tapi bernas, menjadikan siapapun yang membaca bisa memahami fenomena ekonomi yang terjadi, dan bagaimana seharusnya menyikapinya.

Dr. Imron Mawardi, SP., M. Si.
Ketua Umum MES PW Jawa Timur

KATA PENGANTAR PENULIS

Salah satu sarana untuk memelihara ilmu adalah dengan menulisnya. Ali bin Abi Thalib ra. memberi nasihat, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Imam Syafi'i mengumpamakan ilmu yang tidak ditulis sebagai orang bodoh yang memburu kijang liar di hutan, mendapatkannya, tapi tidak mengikatnya. Sayyid Quthb mengatakan, *"Satu peluru hanya menembus satu kepala, tapi satu telunjuk (tulisan) bisa menembus jutaan kepala."*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *'azza wa jalla*. Atas izin-Nya, berbagai tulisan yang selama sepuluh tahun terakhir menghiasi koran dan dunia maya dapat terangkum dalam buku berseri ini. Buku *Membangun Kekuatan Daerah* adalah seri pertama dari Seri 10 Tahun Menakar Ekonomi Syariah dari Ujung Jawa Timur yang memuat 60 tulisan. Sebagian besar tulisan dalam seri ini pernah dimuat pada media cetak lokal. Tulisan-tulisan ini sejatinya mengangkat isu-isu nasional dan global, namun dikemas bercita rasa lokal dan regional karena awalnya memang ditujukan kepada pembaca di wilayah Jawa Timur, khususnya di Tapal Kuda.

Buku *Membangun Kekuatan Daerah* ingin mengajak pembacanya untuk mengenali kekuatan dan kapasitas sumber daya daerah untuk dikembangkan sehingga berdaya. Meski tulisan-tulisan ini ditulis dalam durasi waktu 2007 hingga 2012,

namun saya meyakini semuanya masih memiliki konteks kekinian dan cukup relevan untuk menjadi bahan diskusi bagi kondisi hari ini. Banyak persoalan yang mengemuka adalah persoalan klasik yang berulang atau memiliki rupa berbeda dengan substansi yang sama, Pada tataran inilah, tulisan-tulisan pada buku ini dapat menjadi pengingat sekaligus penyambung kisah.

Lewat tulisan, saya bersuara. Karena dengan pena, saya menjadi ada. Namun, menulis sejatinya bukan sekadar bicara. Menulis, sejatinya bukan sekadar mengurai kata-kata. Menulis, sejatinya juga adalah ibadah untuk membaca ayat-ayat *qauliyah* dan *kauniyah*-Nya. Menulis, sejatinya juga juga adalah dakwah. Menulis, sejatinya juga adalah wakaf. Jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kurang benar, kurang baik pada tulisan-tulisan ini, sesungguhnya semua itu adalah karena kelemahan saya sebagai manusia biasa. Jika terdapat kebaikan dan kebermanfaatan, semua itu sejatinya adalah dari Allah.

Semoga tulisan-tulisan yang terangkum dalam buku ini dapat berkontribusi pemikiran dan menjadi ikhtiar nyata dari saya untuk ambil bagian dalam membangun peradaban keilmuan dengan menyentuh persoalan-persoalan kemasyarakatan, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, juga agama.

Terima kasih tidak terhingga kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Jawa Timur, dan Pimpinan Wilayah (PW) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur yang telah berkenan memberi kata pengantar untuk buku ini. Pentingnya kata pengantar dari *panjenengan*

semua selaku mitra dalam membumikan ekonomi syariah di Jawa Timur menjadi parameter bagi saya untuk memperbaiki diri. Semoga ekonomi syariah ke depan dapat berbuat nyata untuk masyarakat. Buku ini menjadi bukti cinta dari pegiat ekonomi syariah di Jawa Timur untuk Indonesia.

Khairunnisa Musari

Lumajang-Jember, Maret 2020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur iii

Kata Pengantar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Jawa Timur viii

Kata Pengantar Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Pimpinan Wilayah Jawa Timur xiv

Kata Pengantar Penulis xvi

2007 1

1. Perbankan Jatim, Berpihaklah Pada Umkm! 2

2008 7

2. Bandara Notohadinegoro, Investasi Bagi Jatim 8
3. Membuka Akses Kesehatan Berkualitas 13
4. Mewaspadai Memburuknya Ekonomi Makro 18
5. Ekonomi Pulang Kampung 23
6. Antara Krisis Finansial Global, Pertanian, Dan Unej 28
7. Menyoal Langkanya Pupuk Bersubsidi 33
8. Sengonisasi, Dari Lumajang untuk Masa Depan 38
9. Obligasi Daerah, Sudah Siapkah Jember? 43
10. Bank Syariah, Alternatif Hadapi Krisis 48
11. Mengakhiri Pertikaian Industri Ritel Modern VS Pasar Tradisional 53

2009 59
12. Menuju Revitalisasi Pertanian Organik 60
13. Education For All, Kekuatan Perubahan Ekonomi 65
14. Tantangan Dan Peluang Perbankan Di Tapal Kuda 70

2010 75
15. Pembangunan Ekonomi yang Humanis 76
16. Membiayai Sektor Pertanian 80
17. Ekonomi Madani 84
18. Mendesak Realisasi Jamkesda 88
19. Yuk, Kita Berwakaf Uang! 93
20. Sengon Dan Jabon 97
21. Tembakau Dan Kesehatan 101
22. Bersahabat Dengan Air 105
23. Pisang Agung 110
24. Batik 115
25. Kenitu 120
26. Kemandirian Perempuan 125
27. Sampah 130
28. Tebu & Gula 135
29. Pariwisata 139
30. Maqasid Syari'ah 144
31. Jeruk Lokal Vs Jeruk Impor 149
32. Wow, Is It Banana's Tree? 154
33. Sepak Bola Vs Kebutuhan Dapur 158
34. iB 162
35. Pasir Besiku Sayang, Pasir Besiku Malang 167

36. Koperasi, Antara Asa Dan Realitas 172
37. Reformasi Agraria 177
38. Rumpun Aksara untuk Anak Indonesia 182
39. Pariwisata Budaya 186
40. Rumah Tani, Rumah Kita, Ada di Sini 189
41. Marhaban, Ya Konsumtivisme 194
42. Dulu Aku Suka Padamu.... (Ya Ya Ya) 199
43. TKI dan Masa Depan Mereka 204
44. Ekonomi Mudik 209
45. Chocolate From Jember (1) 214
46. Chocolate From Jember (2) 218
47. BMT, Riwayatmu Kini.... 223
48. Yuk, Menabung Sampah!!! 227
49. Ekonomi Zakat 232

2011 237
50. Realistis Memilih Investasi 238
51. Pasir Untuk Kesejahteraan, Sudahkah? 243
52. Yuk, Jadi Ibu Yang Keren! 249

2012 255
53. Cenat-Cenut Gara-Gara Bbm 256
54. Hasil Investasi Emas Yang Menggiurkan 262
55. Melirik Wakaf Produktif 267
56. Bertransaksi Emas Jelang Ramadan? 272
57. Berpihaklah Pada Sektor Pertanian! 277
58. Swasembada Kedelai, Mungkinkah? 285

59. Apa Kabar Pegiat Kakao Jember? 291
60. Anomali Ekonomi Rakyat 297

Biografi Penulis 303

2007

1

PERBANKAN JATIM, BERPIHAKLAH PADA UMKM![1]

Gaung peningkatan fungsi intermediasi sektor perbankan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tampaknya mulai meredup. Hal ini ditunjukkan, salah satunya, dengan merosotnya porsi kredit UMKM dalam setahun terakhir. Sudah lelahkah industri perbankan membiayai UMKM lantaran sektor riil masih tidak menunjukkan geliatnya?

Dari data Bank Indonesia (BI), secara nominal, kredit UMKM mengalami pertumbuhan sekitar 19,52 persen pada Juli 2007 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, porsi kredit UMKM dari seluruh total kredit pada Juli tahun ini tidak sebesar periode sebelumnya. Maraknya proyek infrastruktur berskala korporasi dituding sebagai salah satu penyebab beralihnya porsi kredit UMKM belakangan ini.

Fenomena menurunnya porsi kredit UMKM belakangan ini memang berbeda jauh dengan kondisi selama 2002-2005. Saat

1 Dimuat Kompas Jawa Timur, Opini, 30 Oktober 2007.

itu, porsi kredit UMKM terus mengalami peningkatan. Banyak pendapat yang mencoba menjelaskan hal ini. Salah satunya adalah keberadaan kredit konsumsi yang secara signifikan mampu memicu tinggi rendahnya angka-angka statistik tersebut. Hal ini pula yang terjadi di Jawa Timur (Jatim).

Pada akhir tahun 2002, dibandingkan dengan total plafon kredit perbankan secara keseluruhan, rasio plafon kredit UMKM di Jatim mencapai 42,78 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding rasio tahun sebelumnya yang sebesar 35,12 persen. Apabila dilihat dari jenis penggunaan kredit UMKM, sebagian besar kredit mulanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja UMKM, yang disusul kemudian untuk kebutuhan konsumsi dan investasi. Menariknya, saat itu sudah mulai tampak kecenderungan meningkatnya pangsa kredit konsumsi yang meningkat dari 21,8 persen pada akhir tahun 2001 menjadi 26,5 persen pada akhir tahun 2002 atau sebesar Rp2,11 triliun.

Pada saat itu juga, pada akhir tahun 2002, tercatat pertumbuhan plafon kredit konsumsi meningkat fantastis sebesar 73,6 persen, jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 40,8 persen. Melonjaknya pangsa kredit konsumsi ini menyebabkan pangsa kredit modal kerja turun tajam dari 70,1 persen pada akhir tahun 2001 menjadi 65,3 persen pada akhir tahun 2002. Sedangkan pangsa kredit investasi relatif tetap, hanya berkisar di angka 8 persen.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdongkraknya pertumbuhan kredit UMKM Jatim sepanjang 2002-2005 lebih dipicu oleh meningkatnya kredit konsumsi. Kenaikan harga bahan

bakar minyak (BBM) pada Oktober 2005 yang menurunkan daya beli masyarakat ditengarai sebagai penyebab utama melambatnya pertumbuhan kredit konsumsi pada tahun 2006 hingga saat ini. Melambatnya pertumbuhan kredit konsumsi menyebabkan lambatnya pula pertumbuhan kredit UMKM.

Saat ini, kredit bermasalah di sektor UMKM Jatim pun masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Angka rata-rata dari rasio kredit bermasalah telah melampaui batas aman. Tren kenaikan rasio kredit bermasalah dari UMKM ini mulai menunjukkan kecenderungan sejak Desember 2006. Akankah menurunnya porsi kredit UMKM secara nasional juga akan diikuti oleh Jatim, mengingat sektor riil yang tidak menunjukkan kemajuan, ditambah lagi dengan kredit bermasalah yang meningkat?

Polemik antara pemerintah dan BI atas kurang optimalnya pemenuhan fungsi intermediasi perbankan ke sektor riil sudah terlalu sering menjadi bulan-bulanan di media. Tidak penting membicarakannya lagi. Yang jelas, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perbankan masih cenderung lebih senang dan nyaman menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dengan adanya tren turunnya BI *rate,* tampaknya hal tersebut masih tidak menyurutkan minat perbankan untuk tetap menyimpan dananya dalam SBI. Sekali lagi, belum bergeraknya sektor riil kembali menjadi alasan utama.

Di Jatim, dana perbankan yang menganggur sampai pada Mei 2007 lalu sudah mencapai Rp15,6 triliun. Banyak industri besar yang membutuhkan dana segar untuk ekspansi usaha

terpaksa meminjam dana pada pembiayaan asing. *Loan to deposit ratio* (LDR) rata-rata bank umum di Jatim saat ini berkisar 58,38 persen. Ini artinya, BI dan pemerintah Provinsi Jatim masih perlu bekerja ekstra keras untuk merangsang iklim kondusif bagi sektor riil sekaligus menggugah keberpihakan industri perbankan di Jatim untuk melemparkan kredit pada sektor riil, termasuk UMKM di dalamnya. Tidak perlulah menunggu komando dari pusat untuk mewujudkan keberpihakan ini.

Mengapa perlu keberpihakan? Tidak bisa tidak, tanpa adanya keberpihakan, maka segala problematik yang ada tidak akan pernah berujung. UMKM merupakan representasi dunia usaha di Indonesia, termasuk di Jatim. Pengalaman telah membuktikan bahwa kegiatan ekonomi kerakyatan dalam bentuk UMKM merupakan bagian terbesar dari kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia yang dapat bertahan hidup. Karena itulah, salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional yang perlu ditempuh adalah memberdayakan sektor UMKM.

Tidak perlu menunggu gong dari pusat untuk melakukan gebrakan terhadap pemulihan fungsi intermediasi terhadap UMKM. Tidak perlu pula menunggu gaung dari pusat untuk merealisasikan keberpihakan pada UMKM. BI di Jatim bersama-sama dengan pemerintah daerah dapat berinisiatif untuk menjadi pionir keberpihakan ini. Duduklah bersama untuk mencari jalan dan menggandeng pihak lain untuk bekerja sama. Berpikirlah kreatif dan gunakan hati untuk keberpihakan ini. Misalnya, dengan mengalokasikan dana APBD untuk menjadi penjamin kredit bagi UMKM, atau mengajak industri perbankan dan lainnya untuk

menempatkan dana *corporate social responsibilities* (CSR) sebagai modal kredit tanpa agunan (KTA). Bisa juga batasi pelemparan kredit konsumsi dan beri kelonggaran pada kredit modal kerja dan investasi, atau canangkan budaya hemat dan kurangi budaya konsumtif, atau mengajak industri perbankan konvensional untuk belajar konsep syariah agar orientasi bisnis tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, tapi juga sebagai misi sosial ekonomi. Atau mencari solusi rendahnya pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah. Dan, masih banyak lagi.

Apa pun inisiatif itu dan apa saja yang sudah dilakukan, jangan pernah lelah untuk terus konsisten pada keberpihakan. Kemauan tanpa kemampuan masih bisa diperjuangkan, tapi kemampuan tanpa kemauan, tetap saja tidak akan berhasil. Dunia usaha, termasuk UMKM, sangat bergantung pada perbankan. Hampir 95 persen industri keuangan di Indonesia adalah perbankan, termasuk di Jatim. Topangan dan dukungan perbankan terhadap keberhasilan perekonomian daerah dan nasional sangat substansial. Tanpa perbankan, kemajuan ekonomi Indonesia akan terbata-bata. Jadi, perbankan Jatim, berpihaklah pada UMKM!

2008

2

BANDARA NOTOHADINEGORO, INVESTASI BAGI JATIM[2]

Kehadiran Bandara Notohadinegoro tidak hanya berperan sebagai pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi Kota Jember semata, tetapi juga berfungsi sebagai multiplier *bagi daerah tapal kuda. Lebih jauh, bandara ini merupakan investasi bagi Jawa Timur (Jatim).*

Banyak fakta yang menunjukkan anomali ekonomi di negeri ini. Ketika krisis moneter 1997, hitung-hitungan ala ekonom dari dalam maupun luar negeri menunjukkan 'kebangkrutan' Indonesia. Hingga sepuluh tahun berselang, anomali ekonomi Indonesia masih berlanjut. Pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diiringi dengan meningkatnya lapangan kerja, menurunnya angka pengangguran, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tidak sedikit yang menyangsikan bahwa investasi sesungguhnya tidak bisa menjamin sepenuhnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya lapangan

2 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 19 Agustus 2008.

kerja, menurunnya angka pengangguran, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Harus kita akui, banyak sekali persoalan investasi di negeri ini. Yang menjadi persoalan selama ini bukan sekadar inisiatif untuk melakukan investasi yang kurang komit, tapi juga keberpihakan untuk melakukan pilihan investasi. Di sejumlah daerah, pembangunan investasi sangat minim, tapi di pusat-pusat kota, pembangunan investasi *overloaded* dan ternyata malah tidak membawa peningkatan kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat.

Secara teoretis, investasi merupakan sumber penggerak sektor ekonomi yang dapat memberi *multiplier effect* bagi pembangunan perekonomian bangsa. Namun demikian, mengingat begitu banyak anomali yang terjadi dalam ekonomi makro dan mikro di Indonesia, perlulah pertimbangan dalam memilih jenis investasi agar efektif dan mampu mencapai target yang diharapkan.

Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sejumlah kasus investasi yang dalam ruang wilayah tertentu mengeksploitasi tenaga kerja dan lingkungan. Tingginya harapan pemerintah atas hadirnya investasi ternyata hanya menguntungkan investor, tapi tidak membawa maslahat bagi masyarakat, bangsa, dan negeri ini. Pengorbanan kita kerap kali tidak setimpal dengan keuntungan yang diperoleh investor. Mungkin, inilah jawabannya mengapa anomali ekonomi kerap terjadi dan investasi tidak selalu berkorelasi positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negeri ini.

Bandara Notohadinegoro

Dalam teori ekonomi pembangunan, agar investasi dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, setidaknya investasi tersebut harus memenuhi persyaratan *linkages* dan *multiplier*. Namun, secara empiris, *linkages* dan *multiplier* saja ternyata tidak cukup. Dibutuhkan pula *heart*.

Dari konteks *linkages*, Bandara Notohadinegoro memiliki dua sisi, yaitu sisi *backward* dan *forward*. Dari sisi *backward*, bandara berpotensi menimbulkan penciptaan usaha baru yang menunjang atau memasok segala kebutuhan bandara. Misalnya saja, usaha makanan minuman di sekitar bandara, katering bagi awak pesawat, *landscape* dan bunga hias untuk pertamanan, *cleaning service*, biro perjalanan untuk penjualan tiket, serta penyediaan avtur. Sedangkan dari sisi *forward,* kehadiran bandara dapat menghasilkan bisnis baru dalam hal jasa kargo udara, pariwisata, dan transportasi.

Dalam konteks *multiplier*, Bandara Notohadinegoro tidak saja berfungsi sebagai pengganda ekonomi bagi Kabupaten Jember, tetapi juga bagi daerah-daerah di wilayah tapal kuda. Dalam konteks ini, bandara tidak hanya menjadikan distribusi barang atau orang menjadi lebih efisien waktu, tetapi juga mampu menjadi pengungkit berbagai kepentingan ekonomi lainnya. Hal ini akan semakin memperoleh pencapaian yang signifikan jika hadirnya pesawat LET 410 dari maskapai Tri MG dapat menjadi pionir bagi maskapai lain untuk hadir bersama.

Terakhir, dalam konteks *heart*, bandara merupakan wujud awal dari keberpihakan dan komitmen pemerintah Kabupaten Jember untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bukan dari sektor konsumsi, melainkan melalui pembangunan infrastruktur. Ke depan, keberpihakan ini harus dilanjutkan dengan upaya untuk lebih melibatkan kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah untuk ambil bagian dalam menerima manfaat ekonomi bandara.

Dari Jember untuk Jatim

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu bentuk investasi. Selain sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk pembangunan infrastruktur adalah sarana transportasi. Sarana transportasi berfungsi untuk memperlancar arus perhubungan antar daerah, tidak saja terhadap akses pelayanan pemerintah kepada publik, tetapi juga pada pembukaan akses pasar pelaku ekonomi dan bisnis daerah.

Bagi masyarakat Jember, ketersediaan transportasi udara merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan. Hal ini mengingat waktu yang ditempuh dari Jember ke ibu kota provinsi menempuh 4,5-5 jam dalam ukuran waktu normal. Dari segi efisiensi waktu, hal ini tentu saja tidak ekonomis.

Untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas, kehadiran Bandara Notohadinegoro diharapkan mampu mengoptimalkan dukungan infrastruktur dalam peningkatan

daya saing sektor riil. Tidak hanya bagi ekonomi Kabupaten Jember semata, tapi juga bagi ekonomi kabupaten/kota di wilayah tapal kuda. Hal ini pada gilirannya tentu diharapkan akan berdampak pula pada ekonomi Jatim. Ke depan, rintisan Kabupaten Jember untuk membangun bandara ini akan lebih bermakna jika capaian yang ada terus ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Lebih jauh, kehadiran bandara haruslah diarahkan untuk menjadi 'pembangunan Kabupaten Jember' dan bukan 'pembangunan di Kabupaten Jember'.

3

MEMBUKA AKSES KESEHATAN BERKUALITAS[3]

Kesehatan merupakan hak semua warga negara yang dijamin oleh undang-undang (UU). Kesehatan juga merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM), selain tingkat pendidikan dan pendapatan. Untuk itu, pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam sepuluh tahun terakhir, status kesehatan masyarakat secara umum terus menunjukkan perbaikan. Hal ini tecermin dari berbagai indikator kesehatan, seperti angka kematian ibu (AKI) yang mengalami penurunan dari 334 pada 1997 menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup pada 2003. Untuk angka kematian bayi, terjadi pula penurunan dari 35 pada 2004 menjadi 29 per 1.000 kelahiran

3 Ditulis bersama Dr. dr. Hairrudin, M. Kes, Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan dimuat Jawa Pos Radar Jember, Opini, 19 Agustus 2008.

hidup pada 2007. Selain itu, status gizi anak dan bayi usia di bawah 5 tahun (balita) juga mengalami perbaikan. Hal ini dapat disimak dari menurunnya jumlah balita yang mengalami kekurangan gizi dari 34,4 persen pada 1999 menjadi 28 persen pada 2005 (SUSENAS, 1999 dan 2005).

Indikator kesehatan lain menunjukkan pula adanya sejumlah perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari umur harapan hidup pada 2006 yang meningkat dari 63,5 tahun (SUSENAS) menjadi 69,4 tahun (Proyeksi BPS, Bappenas, UNFPA). Namun demikian, untuk penyakit menular, ini masih menjadi masalah besar.

Menurut catatan Departemen Kesehatan (Depkes), prevalensi *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) masih di bawah 0,1 persen. Namun, pada sub-populasi perilaku berisiko telah melebihi 5 persen. Bahkan, di Papua, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan AIDS telah masuk pada populasi umum dengan prevalensi 2,4 persen (usia 15-49 tahun). Dari sumber data yang sama, ditunjukkan pula sekitar 110 juta orang di Indonesia tinggal di daerah endemik malaria dan sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia.

Dengan demikian, harus diakui, berbagai capaian yang ada masih menyisakan pekerjaan rumah. Upaya-upaya yang lebih keras, intensif, dan berkesinambungan mutlak diperlukan. Hal ini mengingat, secara empiris, realitas di sekitar kita masih menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang belum atau minim memiliki akses kesehatan yang berkualitas. Persoalan ini memang erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan. Tetapi, itu tidak berarti tidak ada solusi untuk membuka akses, utamanya

pada kelompok masyarakat miskin dan yang rentan terhadap kemiskinan.

Kapasitas Layanan Kesehatan

Dalam skala lokal, nasional, maupun global, masalah dan tantangan yang dihadapi dunia kesehatan kian kompleks dan multidimensi. Dalam skala lokal, anggaran dana yang terbatas untuk kesehatan masih menjadi persoalan. Dalam skala nasional, penerapan desentralisasi bidang kesehatan banyak membuat perubahan baru dalam lingkungan strategis. Sementara dalam skala global, Indonesia dituntut untuk dapat mewujudkan sasaran *millennium development goals* (MDGs) pada 2015.

Menyoal kapasitas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, indikator-indikator layanan kesehatan menunjukkan kondisi yang masih jauh dari memadai. Pada 2004, setiap 100.000 penduduk dapat dilayani rata-rata oleh 3,5 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Selain jumlahnya yang kurang, tingkatan kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas masih menjadi kendala. Pada periode yang sama, baru terdapat 1.179 rumah sakit yang tersebar, yang terdiri dari 598 RS milik pemerintah dan 581 RS milik swasta. Sementara, jumlah seluruh tempat tidur yang tersedia di RS sebanyak 127.217 atau rata-rata 61 per 100.000 penduduk.

Tidak hanya itu, kualitas pelayanan sebagian besar RS pada umumnya juga masih di bawah standar. Pelayanan kesehatan rujukan juga belum optimal dan belum memenuhi harapan

masyarakat. Adapun yang menjadi kendala antara lain lambatnya pelayanan, kesulitan administrasi, dan lamanya waktu tunggu.

Terkait dengan tenaga kesehatan, Indonesia juga masih mengalami kekurangan pada hampir semua jenis kebutuhan. Pada 2004, dokter umum diperkirakan baru melayani 7,7 per 100.000 penduduk. Untuk dokter gigi, dokter spesialis, dan bidan, berturut-turut baru melayani 2,7, 3,0, dan 8,0 per 100.000 penduduk. Demikian pula, sarjana kesehatan masyarakat baru melayani 0,5 per 100.000 penduduk. Lebih lanjut, angka untuk apoteker baru mencapai 1,7, untuk ahli gizi baru 6,6, tenaga epidemiologi 0,1, dan 4,7 untuk tenaga sanitasi.

Selain itu, banyak ditemui pula puskesmas yang belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh kesenjangan distribusi tenaga kesehatan, di mana sebaran tenaga kesehatan lebih besar terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar.

Membuka Akses Kesehatan Berkualitas

Membuka akses kesehatan sama artinya dengan membuka akses pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Secara tidak langsung, hal ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, diharapkan masyarakat miskin ini mampu berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan.

Oleh karena itu, membuka akses kesehatan berkualitas, utamanya bagi penduduk miskin dan yang rentan kemiskinan,

patut menjadi prioritas pemerintah. Berbagai kesenjangan kesehatan mengindikasikan bahwa sasaran layanan kesehatan pada waktu mendatang perlu lebih diarahkan pada peningkatan akses layanan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, baik dari aspek ekonomi maupun geografis. Untuk itu, perlu restrukturisasi dan reorientasi dari pemerintah untuk memperbaiki sistem agar seluruh elemen masyarakat dapat mengecap kesehatan berkualitas. Pada tataran normatif, hal ini sudah banyak tercetus. Namun, pada tataran implementasi, banyak sekali penyimpangan dan tiadanya keberpihakan. Inilah pekerjaan besar kita bersama.

4

MEWASPADAI MEMBURUKNYA EKONOMI MAKRO[4]

Beberapa pekan terakhir, tiga indikator penting ekonomi makro memburuk. Melorotnya nilai tukar rupiah, bergejolaknya indeks harga saham gabungan (IHSG), dan laju inflasi yang berpotensi melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008, menjadi sinyalemen penting bagi sektor riil nasional untuk waspada. Terlebih lagi, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang menyentuh level 9,25 persen. Bagaimana dengan daerah?

Beberapa waktu lalu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperingatkan pemerintah dan otoritas moneter untuk mewaspadai kecenderungan negatif tiga indikator ekonomi makro tersebut di atas. Hal ini dapat dipahami, mengingat beberapa pekan terakhir, indikator ekonomi makro Indonesia membuat banyak kalangan terperangah.

4 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 22 September 2008.

Pekan lalu, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dan nyaris mendekati level Rp9.500. Kemerosotan rupiah akhirnya tertolong intervensi BI. Sementara itu, pasar uang yang sarat spekulasi kini juga tengah bergejolak. Bangkrutnya salah satu perusahaan investasi terbesar di Amerika Serikat (AS) memberi pengaruh terhadap pasar uang banyak negara.

Dalam waktu yang sama, inflasi nasional cukup tinggi. Laju inflasi Agustus 2008 memang turun menjadi 0,5 persen dari inflasi Juli. Namun, besaran tersebut belum memasukkan faktor kenaikan harga sembako dan gas elpiji. Diperkirakan inflasi September akan melonjak, sebab kenaikan harga sembako sudah mencapai kisaran 25 persen menjelang lebaran.

Lebih jauh, suku bunga acuan BI memberi sinyal akan meningkatnya laju inflasi. Untuk meredamnya, BI menaikkan suku bunga hingga 9,25 persen. IHSG pun akhirnya sempat tertekan hingga level terendah di tahun ini. Dunia usaha pun was-was.

Anomali Ekonomi

Meski kita sering menyaksikan adanya anomali ekonomi mikro-makro dan *"growth paradox"* antara sektor keuangan dan sektor riil, tetap saja kita tidak dapat menafikkan indikator ekonomi makro yang ada. Turbulensi faktor eksternal yang memengaruhi ekonomi domestik, juga tak bisa dikesampingkan begitu saja. Meskipun demikian, sinyalemen pemerintah bahwa fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik, juga tidak boleh kita percayai begitu saja.

Catatan penting dari mencermati fenomena tersebut di atas adalah, sistem moneter Indonesia dan dunia sesungguhnya rapuh dan rentan terhadap berbagai gejolak. Tidak ada satu pun yang mampu mengendalikan. Sifat sektor moneter akan menuju hal-hal yang bersifat jangka pendek, spekulatif, dan *mobile*. Siapapun yang mengikuti langgamnya, maka akan menjadi bulanannya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kekacauan yang terjadi ini sudah dapat diperkirakan. Hal ini dapat dilihat setidaknya dari beberapa hal. *Pertama*, uang kertas yang kita gunakan saat ini memiliki nilai yang selalu berubah karena adanya inflasi yang bisa "menyurutkan" nilai. *Kedua,* di waktu lalu, sejak dilepasnya sistem *crawling-band,* BI menggunakan *base-money targeting*. Padahal, nilai uang yang digunakan itu cenderung berfluktuasi. *Ketiga,* transmisi BI untuk menstabilkan nilai rupiah ada yang menggunakan jalur suku bunga, kredit perbankan, neraca perusahaan, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Karena jalur transmisi tersebut ada yang berinteraksi dengan riba, syubhat, *maysir*, dan *gharar,* maka hal tersebut diyakini akan menjadi ketidakbaikan dan sumber bencana.

Keempat, BI menggunakan BI *rate* sebagai suku bunga instrumen *signaling*. Penggunaan suku bunga ini sesungguhnya derivasi dari riba. Fakta menunjukkan, suku bunga yang digaungkan dapat menjadi media kontrol, ternyata juga tak bernyali dalam menstabilkan nilai uang dan moneter. *Kelima,* krisis ekonomi di Indonesia dan negara lain sesungguhnya dipicu juga oleh "keterikatan" pada mata uang negara lain dan tidak pada

dirinya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan nilai mata uang kita sulit stabil.

Keenam, kenyataan saat ini menunjukkan uang tidak lagi dijadikan alat tukar, tapi juga sebagai komoditas perdagangan dan ditarik bunga dari setiap transaksi peminjaman/penyimpanan uang. Bahkan, uang kini juga kerap dijadikan alat spekulasi. *Ketujuh,* dalam konsep ekonomi Islam, uang harus mencerminkan sektor riil. Jika ada yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, ini berarti mengurangi jumlah uang beredar yang berdampak pada tidak jalannya perekonomian. Hal ini berbeda dengan kebijakan BI yang menyimpan dana Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Menggerakkan Sektor Riil Daerah

Berbagai "keanehan" anomali ekonomi dan *"growth paradox"* di atas dapat dieliminasi jika manajemen pemerintahan daerah mau bersikap "berani beda" dengan pemerintah pusat. Potensi sumber daya alam daerah sangat besar dan bila dikelola dengan kemandirian, maka akan menjadi cikal bakal terbangunnya fundamental ekonomi daerah yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai "keanehan".

Jelas, agar perekonomian berjalan, maka sektor riil harus digerakkan. Pertumbuhan ekonomi harus didasarkan pada meningkatnya investasi dan bukan konsumsi. Daerah harus mengerahkan seluruh sumber daya dan tidak tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) semata.

Kita bisa lihat, setelah sepuluh tahun reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tak juga beranjak. Yang tumbuh hanya sektor jasa modern, tetapi tidak untuk sektor riil. Padahal, sektor riil seperti pertanian dan usaha kecil lainnya, menempati dua pertiga jumlah masyarakat Indonesia. Lambatnya pertumbuhan sektor riil ini menimbulkan kesenjangan dan berimplikasi serius terhadap meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial.

Oleh karena itu, untuk mewaspadai memburuknya ekonomi makro, mari kita gerakkan sektor riil dengan membangun kemandirian untuk mengelola seluruh potensi daerah. Hindarkan perilaku riba, syubhat*, maysir*, dan *gharar* karena hal itu yang akan "memakan" uang kita hingga tak bersisa. Mari kita kembali pada pertanian dan usaha kecil lainnya yang seakan terlupakan, padahal dari sanalah sumber kehidupan kita.

5
EKONOMI PULANG KAMPUNG[5]

Sepekan terakhir dan sepekan ke depan, bisa dipastikan ekonomi daerah mengalami lonjakan signifikan. Para pemudik dan remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (LN) menjadi pengungkit ekonomi daerah. Inilah potret ekonomi pulang kampung di Indonesia yang berpotensi menjadi penggerak pembangunan investasi di daerah.

Setiap kali lebaran, hampir semua sektor bisnis menikmati gurihnya geliat ekonomi. Dapat dipastikan, roda ekonomi bergerak laju. Mulai dari usaha sembako, bisnis ritel, parsel, transportasi, telekomunikasi, hingga industri kreatif, hampir semuanya mampu mendulang keuntungan pada momen ini.

Yang patut dicermati dalam fenomena lebaran khas Indonesia adalah budaya mudik dan tingginya remitansi TKI. Kedua hal tersebut menyebabkan arus uang masuk dan menyebar ke daerah, serta mendorong geliat ekonomi daerah. Hal ini yang

5 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 9 Oktober 2008.

perlu ditangkap pemerintah agar arus uang tersebut tidak habis untuk konsumsi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk investasi.

Mudik dan Remitansi

Jumlah pemudik di Indonesia terus meningkat. Hal ini ditandai dengan terus bertambahnya arus kendaraan mudik dan volume penumpang. Dapat diinterpretasikan bahwa jumlah tenaga kerja dari daerah yang bekerja di luar kota atau LN terus meningkat.

Lazimnya budaya mudik di Indonesia, pemudik selalu membawa sejumlah uang untuk dibagi atau dibelanjakan di daerah. Pekerja yang tidak berkesempatan melakukan mudik, umumnya juga melakukan transfer uang untuk dimanfaatkan keluarga di daerah. Uang yang biasanya berputar di kota-kota besar, kini berpindah ke daerah.

Sementara itu, remitansi yang merupakan bagian dari gaji atau penghasilan TKI yang dikirim ke Indonesia dan/atau dibawa pulang oleh TKI yang bersangkutan pada saat pulang ke Indonesia, juga menjadi pemicu geliat ekonomi daerah. Pada 2006, jumlah TKI di LN sudah berkisar 3 juta orang. Remis yang mereka kirimkan sekitar Rp24 triliun dan devisa yang mereka hasilkan mencapai Rp60 triliun.

Pada 2007, jumlah penempatan TKI di LN tercatat sebesar 684 ribu orang atau naik 5 persen dari periode sebelumnya. Dari data tersebut, sebesar 58 ribu atau hampir 10 persen berasal dari Jawa Timur. Dengan jumlah TKI yang mencapai 4,3 juta orang pada periode tersebut, penerimaan devisa dari remitansi diperkirakan

sebesar US$5,9 miliar. Jumlah tersebut mencapai sepertiga aliran masuk penanaman modal asing (*inflow-foreign direct investment/* FDI) dan melampaui utang LN pemerintah. Pemerintah sejauh ini baru mampu mendata jalur pengiriman remitansi formal yang dilakukan melalui jasa bank, wesel (PT Pos Indonesia), dan perusahaan remitansi (*Western Union, Money Gram,* Indorem Pratama, Syaftraco, Agung *Remittance Global*, TikiJNE). Sedangkan jalur pengiriman remitansi nonformal yang biasa dilakukan melalui agen remitansi, jasa perorangan, maupun titip saudara atau teman masih belum dapat diperhitungkan. Dengan demikian, arus masuk uang ke daerah dari remitansi TKI di LN jelas jauh lebih besar dari data resmi yang mampu dihimpun pemerintah.

Pertumbuhan Berbasis Investasi

Dari dua hal tersebut di atas, yaitu perpindahan uang karena aktivitas mudik dan remitansi, kita bisa menyimak bahwa momen lebaran dapat menjadi peluang ekonomi untuk menggerakkan sektor riil di daerah. Jika selama ini perpindahan uang lebih banyak digunakan untuk konsumsi, maka ke depan perlu dipikirkan untuk memberdayakan dana tersebut ke dalam bentuk kegiatan investasi.

Tidak bisa dimungkiri, arus uang yang masuk ke daerah belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Masyarakat masih cenderung memanfaatkan uang yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan/ atau keinginan konsumsi. Jika demikian, pertumbuhan ekonomi yang terdongkrak sesungguhnya rapuh karena dibangun dengan

fondasi konsumsi, bukan dengan fondasi investasi. Pemerintah pusat memang belum mampu mengangkat persoalan ini ke dalam sebuah kebijakan. Namun, pemerintah daerah sesung guhnya dapat mengambil peran tersebut.

Mengawalinya, pemerintah daerah perlu membangun paradigma investasi di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, jangan berpikir melakukan investasi selalu melulu terkait dengan dana yang besar. Investasi dapat dimulai dengan membangun jiwa *entrepreneur* dengan memanfaatkan dana yang ada untuk diputar di sektor riil. Pemerintah daerah dapat menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pendampingan.

Pendampingan tidak harus selalu mengarahkan masyarakat untuk mengakses perbankan atapun lembaga keuangan lainnya, namun yang terpenting di sini adalah bagaimana membangun inisiatif dan mengimplementasikan secara kreatif dana yang ada untuk diputar ke sektor riil, seperti membangun warung makanan, toko kelontong, bengkel, cuci sepeda motor, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Meski dana yang ada hanya memungkinkan masyarakat untuk bermain pada skala mikro, tetapi jika ini dilakukan secara kolektif, maka perlahan roda ekonomi daerah setempat akan bergerak. Paling tidak, dana yang ada tidak menjadi *idle* atau *hoarding* dan tidak tergerus nilainya oleh inflasi. Dana yang ada akan jauh lebih bermanfaat jika diputar pada kegiatan riil yang hasilnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Terlebih lagi jika dana tersebut dapat diarahkan menjadi kegiatan produksi.

Lebih jauh, sesungguhnya ekonomi pulang kampung tidak hanya meliputi dana mudik atau dana remitansi semata. Ada banyak potensi kegiatan lain yang menimbulkan arus uang masuk ke daerah. Poin penting yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah bagaimana agar dana tersebut tidak menguap begitu saja atau berpindah kembali pada pemilik modal besar atau kembali hanya berkonsentrasi di kota besar. Perlu duduk bersama untuk menciptakan mekanisme ini. Jadi, mari kita pikirkan dan mulai mewujudkannya dengan memberi kontribusi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Selamat lebaran!

6

ANTARA KRISIS FINANSIAL GLOBAL, PERTANIAN, DAN UNEJ[6]

Krisis finansial yang melanda dunia kini berimbas pada perekonomian Indonesia. Meski berusaha disangkal, pengaruh resesi Amerika Serikat (AS) terhadap perekonomian Indonesia tampaknya tidak terelakkan. Tutupnya Bursa Efek Indonesia (BEI) beberapa waktu lalu menjadi bukti nyata betapa perekonomian global berdampak serius terhadap ekonomi negeri ini.

Sektor yang pertama kali terkena imbas dari pelemahan pertumbuhan ekonomi global adalah sektor finansial yang memiliki keterkaitan dengan AS. Langkah Bank Sentral AS yang terus menurunkan tingkat suku bunga, dengan konsekuensi melemahnya nilai tukar dolar AS, tampaknya tidak cukup untuk membendung terjadinya resesi.

Dilihat dari sumber risiko yang memicu persoalan krisis, kondisi saat ini jauh lebih besar dibanding tahun 1997-1998. Pada

6 Ditulis bersama Dr. dr. Hairrudin, M. Kes, Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan dimuat Jawa Pos Radar Jember, Opini, 14 Oktober 2008.

1997-1998, pemicu krisis adalah faktor eksternal, yaitu kolapsnya Thai Bank. Saat ini, pemicu krisis adalah juga faktor eksternal, yaitu *subprime mortage* yang meluas menjadi krisis finansial global. Namun, pemicu kali ini jauh lebih kompleks dan multidimensi dibanding 1997-1998.

Dengan banyaknya anak perusahaan, produk, dan jaringan usaha derivatif dari perusahaan finansial AS di Indonesia, maka dapat dipastikan kolapsnya nilai aset global akan berpengaruh pada struktur permodalan perusahaan domestik, apalagi bila kemudian diiringi oleh repatriasi modal atau *transfer pricing*. Terlebih lagi, jika krisis ini diikuti dengan penarikan dana skala besar pada pasar modal dan keuangan dalam negeri mengingat lembaga keuangan asing memiliki portofolio sekitar 67 persen di bursa saham kita.

Sektor Pertanian

Sektor pertanian boleh dikata menjadi satu-satunya sektor yang mampu bertahan di tengah krisis finansial global karena tidak berhubungan erat dengan sektor finansial. Sektor pertanian tidak terdapat pada pasar saham dan tidak mendapat fasilitas finansial seperti sektor bidang lain. Oleh karena itu, sektor pertanian dapat menjadi bumper perekonomian dalam memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. Keyakinan ini setidaknya didasarkan dari kemampuan sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang terbesar (6 persen) pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2008 yang sebesar

6,3 persen. Pertumbuhan sektor pertanian ini paling tinggi sejak sepuluh tahun terakhir.

Namun demikian, realitas menunjukkan sektor pertanian tidak lagi diminati generasi muda. Hal ini tecermin dari kosongnya kursi pada jurusan pertanian yang menyisakan 9.019 kursi pada 47 perguruan tinggi negeri (PTN). Pengamatan empiris menunjukkan, sebagian besar anak petani yang berkesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi (PT) tidak berminat memilih jurusan pertanian. Sementara, anak petani yang tidak berkesempatan meneruskan pendidikan ke PT cenderung menekuni pekerjaan di sektor jasa dan perdagangan.

Tidak bisa dimungkiri, minimnya minat untuk masuk jurusan pertanian tidak lepas dari gambaran petani Indonesia yang identik dengan skala usaha sempit, modal terbatas, teknologi yang kurang berkembang, dan tingkat pendidikan yang rendah. Fakta di lapangan juga menunjukkan, pembangunan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan (pertanian) cenderung terpolarisasi. Kawasan perkotaan berkembang dengan cepat, memiliki pendapatan tinggi, modern, dan menjadi pusat pertumbuhan. Sedangkan kawasan pedesaan relatif berkembang lambat, memiliki pendapatan rendah, terbelakang, dan tergolong miskin. Realitas dan paradigma yang ada inilah yang secara tidak langsung membentuk pola pikir generasi muda untuk memilih sektor nonpertanian.

Universitas Jember (Unej)

Lebih jauh, Unej sesungguhnya memiliki potensi besar untuk menjadi laboratorium penggerak sektor pertanian dan sumber daya manusia (SDM). Menyimak lambang perguruannya, Unej secara filosofis telah memosisikan diri untuk menjadi *agent of development* pada sektor pertanian. Hal ini sejalan pula dengan lambang daun tembakau yang digunakan pemerintah daerah yang melambangkan Kabupaten Jember sebagai gudang pangan, penghasil komoditas tembakau dan perkebunan, serta **padi dan kapas yang melambangkan gambaran kesuburan sandang pangan di Kabupaten Jember.**

Senada dengan yang disampaikan Muh. Rozaq Asyhari dalam artikel *Bangkitlah Kampusku, Harapan Itu Masih Ada* pada Radar Jember, 8 Oktober 2008, kami percaya banyak mutiara yang dimiliki Unej. Deretan tenaga pengajar dengan kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional merupakan mutiara yang diharapkan mampu memberi sumbangan bagi peningkatan sektor pertanian dan perekonomian, tidak hanya di Kabupaten Jember, tapi juga daerah-daerah di wilayah tapal kuda, Provinsi Jawa Timur, dan Indonesia dalam skala lebih besar.

Oleh karena itu, penting bagi Unej yang memang dari awal sudah dikenal memiliki keunggulan pada jurusan pertanian, untuk terus berinovasi dalam membuat terobosan pendidikan pertanian. Selama ini, sebagaimana kritik yang banyak dilontarkan oleh sejumlah ahli dan praktisi pertanian, jurusan pertanian dirasakan

terlalu spesifik, bersifat monodisiplin, dan lebih berorientasi pada aspek pendalaman ilmu.

Ke depan, tuntutan pendidikan pertanian cenderung mengarah pada teknologi pertanian, agroekoteknologi, agrobisnis, dan agroindustri. Unej diharapkan mampu menjawab itu semua. Bahkan, Unej diharapkan pula mampu memberi rekomendasi strategis dalam mengatasi ancaman krisis ketahanan pangan dan *food-trap*. Dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap bidang penelitian dan pengembangan, yang ditunjukkan dengan ditingkatkannya belanja penelitian pada tahun anggaran 2009, diharapkan dapat memperkuat sinyal bagi Unej untuk menjadi *agent of change* bagi sektor pertanian guna menjadi pilar pembangunan ekonomi Indonesia raya.

7

MENYOAL LANGKANYA PUPUK BERSUBSIDI[7]

Kekurangan pasokan pupuk bersubsidi masih terus terjadi. Setidaknya, hal ini ditemukan di wilayah Jember dan Lumajang. Pupuk subsidi yang diterima petani ternyata kurang dari kuota.

Beberapa pekan terakhir, petani di wilayah Jember dan Lumajang digelisahkan oleh tiadanya ketersediaan pupuk bersubsidi. Konon, kelompok tani sudah memperoleh jatah pupuk yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanah garapan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan jatah pupuk yang diterima kelompok tani kurang dari kebutuhan.

Jika disimak, persoalan langkanya pupuk bersubsidi sesungguhnya bukan problem baru, tetapi sudah menjadi problem tahunan. Setiap kali menjelang musim tanam, harga pupuk melambung tinggi. Selain tingginya harga, stok pupuk di

7 Ditulis atas nama Naurah Najwa Hairrudin dan dimuat Jawa Pos Radar Jember, Opini, 20 Oktober 2008.

tingkat pengecer juga mulai sedikit. Kerap kali stok pupuk yang sampai di tingkat pengecer hanya setengah dari total kebutuhan pupuk di titik lokasi.

Untuk 2008, pemerintah telah berjanji akan menambah persediaan pupuk untuk masa tanam hingga 2009. Dengan meningkatnya aktivitas pertanian di beberapa provinsi, pemerintah berkomitmen untuk menambah belanja pupuk bersubsidi. Penambahan persediaan pupuk ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 2008.

Mengacu peraturan menteri tersebut, penambahan meliputi semua jenis pupuk. Untuk pupuk urea, pasokan ditambah dari 4,3 juta menjadi 4,4 juta ton, pupuk ZA dari 700 ribu menjadi 800 ribu ton, NPK dari 800 ribu menjadi 1,3 juta ton, dan pupuk organik dari 345 ribu menjadi 450 ribu ton. Jawa Timur hampir selalu masuk dalam kelompok provinsi yang memperoleh tambahan pasokan. Namun, sekali lagi, fakta di lapangan menunjukkan kelangkaan pupuk masih terus terjadi, utamanya pupuk urea.

Sektor pertanian

Persoalan pupuk menjadi kritis karena terkait erat dengan sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan. Sejak satu dasawarsa terakhir, pembangunan sektor pertanian di Indonesia memang belum memenuhi harapan. Keterpurukan sektor pertanian semakin nyata ketika krisis ekonomi mengguncang Indonesia pada 1997/1998.

Pada level domestik, keterpurukan sektor pertanian dipicu oleh kegagalan pemerintah dalam merumuskan perubahan kelembagaan yang baik sehingga justru menimbulkan disinsentif bagi petani. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan sektor pertanian kian tecermin dengan adanya ancaman krisis ketahanan pangan domestik beberapa waktu lalu akibat tingginya ketergantungan pada impor. Kecilnya nilai tukar petani (NTP) dibanding nilai tukar industri (NTI) juga menjadi pemicu turunnya motivasi usaha tani sehingga menambah deretan persoalan yang memperpuruk sektor pertanian.

Sejumlah kegagalan kaum neoliberal dalam mengusung kebijakan ekonomi harusnya membuat kita semakin teguh mengoreksi kebijakan liberalisasi di sektor pertanian. Tidak ada yang salah jika pemerintah memberikan proteksi dan insentif yang memadai bagi petani, termasuk dalam menambah kuota pupuk bersubsidi bagi petani.

Langkah Mendesak

Untuk mengatasi persoalan kelangkaan pupuk, dibutuhkan penyelesaian mendasar dan komprehensif terhadap berbagai aspek yang menyebabkan munculnya kelangkaan tersebut. Ada beberapa langkah mendesak yang harus dilakukan pemerintah dalam jangka pendek dan menengah.

Pertama, untuk memenuhi kebutuhan masa tanam dalam waktu dekat ini, pemerintah perlu menyediakan tambahan pupuk sebagai cadangan untuk dibagikan ke daerah yang tinggi serapannya.

Kedua, untuk mengeliminasi kelangkaan pupuk jenis tertentu, petani perlu mencoba menggunakan pupuk majemuk. Misal, untuk menggantikan pupuk urea yang paling sering mengalami kelangkaan, petani dapat menggunakan pupuk dengan kandungan N, P, K, dan S.

Ketiga, perlu diupayakan agar setiap petani masuk ke dalam kelompok tani atau membuat kelompok tani baru. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan ketersediaan pupuk dapat diadvokasikan kepada Dinas Pertanian selaku pihak yang berwenang dalam menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi. Hal ini juga mengingat Dinas Pertanian menggunakan mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi secara tertutup karena mengacu pada pola rencana dasar kebutuhan kelompok (RDKK).

Keempat, pemerintah perlu menghitung lebih akurat kebutuhan petani di masing-masing daerah. Perhitungan akurat ini penting, mengingat produsen pupuk hanya memproduksi pupuk sesuai permintaan pemerintah. Terkait dengan kelangkaan pupuk, produsen pun hanya mampu menambah stok pupuk sesuai permintaan pemerintah.

Kelima, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja keras untuk membenahi tata niaga dan distribusi pupuk. Di lapangan, kerap kali ditemukan daerah-daerah yang sangat kekurangan, sementara di daerah lain justru kelebihan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan kelancaran distribusi dan menindak tegas pengecer tidak resmi dan distributor nakal guna menjamin penyaluran pupuk bersubsidi yang benar-benar tepat sasaran dan minim penyimpangan.

Untuk jangka panjang, kebijakan pemerintah haruslah mengembalikan sektor pertanian sebagai basis pembangunan ekonomi. Sembari melangkah pada upaya *collective farming* dan reformasi agraria, pemerintah perlu menuntaskan pembangunan infrastruktur pertanian, seperti jalan, irigasi, penyuluhan, sistem informasi, jaringan pemasaran, pengadaan bibit, dan ketersediaan pupuk.

Secara keseluruhan, tantangan terbesar kita bersama dalam menghadapi berbagai persoalan di sektor pertanian adalah melanjutkan komitmen dan langkah nyata dalam mendampingi petani dan masyarakat, mengawasi komitmen politik pemerintah dan legistatif dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, mengkritisi pelaksanaan tata kelola sektor pertanian, dan menjaga stabilitas pasar.

8

SENGONISASI, DARI LUMAJANG UNTUK MASA DEPAN[8]

Awal Oktober 2008, Lumajang memperoleh pujian dari Menteri Kehutanan (Menhut) atas program sengonisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab). Menhut menilai, sengonisasi di Lumajang sangat sukses karena tidak hanya membantu pemerintah dalam melaksanakan program penghijauan, tetapi juga membantu masyarakat setempat dalam peningkatan kesejahteraan.

Sengonisasi adalah program penghijauan dengan menanam pohon sengon jenis albasia. Diperkirakan ada sekitar 400 hektar lahan di Lumajang yang ditanami pohon sengon jenis ini. Meskipun pohon jenis ini memiliki kelemahan mudah patah bila diterjang angin, tetapi masyarakat Lumajang terbukti cukup mampu mengeliminasinya. Oleh karena itulah, Perusahaan Umum (Perum) Perhutani menargetkan dalam waktu lima tahun ke depan, akan ada sekitar 2.500 hektar hutan di Lumajang yang ditanami pohon sengon.

8 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 21 Oktober 2008.

Seiring kian maraknya sengonisasi, tak heran jika di Lumajang kini berjamuran pabrik-pabrik pengolahan pohon sengon. Kehadiran pabrik-pabrik tersebut tentu memiliki nilai strategis karena mampu menyerap tenaga kerja setempat. Hal ini pulalah yang menjadi dasar pujian Menhut terhadap Kabupaten Lumajang karena mampu menghijaukan lahan sekaligus menggeliatkan ekonomi masyarakat.

Penyeimbang Ekosistem Dunia

Hutan di Indonesia diperhitungkan sebagai salah satu paru-paru dunia. Artinya, hutan Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dunia. Peran ini kian besar diemban Indonesia mengingat keadaan hutan di sejumlah negara—yang ikut diperhitungkan sebagai paru-paru dunia—ternyata terus berkurang nilai strategisnya karena dikalahkan oleh kepentingan ekonomi kapitalis. Hutan terluas di Amerika Serikat (AS), Kanada, Brasil, dan beberapa negara lain mengalami deforestasi. Meskipun hal yang sama terjadi pula di Indonesia, namun kondisi hutan di Indonesia dipandang masih relatif lebih baik dibanding negara-negara tersebut.

Cara pandang bahwa nilai hutan hanya sebagai penghasil kayu telah mengakibatkan hutan mengalami kerusakan parah. Sebuah literatur menunjukkan bahwa nilai kayu dari hutan hanya memberikan kontribusi sekitar tujuh persen dari keseluruhan nilai hutan. Sebagian besar nilai hutan sebenarnya justru terletak pada nilai hasil nonkayu, seperti rotan, tanaman obat, getah, madu,

dan yang paling penting adalah jasanya sebagai penyeimbang ekosistem.

Dapat dikatakan, hutan pada dasarnya merupakan penopang penting sistem kehidupan. Jasa lingkungan yang diberikan hutan mencakup perannya sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam, dan kapasitasnya dalam asimilasi lingkungan.

Deforestasi

Fakta menunjukkan, deforestasi terus berlangsung di Indonesia. Meskipun angkanya cenderung fluktuatif, sektor kehutanan di Indonesia boleh dikata berada pada titik nadir. Puluhan industri kehutanan telah menutup usahanya karena ketiadaan bahan baku. Besarnya kebutuhan bahan baku industri yang mencapai sekitar 63 juta meter kubik per tahun tidak mampu dipenuhi oleh hutan alam dan kebun kayu yang hanya mampu menyuplai kurang dari 20 persen dari total kebutuhan. Angka ini belum lagi termasuk 25 juta meter kubik kebutuhan kayu bagi masyarakat Indonesia.

Lebih jauh, deforestasi terjadi akibat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak didasarkan pada kaidah-kaidah tata kelola hutan yang benar *(forest governance)*. Ditambah dengan aspek penegakan hukum yang lemah dan inkonsistensi pengambil kebijakan dalam meletakkan kehutanan sebagai ekosistem lindung bagi kepentingan nasional yang berkelanjutan, menjadikan kondisi hutan terus terpuruk.

Kerusakan bahkan juga terjadi di hutan konservasi dan hutan lindung.

Lumajang, Hari Ini dan Esok

Tidak bisa dimungkiri, sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan hutan dan hasil hutan yang strategis harus dikelola secara arif dan bijaksana. Hutan dan hasil hutan harusnya jangan dipandang sekadar sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari penyeimbang ekosistem.

Dalam hal ini, Lumajang melalui program sengonisasi memiliki kesempatan untuk menjadi inspirasi bagi sektor kehutanan di Indonesia. Pemkab perlu memikirkan bagaimana menyusun cetak biru yang mengarahkan pembangunan sektor kehutanan yang berkelanjutan di Lumajang. Adapun agenda cetak biru tersebut perlu mengangkat pendekatan hutan rakyat dengan prinsip-prinsip *social foresty*, diversifikasi sumber bahan baku industri perkayuan, pengembangan produk kayu bernilai tinggi, pengembangan *cluster* industri kehutanan berbasis wilayah, peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengontrol hutan, pengembangan dan percepatan pembangunan hutan tanaman industri pada kawasan hutan nonproduktif yang tidak merusak lingkungan, pembinaan industri kehutanan primer, pengembangan hasil hutan nonkayu dan jasa lingkungan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang peningkatan produktivitas sektor kehutanan.

Ke depan, jika Pemkab dapat menangkap betapa mendesaknya upaya-upaya intens untuk membangun sektor kehutanan yang berkelanjutan guna mengatasi ancaman *global warming*, tentu program sengonisasi ini merupakan tapak awal yang sangat baik. Bermula dari sebuah program sengonisasi, Lumajang dapat menawarkan diri untuk menjadi *pilot project* bagi pembangunan sektor kehutanan berkelanjutan di Indonesia. Melalui sengonisasi, Lumajang dapat menjadi secercah harapan bagi kita semua. Tidak saja untuk hari ini, tapi juga esok. Dari Lumajang untuk masa depan.

9

OBLIGASI DAERAH, SUDAH SIAPKAH JEMBER?[9]

Mengingat besarnya nilai transaksi investor lokal Jember dan sekitarnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember diharapkan dapat memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif pendanaan pembangunan melalui obligasi daerah (Radar Jember, 23 Oktober 2008). Pertanyaannya, sudah siapkah Jember mewujudkannya?

Penerbitan obligasi memang merupakan alternatif pembiayaan yang relatif murah. Dana yang bisa diperoleh cukup besar. Namun demikian, banyak konsekuensi yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah (Pemda) sebagai *issuer*. **Pertama,** Pemda dituntut untuk memiliki kapasitas fiskal untuk dapat menerbitkan obligasi daerah. Sebab, meskipun penerbitan dan penjualan obligasi daerah dapat mereguk manfaat yang besar bagi pembangunan ekonomi daerah, obligasi ini juga memiliki potensi risiko yang tinggi.

9 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 29 Oktober 2008.

Kedua, konsekuensi logis dari penerbitan obligasi adalah tuntutan transparansi dan akuntabilitas oleh investor kepada Pemda sebagai *issuer*. Investor akan selalu memantau kinerja Pemda dalam mengelola dana pembangunannya. Selain untuk membayar kewajiban berjalan, investor akan menuntut kinerja dan pelaporan yang baik. Tuntutan inilah yang dikhawatirkan. Banyak pihak meragukan kemampuan Pemda untuk memenuhi tuntutan ini.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas juga mesti dijalankan dalam memilih *lead underwriter*. Tidak boleh ada kepentingan terselubung apa pun yang memengaruhi. Ini merupakan langkah krusial yang dapat memengaruhi kepercayaan pasar terhadap obligasi yang diterbitkan. Termasuk tidak membiarkan *investment fund company* melakukan segala bentuk *window dressing* dan Pemda hanya tinggal tanda tangan.

Ketiga, perlunya kesadaran dan kesiapan Pemda untuk menanggung sendiri risiko yang mungkin timbul. Pemerintah pusat tidak akan ikut bertanggung jawab atas kewajiban yang muncul, baik berupa bunga maupun pokok obligasi. Inilah dilematis yang menghinggapi Pemda selama ini dalam menerbitkan obligasi daerah. Makanya, meski wacana obligasi daerah sudah santer terdengar sejak beberapa tahun lalu, hingga saat ini belum ada satu pun daerah di Indonesia yang menerbitkannya.

Jawa Timur (Jatim)

Sejumlah pihak meyakini, sudah saatnya Jatim melatih memisahkan diri dari pemerintah pusat. Dengan pendapatan

asli daerah (PAD) yang terbatas, sementara potensi sumber ekonomi masih belum tergali, maka salah satu produksi yang dapat dilakukan yaitu menerbitkan obligasi daerah. Instrumen ini tampaknya dapat diandalkan dalam upaya menghimpun dana pembiayaan pembangunan daerah, khususnya proyek infrastruktur dan layanan publik.

Banyak pihak mengharapkan Pemda Jatim dapat menjadi pionir penerbitan obligasi daerah melalui perusahaan investasi daerahnya, PT Jatim Investment Management (JIM). Namun, bila dilihat dari sisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim, belum banyak yang layak secara *size* untuk *go public*, selain PT Bank Jatim.

Pada 2004 lalu, pasca pengesahan Undang-Undang (UU) Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jatim pesimistis terhadap penerbitan obligasi daerah. Hal ini disebabkan ketatnya persyaratan untuk mengeluarkan obligasi daerah. Misalnya, persyaratan neraca daerah, aset daerah, PAD yang dijaminkan, dan kewajiban adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Itulah yang menjadi alasan mengapa hingga kini Jatim belum menerbitkan obligasi, selain sejumlah kekhawatiran lainnya dalam menghadapi risiko yang cukup tinggi bagi perekonomian daerah.

Gagasan obligasi daerah di Jatim sempat menghangat ketika pembangunan Jembatan Suramadu tersendat lantaran tidak adanya dana. Namun, gagasan itu tidak mendapatkan sambutan karena besarnya risiko yang diakibatkan jika obligasi tidak bisa dibayarkan. Sekali lagi, banyak pihak yang meragukan kesiapan,

kemampuan, dan kapasitas Jawa Timur dalam menerbitkan obligasi daerah.

Kini, pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah, Jatim mulai mempertimbangkan kembali untuk segera menerbitkan obligasi daerah. Kelangkaan sumber dana untuk membiayai sarana umum infrastruktur yang besar mendesak Jatim untuk mencari jalan untuk menggalang sumber dana. Ini memang bukan perkara mudah. Sebab, selama 32 tahun, daerah dibiasakan menerima kucuran dana dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan. Bahkan, sebagian anggaran rutin pun masih disubsidi dari pemerintah pusat.

Siapkah Jember?

Selain konsekuensi yang diterima Pemda, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Pemda pula dalam menerbitkan obligasi. Yaitu, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai obligasi dan seluk beluknya. Kemudian, Pemda harus menyiapkan proyek-proyek yang akan dibiayai dari dana obligasi itu beserta perhitungan *cashflow*-nya yang dapat dengan mudah dianalisis dan dipertanggungjawabkan asumsi-asumsinya.

Dalam menerbitkan obligasi, Pemda harus mengacu pada kebutuhan riil dan kemampuan bayar. Untuk mengantisipasi ini, pemerintah pusat menetapkan persyaratan total utang

Pemda, termasuk kelonggaran tariknya, tak boleh melebihi 75 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman *(debt service coverage ratio/*DSCR*)* tak boleh melebihi 2,5. Pemda juga harus menghindari *reprofiling* atas utang jatuh tempo pembayaran pokok obligasi yang mendorong makin besarnya biaya bunga obligasi dan mengurangi alokasi dana untuk pembangunan, serta hilangnya kepercayaan pasar. Nah, kembali pada pertanyaan awal, sudah siapkah Jember mewujudkan itu semua?

10

BANK SYARIAH, ALTERNATIF HADAPI KRISIS[10]

Krisis finansial global kian berimbas pada perekonomian Indonesia. Pelemahan suku bunga Amerika Serikat (The Fed Rate) *diikuti dengan gejolak kurs. Bank Indonesia (BI) akhirnya menaikkan suku bunga* (BI rate) *hingga 9,5 persen. Likuiditas mengetat. Pembiayaan perbankan sulit. Namun demikian, bank syariah masih menjadi alternatif yang baik di saat krisis.*

Bagi pelaku ekonomi syariah, krisis finansial global menjadi momentum untuk membuktikan betapa rentannya sistem ekonomi yang berlangsung saat ini. Krisis finansial global menunjukkan betapa riba, *maysir, gharar*, dan syubhat sudah masuk ke ranah paling dalam dari perekonomian dunia. Pada akhirnya, kehancuran tinggal menunggu waktu.

Islam dalam muamalah ekonomi melarang berbagai kegiatan yang mengandung riba, *maysir, gharar*, dan syubhat. Dalam

10 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 5 November 2008.

melaksanakan transaksi keuangan, Islam mengajarkan pentingnya *underlying asset*. Dalam berbisnis, Islam memberi alternatif *profit-loss sharing* (PLS) agar risiko ditanggung bersama dan keuntungan dinikmati bersama.

Di Indonesia

Perkembangan pesat ekonomi syariah di Indonesia dimulai sejak 1998. Saat itu, pascakrisis moneter, Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia ternyata terbukti mampu melewati badai krisis yang menimpa industri perbankan. BMI tidak perlu diinjeksi modal oleh pemerintah seperti halnya bank konvensional. Sejak itulah, pemerintah mulai memperhitungkan sistem ekonomi syariah sebagai alternatif pilar pembangunan ekonomi Indonesia.

Namun demikian, meski tetap dipandang sebagai alternatif solusi yang lebih *syar'i,* perbankan syariah bukannya tidak memiliki persoalan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa bank syariah pun tidak akan mengalami kepailitan. Sebab, dalam tataran implementasi, ada unsur manusia yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Dengan berbagai kelemahannya, kita tidak bijak pula jika membandingkan kemajuan bank konvensional dengan bank syariah. Sebab, bank konvensional sudah hadir dan berkembang di dunia ini sejak ratusan tahun lalu. Sedangkan bank syariah baru lahir sekitar tahun 1976, beberapa saat setelah Islamic Development Bank (IDB) berdiri. Di Indonesia, BMI sebagai pionir baru berdiri 1992.

Perkembangan bank syariah baru terlihat gerakannya setelah 1998.

Yang Membelit Saat Ini

Pasca kenaikan BI *rate* hingga 9,5 persen, pembiayaan bank syariah nasional diprediksi bakal melambat. Bank syariah diperkirakan akan mengalami kesulitan bersaing memberi imbal hasil dibandingkan bank konvensional.

Ketika BI menaikkan BI *rate*, bank syariah tidak bisa mengikuti kenaikan itu. Hal ini terkait sistem syariah yang digunakan, yakni PLS dan bukan *interest rate*. Bagi bank konvensional, kenaikan BI *rate* dapat langsung direspons dengan menaikkan kembali bunganya hingga 14-15 persen. Apalagi, suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga sudah mengalami kenaikan 10 persen.

Bank syariah tidak dapat melakukan itu. Bank syariah terbentur akad yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar itulah, bank syariah sesungguhnya lebih membutuhkan likuiditas dibanding bank konvensional. Pasalnya, *finance deposit ratio* (FDR) bank syariah sepenuhnya dikucurkan untuk pembiayaan, sedangkan bank konvensional hanya sekitar 50-60 persen. Selebihnya, dibelanjakan dalam surat berharga.

Tidak bisa dimungkiri, dampak ketatnya likuiditas saat ini telah memukul bank syariah dari dua sisi, yaitu suku bunga dan nilai tukar. Bank syariah pun menjadi kurang menarik di mata nasabah seiring terjadinya perang suku bunga di perbankan konvensional.

Dalam ekonomi syariah, pertumbuhan sektor finansial memang terkait erat dengan pertumbuhan sektor riil. Atas dasar itulah, dapat dipahami jika imbal hasil bank syariah saat ini tidak sebaik ketika kondisi sektor riil menggeliat. Korelasi keduanya sangat kuat.

Masih Menjadi Alternatif yang Baik

Meski saat ini perbankan syariah tengah dibelit persoalan likuiditas, bank syariah sebenarnya masih menjadi alternatif yang baik. Dampak krisis yang dihadapi bank syariah tidak separah bank konvensional. Kejatuhan akibat krisis keuangan global memang memukul industri perbankan. Namun, perbankan syariah saat ini pada umumnya masih terhindar dari kekacauan.

Untuk mengatasi ketatnya likuiditas, bank syariah saat ini memang dipaksa menaikkan bagi hasil. Namun, bank syariah masih lebih realistis karena dananya dikucurkan pada sektor riil. Bank syariah tidak diperkenankan membeli kredit, tetapi dituntut untuk mengelola aset nyata yang memberikan perlindungan dari berbagai kesulitan. Inilah kunci mengapa bank syariah masih menjadi alternatif yang baik di tengah krisis.

Ke depan, BI hendaknya segera menuntaskan instrumen pelonggaran likuiditas bagi bank syariah guna menghadapi krisis likuiditas seperti yang terjadi saat ini. Perlu ada instrumen baru yang dapat menolong bank syariah dari ketatnya likuiditas. Bank syariah saat ini masih belum bisa menggadaikan surat berharga syariah atau surat berharga syariah negara ke BI.

Lebih jauh, bank syariah diharapkan tetap mempertahankan ekspansifnya pembiayaan. Tidak lupa, kehati-hatiannya perlu lebih ditingkatkan agar tidak terjadi peningkatan *non performing financing* (NPF). Meski perbankan syariah nasional sudah menerapkan manajemen risiko agar pembiayaan yang dikucurkan tetap *prudent* dan risikonya terukur, tetap saja bank syariah memiliki beban moral yang lebih besar untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada bank konvensional. Semoga!

11

MENGAKHIRI PERTIKAIAN INDUSTRI RITEL MODERN VS PASAR TRADISIONAL[11]

Pedagang pasar tradisional Batu Urip merasa terusik dengan bakal hadirnya sebuah minimarket tepat di tengah-tengah pasar. Forum Daerah Usaha Kecil dan Menengah (Forda UKM) Kabupaten Jember membantu mengadvokasi para pedagang ini. Bagaimana mengakhiri pertikaian antara pedagang pasar tradisional dengan industri ritel modern yang kian marak melakukan ekspansi ke daerah?

Sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi, investasi menjadi salah satu indikator ekonomi yang terus digerakkan di setiap negara. Di Indonesia, hal ini kerap menjadi persoalan karena seringnya regulasi pemerintah berpotensi memicu konflik. Saat ini, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional

11 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 22 November 2008.

dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan salah satu yang kerap menjadi pertentangan.

Dalam era globalisasi, pasar telah mengalami perkembangan pesat. Di dalam pasar, terdapat toko-toko yang digunakan sebagai tempat usaha untuk menjual barang dan jasa. Toko yang menjual berbagai jenis barang eceran dan mempunyai sistem pelayanan mandiri adalah toko modern. Toko modern juga disebut industri ritel modern yang terdiri dari minimarket, supermarket, *department store,* hipermarket, dan grosir.

Tidak bisa dimungkiri, tingginya intensitas ekspansi industri ritel modern berdampak langsung terhadap iklim perdagangan di Indonesia. Keberadaan industri tersebut sering dipandang sebagai pesaing kuat pasar tradisional. Pandangan ini tampaknya tidak keliru. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pangsa pasar tradisional terus menurun dan kian tak berdaya. Banyak pasar tradisional yang gulung tikar sebagai akibat dari hadirnya industri tersebut.

Namun demikian, hasil temuan lain menyebutkan bahwa keberadaan industri ritel modern sesungguhnya tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap pasar tradisional. Pasalnya, kedua jenis pasar tersebut memiliki pangsa pasar yang berbeda. Terlepas dari hasil penelitian yang masih kontroversial tersebut, harus diakui, keberadaan industri ritel modern telah mengubah peta industri ritel di Indonesia. Bukan hanya terletak pada perubahan struktur dan komposisinya saja, tetapi juga pada pemain yang berkecimpung di dalamnya.

Peta Industri Ritel Modern

Dalam peta industri ritel modern di Indonesia, minimarket didefinisikan sebagai toko yang menjual eceran barang konsumsi, terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya. Luas lantai bangunan usaha penjualan adalah kurang dari 400 m^2. Berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, jalan lokal, daerah perumahan, dan pusat kota.

Department store adalah toko yang menjual secara eceran barang konsumsi, sandang, dan pangan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin atau usia konsumen. Mempunyai luas lantai bangunan usaha di atas 400 m^2. Berlokasi di daerah padat aktivitas ekonomi masyarakat dan mempunyai areal parkir minimal 100 m^2.

Supermarket mempunyai karakteristik toko yang menjual eceran barang konsumsi, terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya. Luas lantai bangunan usaha penjualan berkisar 400-5000 m^2. Berlokasi di pusat aktivitas ekonomi masyarakat dan jalan lokal serta mempunyai areal parkir minimal 100 m^2.

Hipermarket adalah toko yang menjual barang konsumsi, produk makanan dan rumah tangga lainnya. Pelayanan berorientasi mandiri dan mempunyai areal parkir minimal 100 m^2. Mempunyai luas bangunan lokasi usaha di atas 5000 m^2 serta berlokasi di pusat perkotaan dan padat aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, grosir adalah toko yang mempunyai luas bangunan di atas 5000 m^2. Menjual barang konsumsi secara grosir

serta berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor.

Secara keseluruhan, dalam menjalankan usaha ritel modern di Indonesia sesungguhnya sudah terdapat pengaturan zona pendirian (zonasi). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lain.

Mengakhiri Konflik

Kehadiran minimarket di wilayah Batu Urip seharusnya tidak perlu berujung pada perselisihan jika pendirian minimarket tersebut sesuai dengan aturan. Berdasarkan kelompok klasifikasi ritel di Indonesia, lokasi usaha minimarket dapat didirikan pada kawasan pelayanan lingkungan di daerah perkotaan, sistem jaringan jalan perumahan, dan jalan lokal. Jalan lokal adalah jalan umum yang mempunyai fungsi pelayanan angkutan lokal dengan karakteristik perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah, dan tidak terdapat pembatasan akses masuk.

Dalam penataan lokasi, pendirian minimarket harus memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, dan UKM yang terdapat di wilayah industri ritel modern tersebut. Sedangkan untuk peraturan zonasi, diperlukan ketentuan-ketentuan pemerintah daerah (Pemda) setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian setiap zona sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

Oleh karena itu, untuk mengakhiri konflik antara pasar tradisional Batu Urip dengan minimarket, peran pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember sangatlah besar. Pemkab perlu menjamin bahwa semua pemangku kepentingan memahami peraturan dan semua tingkat pemerintahan hendaknya bertindak berdasarkan aturan. Demi menjamin persaingan yang sehat antara pedagang pasar tradisional dengan peritel modern, Pemkab perlu memiliki mekanisme kontrol dan pemantauan yang riil untuk menjaga agar arena persaingan tetap adil. Jika ini diterapkan, tentu konflik yang ada tidak perlu terjadi. Industri ritel modern dapat berekspansi tanpa harus mematikan para pedagang pasar tradisional.

2009

12

MENUJU REVITALISASI PERTANIAN ORGANIK[12]

Dalam sebuah kuliah umum di Universitas Jember beberapa waktu lalu, Sri Sultan Hamengku Buwono X memberi paparan berjudul "Pembangunan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Untuk Menghadapi Pasar Global Demi Kemakmuran Rakyat". Dikatakannya, salah satu cara untuk mengatasi kondisi pertanian Indonesia yang kini terpuruk adalah dengan kembali kepada sistem pertanian organik (SPO) yang ditunjang dengan kearifan lokal.

Sri Sultan mengungkap, masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mempraktikkan SPO yang didukung dengan kearifan lokal. Namun, dalam perjalanannya, kearifan lokal tadi diabaikan, bahkan dianggap tidak sejalan

12 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, 28 Februari 2009, dengan nama Naurah Najwa Hairrudin.

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal, SPO sesungguhnya tidaklah demikian. SPO sejatinya adalah pertanian yang berangkat dari paradigma holistik dalam memandang alam semesta. Dengan cara pandang ini, manusia sebagai bagian dari alam semesta dituntut untuk mewujudkan tujuan terbesar dari kegiatan pertanian, yaitu untuk keberlanjutan alam semesta.

Jika disimak, paparan Sri Sultan sangat relevan dengan konteks kekinian dari sektor pertanian di Indonesia. Fenomena *global warming*, ketidakamanan produk pangan, dan sejumlah kegagalan dalam membangun ketahanan pangan memberi sinyal bagi manusia untuk lebih peduli lingkungan. Kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian menjelaskan betapa pentingnya revitalisasi SPO ke depan.

Definisi

Secara sederhana, SPO didefinisikan sebagai sebuah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis maupun rekayasa genetis. *International Federation of Organic Agriculture Movements* (IFOAM) mendefinisikan SPO sebagai sistem pertanian holistik yang mendukung dan mempercepat biodiversitas, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Dalam konteks ini, SPO tidak memperkenankan penggunaan *Genetically Modified Organism* (GMO) dalam setiap tahapan pertanian organik. Ringkasnya, SPO

adalah sistem pertanian yang menghindari penggunaan atribut kimiawi dan rekayasa genetis untuk menghindari degradasi sumber daya alam.

Jika ditelaah, SPO sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Sejak manusia mengenal bercocok tanam, sejak itu pula SPO secara tradisional telah diterapkan. Sayangnya, ketika ilmu pertanian berkembang dan populasi manusia mengalami ledakan, revolusi hijau yang diaplikasikan saat itu memberi efek samping terhadap keamanan pangan. Yang paling terlihat dampaknya adalah kerusakan struktur tanah dan berbagai derivasi pencemaran lainnya terhadap variabel sektor pertanian.

Dalam perkembangannya, kesadaran untuk mencari alternatif bercocok tanam yang dapat menghasilkan produk yang bebas dari cemaran bahan kimia sintetis serta menjaga lingkungan yang lebih sehat menjadi momentum untuk kebangkitan SPO modern. SPO modern tetaplah membutuhkan teknologi bercocok tanam, penyediaan pupuk, pengendalian hama dan penyakit, serta manajemen yang baik. Namun, secara umum, konsep SPO modern belum banyak dikenal dan masih banyak dipertanyakan. Sementara ini, penekanan lebih kepada meninggalkan pemakaian pestisida sintetis.

Di Indonesia

Pasar produk SPO dunia saat ini terus meningkat. Preferensi konsumen atas produk SPO terus bertambah seiring dengan kesadaran yang semakin tinggi akan kesehatan dan kelestarian alam. Secara global, produk SPO harus memenuhi persyaratan

atribut aman dikonsumsi *(food safety attributes),* memiliki kandungan nutrisi tinggi *(nutritional attributes),* dan ramah lingkungan *(eco-labelling attributes)*.

Indonesia memiliki potensi pertanian organik sangat besar. Luas lahan yang tersedia untuk pertanian organik di Indonesia sangat memadai. Mengacu data Badan Pusat Statistik (2000), dari 75,5 juta hektas lahan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian, baru sekitar 25,7 juta hektar yang telah diolah untuk sawah dan perkebunan.

Lebih jauh, pengembangan SPO di Indonesia sesungguhnya belum memerlukan struktur kelembagaan baru. Kelembagaan di sektor pertanian, seperti kelompok tani, tengkulak, koperasi, asosiasi atau korporasi, masih sangat relevan untuk digunakan. Untuk menjawab bagaimana revitalisasi SPO, maka pemerintah perlu menerbitkan kebijakan kondusif terhadap pembangunan SPO. Hal ini penting mengingat di negara lain, khususnya di negara-negara Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Serikat, SPO merupakan sektor pangan yang paling cepat pertumbuhannya.

Go Organik 2010

Untuk mencapai target *Go* Organik 2010 yang dicanangkan pemerintah pusat, sudah selayaknya pemerintah daerah mengakselerasi kehadiran SPO. SPO adalah salah satu pilihan terbaik dalam produksi pertanian yang memungkinkan petani Indonesia menjaga ketahanan pangan rumah tangga dan memiliki penghasilan yang cukup sembari meregenerasi tanah, memperoleh kembali keanekaragaman hayati, dan menyediakan

pangan bermutu bagi masyarakat.

Ke depan, sejalan dengan meningkatnya isu kesadaran konsumen akan keamanan pangan, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan petani, pemerintah daerah harus tanggap melakukan berbagai upaya promosi dan pengembangan SPO. Sektor pertanian dari hulu hingga hilir perlu didorong agar secara bertahap menerapkan sistem ini. Kegiatan-kegiatan produksi yang menjadi atribut SPO—seperti pabrik pupuk organik di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, yang memanfaatkan limbah sampah rumah tangga sebagai bahan dasarnya—perlu lebih ditingkatkan.

Tidak bisa dimungkiri, sektor pertanian memiliki peran besar dalam pembangunan perekonomian kita. Sektor ini tidak sekadar menjadi kontributor utama dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dan produk domestik bruto (PDB) nasional, tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor, sumber pendapatan masyarakat, penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, guna menjaga keberlangsungan sektor pertanian, sudah saatnya kita beralih pada SPO.

13

EDUCATION FOR ALL, KEKUATAN PERUBAHAN EKONOMI

Pendidikan adalah investasi. Pendidikan adalah kekuatan perubahan ekonomi. Kuantitas dan kualitas pendidikan yang baik akan meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya akan memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, upaya perbaikan pendidikan yang konsisten serta berkesinambungan merupakan keniscayaan untuk membangun ekonomi bangsa ini.

Sepekan terakhir, topik *education for all* menjadi berita di sejumlah media lokal maupun nasional. Radar Jember, 18 Januari 2009, juga memberitakan betapa topik ini menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Jember. Keinginan untuk memberikan pendidikan yang merata kepada semua warga wajib belajar dimanifestasikan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi siswa sekolah umum, termasuk pula penyediaan keperluan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Secara nasional, dunia pendidikan Indonesia memang menghadapi tantangan yang kian besar dan berat. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga sesama anggota ASEAN, kondisi pendidikan Indonesia masih relatif tertinggal. Mengacu laporan United Nations Development Programme (UNDP), indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tahun 2007 berada pada urutan ke-108 dari 177 negara.

Dari data Bappenas, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada awal 2004 adalah 7,1 tahun. Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan jenjang menengah ke atas masih sekitar 36,2 persen. Meski angka partisipasi sekolah (APS) kelompok usia 7-12 tahun sudah mencapai 96,4 persen, tetapi untuk penduduk usia 13-15 tahun baru 81,0 persen. Sementara, APS penduduk usia 16-18 tahun hanya 51,0 persen. Untuk pendidikan tinggi, angka partisipasi kotor (APK) sampai 2007 hanya mencapai 17,25 persen.

Di sisi lain, peningkatan jumlah anak putus sekolah di Indonesia pada 2006 sekitar 9,7 juta jiwa. Menurut Komnas Perlindungan Anak, jumlah anak putus sekolah pada 2007 mencapai 11,7 juta jiwa atau meningkat sekitar 20 persen. Jumlah itu diyakini bertambah tahun ini, mengingat keadaan ekonomi nasional yang memburuk.

Penyebab

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003 menunjukkan bahwa faktor ekonomi (75,7 persen) merupakan

alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah (67,0 persen) maupun karena harus bekerja (8,7 persen). Untuk jenjang pendidikan menengah, banyak lulusan yang terpaksa lebih memilih membantu ekonomi keluarga ketimbang melanjutkan jenjang pendidikan.

Data Statistik Pendidikan 2006 menunjukkan, faktor utama penyebab kesenjangan akses pendidikan adalah faktor ekonomi dan geografis. Untuk faktor ekonomi, alasan utama anak tidak sekolah karena ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah atau mereka harus bekerja. Untuk masalah geografis, faktor keterpencilan wilayah masih menjadi persoalan klasik. Anak-anak di wilayah terpencil sulit menjangkau fasilitas pendidikan yang umumnya agak jauh dari tempat tinggal mereka.

Secara garis besar, permasalahan klasik yang masih mendera dunia pendidikan kita saat ini meliputi: minimnya pendidik berkualitas dan persebarannya yang belum merata, rendahnya kesejahteraan pendidik, terbatasnya sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran, serta penyediaan biaya operasional pendidikan yang belum memadai.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan yang menjadi harapan, ternyata masih belum mampu menciptakan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien. Penyebabnya adalah ketidakjelasan pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta minimnya kontribusi pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran pendidikan.

Dampaknya, liberalisasi pendidikan menjadi fenomena yang kian nyata. Pendidikan kian mahal dan sulit dijangkau. Fasilitas pendidikan bukan lagi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, tetapi sudah menjadi industrialisasi.

Kekuatan Membangun Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan terbukti dapat memacu pertumbuhan suatu negara. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan akan meningkatkan produktivitas yang nantinya akan meningkatkan pendapatan. Pada gilirannya, kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat dapat diturunkan sehingga kesejahteraan dapat terwujud.

Tidak bisa dimungkiri, pendidikan dan ekonomi sesungguhnya adalah dua variabel terkait dan tidak terpisahkan. Masing-masing bak mata rantai yang dapat membentuk lingkaran kesejahteraan sekaligus kemiskinan. Akibat faktor ekonomi, pendidikan menjadi sesuatu yang sulit diraih. Akibat rendahnya pendidikan, kesejahteraan ekonomi berpeluang lebih besar untuk sulit dicapai.

Oleh karena itu, cukup dipahami jika pendidikan dapat menjadi dasar kekuatan membangun ekonomi. Pendidikan menjadi sebuah prasyarat, bukan sekadar untuk membuka lebih besar peluang untuk mem-peroleh pekerjaan dan upah yang diharapkan, tetapi juga diharapkan dapat membentuk sumber daya insani yang memiliki sikap, tekad kemandirian, ketahanan yang tinggi, memiliki mental spiritual dan moralitas untuk

mengembangkan dirinya agar hidup layak dan harmonis dalam memenuhi kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Dengan demikian, pemerintah ke depan harus melakukan restrukturisasi dan reorientasi untuk memperbaiki sistem agar seluruh anak Indonesia, terlebih yang memiliki kebutuhan khusus, dapat mengenyam pendidikan yang layak. Yang perlu disadari, pendidikan jangan melulu diukur dengan jenjang akademis formal semata. Tetapi, pendidikan juga perlu diiringi dengan transformasi seluruh komponen di dalamnya untuk berubah dan mengubah wajah pendidikan Indonesia yang lebih humanis, bermoral, dan mengedepankan kesejahteraan bersama. Lebih jauh lagi, kita harus yakin bahwa pendidikan akan membuat anak Indonesia di masa yang akan datang menjadi lebih baik dan berdaya untuk mengangkat derajat dan martabat bangsa ini.

14

TANTANGAN DAN PELUANG PERBANKAN DI TAPAL KUDA[13]

Seiring dengan terjadinya krisis global yang berimbas pada sektor keuangan di Indonesia, intermediasi perbankan Jawa Timur secara umum masih menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Menariknya, pencapaian intermediasi perbankan di wilayah tapal kuda relatif lebih baik dibanding wilayah kerja lain.

Pertumbuhan kredit di Jawa Timur pada 2008 lalu mencapai 25,47 persen dan *loan to deposit ratio* (LDR) sebesar 68,25 persen. Untuk wilayah kerja Kantor Bank Indonesia (KBI) Surabaya, pertumbuhan kredit mencapai 29,34 persen, LDR 69,67 persen, dan *non performing loan* (NPL) sebesar 1,24 persen. Untuk KBI Malang, pertumbuhan kredit mencapai 24 persen, LDR 70,84 persen, dan NPL 1,26 persen. Untuk KBI Kediri, pertumbuhan kredit mencapai 23,93 persen, LDR 66,66 persen, dan NPL 0,31 persen. Sementara, untuk KBI Jember yang membawahi

13 Dimuat Surabaya Post, Opini, 16 Maret 2009.

wilayah tapal kuda yang meliputi Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi, pertumbuhan kreditnya 20,57 persen, LDR 96,19 persen, dan NPL 0,57 persen.

Lebih jauh, kinerja intermediasi perbankan Jawa timur di wilayah kerja KBI Jember ini cukup menarik untuk disimak. Komposisi LDR-nya nyaris mengikuti komposisi *financing to deposit ratio* (FDR) perbankan syariah nasional yang bergerak dikisaran 100 persen. Artinya, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan di wilayah kerja ini hampir sepenuhnya dikembalikan pada masyarakat melalui penyaluran kredit.

Posisi Desember 2008, kinerja bank umum di wilayah kerja KBI Jember mencapai aset Rp9,25 triliun, DPK Rp 7,05 triliun, dan realisasi kredit Rp6,67 triliun. Dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-o-y), kinerja ini lebih baik. Aset yang terkumpul pada periode Desember 2007 sebesar Rp7,61 triliun, DPK Rp5,85 triliun, dan realisasi kredit Rp5,55 triliun.

Secara keseluruhan, LDR perbankan di wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi selama 2007-2008 ini berada dalam kisaran tingkat intermediasi yang melampaui rata-rata tingkat intermediasi perbankan di Jawa Timur dan nasional. Dengan waktu yang bersamaan, perbankan di wilayah Eks-Karesidenan Besuki ini juga mampu menurunkan NPL dari 1,45 persen menjadi 0,57 persen. Hal itu menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran kredit di wilayah KBI Jember mengalami peningkatan yang diimbangi dengan membaiknya kualitas kredit.

Sektor Pertanian

Pada 2008, sektor pertanian menjadi kontributor terbesar bagi produk domestik regional bruto (PDRB) di Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Di Jember, sektor pertanian menyumbang PDRB 43,97 persen, di Bondowoso 48,34 persen, di Situbondo 31,97 persen, dan di Banyuwangi 49,25 persen. Data ini mengindikasikan, sektor pertanian masih merupakan kekuatan ekonomi utama di Eks-Karasidenan Besuki.

Tidak bisa dimungkiri, sektor pertanian memiliki peran besar dalam pembangunan perekonomian Jawa Timur dan menjadikan wilayah tapal kuda sebagai lumbungnya. Sektor ini tidak sekadar menjadi kontributor utama dalam pembentukan PDRB regional, tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor, sumber pendapatan masyarakat, penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan.

Ketika ketahanan sektor perekonomian lain terganggu oleh krisis global, sektor pertanian masih berdiri kukuh menghadapi badai. Ketika sektor lain menunjukkan pertumbuhan negatif, sektor pertanian masih menorehkan pertumbuhan positif.

Tak pelak lagi, sektor pertanian yang kerap dipandang sebelah mata sesungguhnya menjadi penyelamat perekonomian. Sudah selayaknya, perbankan Jawa Timur, utamanya di wilayah kerja KBI Jember, memberi perhatian lebih bagi sektor ini. Sektor pertanian sangat terkait dengan ketahanan pangan dan menjadi isu krusial yang harus dikelola dengan baik agar tidak menuai krisis sosial sebagai ikutan kesalahan dalam mengurus perut masyarakat.

Tantangan dan Peluang

Secara tegas dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan perbankan memiliki peran strategis dalam jaring ketahanan pangan. Sayangnya, persoalan klasik dan mendasar yang menjadi kendala perbankan memberi pembiayaan bagi sektor pertanian adalah tidak terpenuhinya persyaratan *feasible* dan *bankable*. Ini adalah isu lama yang sampai sekarang belum sepenuhnya teratasi. Ini juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan di wilayah kerja KBI Jember untuk membangun koordinasi dan komunikasi antarinstansi daerah guna mencari jalan keluar.

Sebagai salah satu bagian dari perbankan nasional, perbankan syariah hendaknya memiliki keberpihakan lebih pada sektor pertanian dan menjadikannya sebagai sebuah tanggung jawab moral. Melalui pola bagi hasil, pembiayaan dari perbankan syariah terhadap sektor pertanian diharapkan tidak memberatkan. Pasalnya, bagi hasil yang dibayarkan kepada perbankan syariah akan disesuaikan dengan penerimaan sektor pertanian itu sendiri.

Kedepan, pemerintah daerah (Pemda) harus lebih berpikir keras untuk memperluas akses sektor pertanian kepada sumber modal. Salah satu upaya yang dapat digiatkan adalah pengembangan produk dan jasa pembiayaan nonbank, peningkatan skema penjaminan kredit, serta penyusunan kebijakan dan strategi nasional pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai sumber pembiayaan alternatif.

Pemda hendaknya memiliki keberpihakan terhadap sektor pertanian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Hijau. Mengenai seberapa besar alokasi yang dianggarkan, itu dapat disesuaikan dengan seberapa besar kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB setempat. Jika sektor pertanian sudah membuktikan kontribusinya bagi penerimaan APBD, maka sudah selayaknya pula Pemda membuktikan komitmennya bagi pengembangan sektor pertanian. Dan bagi perbankan di Eks-Karasidenan Besuki, dukungan pembiayaan menjadi harapan nyata sektor pertanian di sana.

2010

15

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG HUMANIS[14]

Masih ingat Muntik? Saya akan ingatkan. Pada akhir Oktober 2009 lalu, seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) meninggal dunia di rumah sakit (RS) Tengku Ampuan Rahimah, Malaysia. TKI tersebut meninggal setelah enam hari dirawat akibat tindak kekerasan oleh majikan. Dialah Muntik binti Hani.

Dengan majikan sebelumnya, Muntik pun mengalami kekerasan, baik fisik maupun nonfisik. Selama lima tahun, Muntik "hanya" bisa mengirim uang Rp27 juta karena gajinya tidak dibayar. Muntik mengeluh tidak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya, penyiksaan yang berlanjut oleh majikan kedua berujung dengan kematian.

Muntik adalah salah satu warga Dusun Pondok Jeruk Barat. Dusun Pondok Jeruk Barat, Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang pun mendadak terkenal. Meski banyak yang salah kaprah mengira dusun ini berada di Kabupaten Jombang, tetapi

14 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 13 Februari 2010.

sesungguhnya dusun kecil ini berada di Kabupaten Jember dan dekat dengan Jatiroto yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang.

Seperti halnya Muntik, tidak sedikit warga Dusun Pondok Jeruk Barat yang mencari penghidupan di luar negeri. Muntik dan rekan-rekannya di dusun itu adalah cerminan dari sekian banyak TKI kita yang dipaksa oleh keadaan ekonomi untuk mencoba peruntungan di luar. Kisah tragis Muntik ini bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. TKI yang kerap dijuluki gelar 'pahlawan devisa' sesungguhnya merupakan cerita pilu dari pembangunan ekonomi yang tidak humanis.

Sektor Pertanian

Indonesia dikaruniai sumber daya alam berlimpah di mana sektor pertanian menjadi ujung tombaknya. Sebagian besar masyarakat Indonesia berada di wilayah pedesaan yang notabene berinteraksi erat dengan sektor pertanian. Karena itulah, sektor pertanian kerap menjadi bumper dalam memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja.

Namun demikian, realitas menunjukkan sektor pertanian tidak lagi diminati. Pasalnya, sektor pertanian identik dengan skala usaha sempit, modal terbatas, teknologi yang kurang berkembang, dan tingkat pendidikan yang rendah. Keadaan ini kian diperpuruk dengan pembangunan kawasan perkotaan dan pedesaan yang cenderung terpolarisasi. Kawasan perkotaan berkembang dengan cepat, memiliki pendapatan tinggi, modern, dan menjadi pusat

pertumbuhan. Sedangkan kawasan pedesaan relatif berkembang lambat, memiliki pendapatan rendah, terbelakang, dan tergolong miskin.

Keadaan ini pulalah yang terjadi di Dusun Pondok Jeruk Barat di mana Muntik berasal. Sektor pertanian kerap dipandang sebagai lapangan kerja yang tidak menghasilkan kesejahteraan. Padahal, secara geografis, wilayah tersebut dikelilingi oleh lahan pertanian. Sulitnya mencari penghasilan pun memaksa Muntik dan banyak tetangganya memilih menjadi TKI.

Jatim dan Agribisnis

Kisah Muntik adalah sepenggal cerita sedih yang merupakan efek domino dari wajah pembangunan ekonomi kita yang tidak humanis karena kerap mengejar target-target indikator makro. Ilmu dan capaian ekonomi seharusnya adalah sarana, bukan tujuan.

Tujuan pembangunan harusnya mengarah pada pembangunan manusia seutuhnya, yaitu bagaimana mencapai kesejahteraan materi dan immateri. Dalam konteks ini, pemerintah adalah jantung reformasi sosial-ekonomi yang harus memastikan bahwa setiap orang memiliki kesetaraan akses terhadap sumber daya.

Rencana Pemprov untuk menjadikan Jatim sebagai tujuan utama investasi agribisnis di Indonesia perlu disambut gembira. Hal yang sama seyogyanya diamini pula oleh Pemkab Jember dan sekitarnya. Fakta menunjukkan kebanyakan daerah di

Jatim memang sarat dengan sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selayaknya, ketiga sektor ini dijadikan pengungkit utama perekonomian regional.

Untuk itu, Pemkab hendaknya sudah memiliki cetak biru komoditas unggulan berbasis wilayah serta infrastruktur yang mendukungnya. Cetak biru ini juga harus memuat peta bagi petani untuk melakukan *economic upgrading* dan membuka aksesibilitas masyarakat sekitar untuk sumber daya sekaligus mengurangi disparitas ekonomi. Jika belum ada, berarti ini pekerjaan besar bagi Pemkab mendatang.

Manakah di antara kandidat cabup/cawabup yang memiliki visi misi dan program nyata untuk *social-economic empowerment* tersebut? Mengejar target investasi dengan mengabaikan kesejahteraan petani dan menutup peluang masyarakat untuk mengakses sumber daya akan sama artinya dengan membangun ekonomi yang tidak humanis. Jika ini yang terjadi, tidak mustahil akan muncul kembali Muntik yang lain dengan kondisi yang tak jauh beda dengan Muntik dari Dusun Pondok Jeruk Barat, Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. *Wallahu a'lam bishowab*.

16

MEMBIAYAI SEKTOR PERTANIAN[15]

Dalam *Annual Banker's Dinner* di Kantor Bank Indonesia (KBI) Jember setahun lalu kala mendampingi Direktur Indef yang diundang menjadi pembicara, saya mendapati kinerja intermediasi perbankan di wilayah kerja KBI Jember yang menarik untuk disimak.

Tercatat rata-rata pertumbuhan kredit, *loan to deposit ratio* (LDR), dan *non performing loan* (NPL) perbankan di wilayah KBI yang menaungi Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi pada 2008 masing-masing sebesar 20,18 persen (yoy), 94,57 persen, dan 4,18 persen. NPL mengalami penurunan minus 32,03 persen (yoy). Data ini menunjukkan, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan di wilayah kerja ini hampir sepenuhnya dikembalikan pada masyarakat melalui penyaluran kredit dan diimbangi dengan kualitas kredit yang membaik. Capaian ini juga menunjukkan kinerja intermediasi yang melampaui kinerja Jatim dan nasional.

Berikutnya, dari total kredit yang diberikan, porsi terbesar menurut sektor ekonomi tersalurkan pada sektor perdagangan,

15 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 20 Februari 2010.

hotel, dan restoran (PHR) sebesar 41,03 persen dengan kenaikan kredit 43,95 persen (yoy). Sementara, sektor pertanian hanya menikmati sekitar 7,33 persen dengan kenaikan kredit 8,69 persen (yoy).

Sektor Pertanian

Pada daerah-daerah di selatan Jatim, sektor pertanian sesungguhnya adalah kekuatan ekonomi dan pengungkit utama perekonomian regional. Hal ini tecermin dari kontribusi sektor pertanian pada produk domestik regional bruto (PDRB) masing-masing kabupaten.

Sepanjang 2006-2008, sektor pertanian masih mempertahankan posisinya sebagai kontributor terbesar. Di Jember, sektor pertanian menyumbang sekitar 44,05 persen, di Bondowoso 48,43 persen, dan di Banyuwangi 49,32 persen. Hanya di Situbondo yang kontribusi sektor pertaniannya berimbang dengan sektor PHR, yaitu sekitar 32,15 persen. Sedangkan di Lumajang berkisar 34 persen.

Secara keseluruhan, hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian secara nyata memberi sumbangan besar dalam menggerakkan perekonomian daerah. Perlu diketahui, bahwa yang dimaksud sektor pertanian dalam konteks PDRB tersebut meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasilnya, perkebunan, serta perikanan. Dengan demikian, jelas sekali terlihat bahwa kabupaten-kabupaten di sekitar tapal kuda ini dianugerahi potensi sumber daya alam pertanian yang begitu besar.

Pemetaan dan Inovasi

Dalam Rakernas Pembangunan Pertanian 2010-2014 awal Februari lalu, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan pada bank sentral untuk memberi kemudahan akses pembiayaan sektor pertanian, khususnya pengembangan komoditas pangan. Bank diusulkan untuk tidak lagi mensyaratkan agunan sebagai jaminan kredit.

Saya kira, kita harus menyambut baik usulan tersebut. Harus diakui, perbankan memiliki peran strategis dalam jaring ketahanan pangan. Sayang, persoalan klasik terus membayang. Sektor pertanian kerap kali tidak dapat memenuhi persyaratan *feasible* dan *bankable* lantaran terikat regulasi. Hal ini pulalah yang diduga menyebabkan minimnya porsi kredit perbankan terhadap sektor pertanian.

Sembari menanti terealisasinya upaya Menteri Pertanian dalam berkoordinasi dengan otoritas moneter, perbankan di daerah hendaknya sudah mulai memetakan potensi sektor pertanian unggulan yang harus digarap. Semisal di Kabupaten Jember, lumbung padi terbesar berada di Kecamatan Sumber Baru. Lalu, produsen jagung dan cabai besar di Ambulu. Kedelai di Bangsalsari. Durian di Panti. Jeruk siam di Semboro, Umbulsari, dan Jombang. Kemudian sapi potong di Silo dan Sumberjambe serta hasil laut di Puger. Lalu kayu rimba di Silo dan lain sebagainya.

Selain itu, perbankan juga ada baiknya mulai mempermudah persyaratan kredit dan menurunkan bunga kredit dengan cara menekan biaya dana, biaya operasional, premi risiko, dan margin

keuntungan. Selayaknya perbankan mendukung sektor pertanian melalui peningkatan porsi pembiayaan.

Selanjutnya, pada saat yang sama, Pemkab dan otoritas moneter di daerah seyogyanya juga mulai berkoordinasi untuk merumuskan paket kebijakan yang sistematis, komprehensif, dan berorientasi jangka panjang. Jika otoritas moneter membuat kajian skim pembiayaan pertanian dan penjaminan kredit, maka Pemkab dapat membuat kajian "APBD Hijau" dan merumuskan sistem pertanian berkelanjutan serta memikirkan perluasan akses pada sumber modal.

Secara keseluruhan, ini semua adalah pekerjaan besar yang menjadi tantangan bersama. Saya kira, ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi lebih pada mau atau tidak mau. Rasanya kita juga tidak bisa hanya menanti terealisasinya asa itu dari pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah seharusnya memberi kita banyak kesempatan untuk berinovasi dalam membuat kebijakan yang *pro-poor, pro-growth, pro-employment*, dan *pro-environment* bagi pembangunan di daerah. *Wallahu a'lam bishowab.*

17

EKONOMI MADANI[16]

Akhir pekan ini, geliat sektor riil diramaikan oleh peringatan maulid Nabi Muhammad saw. Banyak cara dari masyarakat kita dalam memperingatinya. Anak sekolah selevel *playgroup* dan TK biasanya disuruh membawa keranjang berisi kue atau buah. Anak sekolah tingkat SD, SMP, atau SMU biasanya menggelar pengajian. Begitu pula dengan lingkungan kampung. Sedangkan di ibu kota kabupaten biasanya digelar tablig akbar. Uniknya, yang lazim terjadi di sejumlah daerah di Lumajang, Jember, dan Bondowoso adalah budaya menghantar makanan ke masjid, musala, atau langgar. Ada juga yang hantar-menghantar makanan antartetangga.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan masyarakat dalam memperingati maulid Nabi ini sedikit memicu meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok. Meski tidak setajam ketika Ramadan, namun lonjakan ini memengaruhi inflasi pada bahan makanan. Yang paling kentara terlihat adalah harga cabai yang menyentuh angka Rp25.000-30.000 per kilogram. Fenomena ini menarik untuk

16 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 27 Februari 2010.

disimak karena inflasi yang terjadi mungkin bukan disebabkan oleh kebutuhan riil, melainkan oleh perilaku konsumsi.

Dalam konteks makro-mikro, hal ini tecermin dari budaya hantar-menghantar makanan antartetangga. Bayangkan saja, kebiasaan ini bisa berlangsung dalam kurun waktu seminggu. Dalam satu hari, satu rumah bisa menerima dua hingga tiga hantaran makanan. Fenomena ini biasanya dapat ditemui di wilayah pedesaan yang masih kental hubungan kekeluargaannya.

Yang makin menarik untuk disimak lagi adalah meningkatnya harga-harga pada komoditas pertanian. Dalam kebijakan makroekonomi, untuk mengendalikan inflasi yang berlebihan, pemerintah umumnya berupaya menjaga kelancaran arus distribusi barang. Namun demikian, yang terjadi di lapangan tampaknya bukan pada persoalan kelancaran distribusi barang, melainkan pada jumlah permintaan yang melampaui pasokan. Yang menjadi sedikit aneh, kondisi ini terjadi pada wilayah yang justru kaya dengan hasil bumi sektor pertanian.

Setidaknya, ada dua dugaan yang menyebabkan inflasi bahan makanan yang bersumber dari sektor pertanian ini terjadi. Pertama, daya pasok memang tidak memadai. Kedua, pola konsumsi rumah tangga berlebihan menyebabkan permintaan agregat meningkat. Secara keseluruhan, hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian belum dikelola secara optimal dan adanya kecenderungan perilaku rumah tangga yang konsumtif.

Ekonomi Madani

Dalam ekonomi positif Islam, Nabi Muhammad diceritakan dalam memerintah Madinah mengajarkan rehabilitasi ekonomi melalui pembangunan sumber daya. Madinah mempunyai dasar ekonomi agraria dan penduduknya banyak bergerak di bidang pertanian. Nabi mengajak rakyat untuk menghidupkan tanah-tanah mati. Nabi juga memperkenalkan berbagai hukum mengenai bercocok tanam dan pemasaran produk pertanian yang didasarkan pada keadilan, kerja sama, dan keluhuran budi. Selain itu, Nabi juga menerangkan hukum dan menerapkan skema yang wajar dan saling membantu dalam kontrak perdagangan dan bisnis.

Gambaran kegiatan ekonomi negara Madinah di waktu lalu sedikit banyak merupakan cerminan Indonesia. Indonesia dikaruniai sumber daya alam berlimpah di mana sektor pertanian menjadi ujung tombaknya dan sebagian besar masyarakat berada di wilayah pedesaan yang notabene berinteraksi erat dengan sektor pertanian.

Dalam Islam, manusia memang berserikat terhadap 'padang rumput'. Dalam konteks kekinian, 'padang rumput' dapat diterjemahkan sebagai pemenuh kebutuhan pangan yang bersumber dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Islam memperkenankan kepala pemerintahan untuk mengelolanya dengan mengatur produksi, penjualan hasil produksi, serta mendistribusikan aset-aset tersebut untuk rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara keseluruhan, isu inflasi bahan makanan yang bersumber dari sektor pertanian pada saat maulid Nabi atau Ramadan di daerah memiliki esensi yang sama dengan isu nasional mengenai krisis ketahanan pangan akibat ketergantungan impor dan ketidakmampuan berswasembada pangan. Pembangunan ekonomi yang ada masih belum berbasis pada pemanfaatan sumber daya intensif. Padahal, Nabi dalam membangun ekonomi Madinah mengajarkan tentang pemanfaatan tanah, pengembangan kerja dan dunia usaha, serta kebijakan kependudukan dan perencanaan. Untuk membangun perilaku ekonomi, Nabi juga mengajarkan tentang larangan pemborosan, mencintai harta, pengangguran, meminta-minta, serta menganjurkan hidup sederhana.

Lebih jauh, ekonomi normatif dan positif Islam yang termanifestasi dari kegiatan ekonomi Nabi menjangkau nilai-nilai lokal, kultural, dan universal serta merengkuh nilai-nilai moral-etika, sosial-ekonomi, dan sosial-religius. Nabi telah memberi teladan untuk membangun negeri yang sejahtera. Madinah adalah suatu contoh keberhasilan terbentuknya *civilized society* atau *civil-society* atau masyarakat madani yang berkegiatan dan berperilaku ekonomi madani. Inilah yang kita inginkan bersama untuk negeri ini. *Wallahu a'lam bishowab.*

18

MENDESAK REALISASI JAMKESDA[17]

Sepekan lalu, seorang tetangga yang berprofesi sebagai tukang becak dipaksa oleh keluarganya untuk bersedia masuk ke rumah sakit (RS) karena penyakit hernia yang begitu parah menyebabkannya sesak napas. Bukan tanpa alasan jika si tukang becak ini enggan ke RS. Sebelumnya, ia sudah diberitahu seorang dokter bahwa operasi adalah satu-satunya jalan untuk menyembuhkan. Namun, lantaran tidak memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), tukang becak ini lebih memilih menahan sakit dan berharap kesembuhan akan datang dengan sendirinya.

Dengan hanya mengandalkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), akhirnya anggota keluarga memberanikan mengantar tukang becak itu ke RS. Dalam proses administrasi awal, anggota keluarga diinformasikan bahwa SKTM hanya bisa membantu separuh dari total biaya operasi. Artinya, separuh dari total biaya operasi harus ditanggung oleh tukang becak tersebut.

17 Dimuat Kompas Jatim, Forum, 1 Maret 2010, Hlm. D.

Tidak bisa dimungkiri, cerita di atas adalah kisah nyata yang terjadi dalam masyarakat kita dan menambah deretan kisah keluarga masyarakat miskin yang harus menderita berkepanjangan akibat ketidakberdayaan atau ketidakberanian untuk meminta layanan kesehatan gratis lantaran tidak memiliki kartu jamkesmas. Meski dengan SKTM hanya membayar separuh, itu pun masih dirasa terlampau berat bagi keluarga miskin.

Jamkesda

Di Jawa Timur (Jatim), keluarga miskin yang tidak memiliki fasilitas kartu jamkesmas telah dijanjikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk dapat memperoleh layanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan daerah (jamkesda). Sejak 2008, wacana ini sudah terdengar. Namun, konon karena belum terbentuknya otoritas penyelenggara layanan kesehatan gratis membuat program jamkesda tersebut menjadi terhambat realisasinya.

Pada akhir Januari lalu, Pemprov Jatim dikabarkan telah membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD). BPJKD ini terdiri dari Dewan Wali Amanah (DWA) serta pejabat pengelola yang terdiri dari lima orang profesional. Pejabat pengelola ini yang akan menerbitkan kartu jamkesda sebagai pengganti SKTM.

Menurut rencana, jamkesda akan resmi diberlakukan per 1 April 2010 mendatang. Saat itu, SKTM dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Bagi keluarga miskin yang hendak berobat ke RS atau

puskesmas dapat menggunakan kartu jamkesda. Saat ini, proses pembuatan kartu jamkesda telah dimulai.

Keluarga Miskin

Kita tentu berharap program jamkesda akan sungguh-sungguh terealisasi tepat waktu sebagaimana yang dijanjikan. Program ini sangat mendesak, mengingat masih begitu banyak keluarga miskin yang belum memiliki jamkesmas. Selama jamkesda belum diterbitkan, maka selama itu pula keluarga miskin yang belum memiliki Jjmkesmas akan selalu dihantui ketakutan untuk mengakses layanan kesehatan.

Di Jatim, angka kemiskinan masih cukup tinggi, baik jumlah maupun persentasenya,. Jika angka kemiskinan pada 2005 sekitar 10 juta, tahun 2006 menjadi 7,455 juta, dan tahun 2007 menjadi 7,130 juta, maka diperkirakan tahun ini mengalami penurunan meski tidak begitu besar.

Mengacu hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, jumlah rumah tangga miskin di Jatim yang diperkirakan akan mendapat kartu jamkesda sebanyak 1,4 juta. Banyak yang meyakini bahwa jumlah yang ada sesungguhnya melebihi angka tersebut. Oleh karena itu, secara berkala, pemprov selayaknya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama perlu melakukan pendataan kembali untuk memastikan keluarga miskin yang belum memiliki kartu Jamkesda. Pendataan seyogyanya dilakukan secara merata, baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini mengingat bahwa keluarga miskin di Jatim tersebar dengan dominasi hingga 60 persen lebih tinggal di pedesaan.

Meningkatkan Anggaran Kesehatan

Tahun 2010 adalah tahun Indonesia Sehat. Indonesia Sehat 2010 dicetuskan pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie tahun 1999 lalu. Satu dasawarsa dinilai waktu yang cukup untuk menghantarkan agenda peningkatan kesehatan masyarakat. Namun, kenyataannya, pelayanan kesehatan masih belum memadai hingga saat ini. Sebagian masyarakat masih terkungkung dalam kesulitan untuk mengaksesnya, terutama bagi mereka yang miskin.

Tidak bisa dimungkiri, pemerintah sesungguhnya telah berupaya untuk memperluas dan meningkatkan akses kesehatan masyarakat. Namun demikian, harus diakui pula bahwa fakta menunjukkan upaya yang ada masih belum memenuhi harapan. Hal ini tidak lepas dari minimnya anggaran kesehatan.

Anggaran kesehatan di Indonesia setiap tahunnya selalu kurang dari tiga persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini diamini pula oleh anggaran kesehatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan agar setiap negara mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar lima persen dari APBN.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, pagu anggaran kesehatan ditingkatkan menjadi sebesar Rp141 triliun dengan rata-rata anggaran per tahun sekitar Rp28 triliun. Alokasi ini tidak lepas dari rencana pemerintah yang ingin menjadikan kesehatan sebagai prioritas nasional setelah reformasi birokrasi dan pendidikan.

Seyogyanya, pemprov dan juga pemkab menempatkan pula kesehatan sebagai prioritas. Anggaran publik daerah hendaknya mengakomodasi program nyata untuk masyarakat. Jamkesda adalah salah satu program yang manfaatnya dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Ke depan, selain meningkatkan anggaran kesehatan dengan memprioritaskan program jamkesda, perlu dipikirkan pula untuk melengkapinya dengan program gratis semua obat dan pembangunan rumah penampungan bagi pasien rujukan. Hal ini agar fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin kian memadai dan sekaligus membuktikan 'APBD untuk rakyat' serta membantah ungkapan satiris 'orang miskin dilarang sakit'.

19

YUK, KITA BERWAKAF UANG![18]

Salah satu yang mengingatkan saya pada kota Jember adalah Anang Hermansyah. Tahu semua, kan, siapa Anang yang saya maksud? Beberapa tahun lalu, Anang pernah menyanyikan lagu *Kota Santri*. Boleh jadi, kota santri yang dimaksud Anang adalah kota kelahirannya, kota Jember.

Jember dan sekitarnya, termasuk pula Lumajang, Bondowoso, dan wilayah tapal kuda lainnya memang masih identik sebagai kota religius. Sejumlah pondok pesantren dan sekolah/perguruan tinggi Islam banyak didirikan. Dengan basis utama kekuatan *nahdliyin* dan *stakeholders* yang Islami, rasanya cukup relevan untuk menjadikan instrumen ekonomi syariah sebagai pengungkit pembangunan di wilayah ini. Salah satu instrumen yang layak untuk dikembangkan adalah wakaf uang.

Wakaf Uang

Di Indonesia, lahirnya UU wakaf menjadi momentum untuk menginisiasi wakaf produktif. Regulasi ini mengandung

18 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 6 Maret 2010.

pemahaman yang komprehensif dan modernitas terhadap pemberdayaan potensi wakaf. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana wakaf produktif memang cukup intensif. Kebutuhan inovasi instrumen dalam pembangunan sosial ekonomi memunculkan banyak kajian yang pada gilirannya melahirkan rekomendasi tentang pemberdayaan wakaf uang.

Awal Januari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Dalam membuka tafsir luas tentang wakaf yang semula hanya pada tanah dan bangunan, wakaf uang adalah suatu terobosan. Dalam konstelasi ekonomi Indonesia, wakaf uang memang instrumen yang masih dianggap baru. Terlepas dari perbedaan pendapat pada mekanisme pemberdayaan wakaf akibat ragam interpretasi dari aturan dan prinsip syariah, harus diakui wakaf uang memiliki sejumlah keunggulan.

Pertama, meski nilai uang berkurang setiap waktu karena tergerus inflasi, tapi wakaf uang memiliki sifat fleksibel sehingga dapat menjadi instrumen bagi mekanisme kontraksi likuiditas.

Kedua, wakaf uang tidak terikat dengan kepemilikan kekayaan dalam jumlah besar. Siapapun dapat menjadi *wakif*, berapapun jumlahnya.

Ketiga, wakaf uang adalah sumber pendanaan swadaya masyarakat yang sangat murah dan dapat ditransformasikan menjadi modal usaha sosial ekonomi. *Nadzir* dapat menginvestasikannya pada sektor usaha yang halal dan produktif.

Keempat, wakaf uang dapat menjadi modal proyek pembangunan sektoral atau infrastruktur. Wakaf uang yang

terhimpun juga dapat digulirkan oleh *nadzir* untuk membantu operasional berbagai institusi sosial ekonomi.

Kelima, sebagaimana keunggulan kontrak wakaf pada umumnya, optimalisasi wakaf uang juga bisa lebih luas karena tidak ada kualifikasi mustahik. Dengan demikian, dana yang terserap dapat sepenuhnya diputar untuk membiayai kemaslahatan umat. Selain itu, berbeda dengan akad syariah lainnya, kontrak wakaf tidak mengenal jatuh tempo.

Pembiayaan Pembangunan

Telah banyak kajian yang mengungkap manfaat wakaf dalam berbagai sektor kehidupan umat. Sejarah juga menunjukkan peran signifikan dari wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta peradaban.

Terkait dengan bagaimana memberdayakan wakaf uang sebagai pengungkit pembangunan di wilayah tapal kuda, mungkin seperti ini ilustrasi sederhananya. Pemkab mencanangkan Gerakan Wakaf Uang, misal, Rp1.000. Pemkab kemudian menjadi koordinator dari seluruh *stakeholder* yang disusun berlapis, mulai dari kiai, takmir masjid, sekolah/perguruan tinggi Islam, lembaga ZISWA, pengusaha, hingga masyarakat umum. Selanjutnya, dibangunlah mata rantai dari hulu hingga hilir, mulai dari menghimpun dana hingga mendistribusikan.

Coba bayangkan, jika Jember, Lumajang, Bondowoso, serta daerah lain di sekitarnya bisa memanfaatkan instrumen wakaf

uang ini. Yang punya pondok pesantren dapat menjadikan modal koperasi pesantren (kopontren). Yang bergerak di sektor pertanian dapat mendirikan BMT. Yang bergerak di lembaga pendidikan dapat memperbaiki dan memperluas gedung pendidikan. Yang paling menyenangkan lagi, apabila Pemkab dapat kreatif mengelolanya sebagai proyek bisnis untuk menyerap tenaga kerja. Misal, membangun pabrik sampah.

Pabrik sampah dapat kita buat menjadi dua jenis, yaitu sampah anorganik dan organik. Pabrik sampah anorganik dapat mendaur ulang sampah yang berasal dari plastik, kayu, besi, dan jenis lainnya. Pabrik sampah organik dapat mengolah sampah hasil sektor pertanian, perkebunan, kehutanan untuk menjadi pupuk organik atau bahan baku *handycraft*. Untuk memudahkan distribusi pasokan dan pemasaran, Pemkab dapat mendirikan *cluster* mini pabrik di sejumlah kecamatan dan satu pabrik utama. Jika ini dapat terwujud, maka pertumbuhan ekonomi regional akan berbasis investasi. Kita semua yang menjadi *wakif* pun selain ikut menikmati roda pembangunan, kita juga akan memperoleh *benefit* dari Allah Swt. *Wallahua'lam bishowab.*

20
SENGON DAN JABON[19]

Anda punya lahan kosong? Tidak ada salahnya jika lahan tersebut ditanami sengon. Nasihat ini mungkin sudah basi, tapi rasanya belum terlambat jika kita baru melakukannya hari ini. Tanaman ini memang tengah berkilau seiring kebutuhan kayu yang terus meningkat. Terlebih lagi, pemerintah saat ini melarang penggunaan kayu bulat hasil tebangan hutan alam.

Bisnis kayu albasia, atau lebih dikenal dengan nama sengon, memang tengah menjamur. Kalau kita berjalan-jalan di sekitar Lumajang, Jember, dan Bondowoso, kita pasti sering melihat tanaman ini. Berkat sengonlah, sekitar empat puluh persen jamaah haji asal Lumajang pada 2009 lalu dapat berangkat ke tanah suci. Berkat sengon pula, Lumajang pernah menuai pujian dari Menteri Kehutanan karena dinilai sukses membantu pemerintah dalam melaksanakan program penghijauan sekaligus membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraan.

19 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 13 Maret 2010.

Berkah Sengon

Secara teknis, tanaman sengon bermanfaat untuk mengembalikan kesuburan lahan kritis, meningkatkan perlindungan lahan dan pengaturan tata air, serta mendukung program penghijauan dan pelestarian alam. Secara ekonomi bisnis, tanaman sengon dapat meningkatkan produktivitas lahan dengan keanekaragaman hasil, meningkatkan ketersediaan pasokan kayu untuk kebutuhan harian masyarakat, serta memenuhi ketersediaan bahan baku bangunan/kontruksi dan industri dalam negeri berbasis kayu. Secara keseluruhan, semua ini pada gilirannya dapat meningkatkan nilai pendapatan petani dan nilai tambah ekonomi dari tanaman sengon itu sendiri.

Di Indonesia, sengon memiliki banyak sebutan. Di Jawa, ada yang menyebutnya *jeunjing, jeunjing* laut, *kalbi,* sengon *landi,* sengon laut, atau sengon *sabrang*. Di Maluku disebut *seja*. Di Banda, disebut *sikat*. Di Ternate disebut *tawa* dan di Tidore disebut *gosui*. Dengan kelebihan yang dimilikinya, pemerintah menggalakkan penanaman sengon di aliran sungai (DAS) di Jawa, Bali, dan Sumatra.

Tanaman sengon adalah tanaman serbaguna. Mulai dari daun hingga akar dapat memberi manfaat. Daun sengon bisa digunakan sebagai pakan ternak. Akarnya berfungsi untuk menyerap nitrogen dan karbon dioksida yang ketika bersimbiosis dengan bakteri *rhizobium* dapat membantu porositas tanah dan menambah tingkat kesuburan.

Sementara itu, bagian yang memberi manfaat paling besar dari tanaman sengon adalah batang kayu. Umumnya, kayu sengon

digunakan untuk tiang bangunan/rumah, papan peti kemas, peti kas, perabotan rumah tangga, pagar, batang dan kotak korek api, *pulp*, kertas, papan penyekat, pengecoran semen, dan lainnya. Sejauh ini, permintaan kayu lapis berbahan baku sengon di dalam maupun luar negeri terus meningkat. Bahkan, untuk pasar ekspor, semakin banyak negara yang berminat dengan kayu olahan dari sengon.

Melirik Jabon

Untuk mengelola risiko, tanaman jabon layak pula dipertimbangkan untuk menjadi pendamping sengon. Saat ini, kayu jabon pun kian berkilau. Bahkan, prospeknya jauh lebih bagus dibanding sengon. Namun, masih belum banyak yang menjual bibit kayu jabon. Selain karena tanaman ini belum sepopuler sengon, membuat bibit jabon relatif tidak mudah dan butuh keahlian khusus.

Sebenarnya, kayu jabon sudah lebih dulu dikembangkan di Malang. Namun, saat ini sentranya banyak didominasi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Daya pasok Jawa Timur masih belum bisa mengejar. Mengingat potensi pasar dan nilai jual kayu jabon yang menggiurkan, dapat dipastikan tanaman ini ke depan akan sama populernya dengan sengon.

Jabon memang menjadi andalan industri perkayuan. Pasarnya sangat terbuka lebar seperti halnya sengon. Dibanding sengon, jabon memiliki beberapa keunggulan. Pertumbuhannya lebih cepat, jenis kayunya putih kekuningan tanpa terlihat serat, tidak

memerlukan pemangkasan karena cabang dapat rontok sendiri, dan tidak gampang terkena hama atau penyakit. Sayang, jabon tak begitu kuat dengan sinar matahari. Seperti halnya sengon, penanaman jabon bisa juga dengan tumpang sari. Di bawah tanaman jabon bisa ditanami berbagai jenis tanaman palawija.

Dapat disimpulkan, sengon dan jabon adalah *win-win solution* bagi industri berbasis kayu, petani, pemerintah, dan juga kelestarian lingkungan. Ke depan, Pemkab selayaknya memikirkan bagaimana menjadikan sengon dan jabon sebagai sarana membangun hutan rakyat berkelanjutan yang mengindahkan prinsip *social economic environment foresty*, diversifikasi sumber bahan baku industri perkayuan, pengembangan produk kayu bernilai tinggi, pengembangan *cluster* industri kehutanan berbasis wilayah, dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengontrol hutan.

Dengan demikian, diharapkan akan tercipta optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan rakyat serta bertambahnya hutan tanaman yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga meningkatkan pelestarian mutu lingkungan guna mengatasi *global warming*. *Wallahua'lam bish showab*.

21
TEMBAKAU DAN KESEHATAN[20]

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram mengenai hukum merokok. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah menerbitkan fatwa senada. Sejumlah kalangan memastikan bahwa fatwa tersebut tidak memengaruhi kinerja petani tembakau. Namun, saya melihat, cepat atau lambat hal tersebut akan memberi imbas, baik langsung maupun tidak langsung.

Tembakau adalah primadona petani Jember. Bagi Jember, tembakau adalah ikon sekaligus sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan. Diperkirakan ada sekitar delapan puluh ribu tenaga kerja yang terserap dalam usaha pertembakauan ini.

Namun demikian, eksistensi usaha pertembakauan di Jember terindikasi mengalami pelemahan. Hal ini tecermin dari menurunnya volume ekspor, berkurangnya jumlah eksportir aktif, tidak terpenuhinya sejumlah permintaan, menyusutnya luas lahan yang ditanami tembakau, dan semakin banyak eksportir yang mengalihkan bisnis ke luar kota Jember.

20 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 20 Maret 2010.

Tembakau dan Kesehatan

Selama ini, tembakau memang identik dengan rokok. Para pakar kesehatan sepakat bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal inilah yang menjadi salah satu argumen utama bagi MUI dan PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram merokok.

Jika disimak, sesungguhnya tembakau juga memiliki manfaat. Bagi industri farmasi dan dunia kedokteran, tembakau tidak lagi identik dengan rokok. Seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan bahwa tembakau dapat digunakan sebagai reaktor penghasil *growth colony stimulating factor* (GCSF). GCSF adalah hormon penting dalam menghasilkan protein antikanker, menstimulasi produksi darah, dan memperbanyak sel tunas.

Temuan lain yang dirilis Jurnal BMC *Biotechnology* juga menunjukkan bahwa tembakau yang dimodifikasi secara genetik dapat memproduksi obat antiradang dan mencegah diabetes melitus tipe satu. Ilmuwan dari beberapa lembaga penelitian Eropa saat ini tengah membuat tembakau transgenik yang memproduksi protein antiradang yang ampuh dan dapat merangsang aktifnya sel-sel kekebalan tubuh.

Bagaimana tembakau dapat menghasilkan hal tersebut? Ringkasnya begini, tembakau difungsikan sebagai media produksi. Kode genetik dalam tubuh dipindahkan ke tembakau melalui bakteri. Pada saat masuk, tanaman tembakau akan membuat protein sesuai kode genetik yang telah dimasukkan. Ketika panen, maka akan dihasilkan daun-daun yang mengandung banyak

protein dengan kode tersebut. Melalui proses ekstraksi, akan diperoleh protein murni.

Tidak hanya itu, *Proceedings of the National Academy of Sciences* juga merilis temuan bahwa tembakau berpotensi menghasilkan protein obat *human immunodeficiency virus* (HIV) penyebab AIDS. Di alam, satu-satunya sumber protein tersebut adalah alga merah yang ada di pantai Selandia Baru. Alga ini tumbuh dalam jumlah sangat kecil sehingga tidak dapat dipanen secara efektif. Sedangkan berbagai rekayasa genetis lainnya membutuhkan biaya yang sangat besar. Para ilmuwan kemudian berpaling pada virus untuk memproduksi protein obat HIV tersebut. Virus mosaik tembakau (TMV) yang biasanya menginfeksi tembakau kini dapat dijadikan alat untuk memproduksi obat HIV. Tubuh TMV diinjeksikan gen alga merah agar menghasilkan protein obat HIV.

Secara keseluruhan, berbagai temuan ini sangat bermanfaat bagi sistem produksi protein kesehatan karena menawarkan kemungkinan produksi massal skala besar dengan biaya rendah. Yang lebih penting lagi, temuan ini dapat membantu melanjutkan masa depan para petani tembakau.

Pemkab dan Unej

Setidaknya ada dua opsi yang dapat kita lakukan untuk melindungi eksistensi petani tembakau di Jember. Pertama, mencari pasar baru. Kedua, mengalihkan usaha. Dalam opsi pertama, kita harus memiliki peta industri yang membutuhkan bahan baku tembakau. Tembakau tidak lagi harus disalurkan pada

industri rokok. Bersikukuh mempertahankan tembakau hanya untuk memenuhi permintaan industri rokok tidak akan memberi keterampilan baru bagi petani dalam mengeksplorasi tembakau.

Pada opsi kedua, kita perlu membuat program alih usaha dan pembinaan. Bagi petani tembakau yang ingin beralih usaha, maka Pemkab dapat memfasilitasi bantuan program sekaligus pendampingan agar petani memperoleh keterampilan baru dalam usaha pertanian lain.

Yang tidak kalah penting, Universitas Jember (Unej) sebagai *agent of development* harus mengambil peran dalam menyelamatkan usaha pertembakauan di Jember. Bukankah Unej memiliki Fakultas Pertanian, Kedokteran, dan Farmasi? Menindaklanjuti berbagai riset manfaat tembakau terhadap kesehatan masyarakat, rasanya bukanlah mimpi di siang bolong jika kita berharap sinergi dari dunia akademis dapat menghasilkan terobosan yang menjembatani petani tembakau dalam mengakses teknologi untuk kemudian menjadi pemasok industri farmasi dan dunia kedokteran. *Wallahua'lam bisshowab*.

22

BERSAHABAT DENGAN AIR[21]

Pada 22 Maret lalu, bangsa-bangsa di dunia memperingatinya sebagai Hari Air. Konon, peringatan ini ditujukan sebagai upaya menarik perhatian publik untuk memahami pentingnya air bersih dan bagaimana mengelola air bersih secara berkelanjutan.

Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Pusat, jumlah volume air total di bumi sekitar 1,4 miliar km^3. Dari jumlah yang sangat besar itu, ternyata hanya 2,7 persen yang dapat dimanfaatkan manusia.

Dilaporkan pula oleh *Water Supply & Sanitation Collaborative Council* (2007), hampir satu miliar penduduk dunia nyaris tidak mendapatkan akses air sama sekali dan sekitar 2,6 miliar penduduk dunia tidak memiliki akses untuk mendapatkan sanitasi dasar.

Di Indonesia, diperkirakan ada 24 juta penduduk yang tidak memiliki akses terhadap ketersediaan air bersih. Angka ini jauh melampaui negara Asia Tenggara lainnya. Lalu bagaimana dengan Lumajang, Jember, dan Bondowoso?

21 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 27 Maret 2010.

Air Bersih dan Sanitasi

Setahun lalu, dalam suatu kegiatan, saya singgah ke Desa Wonoayu, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Ketika hendak berwudu di rumah seorang penduduk, saya diajak ke sebuah kamar mandi terbuka dengan bak besar yang kosong berdebu. Di pinggir bak terdapat satu buah ember berisi air dan gayung. Selidik penuh selidik, bak mandi terbuka itu dimaksudkan untuk menampung air kala hujan. Sedangkan air dalam ember itu diambil dari sumur *hydrant* yang jaraknya sekitar dua kilometer dan ditempuh dengan sepeda motor. Desa tersebut memang berada di dataran tinggi sehingga air sulit untuk naik. Bahkan, kabarnya tidak hanya desa itu saja yang bergantung pada sumur tersebut, tapi ada empat desa. Mengenaskan, bukan?

Kisah lainnya saya peroleh di Desa Wotgaleh, Kecamatan Yosowilangun, masih di Kabupaten Lumajang. Ketika singgah di rumah seorang penduduk, saya baru mengetahui bahwa rumah tersebut tidak memiliki tempat pembuangan. Alhasil, jika ingin buang hajat harus bersembunyi di semak-semak dan kemudian menanamnya dengan bantuan cangkul. Menyedihkan sekali bukan, di hari begini hal tersebut masih terjadi?

Satu lagi, di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Masih setahun yang lalu ketika saya berkunjung ke sana. Saat itu, musim hujan dan sungai meluap memasuki rumah-rumah penduduk. Sawah-sawah pun tergenang. Yang terlihat ini bukan jaminan bahwa desa tersebut tidak sulit air. Sebab, ketika musim kemarau, ternyata sebagian penduduk desa

tersebut sulit memperoleh air. Sumur mereka sampai kesat. Jadi, desa tersebut mengalami banjir ketika hujan dan kekurangan air saat kemarau.

Air dan Kemiskinan

Air dan kemiskinan adalah suatu paradoks. Semakin miskin seseorang, maka semakin sulit ia mengakses air. Semakin kecil pendapatan seseorang, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkannya untuk memenuhi kebutuhan air. Sebuah riset menunjukkan rumah tangga yang termiskin di negara berkembang menghabiskan hampir sepuluh persen dari pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan air.

Dilihat dalam makna luas, air dapat diinterpretasikan tidak hanya sebagai pemenuh kebutuhan hidup manusia sehari-hari, tetapi juga dapat memiliki beragam fungsi sebagai pemenuh kebutuhan kegiatan ekonomi. Seperti halnya bahan pangan dan energi, air berpotensi pula menjadi pemicu konflik dan memiliki *contagion effect* signifikan dalam memengaruhi ekonomi masyarakat. Jika berkepanjangan, ini dapat mengancam ketahanan ekonomi dan keamanan nasional.

Dalam ekonomi Islam, manusia diposisikan berserikat dalam memenuhi kebutuhan air. Air dipandang sebagai kebutuhan dasar umat manusia. Islam menempatkan sumber-sumber air sebagai kepemilikan umum (dan bukan milik negara), di mana negara difungsikan sebagai pengelolanya. Sayang, tata kelola sektor air di Indonesia masih belum memenuhi harapan. Buruknya manajemen

adalah salah satu kunci persoalan yang pada akhirnya berdampak dengan munculnya berbagai ketimpangan dan penyimpangan.

Bersahabat dengan Air

Air adalah sumber kehidupan. Sudah seharusnya kita bersahabat dengan air. Sayang, karena ulah kita, air dapat menjadi kawan, tetapi dapat juga menjadi lawan. Di musim penghujan seperti saat ini, air kerap kali menjadi lawan. Banjir di berbagai daerah bukan lagi berita baru. Sementara di musim kemarau, kekeringan dan ancaman kekeringan juga menjadi berita sehari-hari. Ribuan hektar lahan pertanian kerap mengalami ancaman puso.

Jika disimak, persoalan air bukan semata persoalan kita, tetapi juga persoalan dunia saat ini. Hanya saja, yang menjadi sumber munculnya persoalan di setiap negara berbeda-beda. Ke depan, Pemkab seyogyanya membuat perencanaan strategis jangka panjang, menengah, dan pendek. Perlu disusun cetak biru pengelolaan, diversifikasi, dan pelestarian sektor air di daerah. Belanja daerah yang lazimnya *jor-joran* dikeluarkan pada akhir tahun untuk hal-hal yang *unmultiplier effect*, tentu akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk memperbaiki dan membangun irigasi, sumur, sanitasi, dan infrastruktur lainnya.

Satu hal lagi, semoga saja gairah privatisasi air tidak menjadi mimpi bagi para elite di daerah. Tentu, bagi Lumajang, Jember, dan Bondowoso yang masih banyak memiliki hutan, kebun, dan lahan-lahan pertanian memiliki sumber-sumber air. Privatisasi

terkesan menjadi jalan pintas dan mudah. Padahal, sesungguhnya kita mampu membangun prasarana dan sarana air yang memadai. Tinggal mau atau tidak.

23
PISANG AGUNG[22]

***Ramadan 2008**: "Kami baru saja berbuka kolak pisang kirimanmu. Beberapa sisir saya kirim ke ibu di Bandung. Beliau senang sekali. Trims, ya."*

***Ramadan 2009**: "Kami baru pulang dari Swiss. Baru saja saya dan Meutia berbuka dengan keripik pisang kirimanmu. Kami memakannya dengan olesan madu. Lezat sekali."*

Begitulah secuplik pesan pendek yang pernah dikirimkan Prof. Sri-Edi Swasono, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pada saya. Beliau adalah suami dari Ibu Meutia Hatta, mantan Menteri Pemberdayaan Wanita era Kabinet Indonesia Bersatu I yang juga putri dari salah satu proklamator Indonesia.

Ya, pisang agung Lumajang adalah salah satu hal yang mendekatkan saya dan Pak Edi. Ketika mengetahui saya berasal dari Lumajang, beliau spontan menyampaikan keinginannya untuk menikmati pisang agung. Saya biasanya memesan pada

22 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 3 April 2010.

petani di Senduro dan kemudian mengirimkannya via paket ke Jakarta. Dari Jakarta, lalu ke Bandung. Mengapa Bandung? Ya, karena Pak Edi biasanya selalu menyisihkan beberapa sisir untuk dikirimkan pada ibunya yang berusia 90 tahun lebih yang tinggal di Bandung.

Tidak bisa dimungkiri, pisang agung memang sudah menjadi ikon Lumajang. Pisang jenis ini termasuk *M. paradisiaca forma typica* atau *M. paradisiaca normalis*, yaitu pisang yang dapat dimakan setelah buahnya dimasak. Sebagai bahan konsumsi, pisang memiliki gizi tinggi karena komposisinya yang sarat dengan kandungan air, gula ringkas, karbohidrat, protein, lemak, *b-carotene (*A), *thiamin* (B1), *niacin riboflavin* (B2), *pyridoxine* (B6), dan vitamin C.

Jika disimak, pisang agung sesungguhnya bukan monopoli Lumajang saja. Pisang jenis ini sebenarnya dapat kita temukan pula di daerah lain dengan berbagai sebutan. Selain Jawa Timur, sentra pisang agung banyak ditemukan juga di Jawa Barat dan Lampung. Di Jawa Timur, Lumajang termasuk produsen pisang agung terbesar dengan Kecamatan Senduro sebagai poros utamanya.

Di Lumajang, pisang agung kebanyakan dimanfaatkan industri rumah tangga untuk bahan baku keripik atau sale. Padahal, pisang sesungguhnya dapat dimanfaatkan lebih dari itu. Di Malang, sudah mulai dikembangkan tape pisang. Di daerah lain, pisang diolah sebagai pure dan tepung. Kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat cuka melalui proses fermentasi alkohol dan asam

cuka. Batangnya ada yang diolah menjadi serat untuk pakaian dan kertas, selain juga menjadi pakan ternak.

Harus diakui, pisang agung adalah salah satu komoditas unggulan pertanian yang sangat potensial, baik secara teknis, sosial, maupun ekonomis. Sebagai tanaman nonmusim, pisang agung dapat dipanen sewaktu-waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Untuk itu, kebijakan, strategi, dan program kegiatan pengembangan komoditas pisang agung perlu disusun dengan memperhatikan berbagai aspek agar dapat mencapai target yang diharapkan.

Sedikitnya, ada tiga soalan yang perlu dipikirkan terkait dengan pisang agung sebagai komoditas pertanian andalan Lumajang. **Pertama**, persoalan pascapanen. Perlakuan pascapanen di lapangan masih sederhana. Belum ada kebijakan penerapan pascapanen yang komprehensif. Untuk itu, perlu difasilitasi panduan penerapan pascapanen pisang sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Kedua, persoalan pengolahan. Industri pengolahan pisang yang ada juga masih sederhana, skala kecil, dan produknya belum beragam. Juga belum ada insentif kebijakan investasi. Untuk itu, perlu difasilitasi promosi usaha pengolahan pisang, sosialisasi aneka produk pengolahan pisang, magang aneka olahan pisang, dan analisis kelayakan usaha pengolahan pisang serta skema bantuan modal.

Ketiga, persoalan mutu. Karena belum adanya SOP pengolahan pisang, maka aneka olahan pisang yang ada belum memenuhi standar mutu. Untuk itu, perlu adanya sistem

pembinaan dan pengawasan mutu, penyusunan standar mutu aneka olahan pisang, sosialisasi penerapan sistem jaminan mutu, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) pendamping dan pengawas mutu. Dengan demikian, produk pisang yang diperoleh memiliki kriteria mutu yang diharapkan seperti: kulit mulus dan cerah, bentuk buah seragam, tingkat kematangan optimal, rasa yang konsisten, dan aman dikonsumsi.

Sebagai catatan, mengacu pada laporan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (2005), pemerintah telah menetapkan arah pengembangan industri pengolahan pisang 2025 pada pembuatan tepung pisang, pure, pasta, atau selai. Sasaran ekspor 1.000.000 ton pisang akan diarahkan pula pada negara tujuan: Jepang, Korea, China, Singapura, Malaysia, dan negara Asia lainnya. Pada 2010 dan 2015 ini, akan diadakan realisasi ekspor 30.000 ton dan 150.000 ton yang dipasok dari sentra-sentra produksi pisang utama komersial.

Tentu pisang-pisang ini harus sudah memenuhi standar mutu yang diinginkan negara tujuan. Meski jenis pisang utama yang akan diekspor adalah pisang *cavendish,* namun tidak menutup kemungkinan, pisang agung diperhitungkan sebagai varietas andalan.

Berkaca pada Meksiko, Jamaika, Amerika Tengah, Panama, Kolombia, Ekuador, dan Filipina, perkebunan pisang di sana dikembangkan berkesinambungan. Budidaya pisang dibangun menjadi industri yang didukung oleh kultur teknis yang prima dan stasiun pengepakan yang modern dan memenuhi standar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pisang sesungguhnya

bukanlah komoditas yang dapat diabaikan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kesiapan pisang agung Lumajang dalam menyongsong peluang pada 2025?

24
BATIK[23]

Jalan-jalan ke Karang Duren
Banyak perempuan cantik di sana
Kalau Anda ingin tampil keren
Yuk, kita pake batik aja!

Coba deh, buka lemari baju kita! Saya yakin, sedikitnya ada satu baju batik yang tersimpan di sana. Sejak ditetapkan sebagai warisan budaya milik Indonesia oleh *The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) pada 2 Oktober 2009 lalu, batik memang menjadi *booming*. Apalagi, dengan adanya imbauan pemerintah untuk mengenakan batik pada hari Jumat, menyebabkan batik kian laris manis. Setiap orang setidaknya memiliki dua atau tiga baju batik.

Bicara mengenai batik, pasti banyak yang belum tahu kalau Jember, Lumajang, dan Bondowoso punya kerajinan batik. Iya, batik! Seperti halnya batik Yogya, Solo, atau Pekalongan yang selama ini kita lebih banyak kenal.

23 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 10 April 2010.

Di Jember, terdapat Kecamatan Sumberjambe yang menjadi sentra batik, tepatnya di Desa Sumberpakem. Konon, kerajinan batik di sana sudah dirintis sejak zaman Belanda. Batik saat itu diproduksi untuk dipakai sendiri oleh orang Belanda dan sebagian dijual ke daerah lain. Tahun 1997, para perajin batik sempat gulung tikar karena krisis ekonomi. Setelah mencoba bangkit, para perajin harus dihadapkan kembali dengan ancaman gulung tikar lantaran tiadanya permodalan, lemahnya pemasaran, dan persaingan pasar batik yang semakin ketat.

Di Lumajang, terdapat Kecamatan Kunir yang pernah merintis diri menjadi kampung batik. Tepatnya, di Dusun Bentengrejo, Desa Kunir Kidul. Ada yang mengatakan, kampung batik ini sempat mengalami kejayaan di era Orde Baru, tetapi ada juga yang mengatakan kejayaan itu terjadi sebelum 1960. Yang jelas, dengan kreasi motif khas Lumajang seperti pisang, sulur, gelombang samudra, dan burung penglor, batik Lumajang pernah mengambil tempat di pasaran. Seperti halnya di Sumberpakem, krisis ekonomi menyebabkan kampung batik ini kian terpuruk. Jika sebelumnya kebanyakan generasi muda di dusun tersebut mau menggeluti kerajinan batik, kini diperkirakan jumlah yang masih bertahan tidak lebih dari sepuluh orang. Mereka berproduksi hanya jika ada pesanan.

Di Bondowoso, terdapat Kecamatan Maesan yang menjadi pelopor batik, tepatnya di Desa Sumbersari. Seperti halnya di Kunir Kidul, cikal bakal kerajinan batik di Sumbersari juga dicetuskan oleh kelompok pemuda yang berasal dari karang taruna. Namun, lagi-lagi krisis ekonomi di waktu lalu menghantam industri

kerajinan batik di Maesan hingga mengalami kemunduran. Batik Bondowoso yang motifnya terinspirasi dari bentuk daun singkong dan tembakau ini sebelumnya kerap menggunakan jalur Bali untuk memperkenalkan produknya.

Lalu, kira-kira, bagaimana ya, memberdayakan kerajinan batik di Lumajang, Jember, dan Bondowoso? Haruskah kita menunggu inisiatif pemerintah pusat untuk bisa mengembangkannya? Apa mungkin kerajinan batik kita bersaing? Ya, itu pertanyaan kita bersama. Untuk menjawabnya, tentu kita juga harus duduk bersama.

Setidaknya, ada lima poin penting yang perlu kita pikirkan ke depan. **Pertama**, Pemkab setempat harus berinisiatif untuk memosisikan keberadaan batik sebagai sebuah karya budaya, ataukah sekadar produk jualan industri, ataukah keduanya. Dibutuhkan visi misi dan program konkret untuk mengembangkannya mencapai tujuan. Hal ini penting dilakukan karena akan membawa dampak ikutan berbeda.

Kedua, masalah klasik dari perajin batik adalah manajemen, pemasaran, serta kreativitas desain dan kualitas batik. Untuk itu, perlu sinergi antarinstansi untuk melakukan pendampingan, mulai dari produksi, *packaging,* promosi, distribusi, pemasaran, hingga mematenkan. Jika instansi terkait tidak mampu melakukannya, maka Pemkab dapat menggandeng pihak swasta. Misal melalui program *corporate social responsibility* (CSR) atau bapak asuh dengan perusahaan batik yang sudah mapan.

Ketiga, untuk memberdayakan kerajinan batik yang berkelanjutan, maka perlu pula dilakukan program kemitraan

untuk pembiayaan. Hal ini mengingat masalah klasik lain sekaligus masalah utama dari perajin batik adalah permodalan. Dalam hal ini, sinergi perlu merambah perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Kebanyakan industri kerajinan batik memang belum mandiri secara finansial. Hal ini pada akhirnya berdampak pada kedigdayaan menghadapi mata rantai ikutan berikutnya.

Keempat, dalam memasarkan batik, mau tidak mau dan suka tidak suka, kita harus mengikuti mekanisme pasar. Jika *pricing* yang ada benar, tentu akan menimbulkan insentif bagi setiap orang untuk berusaha dalam bidang tersebut. Jika kita ingin menjadikannya sebagai sebuah industri, maka patokannya tetap harga pasar yang mampu memberi keuntungan bagi pelaku usaha sekaligus kompetitif bagi konsumen. Hal ini mengingat kegiatan yang tidak memiliki *reward* dalam bentuk uang, biasanya tidak bisa memiliki partisipasi dalam jangka panjang. Kalaupun mekanisme insentif belum bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu peran serta Pemkab untuk intervensi guna menghadapi mekanisme pasar. Setidaknya, Pemkab melalui Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pariwisata dapat mengemas dan mempromosikan kerajinan dan sentra batik sebagai bagian dari *cultural tourism*.

Kelima, untuk bisa bersaing dan diterima di mana saja, maka ciri utama yang harus dimiliki kerajinan batik lokal adalah *brand, standard,* dan *quality*. Pengamanan pasokan bahan dan jejaring pemasaran harus dijaga dan dikembangkan agar industri ini terus memiliki kesinambungan.

Mungkinkah mimpi untuk menjadikan Kunir, Maesan, dan Sumberjambe sebagai sentra batik nasional pada suatu hari nanti bisa terwujud? Mungkinkah kelak kampung batik di sana dapat memproduksi batik setiap hari dan tidak tergantung pada pesanan? Mungkinkah tiga kampung ini dapat mandiri secara ekonomi sekaligus berkontribusi dalam menjaga kelestarian budaya lokal? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Namun, kalau ingin mewujudkannya, tentu berbagai elemen yang ada harus duduk bersama untuk merumuskannya. *Wallahua'lam bisshowab.*

25
KENITU[24]

Dulu kepompong sekarang kupu-kupu
Nenek gigi ompong senyum tersipu
Kalau mau cari antioksidan alami bermutu
Cari aja buah manecu alias kenitu!

Kalau lagi musimnya, buah kenitu paling gampang kita temui di sepanjang jalan Kali Bondoyudo antara Jatiroto, Lumajang, hingga Batu Urip, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Biasanya, penjual buah kenitu berderet dengan jarak tidak lebih dari 7-8 meter. Buahnya biasa ditata bertumpuk dalam satu baskom besar yang memuat 10-15 buah. Harganya relatif murah dan masih bisa ditawar.

Waktu saya kecil, saya mengira buah kenitu hanya ada di Desa Wotgaleh, Kecamatan Yosowilangun. Dulu, setiap kali liburan ke Lumajang, saya memang tidak pernah melewatkan kunjungan ke kampung leluhur di Wotgaleh, dan hanya di sana saya bisa menemukan buah kenitu. Masyarakat Wotgaleh menyebutnya

24 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 17 April 2010.

buah manecu. Sayang, sekarang pohon-pohon kenitu itu sudah tidak ada. Saya justru banyak menemukannya di sekitar Yosorati-Sadengan, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Ya, ada yang mengatakan bahwa buah ini termasuk langka dan hanya banyak ditemui di sekitar Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo.

Bisa jadi benar, tapi bisa jadi tidak. Sebab, selidik punya selidik, ternyata buah kenitu memiliki banyak sebutan. Ada yang menyebutnya sawo apel, sawo manila, sawo beludru, sawo ijo, sawo *hejo*, sawo *kadu*, sawo duren, apel jawa, atau genitu. Secara umum, buah ini dideskripsikan bulat, mengkilat, warnanya ada yang hijau kemerahan, ada juga yang hijau keunguan, dagingnya putih, berbiji hitam seperti biji sawo, manis, banyak kandungan air, kalau dikupas daging buahnya yang tua berwarna putih kemerahan atau putih keunguan, serta bergetah.

Eksiklopedia Wikipedia menjelaskan bahwa buah ini ternyata berasal dari dataran rendah Amerika Tengah dan Hindia Barat. Buah ini kemudian menyebar ke seluruh daerah tropis. Di Asia Tenggara, kenitu banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indocina bagian selatan. Dalam bahasa asing, buah ini pun dikenal dengan berbagai nama seperti *cainito, caimito, chicle durian, star apple, golden leaf tree, abiaba, pomme de lait, estrella,* atau *aguay.* Namun yang jelas, nama ilmiahnya adalah *Chrysophyllum cainito L*.

Jika disimak, pohon kenitu ternyata mengandung banyak manfaat. Kayunya cukup baik sebagai bahan bangunan. Cabangnya yang tua dapat dimanfaatkan sebagai media tanaman anggrek. Pohonnya dapat menjadi tanaman hias dan peneduh

di tepi jalan. Buahnya dapat dikonsumsi sebagai buah segar atau menjadi bahan baku es krim atau serbat.

Konon, banyak bagian pohonnya yang juga berkhasiat obat. Rebusan daunnya dapat dipakai untuk menyembuhkan diabetes dan rematik. Kulit kayunya dapat digunakan sebagai obat kuat dan obat batuk. Infus daun yang kaya akan tanin dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai obat kanker. Buah yang sudah masak dapat digunakan sebagai antiinflamasi pada keadaan laringitis, pneumonia, serta pengobatan diabetes melitus.

Namun demikian, kenitu memang bukanlah buah yang dikomersialkan secara luas. Keberadaannya tidak begitu dihargai setinggi buah lain yang harganya bisa melesat, bahkan bisa masuk pasar ritel modern. Namun, siapa sangka jika kenitu mengandung antioksidan alami. Sebuah studi menunjukkan bahwa kenitu memiliki kadar antioksidan yang cukup tinggi. Buah ini bermanfaat bagi pengobatan berbagai penyakit yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan radikal bebas.

Bagi dunia kesehatan, istilah antioksidan mungkin sudah sangat familiar. Bagi perempuan, istilah ini juga tidak begitu asing lantaran banyaknya produk kecantikan yang kini kerap menggunakan embel-embel "mengandung antioksidan". Produk-produk tersebut membangun *image* bahwa produk mereka dapat membuat penggunanya terlihat awet muda.

Senyawa antioksidan memang memiliki peran penting dalam kesehatan karena mampu menangkap radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang sangat reaktif karena memiliki elektron yang tidak berpasangan dalam orbit luarnya sehingga

dapat bereaksi dengan molekul sel tubuh. Radikal bebas dapat mengoksidasi asam nukleat, protein, lemak, bahkan DNA sel, dan menginisiasi timbulnya penyakit degeneratif. Senyawa antioksidan dari tumbuhan seperti vitamin C, vitamin E, asam fenol, polifenol, flavonoid, dan karoten diketahui berpotensi mengurangi risiko penyakit degeneratif dan penyakit kronis, seperti kanker dan penyakit jantung koroner.

Pertanyaannya sekarang, mengapa tidak banyak yang menanam pohon kenitu? Mengapa buah ini tidak termasuk buah yang komersial? Saya punya dua hipotesis. **Pertama,** pohon kenitu mungkin tidak ekonomis. Selain karena pohon ini baru menghasilkan buah setelah berumur 5-6 tahun, buah kenitu juga kurang dikenal secara luas dan nilai jualnya cenderung rendah. **Kedua,** pohon kenitu memang tanaman langka sehingga tidak tumbuh di banyak tempat dan buahnya tidak begitu produktif.

Tentu butuh riset tersendiri untuk membuktikan hipotesis tersebut. Namun, upaya yang bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk mengembangkan kenitu adalah menyelamatkan tanaman ini dengan memperbanyak bibit dan membagikannya secara cuma-cuma pada masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan pohon kenitu semakin banyak, buahnya makin dikenal, dan khasiat buahnya sebagai antioksidan alami dapat menarik minat masyarakat.

Dalam jangka menengah, kita berharap dapat membangun *brand* kenitu sebagai buah lokal khas Lumajang, Jember, Bondowoso, atau Situbondo yang memiliki banyak khasiat. Dan,

dalam jangka panjang, kita berharap dapat membangun standar mutu agar kenitu kompetitif.

Dengan demikian, kalau kita butuh antioksidan alami tinggi, tidak perlu mahal-mahal mencari buah impor. Kalau mau memberi oleh-oleh buah khas lokal, tidak perlu bingung-bingung mencari ke pasar. Cukup memetik kenitu, buah berharga di sekitar kita. *Wallahua'lam bish showab*.

26

KEMANDIRIAN PEREMPUAN[25]

Tanggal 21 April kemarin, kita memperingati Hari Kartini. Meski terdapat polemik terkait layaknya Kartini sebagai simbol emansipasi perempuan, namun Hari Kartini lazim direfleksikan sebagai momen dari simbol perjuangan perempuan Indonesia dalam mengangkat harkat martabatnya.

Tahun ini, peringatan Hari Kartini bertepatan dengan 106 tahun wafatnya Kartini dan dua tahun pascaperingatan satu abad kebangkitan bangsa dan sepuluh tahun reformasi. Meski waktu sudah banyak berselang, namun realitas menunjukkan perempuan masih kerap termarjinalkan. Meski jumlah perempuan jauh lebih besar dari laki-laki, namun keberadaan perempuan masih kerap terabaikan.

Persoalan perempuan sesungguhnya adalah isu global meski problem yang muncul antara negara maju dan negara berkembang memiliki titik kulminasi berbeda. Pada kebanyakan negara berkembang, termasuk Indonesia, persoalan perempuan banyak berkutat pada problem impitan ekonomi, praktik diskriminasi,

25 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 24 April 2010.

ketimpangan struktur sosial-budaya masyarakat, minimnya akses layanan kesehatan, kesenjangan layanan pendidikan, kecilnya kesempatan dalam kegiatan publik dan politik, rendahnya kualitas hidup, dan masih tingginya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bagi sebagian besar perempuan, KDRT adalah momok. Lemahnya daya tawar perempuan memicu tingginya KDRT dan persoalan ikutan lainnya. Tidak perlu jauh-jauh mencari kasus di negara atau kota lain. Coba perhatikan tetangga di sekitar kita. Mungkin, justru saudara atau diri kita sendiri yang mengalaminya. Kekerasan domestik terhadap perempuan, terutama bagi yang sudah memiliki anak dan secara finansial sangat bergantung pada suami, nyaris tidak memiliki daya tawar. Perempuan tak berdaya untuk bersikap, apalagi mengambil langkah hukum. Ketakutan akan masa depan anak dan khawatir dituding membuka aib suami, kerap menjadi alasan utama bagi perempuan untuk bertahan dalam penderitaan.

Ya, hanya perempuan pula yang bisa ikut merasakan penderitaan perempuan. Sepatutnya kita menyambut baik itikad tujuh legislator perempuan di DPRD Jember membentuk Kaukus Perempuan Parlemen Jember. Kaukus yang semula menitikberatkan pada upaya menggugah kesadaran hukum kaum perempuan terhadap KDRT seyogyanya merambah pada persoalan lain yang lebih penting, yaitu bagaimana membangun kemandirian perempuan.

Sedikitnya, ada tiga jenis kemandirian perempuan yang perlu diberdayakan. **Pertama,** kemandirian ekonomi. Mandiri dalam

konteks ini berarti memiliki kemampuan ekonomi yang produktif. Perempuan dapat melakukan kegiatan ekonomi untuk mencari tambahan pemasukan bagi dirinya sendiri atau keluarga. Hal ini dimaksudkan agar perempuan dapat memiliki keterampilan hidup guna menolong dirinya sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada suami.

Kedua, kemandirian intelektual. Mandiri dalam konteks ini berarti perempuan beraktualisasi dengan memanfaatkan intelektualnya untuk memiliki eksistensi. Dengan demikian, meski perempuan secara ekonomi bergantung pada suami, tapi perempuan secara mandiri dapat eksis untuk memberi kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan.

Ketiga, kemandirian sikap. Mandiri dalam konteks ini berarti perempuan memiliki kemampuan untuk memilih sikap terhadap berbagai persoalan kehidupan. Perempuan menjadi *partnership* yang setara dengan suami untuk menyampaikan pendapat, opsi, maupun solusi. Dengan demikian, perempuan menjadi penyeimbang sekaligus mitra sejajar bagi suami dalam mengarungi rumah tangga.

Karena itu, kehadiran Kaukus Perempuan Parlemen hendaknya menjadi titik tolok untuk membuat perubahan lebih baik bagi perempuan. Dengan kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya, Kaukus Perempuan Parlemen dapat menginisiasi upaya untuk mengembangkan kemandirian perempuan di wilayahnya.

Mengutip Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2009, jumlah penduduk hasil registrasi 2008 menunjukkan jumlah perempuan melampaui pria di wilayah ini. Data BPS tahun 2000

menunjukkan dominasi perempuan muncul pada kelompok usia produktif, yaitu 15-39 tahun, dan kelompok usia di atas 55 tahun.

Dengan demikian, target pengembangan kemandirian perempuan harus diarahkan pada perempuan usia produktif dan usia senja. Banyak program yang dapat dirumuskan. Dari aspek sosial-ekonomi, dapat dikembangkan koperasi wanita, pelatihan keterampilan, membangun jejaring, dan pendampingan usaha.

Dari aspek sosial-keagamaan, dapat dirancang program tarbiah yang dapat membawa pencerahan bagi wawasan dan religiusitas. Dari aspek sosial-budaya, dapat dilakukan advokasi bagi janda, warga miskin, dan masyarakat terpinggir serta program edukasi pada komunitas-komunitas melalui kunjungan rutin pada kelompok pengajian, PKK, dan lainnya.

Secara ringkas, membangun kemandirian perempuan bermuara pada pendidikan. Dengan pendidikan, perempuan dapat menemukan aktualisasi diri yang pas bagi dirinya dan keluarga. Dengan pendidikan, perempuan memperoleh sarana untuk menciptakan eksistensi diri dan mengekspresikan gagasan sekaligus membentuk jejaring sosial agar dirinya tidak saja bermanfaat bagi keluarga, tetapi juga bagi orang lain.

Siapa bilang perempuan tak perlu pintar? Siapa bilang ibu rumah tangga tak perlu pintar? Perempuan sesungguhnya adalah madrasah yang mencetak generasi masa depan. Madrasah yang pintar memiliki peluang lebih besar untuk mencetak anak-anak yang pintar. Madrasah yang menguasai ilmu pengetahuan dan mengajarkan keimanan memiliki peluang lebih besar untuk

menghasilkan anak-anak yang unggul dalam pengetahuan dan berakhlak.

Percayalah, semua perempuan sesungguhnya adalah *superwoman*. *Supermom*! Perempuan dapat melakukan *multitasking*. Wajar saja jika ada yang mengatakan kesuksesan pria selalu ada wanita di baliknya. Adagium bahwa hari depan bangsa ada di tangan ibu sulit terpatahkan. Selamat Hari Kartini!

27
SAMPAH[26]

Sampah adalah salah satu masalah perkotaan yang sampai saat ini menjadi persoalan. Fenomena yang ada menunjukkan meningkatnya volume sampah kerap tidak dapat diimbangi oleh kemampuan penanganan. Semakin besar kota, maka semakin besar pula penimbulan sampahnya.

Sebuah tesis pada delapan kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa penimbulan sampah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pengeluaran pemerintah daerah (Pemda). Semakin besar sampah yang dihasilkan daerah perkotaan, maka alokasi dan pengeluaran anggaran pemerintah kota (Pemkot) makin besar pula untuk mengolah sampah.

Namun demikian, tesis lebih lanjut menunjukkan bahwa alokasi dana yang besar untuk pengelolaan sampah tidak serta merta relevan dengan tingkat keberhasilan di lapangan. Faktor lain yang lebih memengaruhinya adalah pola hidup dan budaya hidup dari manusia.

---

26 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 1 Mei 2010.

Di Jember, masalah pola hidup dan budaya hidup sangat kental sebagai penyebab rendahnya keberhasilan manajemen sampah perkotaan. Sebagian warga perkotaan jelas-jelas memiliki perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya. Coba perhatikan di sejumlah jalan yang kerap terlihat ceceran sampah. Yang paling menyedihkan, di jembatan Sungai Bedadung, beberapa kali dapat kita saksikan pengendara sepeda motor melempar bungkusan besar berisi sampah ke sungai.

Ya, masalah sampah bukan monopoli Kota Jember saja. Kebanyakan kota-kota di Indonesia juga mengalaminya. Dalam mengelola sampah, sebagian besar menanganinya secara konvensional, yaitu dengan mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sistem pengolahannya bisa berupa *open dumping, controlled landfill* atau *sanitary landfill*. Hanya sedikit kota yang sudah menggunakan *incinerator* untuk membakar sampah anorganik.

Kabupaten Jember, dalam sepengetahuan saya, juga memusnahkan sampah dengan cara dibakar, meski saya tak tahu pasti apakah proses pembakarannya manual ataukah sudah menggunakan *incinerator*. Yang jelas, TPA di Kecamatan Pakusari yang memiliki luas sekitar 6,7 hektar menjadi sentral dari seluruh TPA yang tersebar di empat titik. Setiap harinya, sebaran timbulan sampah di titik-titik tersebut diangkut ke Pakusari untuk dibakar.

Ya, Kabupaten Jember memiliki TPA di empat kecamatan. Di Pakusari untuk wilayah perkotaan. Untuk luar perkotaan, ada TPA Ambulu (untuk area Ambulu, Jenggawah, dan Wuluhan), Kencong

(untuk area Kencong, Jombang, dan Gumukmas), Tanggul (untuk area Tanggul, Sumberbaru, dan Bangsalsari) serta Rambipuji (untuk area Rambipuji dan Balung). Sayang, hanya TPA Pakusari yang pengolahan sampahnya relatif lebih memadai.

Sebuah literatur menyebutkan bahwa komposisi sampah terbanyak di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah sampah organik sekitar 60-70 persen dan sampah anorganik sekitar 30 persen. Hal ini sesungguhnya juga cermin Kabupaten Jember, Lumajang, dan Bondowoso yang lingkungannya didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan yang menghasilkan sampah-sampah organik. Secara teoretis, sampah-sampah ini sesungguhnya adalah potensi untuk dikembangkan menjadi bahan baku industri kompos.

Kompos memang salah satu teknik yang kerap digunakan dalam manajemen sampah perkotaan. Teknik lainnya antara lain: (1) Menjadikan sampah sebagai pakan dan makanan ternak; (2) *Open-dumping* dengan membuang dan menumpuk sampah pada tanah rendah di area terbuka; (3) *Sanitary landfill* yang mirip dengan *open-dumping* tetapi kemudian sampah tersebut ditutup tanah dan diuruk; (4) *Pulverisation* yang membuang sampah langsung ke laut lepas setelah dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil; (5) *Incineration* yang membakar sampah secara massal yang memungkinkan hasil pembakarannya diubah menjadi energi listrik; dan (6) Fermentasi sampah yang dapat menghasilkan etanol.

Selain menjadi kompos, pengolahan sampah menjadi etanol saat ini juga merupakan paradigma baru. Selain dapat

dimanfaatkan menjadi material yang menyuburkan tanah, kompos secara komersial dapat menjadi peluang usaha. Demikian pula dengan etanol yang berpotensi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Mengelola sampah memang tidak sekadar bicara aspek teknis semata, tapi juga bicara aspek lain. Dari aspek sosial, pengelolaan sampah dapat menyerap tenaga kerja bagi dinas kebersihan. Dari aspek ekonomi, pengelolaan sampah dapat membuka kesempatan kerja baru dalam hal pengumpulan atau jual beli sampah untuk daur ulang. Bahkan besar potensinya untuk didirikan koperasi pemulung. Dari aspek lingkungan, pengelolaan sampah mereduksi polusi limbah padat, cair, bahkan udara. Dari aspek budaya, pengelolaan sampah membawa perubahan paradigma berpikir bahwa sampah adalah beban karena tidak bermanfaat.

Hal mendesak bagi Jember dan sekitarnya dalam mengelola sampah adalah *political will*. Mengingat penanganan sampah sangat kompleks dan melibatkan berbagai sektor, maka dibutuhkan kebijakan politik yang terintegrasi. Perlu dirumuskan program edukasi dan sosialisasi mengenai metode pemilahan sampah organik dan anorganik. Institusi pendidikan, swasta, dan pemerintahan dapat menjadi ujung tombaknya. Berikutnya, perlu dirumuskan payung hukum berupa peraturan daerah (perda) mengenai larangan dan sanksi membuang sampah di bantaran sungai.

Ke depan, pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dari akademisi dibutuhkan kontribusi hasil

penelitian. Dari swasta dibutuhkan pengembangan usaha pengolahan timbulan sampah. Dari Pemda dibutuhkan fungsi penganggaran dalam APBD yang memadai dan regulasi yang mendorong partisipasi masyarakat agar peduli terhadap manfaat pengelolaan sampah.

Sebagai kota yang dijuluki kota religius, malu juga lho, kalau kita tidak mampu menunjukkan 'kebersihan sebagian dari iman'. Sebagai kota yang dijuluki kota santri, malu kalau perilaku kita ternyata suka membuang sampah sembarangan. Apa kata dunia?

28
TEBU & GULA[27]

Katanya, tebu manis rasanya….
Kucoba tanam di pinggir hati….
Sayang sungguh sayang….
Tebu berduri menusuk hati….

Syair lagu yang dinyanyikan almarhum Meggy Z. adalah sebuah kiasan. Namun, syair tersebut bak kenyataan sekaligus membantah pepatah 'ada gula ada semut'. Banyak yang mengira, hidup petani tebu semanis rasa gula. Banyak yang mengira ketika harga gula melambung, maka petani menjadi lebih sejahtera. Realitas menunjukkan tidak sedikit petani yang mengeluh bahwa tingginya harga gula di pasaran justru menyakitkan.

Di Lumajang, Jember, dan Bondowoso, pasti tidak sulit menemukan petani tebu. Petani tebu di wilayah ini menyebar di hampir semua kecamatan. Ya, tiga kabupaten ini masing-masing memiliki pabrik gula (PG) yang menjadi penampung tebu-tebu

27 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 8 Mei 2010.

petani. Di Lumajang, ada PG Jatiroto. Di Jember, ada PG Semboro. Di Bondowoso, ada PG Pradjekan.

Lantaran kehadiran PG ini pulalah yang kadang-kadang menyebabkan kecamatan tempat beradanya PG tersebut menjadi jauh lebih dikenal daripada kabupatennya. Tidak sedikit teman-teman saya di luar kota dan luar Jawa yang lebih mengenal Jatiroto daripada Lumajang. Pertanyaan mereka yang kerap muncul adalah 'Lumajang itu apanya Jatiroto?'. Ya, Jatiroto mungkin menjadi familiar daripada Lumajang karena keberadaan PG di wilayah tersebut.

Berbicara tentang petani tebu, otomatis berbicara tentang gula, baik itu industrinya, tata niaganya, pabriknya, harganya, dan lainnya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pergulaan di Indonesia, rasanya orang awam pun dapat melihat bahwa ada masalah besar pada sektor ini. Kerapnya terjadi konflik pada petani tebu merupakan salah satu bukti nyata adanya carut-marut dari sistem pergulaan di tanah air.

Mungkin masih ada yang ingat September 2009 lalu, ketika sejumlah petani di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, membakar lahan mereka karena protes terhadap kenaikan harga gula? Ya, *gap* yang terlalu dalam antara harga dasar pembelian petani dengan harga gula di pasaran lazim menjadi penyulut protes petani tebu. Ketidakpuasan ini berimbas pada beralihnya sejumlah petani tebu pada profesi lain dan menyusutnya lahan tebu. Terbukti, misalnya di Kabupaten Jember, luas lahan tebu rakyat pada 2008 yang mencapai 7.638 hektar mengalami

penyusutan menjadi 6.058 hektar pada 2009 dan diperkirakan akan menyusut lagi menjadi 4.400 hektar pada 2010.

Persoalan tebu dan gula sesungguhnya adalah masalah klasik. Dari tahun ke tahun, kita selalu dihidangkan persoalan pergulaan, utamanya yang terkait dengan kelangkaan gula dan kebijakan gula impor. Jujur saja, saya tidak begitu paham dengan konflik di tingkat elite maupun lingkarannya yang kerap berbuah kebijakan yang tidak pro-petani dan terkesan tidak mampu menjaga stabilitas harga gula dalam negeri.

Oke lah, untuk urusan elite, kita tidak akan diskusikan itu. Persoalan riil yang ada di depan mata kita mungkin lebih tentang nasib petani tebu, revitalisasi PG, dan masa depan tiga kabupaten ini terkait dengan pergulaan.

Tentang nasib petani, rasanya pemerintah kabupaten (Pemkab) perlu ikut campur tangan dalam memberi stimulus agar petani mau menanam tebu. Sementara itu, PG dan ahli pertanian dapat merekonstruksi pengaturan siklus musim tanam dan musim giling agar terjadi *win-win solution* antara petani dan PG. Hal ini mengingat seringnya musim panen tiba tidak bersamaan dengan musim giling. Akibatnya, rendemen yang semula cukup tinggi malah menyusut karena tergerus waktu. Harga pembelian pun menjadi terjun bebas.

Tentang revitalisasi PG, sebagaimana diberitakan, PG Semboro dan Jatiroto tengah direvitalisasi. Proses gilingnya kini tidak lagi berupa sulvitasi, tetapi sudah mengarah pada karbonatasi yang dapat menghasilkan kualitas lebih baik dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Tentu, ini kabar menggembirakan.

Diharapkan revitalisasi ini diikuti pula dengan transparansi kepada petani terkait dengan rendemen dan meningkatnya harga sewa lahan. Sudah sewajarnya jika produktivitas PG yang semakin baik dapat membawa manfaat ekonomi pula bagi petani tebu.

Tentang masa depan Lumajang, Jember, dan Bondowoso, rasanya Pemkab dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI yang membawahi tiga area ini dan elemen terkait lainnya harus duduk bersama untuk menyusun *road map* pergulaan di wilayah ini di masa mendatang. Rasanya naif jika PG di Lumajang, Jember, dan Bondowoso tak berdaya dan tak lagi mampu menjadi produsen gula. Sama naifnya jika Indonesia masih tak mampu berswasembada gula.

Terakhir, bulan ini kita sudah memasuki musim giling. Hal ini ditandai dengan pesta rakyat yang dikenal oleh masyarakat lokal dengan istilah *royalan*. Semoga saja, pesta ini akan terus ada di tengah-tengah kita. Sudah terlalu banyak isu beredar. Sudah terlalu banyak akumulasi kepentingan yang berbuah ketidakpercayaan satu sama lain. Rasanya, sudah saatnya kita akhiri semua dengan berkompromi guna mencari solusi bagi kebaikan kepentingan yang lebih besar. Kita semua tentu berharap, relasi petani tebu dan PG dapat berlangsung transparan, harmonis, dan era kejayaan swasembada gula di masa lalu di wilayah ini akan berulang serta petani pun tidak perlu menyanyikan lagu Meggy Z. yang lain, "Engkau yang berlabuh, aku yang tenggelam....". *Wallahua'lam bish showab.*

29
PARIWISATA[28]

Libur telah tiba…. Libur telah tiba….
Hore...! Hore...! Hore...!
Simpanlah tas dan bukumu
Lupakan kekesalanmu
Hatiku gembira….

Begitulah mantan penyanyi cilik Tasya berdendang menyambut hari libur. Meski anak sekolah belum secara formal memasuki liburan panjang, tetapi suasana akhir pekan ini bak hari libur. Maklum, hari Kamis kemarin pas tanggal merah dan hari Jumat menjadi hari *'kejepit'*. Jika sudah begini, banyak orang yang akan memanfaatkannya untuk bepergian. Lihat saja di bandara atau stasiun, antrean tiket berjubel. Banyak yang kehabisan. Armada pun ditambah. Hal yang sama akan terjadi kembali dua pekan depan yang hari Jumatnya bertepatan dengan hari libur.

28 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 15 Mei 2010.

Dalam situasi semi liburan seperti akhir pekan ini, *peak season* pada berbagai sarana transportasi publik lumrah terjadi. Sebagian masyarakat memanfaatkannya untuk bepergian ke daerah mengunjungi sanak saudara atau berwisata. Dapat dipastikan, kebanyakan tempat wisata akan ramai pengunjung. Bagaimana dengan Lumajang, Jember, dan Bondowoso?

Posisi geografis, budaya masyarakat, dan sejarah kota yang panjang dan unik memungkinkan tiga kabupaten ini memiliki kelengkapan dan keragaman objek wisata yang tidak dimiliki daerah lain. Secara umum, semua objek wisata dapat diakses dengan mudah oleh wisatawan. Sarana dan prasarananya pun relatif memadai. Sayang, mungkin belum ada pusat informasi pariwisata yang memfasilitasi Lumajang, Jember, dan Bondowoso masuk dalam paket wisata yang berskala nasional dan internasional. Padahal, wilayah kita ini tidak jauh-jauh amat dengan Bali yang merupakan ikon pariwisata Indonesia.

Tidak bisa dimungkiri, Bali seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk wisatawan ke daerah lain. Lihat saja Kabupaten Raja Ampat yang berada di pedalaman Papua Barat membuka pusat informasi di Denpasar guna memperkenalkan wisata baharinya ke dunia. Alasannya sangat logis. Bali sementara ini adalah destinasi utama kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.

Kalau kita simak, pengunjung wisata Lumajang, Jember, dan Bondowoso kebanyakan adalah tamu domestik. Hal ini setidaknya tecermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tamu domestik yang menginap di hotel berbintang

dan melati di Jember mendominasi daripada tamu asing. Jika dirinci, tamu domestik yang menginap di hotel berbintang sepanjang 2007 sebanyak 23.429 orang dan 2008 sebanyak 19.740 orang. Bandingkan dengan tamu asing yang menginap di hotel berbintang sepanjang 2007 sebanyak 475 orang dan 2008 sebanyak 1.190 orang. Sementara itu, di Hotel Melati, tamu domestik yang menginap sepanjang 2007 sebanyak 171.479 orang dan 2008 sebanyak 157.147 orang. Bandingkan dengan tamu asing yang menginap di Hotel Melati sepanjang 2007 yang hanya enam orang dan 2008 sebanyak 111 orang.

Seyogyanyalah, Pemkab-Pemkab menyusun cetak biru pariwisata daerah di tapal kuda yang terintegrasi. Hal ini mengingat kabupaten-kabupaten di wilayah tapal kuda memiliki potensi alam yang nyaris seragam meski masing-masing tetap memiliki kekhasan. Jika dikelompokkan, setidaknya ada tiga jenis wisata yang dapat dikembangkan di wilayah ini.

Pertama, wisata alam. Sebagian besar tempat wisata di Lumajang, Jember, dan Bondowoso dianugrahi potensi alamiah yang layak dikembangkan sebagai objek wisata unggulan. Tempat wisata alam ini kebanyakan berupa pantai, pemandian, air terjun, gua, pegunungan, danau, dan area perkebunan. Wisata jenis ini bisa dikembangkan menjadi wisata agro, wisata *rafting*, wisata ilmiah, atau wisata petualangan.

Kedua, wisata bahari. Rasanya, perairan kita tidak kalah dengan Wakatobi, Bunaken, atau Raja Ampat yang begitu populer menyimpan keindahan bawah laut. Isu yang lagi hangat saat ini adalah pengembangan potensi terumbu karang dalam *Coral*

Triangle (CT). CT adalah kawasan segitiga karang yang meliputi Indonesia, Philipina, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea dan Kepulauan Salomon. Total luas terumbu karang di CT sekitar 75.000 km2. Indonesia sendiri memiliki luas sekitar 51.000 km2 atau menyumbang 18 persen luas total terumbu karang dunia dan 65 persen luas total CT. Dari seluruh jenis terumbu karang yang masih ada di dunia, 53 persennya berada di lautan Indonesia. Saya percaya, perairan yang ada di wilayah Lumajang, Jember, dan Bondowoso yang masuk dalam wilayah lautan Indonesia sesungguhnya juga menyimpan pesona terumbu karang yang belum tersentuh. Yang jelas, wisata jenis ini bisa dikembangkan menjadi wisata olahraga atau wisata selam.

Ketiga, wisata budaya. Wisata jenis ini bisa meliputi wisata ziarah, wisata kampung batik, wisata sejarah atau rangkaian wisata yang diselenggarakan bersamaan dengan *Jember Fashion Carnival.*

Secara keseluruhan, kita bisa lihat bahwa kita tak perlu banyak 'berkeringat' dalam membangun pariwisata di Lumajang, Jember, dan Bondowoso. Rasanya, semua potensi wisata sudah tersedia di sini. Tinggal bagaimana kita menyediakan infrastruktur pendukung dan mengemasnya. Dari aspek ekonomi, membangun industri pariwisata pada daerah yang secara alamiah memiliki potensi sesungguhnya tidak membutuhkan biaya yang begitu besar dibanding industri lainnya. Visi, kreativitas, dan inovasi adalah kuncinya.

Ke depan, kita harus menggandeng mitra untuk membantu mempromosikan tempat wisata Lumajang, Jember, dan

Bondowoso. Sudah seharusnya semua institusi yang terkait dengan pariwisata memiliki tanggung jawab dan kebersamaan di berbagai lini. Sinergi semacam inilah yang kita butuhkan. Bukan hanya menunggu siapa yang harus bertanggung jawab. *Wallahua'lam bish showab.*

30

MAQASID SYARI'AH[29]

Beberapa hari lalu, keluarga besar saya kedatangan tamu dari Sukabumi. Beliau adalah guru ngaji saya waktu kecil dulu di Bontang. Sebut saja namanya Pak Sophian. Pak Sophian menginap di rumah hampir sepekan. Dalam suatu kesempatan, beliau mengatakan bahwa Lumajang sangat sejahtera. Lalu, saya bertanya, *"Kok bisa bilang begitu, Pak?"* Jawabnya, *"Masjidnya bagus-bagus. Nggak ada yang nggak bagus. Musalanya juga."*

Perbincangan sesaat tersebut cukup lama terekam dalam benak saya. Saya cukup bisa memahami cara berpikir Pak Sophian, meski bagi sejumlah pihak mungkin pandangan beliau tak lazim. Tapi mengingat latar belakang beliau sebagai guru mengaji di Masjid Al-Kautsar, masjid terbesar di Komplek PT Badak Bontang, wajar saja beliau menjadikan masjid sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Secara terminologi, sejahtera memang memiliki banyak definisi. Indikatornya pun beragam. Sangat bergantung pada

29 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 22 Mei 2010.

siapa yang menyatakan. Bagi seorang guru agama seperti Pak Sophian, indikator kesejahteraan tidak lagi terukur dari materi semata. Baginya, hal-hal yang bersifat nonmateri sesungguhnya juga adalah bagian dari capaian sejahtera. Keberadaan masjid atau musala tentu bagi beliau bukan sekadar dilihat sebagai sebuah bangunan fisik semata, tetapi juga secara nonmateri menunjukkan sebuah capaian peradaban manusia dalam beribadah pada Sang Khalik.

Dari seorang guru mengaji seperti Pak Sophian, sesungguhnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebutuhan manusia ternyata tidak terbatas pada kebutuhan sebagaimana yang disebutkan Maslow dalam teori hierarki kebutuhan. Maslow menyusun tingkatan kebutuhan manusia dari yang dipandangnya paling krusial. **Pertama,** kebutuhan fisiologis. **Kedua,** kebutuhan keamanan dan keselamatan. **Ketiga,** kebutuhan sosial. **Keempat,** kebutuhan untuk dihargai. **Kelima,** kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Meski Maslow menyatakan teorinya sebagai sebuah sintesis teori yang holistik dinamis, tapi sebagai umat beragama, sudah sewajarnya juga memiliki kebutuhan untuk beribadah. Dari titik tolok ini, kita bisa menemukan bahwa hal-hal yang berbasis pada agama ternyata memiliki parameter capaian kesejahteraan tersendiri.

Dalam *spiritual-economics*, setidaknya ada lima indikator kesejahteraan yang menjadi capaian. **Pertama,** sejahtera dalam menjaga keimanan. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat iman merupakan dasar dalam meletakkan hubungan antar

manusia. Iman memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan sesama dalam keseimbangan dan saling membantu dalam memenuhi kesejahteraan manusia. Iman merupakan filter moral untuk mendistribusikan sumber daya sesuai dengan keadilan sosial-ekonomi dan menjadi motivasi yang memberi kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dan distribusi pendapatan yang adil.

Kedua, sejahtera jiwa. Agama pasti menempatkan setiap makhluk bernyawa pada kedudukan terhormat. Hukum agama memastikan bahwa tidak ada satu pun jiwa yang boleh dihapuskan tanpa sembarang hak. Sekiranya nilai yang tinggi tidak diberikan kepada nyawa manusia, maka akan terjadi kerusakan di dunia. Dalam konteks ini, larangan membunuh diri, membunuh orang lain, dan menghina merupakan salah satu bagian dari memelihara sejahteranya jiwa.

Ketiga, sejahtera akal. Setiap agama sudah seharusnya memosisikan akal sebagai sarana untuk mencapai takwa dan kebaikan. Akal mempunyai tempat istimewa dalam hukum agama karena dengan akal, manusia dapat membuat penilaian dan pilihan bagi kebaikan diri dan masyarakat. Dalam konteks ini, larangan minum minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu merupakan salah satu bagian dari upaya mencapai kesejahteraan akal.

Keempat, sejahtera keluarga/keturunan. Setiap agama tentu mengekalkan nama baik dan kesucian dari masing-masing anggota dalam masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat selamat daripada gangguan yang boleh mengganggu ketenteraman

dan kedamaiannya. Dalam konteks ini, aturan-aturan tentang pernikahan dan pergaulan lawan jenis merupakan salah satu bagian dari upaya mencapai sejahteranya kehormatan dan keselamatan keluarga/ keturunan.

Kelima, sejahtera harta benda. Harta memang bukan tujuan, tetapi harta adalah alat untuk merealisasikan kesejahteraan manusia. Dengan harta, manusia dapat membawa dirinya dan masyarakat ke arah kebaikan bersama. Dengan terlindunginya hak manusia atas harta bendanya, diharapkan manusia dapat memanfaatkan harta benda tersebut untuk menyelamatkan iman demi kepentingan manusia seluruhnya. Dalam konteks ini, larangan mencuri harta orang lain serta kewajiban mencari rezeki materi merupakan salah satu bentuk melindungi kesejahteraan manusia atas harta benda.

Secara keseluruhan, lima indikator kesejahteraan yang disebut *maqasid syariah* ini kerap dipandang berlawanan dengan *mainstream*. *Mainstream* telah sejak awal mengajarkan kita dikotomi antara kegiatan ekonomi dengan keyakinan beragama. Dari *mainstream*-lah, kita belajar bahwa hidup adalah untuk berekonomi. Dari *mainstream* pulalah kita belajar bahwa kegiatan ekonomi adalah persaingan dan mengalahkan.

Untuk itu, menjelang Pilkada Jember 2010, seyogyanya kita mencari seorang pemimpin yang mau dan mampu tampil beda dari kebanyakan *mainstream*. Serbuan kehidupan ala hedonis, materialis, dan kapitalis mengepung Indonesia hingga ke pelosok daerah. Adakah dari kandidat yang paham bahwa PAD, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi bukanlah segalanya

dari kegiatan ekonomi? Bagi kebanyakan *mainstream*, berbicara kesejahteraan tanpa angka sering didakwa sebagai retorika belaka. Padahal, tak semua kesejahteraan dapat terukur absolut. *Wallahua'lam bish showab.*

31

JERUK LOKAL *VS* JERUK IMPOR[30]

Jeruk, kok makan jeruk? Begitulah sebuah iklan minuman rasa jeruk yang dulu sering muncul di televisi. Mungkin pernyataan itu cukup pas untuk menggambarkan fenomena 'perseteruan' jeruk impor dan jeruk lokal belakangan ini.

Harus diakui, jeruk impor kian laris manis. Keberadaannya merajai hampir semua sentra-sentra penjualan buah. Belum lagi dengan pedagang dadakan yang menggunakan mobil untuk menjajakan di ruas-ruas jalan. Ditambah dengan kian menjamurnya pasar ritel modern di wilayah ibu kota-ibu kota kecamatan semakin menambah 'promosi' jeruk impor.

Kehadiran jeruk impor bukannya tak boleh, terlebih dengan adanya perjanjian perdagangan internasional dan *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA) yang melegitimasinya. Namun demikian, tak layak pula jika kita membiarkan petani jeruk lokal harus terjerembab.

Tidak bisa dimungkiri, dominasi jeruk lokal mengalami kemerosotan. Jika secara umum permintaan menciptakan

30 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 29 Mei 2010.

penawaran, yang terjadi dalam 'perseteruan' kali ini tampaknya penawaran menciptakan permintaan. Jeruk impor yang konon tidak mudah busuk, warnanya lebih menarik dan tidak berubah walau dipajang beberapa pekan menjadi pemikat bagi importir dan distributor. Terbukti, meski sebagian besar jeruk impor tergolong mahal, realitas menunjukkan, ternyata peminat jeruk ini kian besar.

Kabupaten Jember dengan Kecamatan Semboro dan Umbulsarinya yang menjadi produsen jeruk tentu sedikit banyak ikut terkena getah dari kehadiran jeruk impor. Ditambah lagi dengan persoalan internal yang tak kunjung teratasi menyebabkan jeruk Semboro dan Umbulsari belum mampu berdigdaya.

Jika disimak, setidaknya ada lima persoalan klasik seputar pertanian jeruk lokal. **Pertama**, rendahnya kualitas dan ketersediaan bibit jeruk. Hingga saat ini, penyedia bibit bersertifikat masih sangat terbatas. Jika ingin membeli, sering kali harus menunggu enam bulan sampai setahun.

Kedua, adanya hama penyakit. Sebut saja Desa Pondok Joyo, Sidomekar, Besuki, Wonoroto, dan Umbulrejo yang petaninya tak mampu berharap banyak dari keuntungan hasil jeruk. Akibat hama penyakit, lahan jeruk yang sehat saat ini tinggal 50 persen. Jika pada 2005 sebanyak 1.305.357 pohon dapat menghasilkan hampir 1.800.988 ton, maka pada 2009 sebanyak 2.094.485 pohon hanya menghasilkan 1.205.052 ton buah jeruk.

Ketiga, perilaku yang tidak sehat. Hal ini pulalah yang kian menyebabkan hama penyakit merajalela. Perilaku petani dalam pemberian pupuk di ambang atas kewajaran serta sistem tebas

jeruk yang melewati batas kemasakan menjadikan tanaman jeruk mengalami kerentanan.

Keempat, modal. Beberapa kali ditemukan petani jeruk yang membutuhkan dana tunai terpaksa menyewakan lahannya. Penyewa inilah yang kerap kali didapatkan melakukan perilaku tak sehat bagi tanaman jeruk demi mengeruk keuntungan berlipat.

Kelima, kualitas warna dan rasa jeruk lokal kerap dinilai belum sebanding dengan jeruk impor. Tentu hal ini sangat subjektif. Gengsi kadang kala juga memegang peran dalam menentukan pilihan. Tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa rasa jeruk lokal jauh lebih manis. Sayangnya, rasa itu sering tak seragam dan warna kulitnya tak begitu memikat.

Jika diperhatikan, sesungguhnya persoalan yang terjadi dengan pertanian jeruk di Jember ini juga adalah persoalan nasional. Keberadaan perjanjian internasional yang ditandatangani pemerintah Indonesia tanpa disadari memfasilitasi jeruk impor memangkas kontribusi pertanian jeruk lokal terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta masa depan tanaman jeruk lokal itu sendiri.

Untuk menyelamatkan pertanian jeruk lokal, setidaknya terdapat beberapa hal penting yang dapat dilakukan ke depan. Dalam jangka pendek, yang bisa dilakukan adalah mencanangkan gerakan mencintai produk buah lokal. Setiap institusi, baik pemerintah maupun swasta, hendaknya menjadikan produk pertanian lokal sebagai menu utama dalam setiap kegiatan. Bila perlu, pasar ritel modern dirangkul untuk berpartisipasi pula dalam penjualannya.

Dalam jangka menengah, pemerintah daerah hendaknya menginisiasi *stakeholder* untuk membangun sarana dan prasarana pendukung pertanian jeruk. Mulai dari penyediaan bibit bersertifikat, pengadaan modal kerja atau investasi, pelatihan penanaman jeruk dengan pola yang benar dan efisien, penyediaan dan penerapan teknologi, peningkatan standar mutu, hingga mempersiapkan industri pengolahan jeruk yang bernilai tambah.

Dalam jangka panjang, seyogyanya petani jeruk ataupun petani buah tropika dan hortikultura mengubah orientasinya, dari sekadar peningkatan produksi menjadi peningkatan konsumsi sekaligus perbaikan dan peningkatan produksi lokal yang berorientasi pasar ekspor dengan tetap mengutamakan ketersediaan pasokan bagi pasar dalam negeri.

Dengan demikian, secara tegas dapat dinyatakan bahwa jeruk adalah komoditas yang potensial. Dari sisi kesehatan, buah jeruk memperkuat dinding pembuluh darah kapiler karena adanya kandungan betakaroten dan bioflavanoid. Pektinnya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL).

Buah jeruk juga sarat flavanoid yang berfungsi sebagai antioksidan penangkal radikal bebas penyebab kanker dan dapat menghalangi reaksi oksidasi LDL yang menyebabkan darah mengental dan mencegah pengendapan lemak pada dinding pembuluh darah. Belum lagi, kandungan gula buah yang dapat memulihkan energi secara cepat serta seratnya yang dapat mengikat zat karsinogen dalam saluran pencernaan. Ringkas kata,

buah jeruk memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Seiring dengan isu santer yang sempat berkembang luas bahwa jeruk impor mengandung *formalin, maka pengawasan intensif untuk melindungi kepentingan publik perlu ditingkatkan. Memang, isu tersebut belum dapat* dijamin kebenarannya. Namun, di Cilegon, Provinsi Banten, hasil pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Serang pernah menunjukkan hasil positif bahwa jeruk yang beredar mengandung bahan kimia formalin yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. *Wallahua'lam bish showab.*

32

WOW, IS IT BANANA'S TREE?[31]

Sepekan lalu, dalam sebuah kelas percakapan bahasa Inggris, sang guru mengajarkan tentang penggunaan diksi pada situasi formal dan nonformal. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dalam suatu proses komunikasi. Namun, ditekankannya, hal terpenting dalam berkomunikasi dengan orang asing adalah keberanian untuk berbicara. Salah dan benar itu urusan nomor dua.

Singkat kata, sang guru ini kemudian berkisah tentang pengalamannya bersama dua orang asing asal Eropa yang tengah melakukan perjalanan keliling dunia dengan mengendarai sepeda. Sang guru ini tak sengaja bertemu *bikers* asing di sebuah minimarket di Lumajang. Setelah *ngalor-ngidul* ke sana kemari, sang guru ini menawarkan *bikers* tersebut menginap di rumahnya. Akhir kalam, selama dua hari, *bikers* ini menginap dan berkesempatan mengunjungi sejumlah wilayah di Lumajang.

Saya kemudian bertanya pada sang guru, "Apa yang paling berkesan dari dua *biker* itu selama di Lumajang?"

31 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 12 Juni 2010.

Sang guru menjawab bahwa dua *biker* kenalannya itu selalu terkagum-kagum melihat buah-buahan di Lumajang. Ketika tanpa sengaja melihat pohon pisang, mereka begitu takjub nyaris tak percaya. *"Wow, is it banana's tree?"*. Ya, di negeri asalnya, mereka juga senang makan pisang, tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana wujud asli dari pohon pisang itu.

Hal yang sama ketika mereka dihidangkan buah jeruk. *"What's name this amazing fruit?"* tanya mereka. *"Oh, this fruit is orange,"* sahut sang guru. *"Oh nooooo, this is not orange. Are you kidding? Look at the colour!"* seru mereka. Ya, buah jeruk lokal kita memang tidak berwarna oranye. Jadi, wajar saja mereka begitu terkejut melihat *orange* yang tidak berwarna oranye.

Apa yang ingin saya ceritakan sesungguhnya bukan tentang bagaimana berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Intisari yang ingin disampaikan dari pengantar tulisan ini adalah betapa kayanya negeri kita. Aneka buah tropis yang lazim ada di sekitar kita, kerap kita pandang sebelah mata. Justru orang asinglah yang dapat melihatnya sebagai sebuah kekayaan atas negeri ini.

Coba kita simak sebuah riset kecil yang dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Osaka, Jepang, tentang potensi pasar produk buah tropis di Jepang bagian barat. Kajian ini dilakukan dengan menyebarkan 250 buah angket kepada responden dari kalangan pengusaha dan investor serta masyarakat Jepang bagian barat yang sering melakukan wisata ke luar negeri. Angket didistribusikan melalui beberapa institusi Jepang yang terpercaya.

Ringkasnya, hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah terbiasa dan menggemari buah-buahan impor. Adapun buah-buahan yang paling banyak disukai masyarakat Jepang wilayah barat adalah buah mangga (50,8 persen), pisang (34,4 persen), dan nanas (12,8 persen) asal Indonesia. Sebagian besar responden ternyata menyukai buah yang disajikan dalam bentuk segar tanpa diolah atau diproses (65,3 persen), lalu buah olahan atau dipotong agar mudah dimakan (23,3 persen), dan kemudian buah kalengan (6,3 persen).

Ketika ditanya tentang keinginannya mengimpor buah dari Indonesia, sebagian besar responden mengiyakan (83,7 persen) dengan alasan rasanya enak, harganya murah, bermutu baik, banyak jenisnya, tidak tumbuh di Jepang, aman bagi kesehatan, banyak manfaatnya, khas tropis, dan unik.

Tidak bisa dimungkiri, dunia mengetahui dan akhirnya mengakui betapa Indonesia begitu kaya. Sayang, kita hanya memiliki, tetapi tidak menguasai kekayaan itu. Kebanyakan dari kita tidak mampu memberi nilai tambah terhadap produk-produk kita. Hasil buah-buahan dijual dengan begitu apa adanya. Akibatnya, orang luarlah yang menikmati hasil terbesarnya karena mau dan mampu memberi nilai tambah.

Indonesia memang merupakan salah satu negara penghasil buah tropis yang memiliki keanekaragaman dan keunggulan cita rasa yang cukup baik bila dibandingkan dengan buah-buahan dari negara penghasil buah tropis lainnya. Hal ini pulalah yang menggenjot ekspor buah tropika nusantara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peluang pasar internasional

memang masih terbuka luas dan belum banyak dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku buah tropika nasional.

Namun demikian, sebagai sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk besar, sesungguhnya kita tak perlu terbuai dengan target dan ekspektasi terlampau tinggi terhadap pasar ekspor. Penduduk Indonesia adalah pangsa pasar komoditas yang sangat besar yang justru banyak dilirik negara lain untuk memasarkan produknya, termasuk produk buah-buahan. Berbagai perangkap dan aturan ekonomi global kerap diciptakan negara maju untuk memanfaatkan potensi pasar kita sehingga produk mereka dengan mudah masuk ke Indonesia. Akibatnya, produk kita sendiri tidak berdaulat dalam pasar dalam negeri.

Singkat kata, buah tropis lokal kita seperti pepaya, nanas, salak, mangga, manggis, semangka, kenitu, dan lain sebagainya adalah aset berharga bagi negara kita. Pemenuhan produk buah tropis merupakan hal pokok yang harus dilakukan sebagai upaya stabilisasi ketahanan pangan nasional yang diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi stabilitas ekonomi daerah, regional, dan nasional. Penduduk Indonesia yang besar harusnya dapat dianggap dan dipandang sebagai potensi pasar yang besar yang perlu dimanfaatkan sebagai suatu kekuatan ekonomi nasional. *Wallahua'lam bish showab.*

33

SEPAK BOLA VS KEBUTUHAN DAPUR[32]

Buat bapak-bapak yang lagi demam piala dunia, saya beritahu, ya. Sudah sepekan lebih, para ibu diliputi gundah karena harga sejumlah kebutuhan dapur naik cukup drastis. Setidaknya, di Lumajang, cabai kecil mencapai Rp20.000 per kilo. Satu buah timun ukuran sedang seharga Rp600. Tiga buah terong seharga Rp2.000. Belum lagi sayuran lainnya yang ikut merangkak naik. Ditambah lagi, beras per kilo yang menyentuh Rp6.000. Di Jember, kurang lebih demikian pula. Ibu-ibu jadi pusing, Pak!

Saya juga bertanya-tanya, kira-kira apa ya, yang menyebabkan harga bahan pangan naik? Padahal, bulan puasa masih dua bulan lagi. Dalam waktu dekat ini, tampaknya juga tidak ada momen hari raya keagamaan. Dugaan kuat tampaknya mengarah pada sejumlah kegagalan hasil panen. Ya, iklim sekarang ini *unpredictable*. Dulu, siklus musim kemarau dan hujan dari tahun ke tahun selalu dalam rentang waktu yang hampir sama. Tapi

32 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 19 Juni 2010.

kini, tampaknya terjadi pergeseran dan tidak bisa dipastikan bahwa hujan terus-menerus tidak akan terjadi di musim kemarau. Rasanya inilah salah satu penyebab utama kegagalan panen bagi petani belakangan ini.

Meski demikian, rasanya tak layak juga jika kita hanya bisa menyalahkan perubahan iklim sebagai penyebab kegagalan panen. Hal lain yang juga krusial adalah ketersediaan pupuk. Nah, bicara tentang pupuk, saya mau cerita sedikit tentang Negara Malawi.

Malawi adalah negara kecil dan miskin di selatan Afrika. Malawi adalah contoh sempurna tentang derita sektor pertanian. Tanah gersang. Kurang hujan. Penduduknya padat. Tahun 2005, kekeringan melanda Malawi. Sepertiga lebih dari penduduknya yang berjumlah 13 juta jiwa perlu bantuan pangan untuk bertahan hidup. Ya, Malawi mengalami bencana kelaparan besar-besaran.

Ketika Bingu wa Mutharika terpilih menjadi presiden, ia memenuhi janji kampanyenya untuk menyelamatkan sektor pertanian dan melindungi petani. Setelah bertahun-tahun dicekoki resep program pertanian ala lembaga keuangan dunia agar pemerintah mereformasi pasar dan menghilangkan intervensi pemerintah pada sektor pertanian, Mutharika memberanikan diri untuk mengabaikannya. Ia mengeluarkan kebijakan pupuk dan bibit gratis. Ia aktif menyokong para petani kecil yang tidak punya uang untuk melakukan investasi. Kompensasi yang diminta Mutharika tak berat. Ia meminta penduduk desa untuk menyumbang tiga karung jagung setiap kali panen untuk membantu program subsidi sekolah.

Demikianlah, ketika kebijakan itu sudah berjalan, musim kekeringan pun perlahan berlalu. Dalam waktu dua tahun, cerita kelaparan dan berbagai keterpurukan lainnya di Malawi berbuah indah. Yang terjadi selanjutnya adalah apa yang disebut Keajaiban Malawi. Sektor pertanian yang semula defisit 44 persen menjadi surplus hingga 18 persen. Malawi kini menjadi pemasok bahan pangan di Benua Afrika.

Pesan penting yang ingin saya sampaikan dari cerita Malawi tersebut adalah pentingnya investasi di bidang pertanian untuk mengurangi kemiskinan, kelaparan, dan berswasembada pangan. Kebangkitan sektor pertanian di Malawi bukan sekadar faktor curah hujan dan kealamiahan lainnya yang kembali normal sebagaimana yang diklaim lembaga keuangan dunia. Fakta empiris menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk dan bibit adalah jawaban utama dari keberhasilan di sana.

Coba kita merenung dan berkaca. Setidaknya, di Lumajang dan Jember, saya mengetahui pasti harga pupuk saat ini melangit. Entahlah, apa lagi yang menjadi penyebabnya. Yang jelas, ini bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Persoalan tersebut menjadi rutinitas tahunan dan dapat dipastikan akan menambah beban biaya produksi petani. Yang menyedihkan, ketika harga produk pertanian menjadi mahal, ternyata tidak berkorelasi positif dengan pendapatan petani.

Contoh paling mudah adalah petani padi. Ketika harga beras melonjak, ternyata hal ini tidak diiringi pula dengan harga gabah yang memadai. Padahal, biaya produksi sudah sangat besar akibat mahalnya harga pupuk. Ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang

tak menentu, maka makin dalam pulalah jatuhnya harga gabah akibat kualitas yang rendah.

Hal senada juga terjadi pada sayur-mayur. Meski wilayah kita mampu memproduksi bawang merah, kubis, kembang kol, sawi, kacang panjang, cabai besar, cabai rawit, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, melon, semangka, dan lainnya, tapi toh tak menjamin tidak adanya kelangkaan dan kenaikan harga. Ini artinya, produksi kita masih belum mampu memenuhi permintaan pasar lokal. Atau bisa juga berarti, produksi kita lebih banyak dilempar ke luar daerah sehingga ketersediaannya di daerah sendiri menjadi langka.

Jadi, kembali lagi pada bapak-bapak yang suka melembur nonton piala dunia, terutama yang biasa merokok. Mohon, Pak, rokoknya dikurangi. Jangan sampai jatah uang belanja kebutuhan dapur ibu bulan ini dikurangi buat membeli rokok untuk melembur nonton bola. Pemenuhan gizi untuk anak harus menjadi prioritas.

Satu lagi, Pak, terutama yang tinggal di Jember yang mau ada perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tolong ya, Pak, bantu memilih calon bupati yang peduli pada sektor pertanian. Terutama, yang punya terobosan program untuk menolong petani dan mau menyelesaikan persoalan klasik yang dihadapi petani. Ya, syukur-syukur kalau ada yang punya visi seperti Malawi. Terima kasih.

34

iB[33]

Di luar negeri, jika kita bertanya tentang bank syariah, yakinlah kebanyakan dari mereka tidak akan memahami apa yang kita tanyakan. Ya, bank syariah yang kita sebut demikian di Indonesia lebih dikenal sebagai bank Islam atau *islamic bank* (iB) di luar negeri. Secara etimologi, harus diakui bahwa istilah yang pas memang adalah iB dan bukan bank syariah karena syariah berarti 'hukum'.

Ngomong-ngomong tentang iB, sekitar dua bulan lalu, seorang *researcher* dari Departemen R&D Bank Syariah Mandiri (BSM) di pusat mengirimkan pesan via Wall ke Facebook (FB) milik saya. Dituliskannya, *"Insyaallah, tahun ini BSM akan mulai beroperasi di Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo, menyusul Jember dan Banyuwangi yang sudah lebih dahulu beroperasi".*

Semalam, saya menanyakan kembali perkembangan rencana operasi BSM ini. Jawaban yang masuk mengatakan, *"Insyaallah segera. Saat ini sedang persiapan sarana dan prasarana serta pengurusan perizinan".*

33 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 26 Juni 2010.

Ya, kabar ini tentu menjadi kabar gembira. Paling tidak, jumlah iB di daerah akan bertambah. Tak melulu berkonsentrasi di kota besar. Dengan semakin banyaknya iB yang beroperasi di daerah, maka masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi bagian dari iB dapat mengakses dan diberi pilihan yang beragam.

Mengacu pada data Kantor Bank Indonesia (KBI) Jember 2008, ada tiga iB yang sudah beroperasi di wilayah Jember, yaitu, Bank Muamalat Indonesia (BMI), BSM, dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Sementara itu, di wilayah Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi masih belum ada. BSM di Banyuwangi baru beroperasi pada 2009. Di Lumajang, sepengetahuan saya, baru ada BNI Syariah.

Bicara tentang iB, memang tidak bisa lepas dari nilai-nilai kelslaman. Namun demikian, iB bukanlah bank eksklusif yang memperuntukkan dirinya hanya untuk kaum muslim. Saya beritahu ya, di Malaysia, sekitar 65 persen nasabah iB adalah kaum nonmuslim yang notabene kebanyakan adalah kelompok etnis Tionghoa. Di Indonesia, hal serupa juga terjadi. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, dominasi kaum nonmuslim, utamanya dari etnis Tionghoa juga sangat besar.

Ke depan, saya optimis, tidak hanya BSM, BMI, dan BNI Syariah yang akan berekspansi ke daerah. Nantinya, akan bermunculan pula Bank Mega Syariah, BCA Syariah, dan yang lainnya. Jika hal ini terjadi, lalu apa artinya?

Kehadiran iB di daerah akan menjadi tidak berarti apa-apa jika pasar yang akan digarap tak berbeda jauh dengan bank umum lainnya. Sebagaimana diketahui, kebanyakan bank umum

saling berebut kue pasar yang sama. Segmen pasar potensial tertentu justru malah kerap dihindari, bahkan tak dilirik sekalipun. Alasannya, karena selain profil risiko yang besar, *bankable* dan *feasible* membuat bank tak bisa berbuat banyak untuk menyalurkan dana.

Jelas, untuk dapat melayani masyarakat luas, maka iB dituntut untuk melakukan inovasi dan berani tampil beda daripada bank umum. Inovasi produk sangat mendesak untuk dilakukan karena terbatasnya produk iB. Produk iB belum mampu menjangkau hingga ke daerah untuk menghilangkan ijon. Padahal, dengan sejumlah akad yang dimilikinya, seperti *salam* atau *istishna'*, iB seharusnya dapat menjadi sarana untuk memberantas kegiatan lintah darat yang mencekik rakyat pedesaan.

Ya, terkait dengan akad-akad mana yang bisa dipergunakan, iB memang sangat bergantung pada dukungan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Pasalnya, fatwa menjadi persyaratan untuk produk syariah agar landasan penerbitannya benar-benar sesuai prinsip syariah.

Namun demikian, di tengah *booming*-nya iB, harus diakui pula masih terdapat sejumlah kelemahan. Tidak jarang, ditemukan layanan yang kerap menimbulkan komplain atau pertanyaan dari nasabah. Jangan heran jika menemukan *front liners* yang tak mampu memberi penjelasan yang baik dan benar tentang keberadaan iB dan produk-produknya. Pula, jangan heran ketika nasabah atau calon debitur mengernyitkan kening karena tak puas dengan penjelasan mengapa perbandingan antara biaya

pembiayaan dari iB tidak berbeda jauh dengan biaya bunga kredit di bank umum.

Ya, iB masih dihadapkan dengan nyata persoalan sumber daya manusia (SDM). Bank berbasis syariah ini di Indonesia baru lahir 1992. Jangan bandingkan dengan bank umum yang sudah muncul sejak puluhan tahun lalu.

Ke depan, setidaknya ada dua tantangan utama bagi iB untuk bisa membuat keberadaannya menjadi berarti di masyarakat. **Pertama,** berbeda dengan bank umum, iB memiliki dua fungsi penting yang setara. Yaitu, sebagai entitas bisnis dan entitas sosial. iB di daerah harus mampu menampilkan kedua fungsi ini sejalan dan tidak berat sebelah. Begitu banyak potensi daerah yang belum tersentuh oleh akses perbankan. Sebut saja, sektor pertanian dan perkebunan yang kerap dipandang sebelah mata, padahal merupakan ujung tombak perekonomian regional.

Kedua, iB dalam menyalurkan pembiayaan mikro hendaknya dapat menjalin program kemitraan dengan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) atau *baitul mal wat tamwil* (BMT) atau lembaga keuangan mikro lainnya. Jangan sampai iB di daerah berebut dan mematikan pangsa pasar lembaga keuangan lainnya. Filosofi dari ekonomi dan keuangan Islam adalah membangun kerja sama, bukan persaingan.

Ketiga, wilayah tapal kuda yang mayoritas adalah kaum muslim, hendaknya menjadi peluang bagi iB untuk memperluas pasar. iB di daerah merupakan *fron tliners* bagi iB nasional untuk mengedukasi dan menyosialisasikan apa dan bagaimana

lembaga syariah. Label syariah hendaknya tidak menjadi ajang komersialisasi, tetapi justru sebagai sarana untuk membangun perekonomian yang berbasis pada sektor riil. *Wallahua'lam bish showab.*

35

PASIR BESIKU SAYANG, PASIR BESIKU MALANG[34]

Sepekan lalu, saya berdiskusi dengan seorang advokat di Surabaya yang kebetulan juga menjabat sebagai anggota dewan pakar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur. Kami bertukar pikiran mengenai rencana investasi penambangan pasir besi di Lumajang.

Secara singkat, saya bercerita tentang kronologi rencana investasi tersebut. Berawal dari PT Indo Modem Mining Sejahtera (IMMS) bersama Hongkong Hani Group (HHG), perusahaan investasi dari Hongkong, yang akan menanamkan modalnya sekitar Rp2 triliun untuk menggarap potensi pasir besi dengan luas lahan delapan ribu hektar di Lumajang.

Untuk membuktikan keseriusannya, IMMS memberikan jaminan uang sebesar US$100.000 atau sekitar Rp1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang. Proses eksplorasi direncanakan dilakukan selama tahun 2009 sampai dengan 2010. Sedangkan proses eksploitasinya diharapkan terlaksana pada

34 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 3 Juli 2010.

2011. Untuk tahap awal, lahan yang akan dieksploitasi sebesar dua ribu hektar.

Dalam perkembangan terakhir, IMMS diberitakan tengah melakukan studi kelayakan tambang pasir besi sembari menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Hingga pertengahan Juni 2010, IMMS masih dalam proses revisi dokumen amdal.

Dari aspek ekonomi, saya menyampaikan bahwa keberadaan investor asal Cina ini besar kemungkinannya berkaitan dengan kelangkaan bahan baku pada industri besi-baja dunia. Kebutuhan Cina akan bahan baku tersebut memang sangat tinggi. Cina sedang giat-giatnya membangun infrastruktur. Pasir besi sebagai salah satu bahan baku besi-baja jelas menjadi incaran.

Yang terjadi sekarang ini, pabrik besi-baja kebanyakan hanya bisa mendaur-ulang besi tua. Cina pun berebut bahan baku tersebut karena Cina membangun banyak pabrik besi-baja di negerinya dengan akselerasi pembangunan yang lebih cepat daripada Indonesia. Banyak investor asal Cina yang sekarang ini memburu pasir besi ke Indonesia, termasuk ke Jawa Timur.

Tidak bisa dimungkiri, potensi pasir besi di Jawa Timur memang tinggi. Sayang, hingga kini belum tersentuh dan dikelola secara baik dan benar. Pemerintah masih kurang responsif terhadap salah satu bahan baku besi-baja yang kini mulai diburu pengusaha besi-baja dunia.

Secara yuridis, menurut anggota dewan pakar Walhi yang juga mantan anggota Tim Investigasi Kasus Lumpur Lapindo tersebut, persoalan serta kegiatan pertambangan mineral, termasuk

pasir besi, diatur dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009. Terkait dengan izin eksplorasi dan eksploitasi pasir besi di Lumajang yang diberikan bupati Lumajang kepada IMMS juga terikat dengan UU Minerba.

Menyimak berbagai pemberitaan di media massa, dia melihat masyarakat di sekitar wilayah pertambangan pasir besi yang diizinkan untuk IMMS tersebut ternyata banyak yang tidak mengetahuinya. Bagi masyarakat yang mengetahui, ternyata tidak menyetujui rencana pertambangan tersebut.

Menurutnya, hal ini mengindikasikan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan kepada IMMS mempunyai cacat hukum karena tidak memenuhi syarat UU Minerba. Dijelaskannya, hal yang penting berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta hak atas informasi maka pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) serta pemberian IUP eksplorasi dan operasi produksi kepada masyarakat secara terbuka**.**

Berikutnya, dia mempertanyakan, apakah IUP yang diberikan Pemkab Lumajang kepada IMMS tersebut memang benar-benar berada di WIUP yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang telah berkoordinasi dengan Pemkab Lumajang. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip hukum tata ruang. Oleh karena itu, peraturan daerah (Perda) tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) IUP yang diberikan kepada IMMS harus secara eksplisit menyebutkan sebagai wilayah pertambangan.

Dijelaskannya, penyusunan RTRW daerah dengan instrumen Perda memang harus mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat (Menteri Pekerjaan Umum). Tujuannya agar RTRW di daerah memiliki muatan materi teknis sesuai dengan RTRW nasional, kebijakan nasional, dan untuk menjamin kesesuaiannya dengan peraturan perundangan dan pedoman di bidang penataan ruang.

Diimbaunya, penetapan suatu wilayah menjadi WIUP dalam RTRW, baik secara nasional, regional, hingga ke tingkat wilayah kabupaten/kota, seharusnya tidak luput dari partisipasi rakyat untuk menentukan dan mengetahuinya. Hal itu didasarkan pada prinsip atau asas demokrasi partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kybernologi (ilmu pemerintahan modern menggunakan paradigma baru), rakyat yang diurus dipandang sebagai *customer* yang harus dilayani dengan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan memberikan ketentuan kewajiban perubahan atau penyesuaian atas izin yang sudah dikeluarkan pemerintah, contohnya surat izin usaha pertambangan daerah (SIPD), namun tetap saja SIPD yang diubah menjadi IUP harus berada di wilayah pertambangan sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan.

Tidak bisa dimungkiri, Pasal 15 UU Minerba memang menentukan bahwa pemerintah pusat dapat melimpahkan wewenang penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) kepada pemerintah provinsi (pemprov). Tapi yang menjadi

pertanyaan, apakah Pemprov Jawa Timur telah diberikan pelimpahan wewenang tersebut. Apabila telah diberikan wewenang, apakah Pemprov Jawa Timur telah menetapkan WUP yang telah dikeluarkan IUP di wilayah yang akan ditambang pasir besinya oleh IMMS tersebut.

Saya bukan orang hukum dan tidak paham hukum. Namun, kesimpulan sementara yang disampaikan oleh praktisi hukum ini patut kita cermati bersama, yaitu pemberian IUP pasir besi di Lumajang oleh Pemkab berpotensi melanggar kaidah-kaidah hukum pertambangan dan hukum tata ruang serta asas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

Ya, itu pendapat dari sisi hukum. Jujur saja, saya lebih tertarik dengan diskusi yang terkait dengan tinjauan ekologis. Saya sepakat, pelaksanaan pembangunan secara nyata kerap mengabaikan prinsip tersebut. Sudah banyak fakta membuktikan, negara ini banyak menghadapi persoalan lingkungan yang membutuhkan biaya sangat besar secara terus-menerus. Belum lagi, kerugian nonmaterial yang diderita para korban perusakan ekologi yang nilai ekonominya tidak terhingga. Seluruh kerugian ekologis ini tidak akan bisa ditutupi dengan pendapatan royalti yang diterima pemerintah karena menyangkut keselamatan masyarakat, termasuk masa depan mereka. *Wallahu a'lam bish showab.*

36

KOPERASI, ANTARA ASA DAN REALITAS[35]

Setelah Indonesia merdeka, pada 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres pertama di Tasikmalaya. Momen itu kemudian oleh pemerintah ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia yang akan diperingati pada hari Senin esok.

Bicara tentang koperasi di Indonesia, rasanya respons kebanyakan orang adalah tanpa ekspresi. Setidaknya, yang saya ketahui pasti di perkuliahan, ketika koperasi disebut sebagai soko guru atau pilar utama perekonomian bangsa Indonesia, maka respons yang muncul biasanya adalah manggut-manggut dan tersenyum simpul. Bahkan, pernah seorang pejabat di otoritas keuangan yang berkomentar, *"Hari begini masih ngomong koperasi...."*.

Tidak bisa dimungkiri, respons tak acuh sebagian orang terhadap keberadaan koperasi di Indonesia tidak lepas dari perkembangannya yang tumbuh merambat. Padahal, koperasi di

35 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 10 Juli 2010.

Indonesia lahir dan tumbuh alamiah sudah sejak zaman penjajahan. Bahkan setelah Indonesia merdeka, koperasi diperbarui dan diberi kedudukan yang sangat tinggi dalam konstitusi.

Bagi seorang Sri Edi Swasono, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian. Ini konsekuensi logis dari ditetapkannya demokrasi ekonomi sebagai paham perekonomian nasional sejak mulai diberlakukannya UUD 1945. Bagi menantu tertua Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, tidak majunya koperasi di Indonesia merupakan akibat dari orientasi dan kebijakan ekonomi kaum teknokrat ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi belaka.

Memang, menyimak sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju dan negara berkembang sangatlah diametral. Di negara maju, koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar. Dengan kekuatannya, koperasi memiliki posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi, termasuk dalam perundingan internasional.

Di negara berkembang, koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra pemerintah dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sayang, dalam konteks Indonesia, koperasi kerap dipandang sebelah mata. Koperasi kerap diidentikkan sebagai badan usaha yang dikelola tidak secara profesional, skalanya kecil, dan kerap merugi. Itu pula sebabnya, lembaga keuangan seperti perbankan enggan berhubungan dengan koperasi. Hal ini tidak lepas dari wacana bahwa perbankan selalu mengucurkan kreditnya

dengan sangat hati-hati, namun sebaliknya, koperasi cenderung mengabaikan risiko.

Di Kabupaten Jember, meski koperasi setiap tahun mengalami pertumbuhan cukup pesat, kita tidak bisa menutup mata masih banyaknya koperasi yang tidak aktif di lapangan. Pernah diberitakan tentang sejumlah koperasi yang dinyatakan tidak sehat dan terancam gulung tikar. Ada pula yang menyalahgunakan pendirian koperasi sebagai kedok bisnis pribadi untuk memperoleh bantuan kredit.

Sepanjang 2009, ada 581 dari 1.372 koperasi di Kabupaten Jember yang tidak aktif. Sebagian ada yang karena ditinggalkan oleh pengurusnya, pengurusnya tidak jelas, atau malah ada lembaga koperasi yang keberadaannya yang menjadi tidak jelas. Tentu penting dalam hal ini bagi Dinas Koperasi dan UMKM untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi yang masih aktif. Koperasi diharapkan tumbuh dan berjalan sesuai dengan fungsinya dan tidak hanya sekadar berdiri untuk mendapatkan legalitas dan fasilitas dari pemerintah dan kemudian mati.

Ya, Pemkab Jember seyogyanya memberi perhatian lebih. Koperasi sesungguhnya adalah salah satu solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Simak saja, perputaran uang dari semua sektor usaha koperasi pada 2008 lalu di Jember yang hampir menyentuh Rp 60 miliar dan sisa hasil usaha (SHU) per tahunnya mencapai Rp 18 miliar.

Sebagai inspirator, mungkin kita bisa melihat inovasi Pemda Sumbawa Barat yang mengembangkan konsep Koperasi Berbasis Rukun Tetangga (KBRT). Pemda setempat pada April

lalu meluncurkan 720 koperasi RT seiring dengan dimulainya peluncuran program Dana Stimulus Ekonomi (DSE) bagi koperasi dan UMKM. Yang menarik dari program ini adalah pemberian dana tanpa adanya agunan kepada bank.

Inspirator lainnya, mungkin kita bisa melihat Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur di Kabupaten Pasuruan yang beranggotakan 3.200 peternak sapi perah. Yang menonjol dari koperasi ini adalah pengelolaannya yang profesional sehingga risiko usahanya dapat dikendalikan. Tak mengherankan bila banyak lembaga keuangan ingin menjalin kerja sama. Dalam operasinya, koperasi ini mempekerjakan 149 karyawan dan didukung armada 10 truk. Koperasi ini memfasilitasi para anggotanya dalam pemeriksaan hewan ternak, kawin suntik, serta penyediaan bibit dan pakan ternak. Selain itu, koperasi ini juga mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan memberikan beasiswa bagi putra-putri para anggota yang berprestasi, membangun sarana ibadah, mengadakan khitan massal atau perayaan keagamaan dan kegiatan nasional.

Ke depan, tentu saja sangat dibutuhkan inovasi bagi para pegiat koperasi untuk membumikan lembaga ini. Rencana Kementerian Koperasi dan UKM untuk merintis terbentuknya koperasi *agro-eco-tourism* patut dicermati. Koperasi ini dimaksudkan untuk mengelola desa-desa wisata di beberapa wilayah di Indonesia. Koperasi model ini konon sudah diterapkan di Jepang dan terbukti mampu mendatangkan lebih banyak wisatawan ke sebuah wilayah. Nah, bukankah kita memiliki kampung batik, desa bunga, kebun kopi, dan sentra-sentra yang

bisa kita jadikan unggulan? Lain waktu, mungkin kita harus membahasnya lebih dalam. Sementara ini, saya mungkin hanya bisa mengucapkan Selamat Hari Koperasi Indonesia. Merdeka!

37
REFORMASI AGRARIA[36]

Jujur saja, saya agak khawatir menulis topik ini pada Perspektif. Tapi, rasanya penting buat saya untuk membahasnya. Bukan untuk memihak. Tapi untuk mengajak semua pihak terkait berembuk agar persoalan yang ada menjadi berujung dan membawa kebaikan bersama. Terlebih lagi, dengan periode baru dari Pemkab Jember yang diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam mengemban amanah masyarakat.

Mungkin, masih ada yang ingat tentang sengketa tanah perkebunan kopi Ketajek seluas 17 hektar antara masyarakat dengan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP), badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemkab Jember? Konon, tanah sengketa tersebut pada mulanya adalah tanah hasil babatan masyarakat pada tahun 1942. Para petani kemudian mengajukan surat permohonan kepemilikan kepada pemerintah. Pada tahun 1964, Kementerian Agraria mengabulkan permohonan tersebut. Namun, sepuluh tahun kemudian, masyarakat pemilik tanah

36 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 17 Juli 2010.

tersebut diusir dari tanahnya karena dijadikan perkebunan oleh PDP.

Pemkab Jember menyatakan, alat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki para petani sudah tak berlaku lagi. Para petani pemilik tanah tersebut dianggap telah merebut dan menduduki tanah perkebunan Ketajek milik PDP.

Jember memang bukan satu-satunya daerah yang mempunyai masalah sengketa tanah antara masyarakat melawan perusahaan daerah, perusahaan negara, pemerintah, atau TNI. Sengketa sejenis ini terjadi merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Menurut catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN), data sengketa agraria hingga tahun 2006 terdiri dari 1.423 kasus, konflik terdiri dari 322 kasus, dan perkara terdiri dari 1.065 kasus. Totalnya menjadi 2.810 kasus. Setelah diverifikasi kembali pada tahun 2007, jumlah sengketa menjadi 4.581 kasus, konflik 858 kasus, dan perkara 2.052 kasus. Totalnya menjadi 7.491 kasus.

Di Jawa Timur, berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sengketa agraria hingga tahun 2006 meliputi 172 kasus. Luas lahan sengketa mencapai ±397.684,09 hektar. Jumlah korban dalam sengketa mencapai ± 363.402 KK atau 1.609.871 jiwa. Cakupan sengketa mencapai 259 desa di 136 kecamatan dan 31 kota/kabupaten. Lawan sengketa terdiri dari 70 pihak pemerintah, 9 militer, 32 perusahaan negara, dan 62 perusahaan swasta.

Dari sisi hukum, kasus sengketa tanah Ketajek memang memiliki keanehan. Pasalnya, tanah yang sudah diberikan haknya

kepada masyarakat petani yang memohon kemudian diberikan pula oleh BPN kepada PDP.

Saya mencoba menanyakan solusi hukum bagi persoalan ini kepada seorang aktivis Lembaga Hukum dan HAM Keadilan Indonesia (LHKI). Disampaikannya, apabila inisiatif penyelesaian administrasi negara tersebut tidak dilakukan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, maka para petani korban sengketa tanah dengan perusahaan perkebunan dan lain-lain yang membuat tanah sengketa menjadi tanah perkebunan, dapat mengajukan uji material UU Perkebunan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini mengingat UU tersebut dalam praktiknya kerap dijadikan alat kriminalisasi sehingga melanggar prinsip HAM dan model ekonomi sosial dalam konstitusi.

Disarankannya pula, rakyat petani korban dapat mengadukan persoalan tersebut kepada Komnas HAM agar dilakukan investigasi mendalam berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM berupa keputusan perampasan hak milik atas tanah para petani, serta tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum yang melakukan kriminalisasi, serta siapa saja pihak yang terlibat.

Tidak hanya itu, rakyat petani korban sebenarnya juga bisa mengajukan upaya hukum berupa gugatan perdata kepada perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha (HGU) tanah sengketa, BPN, serta pemerintah daerah berkaitan dengan cacatnya proses pengumpulan data fisik dan yuridis dalam penerbitan HGU tersebut. Namun, tentu saja upaya ini dapat ditempuh jika hasil investigasi Komnas HAM menemukan fakta cacat yuridis tersebut

dan tidak ada keputusan pemerintah mengenai pemenuhan hak rakyat petani yang menjadi korban.

Dari sisi ekonomi, pemerintah pusat nyatanya telah berkalkulasi bahwa kebijakan pertanahan yang terjadi saat ini telah merugikan negara dan rakyat begitu besar. Menurut catatan BPN, berbagai persoalan tersebut telah menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Secara nasional, luas tanah produktif objek sengketa yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal seluas 6.078.860.000 m^2. Nilai tanah yang menjadi obyek sengketa ini jika dihitung dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah terendah yang setara Rp15.000, maka kerugian negara telah mencapai Rp91,1829 triliun.

Hal lain yang patut dicermati dari berbagai kasus sengketa tanah sejenis ini adalah adanya dalih bahwa penggunaan lahan-lahan sengketa untuk perkebunan adalah dalam rangka memberikan sumber pendapatan negara atau daerah. Argumen ini sepatutnya tak layak dikemukakan, lantaran negara seyogyanya tidak bertindak sebagai korporat. Negara Indonesia bukanlah korporatokrasi. Negara Indonesia secara konstitusional adalah negara yang menganut pahamsosio-ekonomi.

Tidak bisa dimungkiri, keadaan yang terjadi menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan perkebunan berdiri di atas perlawanan masyarakat. Semua ini menjadi benih yang berpotensi bersemai menjadi konflik sosial. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin salah satunya dengan mendorong para wakil rakyat yang berada di Senayan untuk meminta pemerintah menindaklanjuti

rekomendasi Komnas HAM agar segera membentuk Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA). *Wallahu a'lam bish showab.*

38

RUMPUN AKSARA UNTUK ANAK INDONESIA[37]

Beberapa waktu lalu, ketika liburan anak sekolah, saya menjanjikan anak-anak untuk mengunjungi sebuah taman baca di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Dengan modal dua kardus kecil berisi buku-buku pelajaran sekolah bekas, kertas mewarnai, dan sejumlah aneka bacaan, saya mengajak anak-anak berkunjung ke sana.

Taman baca yang kami kunjungi itu bernama Rumpun Aksara. Untuk mencapai lokasi, kami harus melewati jalan setapak, melalui kandang sapi, kambing, dan rumah-rumah penduduk. Taman baca yang berangkat dari ide Rumah Dunia milik Gola Gong, penulis novel Balada Si Roy, memang bertempat di tengah-tengah pemukiman penduduk desa yang cukup padat.

Jangan bayangkan taman baca Rumpun Aksara semegah taman bermain di kota-kota besar. Jika Rumah Dunia mempunyai empat bangunan sederhana untuk perpustakaan anak-anak dan remaja, teater terbuka, dan tempat diskusi, maka Rumpun Aksara

37 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 24 Juli 2010.

hanya memiliki dua bangunan kecil sederhana. Yang satu, dengan ukuran sekitar 2x2 meter berdinding bambu, menumpang pada rumah tinggal. Yang satunya lagi berupa pendopo bambu dengan ukuran sekitar 4x5 meter yang menjadi tempat terbuka bagi anak-anak yang sedang berkegiatan.

Pesan penting yang ingin saya sampaikan dari cerita ini adalah keberadaan Rumpun Aksara sebagai salah satu bentuk pendidikan berbasis masyarakat yang berperan dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu wujud dari desentralisasi pendidikan dan konsep otonomi daerah.

Mengapa swadaya masyarakat untuk membuka akses terhadap ilmu pengetahuan harus dilakukan? Ya, kita tentu tidak ingin menjadi masyarakat pasif yang sekadar menunggu uluran tangan pemerintah yang selalu punya alasan untuk kurang intens dan kurang *trengginas* dalam memenuhi hak atas pendidikan rakyat yang diamanatkan konstitusi.

Hal ini pulalah yang tampaknya dipahami Rumpun Aksara. Dengan berbekal jaringan teman, donatur, dan swadaya seadanya, Rumpun Aksara mengumpulkan berbagai macam buku untuk dijadikan perpustakaan mini. Menariknya, Rumpun Aksara mampu menghimpun sejumlah eksiklopedia padat ilmu yang diperoleh dengan harga sangat murah di toko-toko buku loak di Malang dan Surabaya. Dari perpustakaan inilah, aktivis di dalamnya mengajarkan anak-anak berbagai banyak hal. Anak-anak diajarkan bagaimana membaca puisi, menggambar, mendongeng, bekerja sama, dan diajak untuk meraih cita setinggi langit.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, jumlah penduduk berusia lima tahun ke atas yang tidak/belum tamat SD di Kecamatan Panti, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000, sesungguhnya tidak sebesar kecamatan lain seperti Bangsalsari, Sumberbaru, dan Wuluhan yang mencapai hampir dua kali lipatnya. Namun, mengingat minimnya akses masyarakat, terutama anak-anak, terhadap ilmu pengetahuan, maka kebutuhan untuk mengaksesnya sangat besar di Kecamatan Panti.

Sekilas, kegiatan di taman baca Rumpun Aksara tampak sepele. Tapi percayalah, hal yang tampak kecil ini jika dapat berlangsung secara kolektif dan simultan, maka akan memberi dampak yang signifikan bagi generasi masa depan. Dari budaya membaca, akan tercipta anak-anak yang berpengetahuan luas, dapat berpikir kritis, dan berwawasan global. Dengan terbukanya jendela-jendela ilmu pengetahuan, diharapkan generasi mendatang akan dapat berdiri dengan kaki tangannya sendiri.

Ya, cara berpikir untuk mandiri dan berdiri dengan kaki sendiri adalah barang mahal di negeri ini. Cara berpikir instan menjadi salah satu mental yang membuat bangsa ini tidak produktif. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu indikator betapa sumber daya insani negeri ini membutuhkan peningkatan akses terhadap ilmu pengetahuan. Faktor kemiskinan merupakan problem utama bagi masyarakat untuk mengaksesnya.

Tidak bisa dimungkiri, karena faktor ekonomilah, tidak semua anak memiliki akses yang memadai terhadap ilmu pengetahuan. Karena minimnya ilmu pengetahuan pula, banyak anak di masa

dewasanya yang tak mampu mandiri dalam berekonomi. Atas dasar realitas inilah, maka dibutuhkan peran serta masyarakat untuk menyediakan jendela-jendela ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, diharapkan generasi mendatang memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membangun kemandiriannya dalam berekonomi. Dengan ilmu pengetahuan, diharapkan generasi mendatang dapat melepaskan diri dari ketergantungan dan dapat membangun kedigdayaan ekonomi nasional.

Ke depan, pemerintah daerah perlu meningkatkan perannya untuk mendorong implementasi pendidikan berbasis masyarakat. Sebagaimana tema peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli kemarin, yaitu Gerakan Nasional Indonesia Sayang Anak, maka sepantasnya anak-anak Indonesia diberi kesempatan yang lebih luas untuk mengakses ilmu pengetahuan. Semoga tak perlu waktu lebih lama bagi Rumpun Aksara untuk membiakkan cinta dan cita bagi anak Indonesia kepada yang lainnya. Selamat Hari Anak Nasional!

39

PARIWISATA BUDAYA[38]

Akhir pekan ini, Kabupaten Jember didapuk oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) untuk menggelar Festival Permainan Tradisional Anak-Anak Nusantara. Festival ini merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional sekaligus juga rangkaian kegiatan Pekan Budaya, Seni dan Film (PBSF) 2010.

Permainan tradisional anak-anak memang memiliki nilai budaya tinggi. Permainan tradisional anak-anak merupakan pusaka budaya yang mengandung nilai-nilai keluhuran yang tecermin dari semangat dan filosofi permainannya. Sejumlah permainan tradisional anak-anak, seperti calak cadang, *ganding*, gobak sodor, petak umpet, *bekelan*, dakon *engkle*, dan egrang mencerminkan semangat kejujuran, sportivitas, dan kegigihan. Pesan yang ingin ditanamkan adalah kerja sama dan saling membantu.

Terpilihnya Jember sebagai tuan rumah tentu bukanlah tanpa sebab. Potensi budaya pasti menjadi dasar pertimbangan utama, di samping sejumlah pakar budaya ternama yang berasal dari kota ini.

38 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 31 Juli 2010.

Perspektif kali ini bukan untuk mencoba mendiskusikan topik budaya yang bukan kompetensi saya. Saya ingin mencoba mengulas tentang potensi pariwisata budaya di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Budaya memang menjadi salah satu keunikan sekaligus kekayaan yang dimiliki Jember untuk dikembangkan sebagai industri pariwisata. Keberadaan Jember *Fashion Carnival* (JFC), kampung batik, olahraga tradisional, ditambah lagi dengan potensi budaya di wilayah tapal kuda lainnya, sesungguhnya menjadi embrio bagi pengembangan industri pariwisata budaya regional.

Secara sederhana, pariwisata budaya adalah pengembangan pariwisata yang bertumpu pada kebudayaan. Sebagai sebuah fenomena yang multidimensi, pariwisata budaya juga sangat terkait erat dengan aspek ekonomi. Kaitan ini muncul dikarenakan tujuan pengembangan wisata sesungguhnya lebih didorong oleh motif ekonomi guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Untuk mencapai tingkat ekonomisnya, *stakeholders* harus mampu mengintegrasikan segala aspek yang berhubungan dengan pariwisata, seperti promosi, atraksi, manajemen, makanan, dan cendera mata. Pengintegrasian pengembangan pariwisata dengan sektor lain adalah keniscayaan sebagai salah satu cara untuk menjaga proses pembangunan dan peradaban yang berkesinambungan.

Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam Perspektif sebelumnya, dari aspek ekonomi, membangun industri pariwisata pada daerah yang secara alamiah memiliki potensi sesungguhnya tidak membutuhkan biaya yang besar dibanding industri lainnya.

Semua unsur budaya sesungguhnya adalah komoditas yang bernilai. Visi, kreativitas, dan inovasi adalah kuncinya. Tinggal bagaimana kita menyediakan infrastruktur dan mengemasnya serta melibatkan sejumlah pihak untuk turut serta.

Namun demikian, hal penting yang tak terelakkan untuk didiskusikan dalam membangun industri pariwisata adalah dampaknya. Dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata terhadap kebudayaan tidak terlepas dari pola interaksi di antaranya yang cenderung bersifat dinamis. Kedinamisan tersebut berkembang karena kebudayaan memegang peranan penting bagi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, dan sebaliknya, pariwisata memberikan peranan dalam merevitalisasi kebudayaan.

Tidak bisa dimungkiri, industri pariwisata budaya jika dikelola secara serius akan menjadi alternatif upaya pengembangan ekonomi yang sekaligus menjadi sarana melestarikan budaya daerah. Kehadiran industri pariwisata budaya diharapkan selain dapat menjadi pengungkit dan pilar ekonomi daerah, juga dapat menghindarkan lingkungan dari industri lainnya yang bersifat destruktif secara ekologi yang dapat mengancam keselamatan masyarakat di masa depan. *Wallahua'lam bish showab.*

40

RUMAH TANI, RUMAH KITA, ADA DI SINI[39]

Haruskah kita beranjak ke kota
Yang penuh dengan tanya
Lebih baik di sini, rumah kita sendiri
Segala nikmat dan anugerah yang kuasa
Semuanya ada di sini
Rumah kita…. Ada di sini….

Itulah sepenggal lagu *Rumah Kita* yang pernah dinyanyikan God Bless. Lagu ini tiba-tiba saja terngiang di kepala saya ketika mengikuti forum diskusi dengan *stakeholder* pertanian Kabupaten Jember pada hari Rabu lalu.

Seperti yang diulas *Erje* kemarin selama dua hari berturut-turut, wacana pembentukan subterminal agribisnis (STA) disambut hangat oleh para *stakeholder* pertanian. Hadirnya pasar induk agrisbisnis Puspa Agro di Sidoarjo, ditambah lagi testimoni sejumlah petani yang telah merasakan manfaat di dalamnya,

39 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 7 Agustus 2010.

semakin menguatkan keinginan para peserta forum untuk mewujudkan gagasan Komisi B DRPD untuk mendirikan STA di Kabupaten Jember.

Secara pribadi, saya mengapresiasi gagasan ini. Setidaknya, ada lima alasan utama. **Pertama,** potensi alamiah Kabupaten Jember memang didominasi oleh sektor pertanian. Yang dimaksud sektor pertanian dalam konteks ini meliputi sektor perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, dan pertanian itu sendiri. Sektor-sektor inilah yang secara nyata menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan kontributor PDRB terbesar.

Kedua, sektor pertanian yang menjadi basis utama Kabupaten Jember, ternyata dalam praktiknya tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan komoditas pertanian di Kabupaten Jember itu sendiri. Hal ini tecermin di antaranya dari kelangkaan pasokan yang menyebabkan mahalnya sejumlah produk komoditas. Hal yang sama terjadi pula dalam ruang lingkup Jawa Timur, bahkan juga Indonesia yang tak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan domestik. Dengan kata lain, sektor pertanian masih belum mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Ketiga, dengan memberdayakan sektor pertanian, maka perekonomian daerah diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan iklim *pro-poor, pro-job, pro-growth,* dan *pro-environment*. Inilah ekonomi yang riil. Inilah bentuk konkret dari ekonomi kerakyatan yang selama ini banyak digembar-gemborkan.

Keempat, gagasan mengeliminasi panjangnya mata rantai distribusi yang merusak harga dalam perekonomian adalah

baik. Ekonomi yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen secara langsung diharapkan memberi pengaruh positif terhadap pendapatan produsen dan menghindari kemahalan harga bagi konsumen. Meski sejumlah tengkulak pada praktiknya memberi manfaat dalam pendampingan dan modal, tetapi posisi tawar petani yang lemah kadang membuat tengkulak sering menawar harga sangat rendah.

Kelima, persebaran petani yang tak rapi dan tak terorganisasi menampilkan sebuah kinerja sektor yang terkesan tak memiliki prospek dan sarat risiko dalam sudut pandang lembaga keuangan. Dalam hal ini, Pemkab memiliki tanggung jawab terbesar untuk mengkondisikan sektor pertanian sebagai sebuah sektor unggulan yang memiliki masa depan dan layak untuk diakses oleh lembaga keuangan. Sektor pertanian tak bisa dibiarkan tumbuh sporadis, tetapi harus terintegrasi dan tumbuh secara simultan dan kolektif dalam sebuah kelembagaan pasar yang rapi.

Untuk mewujudkan STA, saya melihat sejumlah persoalan di depan yang menjadi tantangan bersama. **Pertama,** dari aspek hukum. Saya tidak dapat memastikan, tetapi saya berpendapat payung hukum dari STA adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007. Nah, di lapangan, acap kali kita menemukan berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi Perpres ini, utamanya dalam hal zonasi, kemitraan, dan *trading term*.

Kedua, dari aspek teknis. Perlu dirumuskan sejumlah opsi untuk dikaji kelayakannya, manakah yang lepih tepat, menjadikan STA dalam satu lokasi ataukah membuat *link* dan meningkatkan optimalitas terhadap pasar tradisional yang sudah ada. Hal ini

mengingat adanya persebaran pasar tradisional dan *crowd level* yang tampaknya tidak merata.

Ketiga, dari aspek sosial-ekonomi. Perlu dipikirkan bagaimana kehadiran STA dapat merangkul semua pasar tradisional. Kita tentu berharap pasar tradisional dapat menjadi embrio dan tidak dibiarkan mati tak berdaya karena keberadaan STA. Selain itu, perlu dipikirkan juga bagaimana agar petani dapat diberi kesempatan yang sama untuk bisa menikmati los dan stan STA. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak hanya pemilik modal saja yang dapat menyewa dan ditampung oleh STA.

Keempat, dari aspek operasional. STA sesungguhnya adalah model praktik pemerintahan korporat di mana pemerintah bertindak sebagai "pedagang jasa penyedia tempat" yang memungut uang sewa (melalui BUMD pengelola) yang bisa secara sepihak menentukan tarif sewa berdasarkan keputusan politik daerah. Perlu disepakati oleh para *stakeholder* untuk merumuskan hal ini agar mekanisme yang ada memberi *win-win solution*. Tentu saja, Pemkab seyogyanya tidak bertindak sebagai korporatokrasi yang mengedepankan *profitable* daripada tanggung jawab sosialnya.

Kelima, dari aspek keuangan. Perlu dipikirkan bagaimana membuat skema agar STA ini dapat terwujud dengan tidak hanya bersumber dari APBD semata. Perlu dipikirkan juga bagaimana agar para petani yang bernaung di STA dapat difasilitasi untuk mengakses lembaga keuangan, utamanya perbankan. Sepertinya, kita patut mempertimbangkan keberadaan koperasi sebagai jembatannya.

Ke depan, kita semua berharap, STA dapat menjadi model kelembagaan pasar yang dapat bekerja untuk menghindarkan para pelaku di dalamnya dari *asymmetric information,* sehingga tercipta keadilan dan kemerataan dalam penguasaan sumber daya, informasi, pasar, modal, dan jaringan. Diharapkan pula, akan muncul praktik *hisbah* di masa lalu yang berfungsi sebagai pengawas yang adil dalam lalu lintas perdagangan. Secara keseluruhan, ini semua akan menjadi pilar dalam membangun kedaulatan ekonomi petani dan sektor pertanian di rumah kita, di sini, di Kabupaten Jember. *Wallahu a'lam bish showab.*

41

MARHABAN, YA KONSUMTIVISME[40]

Bulan puasa telah tiba. Puasa yang sejatinya adalah pengendalian diri, ternyata tak berkorelasi dengan menurunnya permintaan berbagai kebutuhan. Marhaban ya Ramadan justru berkorelasi dengan Marhaban ya Konsumtivisme.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Mas-Mas, Mbak-Mbak, tiga hari kemarin, menu buka puasanya apa saja? Saya yakin, pasti menunya berbeda daripada hari-hari biasa. Yang hari biasa minum air putih atau segelas teh, pasti sedikit banyak berubah menjadi es buah, es kolang kaling, es cao, soda gembira, setup, kolak, sirup, jus atau yang lainnya. Begitu juga yang hari biasa makan dengan tahu tempe atau sayur secukupnya, pasti sedikit banyak kini berubah menjadi hidangan lauk pauk dan masakan sayur beraneka ragam.

Ya, sajian kala berbuka puasa memang lazim beraneka warna. Perubahan yang terjadi tidak hanya dari sisi kualitas, tetapi juga

40 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 14 Agustus 2010.

kuantitas. Pada tataran inilah yang secara agregat memengaruhi keseimbangan penawaran dan permintaan di pasar. Pola yang selalu menunjukkan titik keseimbangan, selama bulan Ramadan berada di atas keseimbangan normal.

Tahun ini, kenaikan harga berlangsung dalam rentang waktu yang lebih panjang dari biasanya. Mulai dari liburan sekolah, tahun ajaran baru, kemudian berlanjut dengan kenaikan harga bahan pangan akibat terganggunya pasokan karena kegagalan panen dan sejumlah persoalan di bagian hulu.

Tak lama berselang, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) kembali memicu kenaikan harga produk sebagai dampak ikutannya. Kenaikan ini masih akan terus berlangsung hingga bulan puasa dan Lebaran. Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan telah memperingatkan untuk mewaspadai adanya inflasi yang tak terkontrol pada rentang bulan Juli hingga September. Selama periode ini, inflasi diperkirakan akan mencapai titik tertinggi karena banyak faktor yang mengerek inflasi.

Meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikannya, tetapi fenomena inflasi seolah tak bisa lepas dari bulan Ramadan. Diduga kuat, kenaikan harga barang secara umum ini sesungguhnya bukan disebabkan oleh kebutuhan riil, melainkan lebih pada perilaku konsumsi.

Jika dijabarkan, perilaku konsumsi di bulan Ramadan terbagi ke dalam tiga motif. Yaitu, motif konsumsi kebutuhan primer, motif konsumsi kebutuhan sekunder/tersier/mewah, dan motif konsumsi kebutuhan untuk ibadah/beramal saleh.

Sejatinya, datangnya bulan Ramadan memberi dorongan besar untuk menghadirkan motif konsumsi kebutuhan untuk ibadah/beramal saleh. Dana yang dibelanjakan tentu akan meningkat untuk kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, peningkatan jumlah belanja kebutuhan untuk ibadah/beramal saleh tidak mustahil juga dapat mendorong lonjakan harga. Namun demikian, *impact* yang terjadi sesungguhnya adalah distribusi pendapatan yang berkeadilan karena terjadi transfer pendapatan antara kelompok masyarakat yang mampu kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Hal demikian tidak akan terjadi pada perilaku konsumsi dengan motif yang lain.

Realitas menunjukkan, motif yang banyak ditemui di bulan Ramadan adalah motif konsumsi kebutuhan primer. Hal ini tecermin di antaranya dengan lonjakan harga dan tingginya permintaan kelompok bahan makanan, makanan jadi, dan sandang pada hampir seluruh mata rantai distribusi. Bagi kelompok masyarakat bawah, dampak besar kenaikan harga kelompok bahan makanan dan makanan jadi akan sangat dirasakan karena lebih dari separuh belanjanya untuk makanan.

Keadaan ini kian diperparah pula oleh faktor ekspektasi inflasi yang juga menjadi faktor lain pendorong inflasi di bulan Ramadan. Faktor ekspektasi inflasi inilah yang memengaruhi perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam membuat keputusan kegiatan ekonomi. Momen seperti ini pulalah yang membentuk perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang. Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, tapi harga

barang dan jasa pada saat-saat Ramadan umumnya meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* normal.

Tidak bisa dimungkiri, banyak rumah tangga yang memosisikan bulan Ramadan, apalagi lebaran, sebagai *special day* untuk dirayakan dengan menghadirkan sejumlah aneka hidangan dengan pakaian dan perangkat ibadah baru. Hal ini tidak sepenuhnya salah, tetapi menjadi tidak benar jika perilaku yang muncul menjadi berlebihan. Islam tidak pernah mengajarkan adanya momen yang harus diistimewakan, termasuk bulan Ramadan dan lebaran, dengan konsumsi yang berlebihan, apalagi di luar batas kemampuan.

Ketika keinginan menyetir kebutuhan secara berlebih, maka keinginan itu telah berubah wujud menjadi hawa nafsu. Padahal, bulan puasa pada hakikatnya adalah fase untuk berlatih mengendalikan hawa nafsu. Namun, kenyataannya, yang terjadi setiap kali bulan puasa datang adalah perilaku yang tidak terkendali dalam kegiatan konsumsi. Memang, pada akhirnya peningkatan konsumsi ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun sejatinya yang terjadi bersifat semu.

Oleh karena itu, perilaku konsumsi individu dan rumah tangga memegang peran penting dalam menyetir permintaan dan penawaran agregat di bulan Ramadan. Perilaku konsumsi yang sewajarnya dapat menangkis eksploitasi produsen yang gencar menawarkan produknya. Justru di bulan Ramadan, kita harus belajar untuk tidak mudah tergoda iklan. Seyogyanya, bulan Ramadan menjadi sarana untuk meningkatkan motif konsumsi ibadah/beramal saleh dan bukan malah mendorong motif

konsumsi kebutuhan primer, apalagi motif konsumsi kebutuhan sekunder/tersier/mewah. Kalau ini yang terjadi, maka memang tepat kita mengatakan '*Marhaban ya Ramadan*' dan bukan '*Marhaban ya Konsumtivisme'. Wallahua'lam bish showab.*

42

DULU AKU SUKA PADAMU.... (YA YA YA)[41]

Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka (ya-ya-ya)
Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila (ya-ya-ya)
Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku (o-o, o-o)
Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku (o-o, o-o)

Ada yang bisa menebak judul tembang di atas? Ya, betul sekali. Itu lagu *Miransatika*-nya Raja Dangdut Indonesia, Rhoma Irama. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menggemari Bang Rhoma, pastilah bisa melanjutkan dendang tersebut. Pesan penting yang ingin disampaikan Bang Haji tecermin pada larik akhirnya. *Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila.... Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah.... Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan…. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan.....*

41 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 21 Agustus 2010.

Bukan tanpa sebab saya mengawali tulisan ini dengan berdangdut ria ala Pak Haji Rhoma. Pesan moral yang disampaikan Pak Haji tentang dampak minuman keras (miras) rasanya patut mendapat tempat dalam Perspektif di bulan Ramadan kali ini. Terlebih, mengingat kian santernya peredaran miras di sejumlah pasar ritel modern yang meresahkan beberapa pihak.

Keresahan akan miras yang ingin saya ulas ini bermula dari seorang kolega yang menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Jember. Ia menyampaikan temuannya di sejumlah minimarket di wilayah tapal kuda yang menjual secara bebas minuman beralkohol. Melalui diskusi panjang dengan rekan lainnya yang mendalami biokimia, saya mengetahui bahwa minuman beralkohol dengan kadar rendah bersifat akumulatif. Artinya, minuman tersebut jika dikonsumsi terus menerus akan membuat dampak yang sama besarnya bagi orang yang minum dengan kadar yang tinggi.

Sebelumnya, saya pribadi pernah mendapati minimarket yang menjual bebas minuman tersebut. Sayang, saya lupa di mana persisnya. Entah di Surabaya, Lumajang, atau Jember. Maklum, rutinitas mengelilingi tiga kota ini membuat saya kerap lupa masuk minimarket di wilayah mana. Yang jelas, ketika saya bercerita tentang penjualan bebas miras ini, rekan-rekan di Surabaya mengamini keberadaannya. Ternyata, bukan hanya minimarket di wilayah tapal kuda saja yang disinyalir melakukan penjualan bebas tersebut.

Persoalan miras sesungguhnya adalah cerita pilu. Kerap kali, media memberitakan penggerebekan pesta miras yang dilakukan

sekelompok anak muda, bahkan anak sekolah yang sudah turut mengonsumsinya. Tak jarang pula kita mendapati berita tentang warga yang tewas akibat minum miras oplosan. Tentu ini sangat memprihatinkan. Pantaslah jika pihak kepolisian menabuhkan genderang perang terhadap peredaran miras.

Sayang, payung hukum kita konon hanya memberi sanksi wajib lapor bagi pengedarnya dan tidak ada sanksi hukuman penjara. Bahkan, dalam suatu diskusi, ada yang mengatakan bahwa secara nasional memang belum ada peraturan yang secara tegas melarang menjual, menyimpan, membuat, dan mengonsumsi miras. Padahal, peraturan ini sangat dibutuhkan, mengingat peredaran miras sudah sedemikian tidak terkontrol. Miras dapat ditemui di mana saja dan dapat dibeli oleh siapapun.

Regulasi yang kerap menjadi acuan peredaran miras selama ini adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Meski Keppres ini menyatakan pelarangan untuk mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dengan sejumlah persyaratan, tapi dalam implementasinya banyak terdapat ketidakbenaran. Pasalnya, pemerintah pusat memberi wewenang kepala daerah menetapkan tempat-tempat yang diizinkan dan tidak sebagai tempat peredaran miras.

Tidak hanya itu, kelemahan lain dari Keppres ini adalah izin bagi pemerintah pusat melalui Departemen Perdagangan dan Perindustrian untuk berkoordinasi dengan daerah melalui kepala daerah. Artinya, aturan-aturan ini sesungguhnya memberi ruang bagi peredaran miras. Hukum melegalkan semua itu atas dasar

ketetapan atau keputusan para pejabat administrasi negara. Pada titik inilah yang berpotensi untuk memunculkan kolusi antara pengusaha miras dengan pejabat administrasi negara.

Saya tidak tahu, apakah di wilayah tapal kuda ini terdapat peraturan daerah (Perda) yang mengatur peredaran miras. Namun, jika ternyata memang terdapat pasar ritel modern di wilayah ini yang menjual bebas, maka artinya ada dua kemungkinan. **Pertama**, mungkin memang terdapat ketetapan kepala daerah setempat yang mengizinkannya. **Kedua**, mungkin tidak ada ketetapan, sehingga minim pengawasan.

Seorang ahli hukum menyampaikan pada saya, legalisasi miras oleh pemerintah menggunakan hukum tertulis. Kalau bicara tentang hukum Indonesia, sebenarnya hukum yang tertulis itu belum tentu merupakan hukum yang bernilai benar. Hukum tertulis seharusnya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan diakui masyarakat serta bukan sekadar produk regulasi kekuasaan yang cenderung merupakan produk politik yang sewenang-wenang dengan tendensi tertentu.

Ketika saya mencari tahu daerah-daerah mana saja yang memiliki Perda Miras di Om Google, ternyata memang tidak banyak yang memilikinya. Setidaknya, Bekasi, Cilacap, Blitar dan Subang sudah mencoba melakukannya. Bahkan, legislatif di Blitar saat ini tengah mengusulkan perda yang lebih tegas melarang segala praktik jual beli miras.

Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tidak bingung dengan posisi saya yang menjadi kolumnis ekonomi kok, *ndilalah* banyak bicara hukum. Tidak, Pak, Bu, saya tetap mengulas ekonomi.

Catatan penting yang ingin saya sampaikan dalam Perspektif hari ini adalah lazimnya legalisasi kegiatan-kegiatan yang meski secara agama, sosial, dan kesehatan membawa mudarat, tetapi sering dikalahkan oleh pertimbangan ekonomi. Dan, kerap kali pemerintah pusat kita dengan atas nama penerimaan negara dan pemerintah daerah kita dengan atas nama pendapatan asli daerah (PAD) melindungi kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya merusak moral dan masa depan generasi kita. *Wallahua'lam bish showab.*

43

TKI DAN MASA DEPAN MEREKA[42]

Saya : Mau mengurus paspor, Mbak?

TKI : Iya, saya mau perpanjangan.

Saya : Kerja di Malaysia ya, Mbak?

TKI : Iya, saya pernah kerja lama di sana. Ini mau ke sana lagi. Kalau Mbaknya?

Saya : Saya mau ngurus untuk keperluan sekolah.

TKI : Mbaknya ini perpanjangan atau baru pertama kali buat paspor?

Saya : Baru pertama kali.

TKI : Hah...? Berarti Mbaknya belum pernah ke luar negeri, dong?!

Ya, saya masih ingat betul percakapan yang pernah terjadi sekitar tiga tahun lalu di ruang tunggu Kantor Imigrasi Kabupaten Jember. Saya bermaksud mengajak ngobrol perempuan yang duduk di sebelah saya. Niat baik untuk menyapa ramah, ternyata berbuntut kedongkolan. *Hehehe,*

42 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 28 Agustus 2010.

betapa tidak? Ekspresi perempuan itu membelalakkan mata ketika mendengar saya belum pernah ke luar negeri. Entahlah, respons demikian karena memang tak percaya atau menertawakan. Yang jelas, perempuan itu kemudian fasih bercerita tentang bagaimana negeri jiran yang selalu disebutnya "luar negeri" itu.

Bisa jadi, perempuan yang pernah saya temui dulu itu memang benar adanya meraih "sukses" di Malaysia. Meski gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia adalah yang paling rendah dibandingkan negara lain, namun hal tersebut tidak menyurutkan kebahagiaannya yang akhirnya dapat memiliki rumah, sepeda motor, dan sapi. Karena "kesuksesan" itu pulalah, dia bermaksud kembali ke sana, bahkan berencana mengajak sanak saudara untuk ikut serta.

Ya, jika kita simak, gaji TKI di Malaysia termasuk yang paling rendah. Sebuah media pernah merilis, gaji TKI di negeri jiran berkisar antara 400-500 ringgit. Sedang di Hongkong berkisar 1.631 ringgit (3.600 dolar Hongkong), Singapura 737-858 ringgit (300-350 dolar Singapura), Taiwan 1.649 ringgit (15.400 dolar Taiwan), Arab Saudi 564-749 ringgit (600-800 real), dan Kuwait 1.223 ringgit (100 dinar) per bulan.

Tidak bisa dimungkiri, kisah TKI penuh warna dan problem. Tak selalu berbuah manis seperti yang diceritakan perempuan yang saya temui itu. Sering pula kita dapati, cerita pilu nan tragis dari mereka. Dari Kabupaten Jember saja, termasuk cukup sering kita dengar kisah TKI yang bermasalah. Mulai dari hidup mereka yang terlantar, gaji tidak dibayar, hingga yang tewas akibat kekerasan fisik dari majikan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, di bulan puasa, dana remitansi atau pengiriman uang lewat bank oleh TKI cenderung meningkat hingga menjelang lebaran. Di Jawa Timur, nilai remitansi ini cukup tinggi. Hal ini mengingat jumlah TKI yang berasal dari Jawa Timur cukup dominan.

Sepanjang tahun 2007, jumlah penempatan TKI di luar negeri tercatat sebesar 684 ribu orang atau naik lima persen dari periode sebelumnya. Dari data tersebut, sekitar 58 ribu atau hampir 10 persen berasal dari Jawa Timur. Dengan stok TKI yang mencapai 4,3 juta orang pada 2007, maka penerimaan devisa dari remitansi TKI diperkirakan sebesar US$5,9 miliar. Jumlah tersebut mencapai sepertiga aliran masuk penanaman modal asing *(inflow-foreign direct investment*) dan melampaui utang luar negeri pemerintah.

Sementara itu, rilis data Bank Indonesia (BI) Jember yang pernah sampai di media, mengungkap pengiriman uang oleh TKI melalui perbankan di wilayah kerjanya pada 2009 sebanyak Rp193,113 miliar. Angka ini tentu seharusnya jauh lebih besar lagi karena belum memperhitungkan transaksi di luar bank, seperti dibawa sendiri atau dititipkan ke saudara, kerabat, dan teman.

Secara nasional, dengan terus meningkatnya jumlah TKI di luar negeri menyebabkan studi mengenai pekerja migran dan remitansi semakin intens. Hal ini mengingat masih sulitnya memprediksi nilai remitansi secara akurat serta menghitung dampak positifnya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di daerah asal pekerja.

Meningkatnya pengiriman dana oleh TKI memang bersifat musiman (*seasonal)*. Berbeda dengan tenaga kerja di ibu kota

yang mengumpulkan dana dari gajinya, lalu dibawa pulang saat mudik lebaran, maka TKI pada hari lebaran biasanya tidak bisa pulang karena belum dapat izin atau adanya kontrak kerja. Mereka baru bisa kembali dalam jangka waktu tertentu.

Ya, bagi sebagian orang, terutama di desa, menjadi TKI bisa menjadi impian. Meski mereka tidak ingin menjadi TKI selamanya, tapi menjadi TKI adalah pilihan yang harus diambil untuk mencari penghidupan. Namun demikian, bagi mereka yang telah mewujudkannya dan berhasil melakoninya dengan baik, tak jarang harus menghadapi kenyataan pahit. Pasalnya, ketika uang yang mereka kumpulkan sudah berwujud aset dan digunakan untuk kepentingan rumah tangga, mereka terpaksa harus kembali menjadi TKI karena tidak tahu harus mengerjakan apa di daerah asalnya. Padahal, di saat yang sama, uang mereka telah habis.

Ya, menjadi wirausaha adalah pilihan paling logis bagi para mantan TKI. Dengan jalan ini, diharapkan dana yang mereka kumpulkan tidak habis dikonsumsi, tetapi dapat diinvestasikan atau diputar untuk menghasilkan keuntungan ekonomi berkelanjutan. Kabarnya, beberapa perbankan sudah melirik potensi TKI dengan memberi kesempatan bagi mereka untuk memperoleh bantuan kredit usaha mikro (KUM) guna membuka usaha sendiri setelah menjadi TKI purna.

Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi TKI purna. Kebanyakan TKI purna umumnya sudah memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup memadai sebagai modal untuk membuka usaha

mandiri. Namun, semangat dan motivasi yang kerap kali menghalangi mereka untuk percaya diri memulai usaha.

Ke depan, salah satu hal mendesak yang perlu segera dilakukan adalah membangun bank data TKI dan jaringannya. Hal ini penting dilakukan untuk mendeteksi secara akurat keberadaan TKI sejak penempatan, masa penempatan, dan setelah penempatan. Tujuannya tak lain agar dapat mengoptimalkan upaya untuk memberi perhatian dan perlindungan hukum terhadap TKI dan masa depannya. *Wallahua'lam bish showab*.

44

EKONOMI MUDIK[43]

Lantunan lagu Opick berjudul *Ramadan Tiba* menjadi pengantar para penumpang kereta api Sancaka Sore saat itu. Ya, saya yang dalam pekan ini melakukan perjalanan ke Yogyakarta menggunakan Sancaka Sore merasakan sekali hangatnya suasana Ramadan. Ketika tiba waktu berbuka, petugas kereta menyampaikannya kepada para penumpang dengan pengeras suara. Para penumpang yang sedang berpuasa pun bergegas menyantap bekal berbuka yang dibawa.

Selisih tiga hari, saya kembali ke Surabaya masih dengan kereta api. Namun, kali ini dengan Mutiara Selatan. Cukup melelahkan. Saya merasa seperti pemudik. Bukan karena menanti lama di Stasiun Tugu hampir empat jam kala dini hari. Bukan juga karena harus menahan kantuk karena kereta telat hingga 1,5 jam. Tapi karena harga tiket yang mencengangkan karena naik berlipat-lipat sehingga membuat kantuk saya hilang seketika.

Ya, naiknya harga tiket hanya salah satu fenomena kegiatan ekonomi menjelang lebaran. Banyaknya pengguna loyal jasa

43 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 4 September 2010.

transportasi massal yang murah seperti kereta api adalah potensi bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan. Tidak hanya dalam bisnis transportasi, dapat dipastikan semua lini prosesi mudik dan sektor usaha, semakin mendekati hari lebaran sudah dikepung begitu rapat oleh kapitalisme. Tiada ruang yang dibiarkan oleh pemilik modal untuk tidak diberi sentuhan kapital.

Secara filosofis, kegiatan mudik bagi masyarakat perantau adalah sebuah kewajiban. Kegiatan ini bagi mereka adalah penyambung silaturahmi yang memberi energi baru untuk melanjutkan kehidupan di tanah perantauan. Tahun ini, angka pemudik secara nasional diperkirakan mencapai 16,3 juta jiwa atau naik sekitar 50 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya.

Secara teknis, mudik adalah sebuah proses redistribusi ekonomi. Mudik mampu menggerakkan roda perekonomian berupa penyebaran perputaran uang hingga ke seluruh pelosok negeri. Banyak sisi telah ikut meramaikan dan mereguk manfaat dari ritual pulang kampung ini. Mudik telah melibatkan kapital yang berkekuatan besar dan membawa dampak sosial ekonomi yang signifikan meski kadang hanya bersifat temporer. Yang jelas, perpindahan uang ini sesungguhnya adalah peluang untuk menggerakkan sektor riil di daerah dan menciptakan ekonomi tinggi serta peningkatan PAD.

Sayang, arus uang yang masuk ke daerah selama ini belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Pemudik cenderung berperilaku konsumtif dengan membelanjakan dananya untuk kepentingan bernilai rendah dan jangka pendek serta kurang bermanfaat bagi kesinambungan ekonomi. Jarang ditemui pemudik yang memiliki

rencana jangka panjang dengan mengirimkan uangnya ke desa untuk dikelola sebagai usaha-usaha produktif.

Bisa jadi benar, mudik adalah wajah kegagalan kita mentransformasi sektor pertanian menjadi industri agribisnis. Bisa jadi benar, mudik adalah wajah kegagalan kita menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan sumber-sumber keunggulan baru perekonomian. Bisa jadi juga, mudik adalah wajah kegagalan kita menciptakan lapangan pekerjaan yang manusiawi hingga memaksa belasan juta orang berdiaspora hingga ke ujung belahan dunia, meninggalkan sanak keluarga untuk sekadar menyambung nyawa. Ya, bisa jadi benar, mudik adalah wajah kegagalan kita mewujudkan kemerataan yang berkeadilan sosial.

Dari tahun ke tahun, kita sibuk menghadapi mudik sebagai sebuah ritual yang tak bersahaja. Begitu banyak sumber daya yang terserap dan habis untuk kegiatan yang satu ini, mulai dari waktu, bahan bakar, juga uang tabungan. Bagi kelompok masyarakat yang berada pada kelas menengah ke bawah, mereka bahkan sampai merelakan mengurangi pengeluaran kesehatan, pemenuhan gizi, bahkan pendidikan demi mudik. Belum lagi jika kita menghitung ongkos sosial akibat meningkatnya kriminalitas, kecelakaan transportasi yang menelan korban harta dan jiwa, hingga kemacetan luar biasa di berbagai jalur mudik.

Sungguh, kegiatan mudik yang memiliki arti ekonomi cukup strategis ini akan menjadi semakin tidak berarti apa-apa jika tidak dikelola secara terpadu dan menyeluruh. Jika kita kalkulasi jumlah pemudik tahun ini membawa pulang uang senilai Rp1 juta, maka 16,3 juta pemudik itu secara nasional bernilai triliunan rupiah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah hendaknya memiliki inisiatif untuk memanfaatkan potensi dana yang masuk ke daerah. Pemerintah hendaknya sudah mulai berpikir bagaimana agar dana tersebut tidak menguap begitu saja atau berpindah kembali pada pemilik modal besar atau kembali hanya berkonsentrasi di kota-kota besar.

Seperti tulisan saya pada Perspektif minggu lalu, berwirausaha adalah pilihan logis bagi para tenaga kerja yang ingin menjaga kesinambungan ekonominya di daerah. Untuk itu, dibutuhkan pendampingan. Pendampingan tidak harus selalu mengarahkan masyarakat untuk mengakses perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Yang terpenting adalah bagaimana menginisiasi dan mengimplementasikan secara kreatif dana yang ada untuk diputar kepada sektor riil.

Meski dana yang ada hanya memungkinkan masyarakat untuk bermain di skala mikro, tapi jika dapat berlaku kolektif, maka roda ekonomi daerah perlahan bergerak. Paling tidak, dana yang ada tidak menganggur (*idle*) atau disembunyikan di bawah bantal *(hoarding)* dan tidak tergerus nilainya oleh inflasi. Dana yang ada akan jauh lebih bermanfaat jika diputar pada kegiatan produktif yang hasilnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ya, derap pembangunan di daerah harus dapat menyebarkan manfaat. Sumber daya di daerah jangan sampai terisap kembali oleh daerah-daerah perkotaan. Agar mudik dapat memberi manfaat yang berkelanjutan, maka pemerintah daerah hendaknya tidak memberikan ikan segar siap bakar, tetapi kail yang setiap saat bisa dipakai mereka untuk mengail lagi. Mudik sebagai kegiatan

ritual rutin, bahkan seolah disakralkan, handaknya jangan hanya dilihat saja dari luar dan kita terbiasa dengannya hingga lupa untuk melihat dan menyelesaikan akar masalahnya. *Wallahu a'lam wa taqabalallahu minna wa minkum.*

45

CHOCOLATE FROM JEMBER (1)[44]

Lebaran kemarin hampir bersamaan dengan ultah Naj, anak saya yang kedua. Seorang sahabat di Surabaya memberikan saya *budget* untuk berbelanja apa saja yang menjadi kesukaan Naj sebagai hadiah ultah. Saya katakan, hadiah yang paling bisa berkesan dan menyenangkan Naj adalah makanan. Sebab, Naj belum bisa menghargai pemberian dalam bentuk materi yang lain selain makanan.

Akhir kalam, saya membelikan camilan, susu kotak instan rasa coklat, dan tentu saja cokelat itu sendiri sebagai hadiah ultah beratasnamakan Om Bagyo. Ya, anak-anak saya biasa memanggilnya Om Bagyo. Mereka bersahabat dan cukup rutin berkomunikasi via SMS. Nau, anak saya yang sulung, pun ikut kecipratan dan mendapat jatah hadiah dari *budget* yang diberikan Om Bagyo.

Ketika anak-anak menikmati cokelat batangan, suami saya memperhatikan label yang tertera di pembungkus cokelat tersebut. Ia kemudian menyeletuk, "Jangan-jangan, cokelat impor

44 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 18 September 2010.

ini sebenarnya bahan bakunya dari Jember. Kualitas cokelatnya Jember, kan, terkenal dan dikirim ke mana-mana."

Ya, gara-gara hadiah cokelat dari Om Bagyo dan celetukan suami itulah yang membuat saya ingin menulis topik cokelat dalam Perspektif kali ini. Selain tembakau, cokelat sesungguhnya juga bisa menjadi ikon Jember. Siapa sangka, kota kecil ini ternyata menyimpan sejarah panjang sekaligus modernitas dari teknologi kakao.

Ada yang bingung, ya, apa bedanya cokelat dan kakao? Ya, cokelat itu adalah sebutan untuk makanan yang diolah dari biji kakao (*Theobroma cacao*). Dengan kata lain, biji kakao adalah penghasil bahan baku cokelat. Nah, Indonesia yang dikenal sebagai produsen kakao terbesar kedua di dunia sesungguhnya banyak memperoleh kontribusi besar dari Jember.

Ya, kehadiran Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Jember ternyata mampu bertindak lokal dengan pikiran global. Betapa tidak, dari tempat ini muncul teknologi yang menjadi kebanggaan bidang penelitian dan pengembangan varietas perkebunan Indonesia. Teknologi pembibitan *somatic embriogenesis* (SE) yang dikembangkan memungkinkan kegiatan pemuliaan (benih) dilakukan secara massal dari satu tanaman induk. Keadaan ini berbeda dengan teknologi okulasi dan setek konvensional yang hanya bisa memproduksi satu benih dari satu tanaman induk.

Selain mampu diproduksi secara massal, benih kakao hasil SE juga terbukti mempunyai produktivitas sangat tinggi. Konon, Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang mampu

memproduksi benih kakao secara massal dari satu tanaman induk. Puslitkoka Jember bahkan dikabarkan memperoleh hak pengembangan dari Nestle, perusahaan multinasional asal Prancis.

Ya, Puslitkoka bukan saja sebuah bangunan sejarah yang menjadi saksi kejayaan kakao Jember. Tempat ini juga adalah museum pertanian dan perkebunan karena menyimpan varietas tanaman pertanian dan perkebunan yang usianya sudah tua. Sejak zaman Belanda, potensi alam Jember sangat dipahami betul oleh pemerintah kolonial. Budidaya tanaman pertanian dan perkebunan memang tumbuh sangat baik di kawasan ini. Kakao adalah salah satu komoditas unggulannya. Belanda kemudian mendirikan Puslitkoka untuk riset pengembangan komoditas.

Duh, apa sih yang nggak ada di Jember ini? Semua sudah ada di sini. Tinggal bagaimana kita mengelolanya saja. Kakao Jember harusnya mampu menjadi pemain utama nasional. Setidaknya, Puslitkoka harusnya mampu menjadi *think-tank* bagi masa depan kakao nasional. Dari sini, pemerintah harusnya dapat mengambil banyak manfaat. Di tempat ini, terdapat teknologi pengolahan kakao hingga pemanfaatan kulit kakao sebagai sumber energi. Selain itu, terdapat juga teknologi biogas dan pengkomposan dengan aerasi pasif untuk berbagai limbah padat hasil kakao.

Ketika saya mencoba *googling* keberadaan Puslitkoka di Jember, saya mengetahui bahwa lembaga penelitian ini ternyata juga memiliki pabrik pengolahan kakao yang didirikan mendampingi kebun kakao yang luasnya 60 hektar. Dengan kebun seluas itu, dapat dihasilkan kakao yang cukup untuk memproduksi cokelat olahan hingga 300 kilogram per hari. Meski

harga jual cokelat produksi pabrik lokal ini cukup terjangkau oleh pasar menengah ke bawah, namun nyatanya tak mampu mendongkrak pasar. Bahkan, permintaan cenderung turun. Meski telah melakukan upaya efisiensi di segala lini, tetapi jika tiada dukungan konkret dari pemerintah daerah untuk memberi jalan terbukanya pasar, bisa jadi pabrik cokelat ini tidak berkutik sama sekali.

Mengapa pemerintah daerah perlu turun tangan? Ya, ini tidak lepas dari visi pemerintah pusat yang berencana untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen kakao terbesar di dunia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian memperkirakan Indonesia pada 2015 mampu mewujudkannya.

Saat ini, Indonesia merupakan negara produsen kakao terbesar kedua di dunia setelah Pantai Gading. Dengan luas areal tanam 1.563.423 ha dan produksi 795.581 ton, Indonesia berada di bawah Pantai Gading yang memiliki produktivitas mencapai 1,5 ton per hektar. Dengan menggunakan teknologi SE untuk perbanyakan benih yang diproduksi Puslitkoka Jember, diprediksi kemampuan produksi Indonesia akan mampu melampaui Pantai Gading.

Hasil uji coba di lapangan, benih kakao SE mampu menghasilkan lebih dari 2 ton per hektar. Potensi kemampuannya bahkan diperkirakan dapat mencapai 4 ton per hektar. Dengan tingkat produktivitas seperti itu, keinginan Indonesia untuk menjadi produsen kakao terbesar dunia pada 2015 bukanlah mimpi. Peluang inilah yang harusnya dapat direspons cepat oleh pemerintah daerah. **(Bersambung)**

46

CHOCOLATE FROM JEMBER (2)[45]

Tulisan bersambung ini masih bicara tentang cokelat, juga tentu saja kakao. Sekadar *flashback,* tulisan ini bermula dari sahabat keluarga yang bernama Om Bagyo yang memberi *budget* hadiah untuk Naj, anak saya yang kedua. Dengan *budget* yang ada, saya membelikan Naj bermacam-macam camilan, makanan, dan minuman. Salah satunya yang pasti tidak boleh ketinggalan adalah cokelat.

Ketika mencicipi cokelat, suami menceletuk tentang bahan baku cokelat impor tersebut yang mungkin saja berasal dari Jember. Singkat cerita, cokelat sesungguhnya juga bisa menjadi ikon kota suwar-suwir ini. Keberadaan Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka)-lah yang menjadikan Jember layak untuk menjadi pelaku utama dalam industri kakao nasional.

Dari sisi pasokan, mengacu pada Statistik Perkebunan Indonesia (2006-2008), kemampuan produksi Jember pada 2006 sebanyak 5.977 ton dengan lahan yang sudah digunakan seluas 5.013 hektar. Sedangkan Bondowoso berkemampuan produksi

45 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 25 September 2010.

sebanyak 225 ton dengan lahan yang sudah digunakan seluas 60 ha. Di Lumajang, produksinya mencapai 1.614 ton dengan lahan yang sudah digunakan 758 hektar. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah Jember dan sekitarnya sesungguhnya sudah memiliki potensi sebagai pemasok kakao.

Namun demikian, sempat terdengar kabar bahwa produksi kakao Jember menunjukkan kecenderungan turun. Padahal, sebelumnya Jember merupakan penopang utama produksi kakao Indonesia yang dikirim ke Amerika dan Eropa. Saat ini, produksi kakao dari perusahaan perkebunan tidak banyak. Mugkin hanya berkisar 5.000 ton. Sisanya berasal dari kakao perkebunan rakyat. Total sekitar 600 ribu ton.

Dengan adanya benih *somatic embriogenesis* (SE) dari Puslitkoka, seharusnya persoalan produksi sudah dapat teratasi. Seiring dengan terus meningkatnya permintaan dalam dan luar negeri, maka pemerintah daerah seyogyanya mengambil peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi kakao. Apalagi, sampai saat ini kualitas kakao yang diincar pasar dunia sebagian besar berasal dari Indonesia.

Bagi perusahaan asing, bisnis kakao di Indonesia merupakan lahan subur untuk meraup keuntungan besar. Mereka mendirikan perusahaan di Indonesia, lalu membangun jaringan sampai ke pelosok-pelosok desa untuk mengumpulkan kakao petani. Selanjutnya, kakao diekspor dalam bentuk gelondongan dan setengah jadi dengan negara tujuan ekspor adalah jejaring pabrik mereka yang tersebar di berbagai negara Eropa, Amerika, Australia, dan Asia.

Akibat penguasaan perusahaan asing dalam perdagangan kakao di tanah air yang berorientasi ekspor, industri pengolah kakao nasional kerap kekurangan bahan baku. Hal ini berdampak pada berkurangnya utilisasi hingga sekitar 30 persen. Meski produksi kakao nasional besar, namun sering kali kebutuhan bahan baku 16 industri di dalam negeri tidak bisa dipenuhi. Ini akibat dominasi *trader* yang 80 persen merupakan perusahaan asing, yang banyak mengekspor kakao dalam bentuk biji untuk bahan baku industri pengolah di Amerika Serikat (AS), Brasil, Malaysia, dan Singapura.

Saya yakin sekali, daya saing produk kakao kita sangat baik dan mempunyai peluang untuk meningkatkan ekspor. Tetapi, alangkah baiknya jika kita berupaya untuk memberi nilai tambah dari biji kakao. Untuk itu, tentu dibutuhkan secara bertahap pengembangan pasar domestik guna meningkatkan industri hilir kakao dalam negeri.

Untuk pasar domestik, peluang untuk substitusi impor biji kakao masih sulit karena kakao yang diimpor adalah untuk memenuhi keperluan *blending* yang berkaitan dengan keunikan cita rasa seperti aroma (*flavour*) dan kandungan lemak (*fat content*). Karakteristik tersebut sulit untuk disubstitusi oleh kakao Indonesia. Namun demikian, peluang untuk mensubsitusi kakao olahan cukup terbuka sehingga upaya substitusi impor lebih terbuka untuk kakao olahan.

Kakao Indonesia memiliki keunggulan pada tingkat kekerasan (*hard butter*) dan karakteristik warna *(light breaking effect)*. Untuk kakao olahan, produk yang paling strategis untuk dikembangkan

adalah lemak kakao (*cocoa butter*). Pemilihan lemak kakao sebagai produk yang paling strategis untuk dikembangkan didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti aspek lapangan kerja, peluang pasar, dan nilai tambah. Hal ini juga sejalan dengan kualitas bahan baku kakao Indonesia yang diproduksi rakyat yang umumnya tidak difermentasi. Untuk memproduksi lemak kakao, bahan baku tidak harus difermentasi karena untuk produk lemak kakao, cita rasa bukan merupakan penentu utama dari mutu, akan tetapi kandungan lemaknya.

Perlu diketahui, biji kakao yang melewati proses *butter press* dapat menghasilkan mentega cokelat dan bubuk cokelat. Mentega cokelat dan bubuk cokelat inilah yang kemudian akan menjadi bahan baku dalam industri permen cokelat, industri biskuit dan roti, industri minuman, industri es krim, dan sebagian kecil digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri kosmetik dan obat-obatan.

Secara keseluruhan, ada dua catatan penting yang ingin saya garis bawahi dari cerita saya ini. **Pertama,** visi Indonesia yang ingin menjadi produsen kakao terbesar di dunia pada 2015 harusnya direspons cepat oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Terlebih bagi Pemkab Jember, kakao hendaknya dikembangkan sebagai salah satu bisnis unggulan dari perusahaan perkebunan daerah. Adanya Puslitkoka seharusnya menjadi faktor unggulan yang membuat kakao Jember mampu eksis di tanah air.

Kedua, selama ini produksi kakao diekspor berupa mentahan tanpa adanya proses pengolahan lebih lanjut yang menghasilkan

nilai tambah. Jika kita mau, saya yakin kita mampu mencuri kesempatan tersebut. Ah, masa kita yang punya Puslitkoka dan Universitas Jember tak mampu bersinergi untuk melakukannya? Ya, mungkin peran Pemkab-lah yang kita harapkan untuk menginisiasi semuanya. *Wallahu a'lam bish showab.*

47

BMT, RIWAYATMU KINI....[46]

Sepekan lalu, seorang kawan di Semarang meng-*add* akun pertemanan Facebook milik saya. Ia mengirim *personal message* (PM) *inbox* di Facebook, menanyakan apakah saya masih mengingatnya. Tentu saja, saya mengingatnya. Saya pun bercerita bahwa saya mengunjungi tempat praktik ayahnya beberapa waktu lalu. Ayahnya adalah seorang dokter spesialis THT ternama di kota Lumajang.

Berikutnya, dalam balasan PM, ia bercerita bahwa ia sudah mengetahui pertemuan saya dengan ayahnya. Justru ayahnyalah yang menyuruh kawan saya itu mencari saya pada jejaring Facebook. Singkat cerita, kawan saya itu memperoleh tawaran untuk mendirikan *baitul mal wat tamwil* (BMT). Dia ingin tau apa itu BMT? *Mmm*... ya, saya ingin mengulas topik BMT dalam Perspektif kali ini.

BMT adalah sebuah lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam. Di Indonesia, lembaga ini belakangan populer seiring dengan semangat umat Islam untuk mencari model ekonomi alternatif pascakrisis.

46 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 2 Oktober 2010.

Konsep BMT adalah buah dari sejarah panjang ekonomi Islam yang di masa lalu disebut *baitul mal*. Di masa Rasulullah saw. hingga era *khulafaur rasyidin*, *baitul mal* adalah suatu lembaga yang bertugas mengumpulkan harta kekayaan negara untuk didistribusikan kepada umat. *Baitul mal* adalah salah satu bentuk reformasi di bidang sosial-ekonomi yang dilakukan Rasulullah saw. Melalui *baitul mal,* Rasulullah saw. meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara, mengembangkan sumber-sumber penerimaan negara, mengembangkan dasar-dasar kebijakan fiskal, dan meletakkan dasar-dasar keseimbangan moneter.

Seiring dengan perubahan zaman dan dinamika perekonomian nasional, konsep *baitul mal* kini berkembang tidak sebatas menerima dan menyalurkan harta saja. Tetapi, juga turut mengelola secara produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Penerimaannya juga tidak terbatas pada zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saja, tetapi sudah merambah pada wakaf.

Di Indonesia, istilah BMT mengemuka sejak tahun 1992. Mulanya, lembaga ini sekadar menghimpun dan menyalurkan ZIS dari para pegawai atau karyawan suatu instansi untuk dibagikan kepada para mustahiknya. Dalam perkembangannya, lembaga ini bertransformasi menjadi sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serbausaha yang bergerak di bidang simpan pinjam dan usaha-usaha pada sektor riil.

Saat ini, sekitar 5.000 BMT telah menyebar di seluruh Indonesia dan mendanai sekitar lima juta usaha mikro. Sayang, sejauh ini, belum ada payung hukum yang melindungi upaya pengentasan kemiskinan dalam wadah BMT ini.

Saya ingin cerita sedikit tentang Istana Taj Mahal. Bukan, ini bukan Istana Taj Mahal yang di India itu. Ini Istana Taj Mahal yang merupakan nama perumahan yang dibangun di Kecamatan Blega di Bangkalan, Madura sana. Perumahan itu dibangun oleh Haji Mathlub di bawah bendera PT Maqon Sejahtera. Asetnya bernilai kurang lebih Rp7 miliar. Usaha Haji Mathlub ini berawal dari modal Rp20 juta yang didapatnya dari dana BMT di Sidogiri, Pasuruan. Haji Mathlub memulai usahanya sebagai pemborong pintu pagar dan tangga bangunan, hingga akhirnya mampu membeli lahan dan membangun perumahan.

Banyak kisah sukses yang bisa kita dengar seperti Haji Mathlub yang memperoleh manfaat dari dana yang disalurkan BMT. Di antaranya adalah kisah 12 pengusaha Madura di Jakarta yang bisa mendirikan pabrik pengolahan daur ulang besi tua menjadi ring baut. Padahal, mereka awalnya adalah pengumpul besi bekas yang dijual secara kiloan. Ya, sebagian besar nasabah BMT adalah pelaku usaha mikro atau nasabah yang simpanannya tidak sebesar nasabah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau bank umum.

Selain kisah bahagia, ada juga kisah sedih yang dilagukan BMT. Salah satunya, yang pernah terjadi di Lumajang pada pertengahan 2007 lalu. Sebuah BMT ternama dikabarkan membawa lari uang nasabah hingga Rp15 miliar. Salah satu nasabah tersebut yang saya ketahui pasti adalah seorang guru TK yang berkeinginan menyimpan dananya di lembaga keuangan syariah. Entahlah, kabarnya uang simpanannya "hanya" sebanyak Rp1 juta, tetapi uang itu ditabungnya sedikit demi sedikit. Uang

Rp1 juta yang mungkin tampak kecil bagi keluarga lain, tetapi bagi guru TK tersebut sangat berarti.

Kisah sedih lainnya juga saya temui di Yogyakarta. Saya memiliki rekanan usaha di sana. Kami memiliki seorang teman yang bergerak di usaha BMT. BMT tersebut adalah salah satu BMT terbesar dan ternama. Akibat gempa Yogya, sejumlah BMT yang dimilikinya mengalami kerusakan parah. Pelaku usaha mikro yang juga menjadi nasabah BMT tersebut pun mengalami masalah likuiditas. Dalam perkembangannya, BMT ini mengalami wanprestasi dan merugikan banyak nasabah. Salah satunya adalah komunitas guru yang menyimpan dana sekolahnya di BMT tersebut.

Intisari dari cerita yang ingin saya sampaikan adalah betapa label syariah saat ini mengalami masa-masa *booming*. Perguruan tinggi berlomba-lomba membuka jurusan Ekonomi Syariah. Perbankan konvensional berlomba-lomba membuka unit usaha syariah. Lembaga pengelola ZIS tumbuh subur. Secara keseluruhan, hal ini cukup menggembirakan, tetapi juga patut diwaspadai. Pasalnya, banyak pihak yang kini mencari untung dan mengomersialkan label syariah.

Kelemahan signifikan dari lembaga usaha berbasis syariah adalah sumber daya manusia (SDM). Kebanyakan adalah SDM yang tidak memiliki dasar pengetahuan tentang ekonomi syariah. Esensi terpenting dalam lembaga yang berlabel syariah adalah tuntutannya yang tidak sekadar menampilkan kinerja keuangan dan kinerja layanan semata, tetapi juga kinerja sosial. Ketiganya memiliki porsi yang sama pentingnya. *Wallahu a'lam bish showab.*

48

YUK, MENABUNG SAMPAH!!![47]

Tanyalah pada saya, apa yang ingin bisa saya lakukan di masa depan. Saya bisa pastikan bahwa salah satunya adalah mendirikan bank sampah. Hehehe, jangan ketawa. Ini serius. Cukup suami saya saja yang selalu mengernyit, kemudian tersenyum simpul sembari geleng-geleng kepala, lalu terkekeh-kekeh mendengar daftar keinginan saya yang 'aneh-aneh'.

Ya, saya tertarik dengan urusan persampahan ini karena tak tega melihat botol kaca, botol plastik, kertas, dan lainnya yang terbuang begitu saja. Padahal, jika mau kreatif, sampah-sampah tersebut bisa dimanfaatkan. Untuk sampah-sampah organik, saya biasa menguburnya di halaman rumah. Metode biopori coba saya terapkan dengan menggunakan versi saya sendiri. Tanah digali secara *random*, kemudian sampah-sampah organik saya kubur. Saya membayangkan, metode ini sudah cukuplah untuk ikut serta menghijaukan bumi. Binatang-binatang di bawah tanah dapat makanan sehingga mereka dapat bekerja menyuburkan tanah dan tanaman.

47 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 9 Oktober 2010.

Ya, gara-gara ingin bisa mendirikan bank sampah suatu hari nanti, saya jadi tertarik mencari tahu seluk-beluk persampahan. Saya juga tertarik untuk berkenalan dengan orang-orang yang berinteraksi dengan sampah. Salah satunya adalah seorang alumni Teknologi Pertanian Universitas Jember. Ceritanya, dia mengolah limbah kopi menjadi kompos blok. Melalui riset pribadi, limbah kopi tersebut dicampur dengan sejumlah zat, sehingga dengan komposisi yang ada, dapat meningkatkan produktifitas tanaman. Kabarnya, dia juga mengajak petani di Kecamatan Silo untuk ikut mengembangkan kompos blok berbasis limbah kopi tersebut. Keren kan? Keren, dong! Kalau tidak keren, mana mungkin ide itu bisa membawanya menjadi finalis Duta Lingkungan Hidup *Bayer* 2010!

Nah, sekarang kembali pada bank sampah. Saya mau cerita sedikit tentang apa dan bagaimana bank sampah. Banyak definisi yang bisa digunakan untuk menjelaskan bank sampah ini. Ada banyak istilah juga yang bisa dipakai untuk menyebutkannya, misal yang lazim kita dengar adalah pengepul. Dari sekian banyak definisi dan istilah tersebut, intinya adalah sama yaitu bagaimana mengelola limbah menjadi bermanfaat. Pada tataran tertentu, kegiatan bank sampah dan pengepul terdapat perbedaan. Kita tengok yuk, bank sampah di beberapa kota berikut.

Di Yogyakarta, tepatnya di Dusun Badekan, Trirenggo, Bantul. Berawal dari kesadaran pribadi untuk mengumpulkan sampah di rumah, warga di sana kemudian menyetorkan ke Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan yang sering disebut bank sampah Gemah Ripah. Sesuai namanya, bank ini memang tempat menabung

sampah. Masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan berdasar jenisnya. Mereka mendapat nomor rekening dan buku tabungan. Pada buku tabungan mereka, tertera nilai rupiah dari sampah yang sudah mereka setorkan.

Secara ringkas, aktivitas bank sampah di sana meliputi penimbangan, pencatatan, dan penentuan harga sampah sesuai berat dan jenisnya. Bank sampah memotong dana 15 persen dari nilai sampah yang disetor nasabah. Dana itu digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, seperti fotokopi, pembuatan buku tabungan, dan biaya lainnya. Bank sampah bekerja sama dengan pengepul barang-barang plastik, kardus, dan sebagainya, untuk bisa menyalurkan tabungan sampah masyarakat, juga dengan pengolah pupuk organik untuk menyalurkan sampah organik yang ditabungkan.

Setelah tiga tahun berselang, bank sampah ini sudah tidak melulu menjual sampah pada pihak ketiga. Mereka mulai memisahkan sampah yang bisa diproduksi kembali. Di antaranya adalah sampah *styrofoam* yang diolah menjadi hiasan kotak penyangga bendera atau bekas bungkus makanan dan minuman yang disulap menjadi barang kerajinan.

Di Jakarta, tepatnya di Kampung Beting Indah, Semper Barat, Cilincing, praktik bank sampah juga senada dengan yang di Yogyakarta. Sampah yang tidak bernilai itu bisa menjadi uang dengan cara ditukarkan di bank sampah. Bank sampah di Jakarta ini malah bekerja layaknya seperti bank yang melakukan simpan pinjam, setoran, penarikan, dan tabungan. Semua transaksi itu bisa dilakukan, asal ada sampahnya.

Di sini, masyarakat yang menyetorkan sampah diberi opsi untuk menjual tunai atau menabungkan hasil jualannya. Semua transaksi akan tercatat di buku tabungan. Jika A minta uang tunai, maka petugas akan langsung memberi uang tunai senilai penjualannya. Jika tidak, maka nilai tersebut akan disaldokan di buku tabungan. Kebanyakan warga biasanya akan menabung dulu uang jual sampahnya hingga jumlahnya cukup lumayan untuk diambil.

Menariknya dari bank sampah di Jakarta ini, bank memberikan fasilitas simpan pinjam maksimal Rp300 ribu. Cara pembayaran kreditnya dengan menyetor sampah hingga nilainya melunasi pinjaman tersebut. Lebih menariknya lagi, fasilitas simpan pinjam ini tanpa jaminan, tanpa bunga, dan bisa dibayar dengan sampah.

Di Bogor, ada juga bank sampah. Mulai beroperasi tahun 2009. Sekolah Alam di Tanah Baru, Bogor Utara, yang mengembangkan dan nasabahnya adalah ratusan siswa sekolah tersebut. Setiap hari, para siswa menyetorkan sampah dari rumah ke bank sampah di sekolahnya. Mereka akan mendapatkan koin untuk setiap sampah yang disetor. Ada kurs atas berat dan jenis sampah yang diserahkan. Misal, kurs koran bekas berbeda dengan kurs botol minuman plastik. Nah, setiap bulan, jika dirata-rata, setiap siswa bisa menukarkan koin hingga senilai Rp50 ribu.

Dengan demikian, secara sederhana dapat kita gambarkan bahwa kegiatan bank sampah adalah memilah berbagai jenis sampah. Berikutnya, bank sampah akan menyalurkan sampah-sampah tersebut kepada para agen, pengepul, pabrik, petani

organik, atau malah mengolahnya sendiri untuk menjadi bahan baku industri.

Bayangkan, jika di daerah kita bisa didirikan bank sampah yang demikian. Ada bank sampah induk dan ada bank sampah cabang. Setiap cabang berkonsentrasi pada wilayah-wilayah kecil yang membangun jejaring nasabah dari sekolah-sekolah atau kampung-kampung atau komunitas pengajian/arisan/dasawisma ibu-ibu. Jika ini bisa terwujud, sampah bukan lagi momok bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan sendirinya, kita bisa membangun sistem ekonomi daerah yang *pro-poor, pro-growth, pro-employment*, dan tentu saja *pro-environment*. *Wallahu a'lam bish showab.*

49

EKONOMI ZAKAT[48]

Akhir September lalu, Yogyakarta menjadi tuan rumah *World Zakat Forum* (WZF). WZF adalah konferensi internasional yang membahas masalah perzakatan dunia. Sebagaimana temanya, '*to strengthen the role of zakat in realizing the welfare of ummah through international zakat network*', WZF digagas untuk memfasilitasi kemungkinan kerja sama zakat lintas negara guna pengentasan kemiskinan di berbagai negara.

Salah satu peserta WZF saat itu yang saya tahu pasti hadir adalah Direktur Lembaga Amil Zakat RIZKI Jember. Lho, kok saya bisa tahu? Ya iya, lah! Beliau menuliskannya di status Facebook, *"Berkemas & bersiap meluncur ke* World Zakat Forum ing Ngayogyakarta. *Ya Allah, rahmati dan berkahilah langkah kami semua hingga zakat menjadi cahaya gemilang bagi suramnya permasalahan bangsa dan ummat ini...."*.

Selain RIZKI, saya yakin sekali acara tersebut juga diikuti oleh Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), Lembaga Manajemen Infaq (LMI), Rumah Zakat, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, dan juga

48 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 16 Oktober 2010.

lembaga pengelola zakat infaq sedekah wakaf (ZISWA) lainnya. Ya, saat ini lembaga pengelola ZISWA tumbuh subur, baik yang berskala nasional, regional, maupun lokal, seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia.

Dalam Perspektif kali ini, saya ingin mengulas zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam. Dibanding instrumen fiskal konvensional, zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan memiliki sejumlah keunggulan.

Pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat. Zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan *(ashnaf),* yaitu orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang berutang, jihad *fi* sabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur *fuqaha* sepakat, selain delapan golongan ini tidak halal menerima zakat. Ketentuan ini secara tegas menunjukkan keberpihakan instrumen zakat yang *pro-poor*.

Kedua, zakat memiliki tarif yang rendah dan tidak berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Penerapan instrumen zakat otomatis tidak akan mengganggu investasi karena menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberi kepastian usaha.

Ketiga, zakat memiliki tarif berbeda untuk jenis harta yang berbeda. Keringanan dimungkinkan untuk diberikan pada usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi yang lebih tinggi.

Keempat, zakat dikenakan pada basis luas yang meliputi berbagai kegiatan ekonomi. Zakat dapat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang. Fikih

kontemporer bahkan memandang zakat juga dapat diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerja.

Kelima, zakat adalah kewajiban yang harus dibayar oleh kaum muslimin. Jumlah penerimaannya cenderung stabil sehingga dapat menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, perintah zakat berdampak pada keseimbangan ekonomi. Zakat mendistribusikan kekayaan di antara manusia. Zakat menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Zakat membawa mandat bagi pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, instrumen zakat dapat menggerakkan potensi dan optimalisasi kekuatan ekonomi umat untuk kemaslahatan umat itu sendiri.

Secara nasional, Departemen Agama Republik Indonesia memperkirakan potensi ZISWA mencapai Rp19,21 triliun per tahun. Untuk zakat, data BAZNAS menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tahun 2006, zakat yang terhimpun Rp224 miliar. Tahun 2007, meningkat menjadi Rp408,67 miliar. Tahun 2008, kembali meningkat hingga Rp736 miliar. Dan tahun 2009, ditargetkan dapat mencapai sekitar Rp1 triliun.

Di Lumajang, Jember, dan Bondowoso sudah terdapat sejumlah lembaga pengelola ZISWA. Pemerintah hendaknya menggandeng lembaga-lembaga ini untuk program pengentasan kemiskinan. Sinergi pemerintah dan lembaga ZISWA akan membuat program ini tidak tumbuh dan bekerja sporadis. Sinergi akan membawa kemerataan yang lebih luas dan memberi *multiplier effect* yang lebih besar.

Ke depan, organisasi pengelola ZISWA diharapkan dapat mendorong perubahan paradigma penyaluran zakat. Jika semula terbatas pada sekadar pemenuhan kebutuhan hidup yang cenderung konsumtif, maka ke depan perlu dipikirkan pula untuk menciptakan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang sifatnya produktif. Tidak lupa, tata kelola pengelolaan ZISWA menuntut transparansi dan akuntabilitas. Teknologi adalah infrastruktur yang tidak terelakkan yang memberi kemudahan, kecepatan, dan ketepatan bagi para muzaki dan amil.

Tidak bisa dimungkiri, potensi zakat yang besar adalah modal utama pembiayaan program-program kemiskinan. Pengelolaan ZISWA yang kian profesional, produktif, dan edukatif diharapkan dapat menggiring kemandirian masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi bagi kaum fakir miskin. Dari sinilah, kita berharap akan muncul inkubator-inkubator yang kelak melahirkan kegiatan ekonomi riil yang *pro-poor, pro-growth, pro-employment,* dan *pro-environment*.

2011

50

REALISTIS MEMILIH INVESTASI[49]

Usai mengikuti diskusi ekonomi "Menakar Peluang dan Tantangan Ekonomi Lumajang 2011" pada 25 Januari lalu, saya kemudian mengikuti ujian sidang terbuka seorang staf ahli menteri di Surabaya. Kebetulan, saya termasuk salah satu yang memperoleh undangan menjadi penguji akademis.

Saya tertarik dengan disertasi beliau yang mengangkat isu investasi. Bahasannya sangat membumi dan relevan dengan kondisi riil perekonomian daerah di Indonesia, termasuk pula kondisi di Lumajang, Jember, Bondowoso, dan wilayah tapal kuda lainnya yang begitu mengharapkan masuknya investasi guna membangun ekonomi daerah.

Bila merujuk pada kesimpulan implisit dari diskusi ekonomi "Menakar Peluang dan Tantangan Ekonomi Lumajang 2011", investasi adalah sebuah keniscayaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selama ini, pertumbuhan ekonomi lokal, regional, dan juga nasional lebih didongkrak oleh sektor konsumsi.

49 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 1 Februari 2011.

Saya yakin, semua pihak pun akan sepakat bahwa kita *absolutely* membutuhkan investasi untuk pembangunan, tapi cobalah lihat dengan saksama daerah-daerah yang terdapat investasi besar! Benarkah wilayah tersebut menjadi lebih sejahtera? Benarkah sebagian besar masyarakat setempat mengalami peningkatan kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan?

Saya tidak bermaksud melemahkan semangat pemerintah daerah untuk menarik investor berinvestasi. Saya juga tidak bermaksud pasrah dengan keadaan. Saya hanya ingin mengajak kita semua melihat persoalan pembangunan secara holistik. Saja ingin mengajak kita semua melihat implementasi dari kegiatan investasi secara integratif.

Secara empiris, investasi nyatanya tak selalu berbuah pada kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Secara teoretis, kegiatan investasi dan ketersediaan infrastruktur memang akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi pun berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada gilirannya, penyerapan tenaga kerja pun berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, di lapangan banyak ditemukan investasi besar yang tak berujung pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan per kapita, dan kesejahteraan masyarakat. Nyatanya, strategi penyerapan tenaga kerja yang diakibatkan oleh pengembangan kapasitas wilayah belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini mungkin disebabkan oleh produktivitas tenaga kerja yang masih

lemah, tingkat keterampilan yang belum baik, dan tarif tenaga yang belum memadai.

Contoh kasus yang dapat kita ambil adalah yang terjadi di Jepara. Investasi yang tumbuh di wilayah ini untuk membangun industri mebel dan ukir-ukiran sesungguhnya lebih banyak dimiliki pihak asing dengan ragam modus, termasuk salah satunya dengan 'kawin kontrak'. Aliran dana keuntungan investasi lebih banyak mengalir keluar. Meski terjadi penyerapan tenaga kerja, tetapi juga sekaligus terjadi pengisapan ekonomi daerah.

Untuk penambangan, Indonesia juga belum memiliki contoh korporasi yang layak menjadi *role model*. Kita belum menemukan kegiatan investasi tambang yang tidak membuat kerusakan lingkungan dan tidak melakukan pengisapan ekonomi lokal. Pengorbanan yang diberikan masyarakat daerah tampaknya jauh lebih besar daripada manfaat yang mereka terima.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi Kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso dan wilayah tapal kuda lainnya ke depan adalah bagaimana mengupayakan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan kapasitas produksi wilayah yang tidak hanya bersandar kepada mekanisme pasar. Kesejahteraan rakyat harus diupayakan dengan mengembangkan kebijakan afirmatif yang berorientasi pada penguatan pembangunan manusia dan keseimbangan wilayah.

Oleh karena itu, kebijakan afirmatif terhadap struktur investasi pada ketidakseimbangan wilayah yang ditunjukkan oleh ketersediaan infrastruktur harus diperbesar guna mengembangkan kapasitas produksi. Kebijakan optimal terhadap

potensi tabungan dan investasi pun harus dilakukan melalui pengembangan program yang mampu menciptakan peluang yang sesuai dengan potensi wilayah dan kualitas manusia.

Ke depan, pemerintah perlu menggunakan otoritas kebijakan publik yang dimiliki untuk memperluas sasaran pembangunan yang dapat menciptakan kesempatan kerja dan melakukan intervensi untuk memperbesar alokasi investasi dan mempercepat keseimbangan wilayah. Intervensi juga dapat dilakukan untuk pengembangan potensi yang dibiayai oleh keuangan swasta dan daerah agar tidak lari ke daerah lain.

Tidak bisa dimungkiri, nadi kehidupan ekonomi pemerintah daerah masih bergantung pada infus dana perimbangan pemerintah pusat. Pasca otonomi daerah (otoda), pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) secara empiris lebih tinggi dibanding pertumbuhan sebelum otoda. Namun demikian, hal ini tidak diikuti dengan kenaikan kontribusi PAD terhadap belanja. Kontribusi PAD terhadap belanja justru lebih rendah dibanding kontribusi pascaotoda. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah saat ini terhadap pemerintah pusat justru semakin meningkat.

Jadi, realistislah dalam memilih investasi. Jangan bereuforia dengan istilah investasi. Pilihlah investasi yang membumi, berpihak pada sebagian besar masyarakat, dan membawa manfaat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kita semua berharap dunia usaha dapat mengembangkan investasi kapital yang dimiliki untuk memperbesar kapasitas produksi wilayah yang dapat menciptakan kesempatan kerja dengan tingkat upah yang

memadai serta memilih teknologi yang tepat untuk penyerapan tenaga kerja yang memadai. Kita juga berharap, masyarakat dapat berpartisipasi dan beremansipasi dalam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri serta dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas diri guna terciptanya kemandirian ekonomi yang bermartabat. *Wallahua'lam bish showab.*

51

PASIR UNTUK KESEJAHTERAAN, SUDAHKAH?[50]

Lumajang dianegerahi potensi pasir yang luar biasa oleh Tuhan. Baik pasir galian C maupun pasir besi. Potensi pasir galian C di Lumajang disebut-sebut mencapai lebih dari dua juta kubik. Yang tergarap selama ini hanya satu juta kubik per tahun. Sedangkan potensi pasir besi kabarnya mencapai hingga 60 ribu hektar. Arealnya yang berderet di sepanjang pantai selatan Kecamatan Yosowilangun, Kunir, Tempeh, dan Pasirian menjadi incaran sejumlah investor.

Sejak akhir 2009, media memberitakan tentang rencana investor pasir besi dari Tiongkok masuk Lumajang. PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) yang berafilisasi dengan Hongkong Hani Group (HHG) diberitakan akan mengeksplorasi tambang pasir besi seluas 8 ribu hektar di Desa Dampar, Pasirian.

Tak lama berselang, kabar tentang IMMS pun mulai meredup dan berganti dengan kabar aksi perlawanan warga Desa Wotgalih, Yosowilangun, atas kehadiran PT Aneka Tambang (ANTAM)

50 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, *Cover Story,* 1 Agustus 2011.

yang ingin mengeksplorasi kembali tambang pasir besi di desa tersebut. Sebagian besar masyarakat yang merasa tidak pernah dimintai kesediaan atas rencana kegiatan penambangan di wilayah tersebut dikejutkan dengan terbitnya izin penambangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang.

Mengundang Polemik

Kegiatan penambangan memang selalu mengundang polemik. Aksi perlawanan warga terhadap operasi dan rencana tambang dapat dipahami sebagai bentuk kegalauan yang memuncak atas berbagai aktivitas penambangan di Indonesia. Lumpur Lapindo adalah kasus fenomenal yang sudah berusia lima tahun, tapi sampai kini menyisakan duka dan polemik. Kasus ini pada akhirnya juga menghadapi masalah klasik sebagaimana yang dihadapi masyarakat di Kalimantan atau Papua dalam menghadapi perusahaan penambangan batubara dan emas.

Kini, penambangan pasir besi di berbagai daerah pun menuai pergolakan. Kebutuhan bahan baku baja yang sangat besar menyebabkan pasir besi menjadi incaran banyak korporasi tambang asing maupun nasional. Penolakan warga terhadap kegiatan penambangan tidak hanya terjadi di Desa Wotgalih (Lumajang), tetapi juga di Desa Cipatujah (Tasikmalaya) dan Desa Kulonprogo (Yogyakarta). Pedihnya, warga yang kontra penambangan tidak saja berhadapan dengan korporat, tetapi juga berhadapan dengan eksekutif, legislatif, dan bahkan aparat.

Di Desa Wotgalih, ANTAM pernah melakukan penambangan selama sepuluh tahun di lahan seluas 500,4 hektar sejak 1998.

Warga menolak kehadiran ANTAM kembali lantaran merasa tidak menerima manfaat ekonomi darinya. Sisa-sisa hasil penambangan pasir besi ditinggalkan begitu saja. Gunung pasir yang dulu menghalangi wilayah pesisir dari ombak pantai selatan, kini kabarnya telah rata dengan tinggi air laut. Daratan pasir besi yang dulu tinggi juga kini membentuk gumuk-gumuk kecil sehingga sulit untuk dimanfaatkan lahannya.

Simak juga bagaimana kasus penambangan pasir besi di Cilacap yang menampilkan potret serupa. Penambangan yang berlangsung sejak 1973 diberitakan menyebabkan sejumlah pantai di wilayah tersebut mengalami penurunan 90 sentimeter, muara sungai berpindah, sedimentasi sungai dan laut, meningkatnya abrasi pantai utara Jawa, dan rusaknya tanaman *mangrove*.

Begitu pula yang terjadi di pesisir barat Pulau Sumatera. Semenjak dilakukan penambangan, risiko bencana warga sekitar tambang meningkat. Badai *geloro* kini dapat menerjang sampai ke pemukiman penduduk.

Penambangan VS Kesejahteraan

Salah satu kesalahan besar pemerintah, baik pusat maupun daerah, kerap memaknai kekayaan sumber daya tambang di wilayah teritori menjadi milik pemerintah dan bukan milik masyarakat. Hal inilah yang pada perjalanannya membawa banyak penyimpangan karena pola pikir tersebut menggiring munculnya kebijakan yang pro-pemerintah dan bukan pro-masyarakat.

Titik krusial kelemahan pengelolaan pertambangan di Indonesia adalah cara pandang terhadap sumber daya tambang

sekadar sebagai komoditas semata. Cara pandang tersebut menjebak Indonesia menjadi pemasok bahan tambang dunia yang mengeksploitasi sumber daya tanpa perencanaan. Yang terjadi kemudian adalah pengelolaan yang tidak didasarkan pada kalkulasi seberapa besar volume yang boleh ditambang dan berapa lama kegiatan penambangan boleh berlangsung. Kalkulasi cenderung hanya berdasar pada seberapa besar potensi sumber daya yang ada tanpa menyertakan kalkulasi lebih jauh tentang seberapa besar yang dibutuhkan untuk menyejahterakan masyarakat lokal, menjaga kelestarian ekosistem, dan seberapa banyak potensi tambang yang harus disisakan untuk generasi masa depan. Kita akan sulit menjawab berapa yang masih tersisa dari potensi pasir besi yang ada jika suatu saat nanti warga setempat berdaya untuk mengelolanya sendiri.

Sejauh ini, data aktivis lingkungan menunjukkan kerusakan ekologis yang ditimbulkan dari penambangan pasir besi jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Di Seluma (Bengkulu), untuk memproduksi pasir besi hingga 20 ribu ton harus mengeruk satu juta meter kubik pasir pantai, menggali garis pantai sepanjang tiga kilometer hingga selebar lima puluh meter, dan sedalam tujuh meter. Perusahaan tambang mengantongi pendapatan kotor USD1,9 juta, namun royalti yang dibayarkan hanya Rp209 juta dan pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp10 juta. Padahal, tambang itu menghancurkan akses jalan hingga membuat warga terasing.

Keadaan serupa terjadi di Cipatujah (Tasikmalaya). Penggalian pasir besi ditengarai lebih berpotensi merusak daripada manfaat

ekonomi yang didapat. Pemasukan untuk pemerintah daerah (Pemda) hanya sekitar Rp400 juta per tahun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan Pemda untuk membiayai pembangunan jalan yang rusak.

Bagaimana dengan Lumajang? Untuk pasir besi, belum pernah terpublikasi secara luas data yang sahih tentang berapa sumbangsih ANTAM ke Lumajang saat masih melakukan aktivitas penambangan di Wotgalih.

Sementara untuk pasir galian C, mengutip data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2010-2014, jumlah produksi pasir tahun 2003 sebanyak 474.140 ton dengan realisasi penerimaan pajak galian Gol. C sebesar Rp675.041.021,61. Tahun 2004, produksi pasir meningkat menjadi 521.906 ton, tetapi realisasi penerimaan pajak malah anjlok menjadi Rp488.212.370,98. Pada tahun 2005, produksi pasir meningkat tajam 53,28 persen menjadi 800.000 ton dan pajak galian Gol. C meningkat menjadi Rp809.608.964,98. Tahun 2006, produksi meningkat sedikit menjadi 858.000 ton, tetapi kembali diikuti anjloknya penerimaan pajak menjadi Rp504.281.103,28. Kondisi yang sama terjadi pula di tahun 2007, di mana produksi meningkat menjadi 967.440 ton, tetapi penerimaan pajak malah anjlok kembali menjadi Rp486.163.807,00. Tahun 2008, produksi meningkat lagi menjadi 1.064.184 ton dan pajak meningkat menjadi Rp585.215.913,06.

Untuk 2011, informasi *splash news* di situs Pemkab Lumajang menyebutkan pendapatan bahan galian C/pasir untuk bulan Juni 2011 sebesar Rp270.340.000, bulan Mei Rp232.292.000, dan bulan

April Rp237.912.000. Sayang, saya belum menemukan data yang dapat menunjukkan apakah manfaat finansial ini setara dengan berbagai kerugian yang dialami masyarakat maupun Pemkab atas kegiatan penambangan tersebut. Yang jelas, yang menjadi isu sekaligus tantangan utama dari kegiatan penambangan pasir besi di Lumajang adalah belum adanya komitmen dari Pemkab untuk menyejahterakan masyarakat setempat. Manfaat ekonomi belum terdistribusi secara berkeadilan. Sejumlah titik strategis yang menjadi lokasi bahan tambang pun disinyalir telah dikuasai oleh pemegang modal yang berada pada lingkaran dalam kekuasaan.

Reformasi Industri Tambang

Tidak bisa tidak, reformasi industri tambang harus ditegakkan melalui kontruksi penegakan hukum lingkungan dengan mengaplikasikan ilmu ekonomi yang bernurani. Meminjam pendapat Subagyo (2011), Dewan Pakar Tamkin Institute, implementasi penegakan sistem hukum lingkungan Indonesia adalah dengan cara membangun paradigma berbasis lingkungan hidup yang mengakui prinsip keadilan sosial. Agenda reformasi adalah dengan menjalankan gerakan pemerintah, sosial, dan hukum ekologi berdasarkan sistem hukum lingkungan.

Selain itu, hukum harus memberikan akses upaya hukum bagi subjek hukum masa kini dengan dasar moral untuk mewakili masa depan. Ya, sudah saatnya gaung pembangunan tidak hanya mengedepankan *pro-poor, pro-growth*, dan *pro-employment* semata, tetapi juga harus berkomitmen menggaungkan *pro-environment* dengan menjadikan *people* sebagai objek pembangunan. *Wallahua'lam bish showab.*

52

YUK, JADI IBU YANG KEREN![51]

Pak Edi : "Ayo, Is, kamu kenalan dulu dengan istri saya!"

Saya : "Sudah kenal kok, Pak Edi. Kan, sudah pernah ketemu dulu!"

Pak Edi : "Iya, kenalan lagi. Nggak papa. Itu ada Pak Bupati juga."

Saya : "Aduh, Pak. Jangan. Nggak usah lah, Pak. Saya bingung mau ngomong apa."

Pak Edi : "Ya, nggak usah ngomong apa-apa. Kenalan saja dulu. Ayo!".

Itulah secuplik percakapan saya dengan Prof. Sri-Edi Swasono pada akhir pekan lalu. Ya, tanggal 16 Desember kemarin, saya menghadiri rapat terbatas (ratas) anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Meutia Hatta, di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Dalam kesempatan tersebut, memang untuk pertama kalinya saya *face to face* dengan Bapak

51 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 22 Desember 2011. Ditulis dalam rangka memperingati Hari Ibu 22 Desember.

MZA Djalal. Senang? Kayaknya, istilah yang tepat itu bukan 'senang' deh, tapi 'grogi'.

Ya iya lah, dipaksa Pak Edi bertemu dengan orang nomor satunya Jember tanpa persiapan. Kan, bingung mesti ngomong apa. Akhirnya, yang terbersit di kepala dan terucap di bibir sembari tersenyum sedikit cengengesan kepada Pak Bupati adalah, "Saya dulu yang pernah mengisi kolom Perspektif di Radar Jember, Pak." *Hehehe*....

Menurut ingatan saya, kunjungan ke Jember ini adalah kunjungan ketiganya Pak Edi. Saya yakin, Pak Edi membawa serta Bu Meutia, anak, menantu, dan total rombongan Tim Wantimpres sebanyak 16 orang itu bukan tanpa alasan. Termasuk pula kunjungan Bu Meutia ke Kalibaru hingga menginap semalam, pastilah membawa misi. *Ups.* Mungkin, lain kali saya akan menceritakan tentang hal tersebut. Iya, saya hampir lupa kalau mau menulis artikel ini dalam rangka Hari Ibu....

Ratas Wantimpres

Menghadiri ratas Wantimpres cukup membuat saya *dag dig dug der*. Selain itu acara selevel demikian yang pernah saya ikuti, saya juga *deg-degan* karena belum pernah mengunjungi kantor Pemkab Jember. Ditambah lagi, saya tidak tahu-menahu apa yang akan dibahas dalam ratas Wantimpres. Ibaratnya, saya hanya modal dengkul menghadiri acara tersebut.

Ah, ternyata Bu Meutia itu membidangi Pendidikan dan Kebudayaan. Topik yang diketengahkan dalam Ratas tersebut

adalah tentang pembangunan karakter. Saya jadi teringat segitiga emas dalam pembentukan karakter anak, sebagaimana yang pernah disampaikan dalam pelatihan *smart parenting* yang diselenggarakan Kualita Pendidikan Indonesia (KPI) di SD Al-Ikhlash Lumajang. *Yuppp,* pembangunan karakter anak itu harus berbasis sinergi sekolah dan orang tua serta lingkungan pendidikan anak.

Menyimak pandangan dan aspirasi sejumlah elemen yang mewakili institusi perguruan tinggi, parlemen, maupun birokrat kepada Bu Meutia, saya pun tergerak pula untuk turut menyampaikan hal yang sama. Jika banyak pihak menyampaikan keprihatinan atas minimnya wawasan kebangsaan dari generasi muda saat ini serta menawarkan solusi bagi institusi yang mereka geluti, saya mencoba mendekati persoalan dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Alhamdulillah, saya pernah ikut pelatihan *smart parenting*. Semoga saya nggak keliatan *o'on* banget ketika bicara dalam ratas tersebut....

Saya menjadi peserta terakhir yang menyampaikan pandangan. Saya sampaikan, saya terinspirasi dengan pidato Bu Meutia di PBB tentang perempuan. Ya, Pak Edi pernah cerita tentang pidato Bu Meutia, "… *If you educate one man, you educate one person. But, if you educate one woman, you educate one generation* ….". Dari pidato tersebut, saya kemudian terinspirasi untuk menulis artikel di Harian Kompas berjudul "Satu Perempuan, Satu Generasi".

Saya sampaikan, berbekal profesi serabutan saya yang mengajar mahasiswa, anak TK, menjadi ketua Dharma Wanita

(DW), dan pernah juga menjadi ketua Forum Wali Murid, saya merasakan kebenaran bahwa betapa peran ibu begitu besar dalam membangun karakter putra-putrinya. Saya banyak melihat bagaimana pola pikir dan kebiasaan ibu dapat memengaruhi pola pikir dan karakter anak-anaknya.

Dalam kesempatan tersebut, saya sampaikan bahwa salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam membangun karakter adalah melalui penguatan keluarga, terutama peran ibu. Bukankah ibu adalah madrasah pertama dan utama untuk buah hatinya? Sayang, peran ibu banyak tereduksi dengan perubahan paradigma yang menggiring wanita untuk lebih bangga menjadi wanita pekerja daripada menjadi ibu rumah tangga. Tidak bisa dimungkiri, tingginya kebutuhan hidup dan aktualisasi diri menyebabkan banyak wanita bekerja di luar rumah.

Saya tidak tahu, aspirasi saya sekadar utopia ataukah memang mungkin untuk direalisasikan. Saya menitipkan aspirasi kepada Bu Meutia untuk memperhatikan jam kerja bagi wanita pekerja. Jangan sampai jam kerja menyita, bahkan mengurangi waktu bagi ibu untuk menemani anak-anaknya belajar dan tidur. Saya juga mempertanyakan kemungkinan bagi pemerintah untuk mengintervensi media televisi yang menayangkan tayangan tidak sehat bagi penontonnya. Tayangan materialisme, konsumerisme, dan hedonisme seharusnya menjadi musuh utama bagi seluruh ibu di dunia.

Saya jadi ingat dengan teman-teman anak saya di jejaring Fesbuk. Mereka sering kali meng-*upload* foto *boyband/girlband* dari Korea. Ya, para ABG sekarang ini banyak yang mengidolakan

selebriti asal Korea. Saya sampai me-*link* kepada sejumlah sahabat anak saya tentang sebuah survei yang menunjukkan bahwa selebriti Korea itu paling tinggi angka bunuh dirinya di seluruh dunia. Saya bahkan sampai memberi *link* video zikir anak dari Youtube milik Sulis yang secara persuasif, saya bilang, tidak kalah keren dengan lagu-lagu Korea.

Ketika ngobrol berdua dengan Pak Edi, saya kembali menanyakan tentang aspirasi tersebut. Pak Edi bilang, jangan banyak berharap pemerintah akan mengiakan. Media televisi pasti sudah 'membeli' pemerintah agar membiarkan tayangan-tayangan mereka tidak diganggu. *"Sudahlah, kita ini yang menjadi ujung tombaknya. Kita saja yang bergerak ke mana-mana."*

Hari Ibu

Artikel ini saya tulis memang dalam rangka Hari Ibu. Tanggal 22 Desember, sebagaimana biasa, negeri ini memperingatinya sebagai Hari Ibu. Di kampus Universitas Jember (Unej), peringatan Hari Ibu diselenggarakan tanggal 21 Desember, bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun DW dan Pengajian Catur Wulan. Tahun ini, saya akan turut hadir pula dalam peringatan tersebut. Setelah setahun lebih sejak saya menjadi ketua DW di Fakultas Kedokteran (FK) Unej, saya memang tidak pernah menampakkan diri dalam kegiatan DW Universitas. Barulah di penghujung tahun ini, saya akhirnya berkesempatan untuk menghadirinya.

Ya, ada benang merahnya, kan, antara ratas Wantimpres dengan Hari Ibu bulan Desember ini? Tentang pembangunan

karakter, baik yang berwawasan kebangsaan maupun yang berakhlak karimah, tidak bisa lepas dari peran ibu. Jika kita ingin negara ini menjadi lebih baik, maka tanggung jawab itu ada di pundak kita. Jika para ibu ingin beraktualisasi di luar rumah, tetap boleh, kok. Jangan hentikan langkah kita hanya di dalam rumah. Ibu rumah tangga juga harus berkarya dan bermanfaat untuk masyarakat. Tapi, jangan lupa, kesuksesan ibu bukan dilihat dari penerimaan masyarakat atas keberadaan kita. Kesuksesan ibu yang hakiki adalah ketika sukses mencetak putra-putrinya untuk menjadi generasi yang lebih baik daripada kita.

Yuk, kita jadi Ibu yang keren, yaitu ibu yang dapat menghantarkan putra-putrinya kelak menjadi generasi yang tidak saja mencintai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki iman, takwa, serta menjadi pribadi yang sederhana, rendah hati, dan bermanfaat untuk sesama. Amin.

2012

53
CENAT-CENUT GARA-GARA BBM

Kawan : Is, sudah 3 kantor pengiriman jasa paket yang aku datangi, harganya ya, tetap berkisar Rp400 ribu. Bagaimana? Masih tetap mau menggunakan jasa pengiriman paket?

Saya : Waduh, naiknya kok drastis begitu, ya? Ya sudah kalau begitu, pakai travel saja. Ditransitkan dulu ke Surabaya.

Kawan : Oke kalau begitu, aku kirim via travel, ya. Nanti transit dulu di Surabaya.

Itulah sedikit pembicaraan saya dengan pemasok di Yogya pada awal Maret lalu. Dengan besar paket dan berat yang hampir sama, biasanya biaya dengan menggunakan perusahaan jasa pengiriman paket hanya Rp100-120 ribu. *Lah,* ini harga bahan bakar minyak dan gas (BBM) belum naik sudah meningkat tiga kali lipat. Tentu saja saya harus mencari cara lain agar biaya transpor tidak sampai meningkat tajam agar tak perlu menjual barang dagangan lebih mahal. Dengan menggunakan

travel, biaya Yogya-Surabaya sebesar Rp70 ribu dan biaya Surabaya-Lumajang sebesar Rp65 ribu. Lumayan menghemat, *toh*?

Ya, rencana kenaikan BBM sebagaimana biasanya selalu membuat kepala cenat-cenut. Mulai dari ibu rumah tangga, pegawai swasta, pegawai negeri, pengusaha, petani, nelayan, dan juga buruh. Eh, para buruh sekarang ini semakin pintar, lho. Coba saja simak argumen dari Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI) yang beberapa waktu lalu menyatakan penolakan kebijakan tersebut. Saya membaca di sebuah media, mereka menolak dengan alasan: (1) Dampak kenaikan BBM akan diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok, ongkos angkutan penumpang maupun barang, termasuk sewa kontrakan; (2) Kenaikan BBM hanya menguntungkan perusahaan minyak dan gas (migas) multinasional. Perusahaan inilah yang mendesak pemerintah untuk menaikkan harga BBM sesuai dengan harga pasar mereka.

Hft.... Tarik napas dulu panjang-panjang....

Ya, kenaikan harga BBM selalu mengundang polemik dan lazimnya memicu persoalan baru nan klasik. Namun, dampak kebijakan *administered price* ini tidak semudah seperti yang disampaikan Menteri ESDM Jero Wacik yang menyatakan 'keputusan menaikkan harga BBM ini akan bisa diterima rakyat dengan baik'. Menurut saya, rakyat Indonesia sekarang sudah biasa, lah.

Dalam tulisan ini, saya tidak akan mendiskusikan berbagai pemikiran yang membuat beberapa pihak dapat berdebat habis-

habisan dengan pemerintah karena kontra dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Area permasalahan di bagian hulu ini akan selalu menjadi *debatable forum.* Saya hanya ingin mendiskusikan realitas yang umumnya terjadi di bagian hilir jika harga BBM ini benar-benar terealisasi. Efek dari rencana kenaikan harga BBM ini dapat dipastikan akan menyebar ke seluruh sektor kehidupan dan berdampak sistemik.

Pertama, soal bantuan langsung tunai (BLT). Sebagai kompensasi atas penghematan sebesar Rp38 triliun dari subsidi BBM, pemerintah akan mengalokasikan dana BLT senilai Rp25 triliun. Dari hitung-hitungan ini, penghematan riil yang dilakukan pemerintah sesungguhnya 'hanya' sebesar Rp13 triliun. Angka ini mungkin tidak sebanding dengan dampak ikutan yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya itu, nilai Rp 25 triliun juga sesungguhnya bak puntung rokok yang sekali isap lalu menjadi asap dan terbang menghilang. Betapa tidak, lihat saja bagaimana perilaku masyarakat dalam memanfaatkan BLT! Yang saya tahu pasti, mereka cenderung menggunakannya untuk membeli kebutuhan harian. BLT bertahan di tangan hanya dalam hitungan hari dan umumnya menguap dalam perut.

Coba bayangkan, deh, jika uang sebesar Rp25 triliun itu dibangun rumah sakit, jembatan, jalan, sekolah, atau fasilitas publik lainnya! Inilah yang disebut *opportunity cost.* Wujud BLT yang hilang dalam perut sesungguhnya dapat diwujudkan dalam bentuk fasilitas publik yang dapat diakses pemanfaatannya oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Kedua, kenaikan harga BBM tidak serta merta akan membuat pengusaha menaikkan upah buruh. Pengusaha di satu sisi kian terdesak oleh biaya produksi yang semakin tinggi, tetapi buruh di sisi lain juga terdesak oleh kenaikan biaya berbagai kebutuhan pokok. Butuh waktu agak lama untuk mencari titik temu dari dua kepentingan ini. Tidak jarang sampai melahirkan konflik. Namun demikian, tetap saja pengusaha memiliki *bargaining power* lebih besar sehingga terkadang muncul opsi 'kalau mau dengan upah tersebut, silakan terus bekerja, tetapi kalau hendak menuntut upah, silakan angkat kaki'.

Ketiga, kenaikan harga BBM meningkatkan biaya produksi petani. Yang lumrah terjadi pascakenaikan harga BBM adalah meningkatnya harga benih, harga pupuk, biaya transportasi, dan biaya BBM mesin. Dalam hal ini, kenaikan biaya produksi tidak selalu diikuti dengan meningkatnya harga jual produk petani karena petani tidak memiliki kemampuan untuk menentukan harga pasar. Harga pasar lazimnya ditentukan oleh pengepul atau tengkulak. Kondisi ini tentu membuat keadaan petani kian termarjinalkan. Termasuk pula di sektor perkebunan, di mana kenaikan harga produksi perkebunan selalu lambat dari harga produksi kebutuhan pokok. Petani biasanya selalu kalah dalam hal penentuan harga akibat kuatnya dominasi penentuan harga dari pabrik. Apalagi, terhadap harga komoditas yang banyak dikendalikan oleh harga pasar dunia.

Keempat, pemerintah beberapa kali membantah bahwa kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok belakangan ini lebih disebabkan oleh kegagalan panen dan ketidaklancaran

distribusi. Bukan disebabkan oleh dampak psikologis atas rencana kenaikan harga BBM. Mungkin, tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Yang jelas, realitas di lapangan menunjukkan adanya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Pemerintah nyatanya tidak bisa mengamankan harga di pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum mampu mengantisipasi berbagai gejolak responsif di lapangan. Seperti kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, banyak pengusaha cengeng yang sudah buru-buru menaikkan harga produksinya sebelum harga BBM benar-benar naik.

Kelima, pada keluarga miskin, yang menjadi tekanan adalah porsi konsumsi mereka yang sudah sulit untuk dikurangi. Pola pengeluaran ini tidak bisa diganti dengan kompensasi di luar pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti halnya nelayan, di mana 70 persen anggarannya digunakan untuk membeli BBM. Pada titik inilah, titik maksimum kemampuan mereka berhemat. Pemberian kompensasi kenaikan BBM subsidi berupa penggantian uang dan batu es tidak banyak berarti karena yang dibutuhkan nelayan adalah BBM yang murah. Bagi nelayan kecil, biaya untuk BBM kerap kali lebih besar ketimbang hasil tangkapan.

Hft.... Tarik napas lagi panjang-panjang....

Buat Pak Bupati, ayo *toh,* Pak, lakukan sesuatu! Tidak cukup hanya dengan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menjaga stok pangan, BBM, dan kebutuhan pokok masyarakat, serta mengawasi agar kompensasi kenaikan BBM diberikan tepat sasaran. Sebagai respons jangka pendek, mungkin ini dapat dilakukan, tetapi untuk jangka menengah dan panjang, ayo buat

terobosan agar kita memiliki ketahanan dan kemandirian energi. Kita punya matahari, angin, laut, etanol, bahkan sampah yang dapat menjadi sumber daya alternatif.

Buat Pak Rektor Universitas Jember (UJ) yang baru, ayo Pak, jadikan kampus sebagai agen perubahan dan pembaruan, minimal untuk wilayah tapal kuda. Kan, UJ punya orang-orang pintar berkelas nasional dan internasional atas risetnya untuk digagas dan diimplementasikan. Ayo, Pak, singkong jangan hanya menjadi pengganti gandum saja, mungkin singkong bisa juga jadi sumber bioenergi. Percaya deh Pak, kita bisa, kan katanya *man jadda wajada...!*

54

HASIL INVESTASI EMAS YANG MENGGIURKAN [52]

Emas memang selalu memikat. Nilainya yang terus meningkat dalam jangka waktu menengah dan panjang menjadi alasan utama untuk menjadikannya sebagai instrumen investasi. Tak heran jika terus bermunculan perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa investasi emas. Termasuk pula salah satunya perusahaan berlabel syariah yang memberi penawaran imbalan hasil yang menggiurkan bagi investor (www.kontan.co.id, 18 Juni 2012).

Harga emas tercatat mengalami kenaikan cukup tinggi mulai tahun 2001 dengan rata-rata kenaikan sekitar 17 persen. Sebelumnya, kenaikan harga hanya di kisaran enam persen. Banyak pihak yang meyakini bahwa emas tengah mengalami *bubble*. Hal ini didasari oleh kian maraknya emas menjadi komoditas dan semakin kuatnya keyakinan

52 Dimuat Kontan, Opini. 22 Juni 2012. Judul asli "Investasi Emas (Syariah) Berimbal Hasil Menggiurkan?"

masyarakat bahwa emas akan mengalami kenaikan harga secara permanen melampaui tingkat inflasi.

Dapat dipahami jika investasi emas menjadi tampak menarik karena apresiasinya jauh lebih besar daripada deposito atau sejenisnya. Gaung emas pun merambah industri jasa keuangan syariah. Kegiatan *rahn* dan *qardh* untuk emas di perbankan syariah menjadi motor penggeraknya. Hampir semua Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia kini telah mempunyai layanan gadai emas.

Emas dalam sejarah ekonomi syariah memang mendapat perhatian besar. Wacana mata uang dinar yang banyak digaungkan para pelaku ekonomi syariah sebagai alat transaksi tidak lepas dari keunggulan nilai emas yang relatif stabil. Namun, stabil bukan berarti tidak mengalami inflasi. Nilai emas yang di-*backup* oleh intrinsiknya-lah yang menjadi dasar argumen emas lebih baik daripada *fiat money*.

Namun demikian, keberadaan emas sebagai alat transaksi atau sebagai instrumen *hedging* harus dipisahkan dengan kinerja emas dalam konteks kekinian. *Bubble* emas yang tengah berlangsung saat ini terjadi karena adanya spekulan. Pengalaman 2008 menunjukkan perilaku investor dalam mengantisipasi krisis kredit yang menyebabkan pasar saham anjlok adalah dengan memborong emas. Yang terkini, aksi George Soros yang menambah portofolio logam mulianya hingga 273,96 persen pada Mei lalu. Aksi Soros mengundang pertanyaan mengingat harga emas saat itu sudah jatuh 8,1 persen per Maret dan tercatat sebagai penurunan terbesar sejak 2004.

Fluktuasi Emas

Jika sebuah perusahaan investasi emas berlabel syariah berani menawarkan imbal hasil *fixed rate* yang cukup tinggi dalam jangka waktu pendek, maka pertanyaan yang mengemuka adalah 'benarkah mekanisme yang ada sudah memenuhi prinsip syariah'?

Logika ekonomi tentu akan berbicara bahwa investasi emas akan memberi keuntungan jika harga emas mengalami kenaikan. Jika harga emas turun, maka investor akan mengalami kerugian. Dalam jangka menengah dan panjang, pengalaman di masa lalu mungkin dapat menjadi argumen untuk mengatakan harga emas ke depan memiliki tren kenaikan. Namun, dalam jangka waktu pendek yang kurang dari setahun, pengalaman menunjukkan bahwa emas juga mengalami fluktuasi yang mengikuti *up and down* perekonomian.

Mungkin, tak banyak yang mengingat bagaimana volatilitas harga emas bulanan dan tahunan selama sepuluh tahun terakhir. Secara bulanan, penurunan harga emas tertinggi pernah terjadi sebesar 16 persen di bulan September 2008 ke Oktober 2008. Secara tahunan, penurunan harga emas tertinggi pernah terjadi hingga 41,5 persen di tahun 2008 ke 2009. Mei 2012 lalu, kontrak emas berjangka untuk pengantaran Juni merosot 0,6 persen. Nilai ini adalah posisi terendah dalam empat bulan terakhir seiring dengan kekacauan politik yang kian memburuk di Yunani yang memberi sentimen positif terhadap US Dollar sebagai aset lindung nilai.

Secara keseluruhan, bukti empiris ini menunjukkan bahwa fluktuasi emas cukup tajam dalam jangka waktu pendek.

Kinerja emas saat ini bukanlah berbasis sektor riil murni yang dapat dipertanggungjawabkan kealamiahan penawaran-permintaannya. Emas sebagai komoditas dan faktor spekulan adalah salah satu variabel laten utama yang memengaruhi emas menjadi *bubble*. Pertanyaannya kemudian, jika yang terjadi ke depan adalah penurunan harga emas secara signifikan, lalu bagaimana perusahaan jasa investasi emas berlabel syariah itu dapat memenuhi janjinya untuk memberi bonus hingga 30 persen untuk kontrak setahun?

Perspektif Syariah

Dalam peta industri jasa keuangan syariah, bisnis investasi emas boleh jadi termasuk dalam komponen pasar modal syariah. Jika dipetakan, industri jasa keuangan syariah meliputi tiga komponen utama, yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah, dan takaful yang masing-masing di dalamnya terdiri dari beberapa subkomponen. Kecilnya pasar jasa keuangan syariah boleh jadi tidak memberi pengaruh signifikan bagi perekonomian. Namun demikian, tidak dapat dimungkiri, pertumbuhannya yang pesat mendorong banyak sektor untuk turut menyandang label syariah demi mengakses pasar yang masih sangat besar.

Sebuah kajian tentang dampak pergerakan harga emas kepada *capital adequacy ratio* (CAR) individual bank syariah memberikan pesan penting. Skenario penurunan harga emas sebesar 25 persen dan 50 persen ternyata berpotensi menurunkan CAR sejumlah bank syariah hingga di bawah 8 persen. Kajian ini

mengindikasikan bahwa industri jasa keuangan syariah pun rentan terhadap fluktuasi harga emas.

Oleh karena itu, dapat dipahami jika iming-iming imbal hasil yang menggiurkan dari perusahaan investasi emas berlabel syariah menimbulkan dugaan adanya kegiatan spekulasi yang mengarah pada unsur *maysir*. Di kalangan ekonom syariah, memang masih terdapat perdebatan tentang praktik spekulasi berbasis *maysir* ini. Sebagian berpendapat bahwa *maysir* bermakna pengambilan risiko yang tidak mampu ditanggung. Sebagian lain berpendapat bahwa *maysir* adalah spekulasi yang tidak meningkatkan agregat pasokan barang dan jasa. Apa pun itu, janji imbal hasil yang cukup tinggi dalam jangka waktu pendek memberi ruang besar untuk mempertanyakan keabsahan *syariah compliance* dalam mekanisme investasi dan pemberian imbal hasil. Kalau sudah begitu, semoga saja Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat segera merespons kegiatan investasi tersebut melalui fatwanya untuk memperjelas keabsahannya.

55

MELIRIK WAKAF PRODUKTIF[53]

Apa yang ada di benak anda ketika mendengar sebuah negara bernama Bahrain? Saya yakin, bapak-bapak dan mas-mas pasti akan lebih mengenal nama negara ini ketimbang ibu-ibu dan mbak-mbak. Hayo, kenapa? Ya, kalau bapak-bapak dan mas-mas, terutama yang penggila bola, tentu masih lekat diingatan ketika tim nasional (Timnas) Indonesia dikalahkan 10-0 oleh Timnas Bahrain di sebuah stadion 'kumuh' di Bahrain. Menyakitkan, ya! Tapi, meski kalah mengenaskan, warga Indonesia yang bermukim di Bahrain tetap menyambut pemain Timnas Indonesia bak selebriti, lho!

Pertengahan April lalu, alhamdulillah, saya mendapat kesempatan mengunjungi Bahrain selama hampir dua pekan. Penantian selama hampir setahun untuk mengunjungi Negeri Dua Lautan tersebut, akhirnya terjawab dengan sebuah *calling visa* dari Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) yang merekomendasikan kunjungan saya melalui sebuah invitasi riset.

53 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 2 Juli 2012.

Ya, Bahrain sebenarnya adalah satu pusat keuangan dan perbankan dunia, termasuk bagi industri keuangan dan perbankan Islam. Bahrain juga menjadi yang terdepan di antara negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) dalam mengembangkan sistem keuangan dan perbankan Islam. Meski mungkin Dubai dan Qatar memiliki sejumlah ikon megah yang dibangun dengan instrumen keuangan Islam, bahkan Oman masih baru saja memikirkan untuk mengembangkan sistem keuangan dan perbankan Islam, Bahrain telah jauh lebih dulu memulainya. Dari sisi infrastruktur regulasi dan *human capital*, Bahrain memiliki semuanya.

Dalam kesempatan kunjungan riset tersebut, setidaknya ada enam misi yang harus saya sampaikan di sana. **Pertama,** tentang Indonesia. **Kedua,** tentang riset saya. **Ketiga**, tentang industri keuangan dan perbankan Islam di Indonesia. **Keempat,** tentang potensi kolaborasi riset Bahrain-Indonesia. Empat hal inilah yang saya presentasikan dalam sebuah forum *focus group discussion* (FGD) bersama *Center for Islamic Finance*-BIBF.

Lho, kok cuman empat materi presentasinya? Padahal, tadi bilangnya bawa enam misi? Ya, misi **kelima** saya adalah menyampaikan presentasi tentang ide proyek wakaf produktif nasional Pesantren Ekonomi Syariah (PES) di pegunungan Sentul, Bogor. Presentasi ini tidak saya sampaikan dalam FGD tersebut. Proyek ini saya presentasikan kepada seorang warga Indonesia yang bekerja sebagai *senior lecturer* dan *business development manager* di *Center for Islamic Finance* BIBF.

BIBF adalah sebuah perguruan tinggi yang berada di bawah Central Bank of Bahrain (CBB). Jejaringnya tentu adalah industri

keuangan dan perbankan di sana. Saya dan kolega saya tersebut mencoba memfasilitasi untuk mencoba mengalirkan dana Timur Tengah ke Indonesia. Proyek wakaf produktif 'PES' adalah salah satu upaya mempromosikan Indonesia kepada Bahrain.

Ya, namanya juga mencoba. Mungkin perlu waktu mengingat Timur Tengah, termasuk Bahrain, memiliki kecenderungan untuk bekerja sama dengan Malaysia ketimbang Indonesia. Pelaku industri keuangan dan perbankan Islam di Timur Tengah memang lebih *Malaysia-oriented.* Tapi, beneran deh, Indonesia sesungguhnya punya potensi luar biasa untuk mengungguli Malaysia. *Saking,* kita kerap minder dan *underestimate* terhadap kemampuan kita sendiri.

Btw, saya melihat *booming* sistem ekonomi Islam juga sudah mulai merambah tapal kuda, termasuk di Jember, Lumajang, dan Bondowoso. Setidaknya hal ini tecermin dari mulai maraknya perbankan syariah dan banyak bermunculannya lembaga amil zakat (LAZ) di wilayah ini. Pertanyaan yang muncul di benak saya adalah apakah ide wakaf produktif sudah mulai dipikirkan pula oleh institusi-institusi tersebut?

Sedikit *sharing* tentang 'PES' yang saat ini tengah digodok untuk menjadi proyek wakaf produktif nasional. Di atas sebuah lahan wakaf seluas 1,6 hektar tersebut, akan dibangun berbagai fasilitas *training,* hunian, *outbond,* spiritual, dan sosial. Dibelah oleh Sungai Cibarengkok dan dikelilingi hutan alam, kawasan ini dapat dicapai dari Jakarta sekitar satu jam perjalanan via tol Jagorawi selepas keluar tol Sentul Selatan.

Nah, mekanisme yang tengah dirancang oleh pengelola wakaf ini adalah mengomersialkan area hunian untuk membiayai berbagai pelatihan ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah secara gratis. Mengingat yang terlibat dalam struktur *nazhir* adalah tokoh-tokoh yang menjabat di bank sentral, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), direksi lembaga keuangan dan perbankan syariah, anggota DPR-RI, BUMN, perguruan tinggi nasional, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), maka tak mustahil jika proyek ini akan menjadi salah satu model proyek wakaf produktif yang menjadi acuan di Indonesia. Terlebih lagi, model pengembangan berbasis salah satu kebutuhan paling urgensi dari industri keuangan dan perbankan syariah Indonesia saat ini adalah sumber daya insani dan *knowledge improvement*.

Mmm, jangan anda bayangkan kalau ingin berwakaf harus punya tanah dulu, ya. Jangan bayangkan juga kalau ingin berwakaf harus punya uang banyak. Jika institusi *nazhir* memiliki ide dan kreatif, tidak mustahil di Jember, Lumajang, dan Bondowoso juga bisa mengembangkan proyek wakaf produktif. Instrumen keuangan yang *genuine* dari ajaran Islam ini adalah sumber pendanaan swadaya masyarakat yang sangat murah yang dapat ditransformasikan menjadi modal usaha sosial ekonomi. *Nazhir* dapat menginvestasikannya pada sektor usaha yang halal dan produktif. Keunggulan kontraknya yang tidak memiliki kualifikasi mustahik dan tidak mengenal jatuh tempo, tentu akan memberi ruang besar bagi *nazhir* untuk mengoptimalisasikannya.

Ya, sejarah Islam di masa lalu juga telah menunjukkan peran nyata dari kegiatan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan,

baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta peradaban. Ide Gerakan Wakaf Produktif Rp1.000 juga adalah hal sederhana untuk membangun ide-ide besar.

Mmm, satu lagi, saya belum cerita tentang misi **keenam** saya, kan? Iya, saya dititipi pesan oleh kolega dosen di Bahrain untuk bercerita tentang perempuan Indonesia. Ternyata, di Bahrain, kebanyakan warga sana menganggap bahwa perempuan Indonesia itu hanya bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Semula saya juga tidak percaya. Tapi 1, 2, 3... dan 10 orang teman-teman saya yang biasa hilir mudik di Eropa dan Timur Tengah karena urusan studi dan pekerjaan mengatakan bahwa kebanyakan orang di sana memang memiliki *mindset* bahwa perempuan Indonesia hanya bisa bekerja sebagai PRT.

Btw, semoga ide wakaf produktif ini dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman yang berkecimpung di industri keuangan dan perbankan syariah, LAZ, dan syukur-syukur bisa menjadi jawaban untuk mereka yang sedang mencari jalan investasi abadi di dunia dan akhirat. *Wallahua'lam bish showab.*

56

BERTRANSAKSI EMAS JELANG RAMADAN?[54]

Sudah mau Ramadan. Hayo, siapa yang kalau menjelang bulan puasa suka bertransaksi emas? Coba perhatikan, kalau menjelang bulan puasa seperti saat ini, pasti tempat-tempat pegadaian semakin ramai. Nasabah pegadaian dapat dipastikan melonjak. Selain barang elektronik, banyak juga yang menggadaikan emasnya. Alasan yang kerap dikemukakan adalah untuk memenuhi kebutuhan di bulan puasa. Apalagi, bulan puasa ini berdekatan dengan tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah.

Selain pegadaian, toko emas di beberapa tempat juga menggeliat. Meski tidak seramai pegadaian, tetapi ada fenomena menarik yang bisa kita lihat di toko emas. Jika orang pergi ke pegadaian untuk menggadaikan emas dan kemudian mulai mencicilnya pascalebaran, orang yang ke toko emas itu ternyata ada yang berperilaku kebalikan. Ya, mereka ke toko emas untuk membeli emas, kemudian menjualnya lagi setelah lebaran usai. *Mmm*, kira-kira untuk apa ya, mereka melakukan hal demikian?

54 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 16 Juli 2012.

Bukan tak ada angin tak ada badai jika saya tiba-tiba menulis tentang emas. Tidak bisa kita mungkiri, emas saat ini sedang mengalami *booming*. Meski dalam beberapa bulan terakhir harga emas mengalami penurunan, tetapi banyak yang meyakini bahwa emas akan kembali memecahkan rekor. Sejak 2001, pertumbuhan harga emas memang menakjubkan. Nah, gara-gara menakjubkan itulah, makanya emas bak gula yang dikerubuti semut. Banyak industri yang muncul yang menawarkan berbagai ragam investasi emas.

Madura dan Emas

Saya adalah orang Madura. Meski banyak kolega di Lumajang dan Jember yang meragukan saya seorang Madura, tapi kalau saya di Surabaya, Yogya, atau Jakarta, banyak orang yang dengan mudah menodong pernyataan, "Kamu Madura, ya?". Logat saya memang menjadi tampak Madura jika sudah berkumpul dengan orang-orang bukan Madura. Tapi, saya menjadi tidak tampak Madura jika berkumpul dengan orang-orang Madura.

Nah, di Lumajang, Jember dan Bondowoso ini banyak yang beretnis Madura, kan? Saya pernah membaca sebuah kajian kualitatif yang menyatakan bahwa orang Madura punya kebiasaan menabung uang dalam bentuk emas. Saya melihat ada benarnya juga hasil kajian tersebut. Saya sering melihat orang Madura gemar memakai gelang atau kalung emas yang amat besar. Memang, ini tidak boleh digeneralisasi, karena yang terpotret adalah fenomena yang terlihat dalam suatu waktu atau hanya

pada suatu lokasi. Kalau mau menggeneralisasi, ya idealnya harus menggunakan pendekatan kuantitatif. Tapi, setidaknya kajian tersebut menunjukkan bahwa orang Madura cukup berorientasi pada emas.

Dalam sejarah ekonomi Islam, emas memang mendapat perhatian besar. Mata uang dinar yang berbasis emas diyakini sebagai mata uang terbaik karena nilainya sesuai intrinsik sehingga lebih stabil daripada *fiat money*. Namun demikian, stabil bukan berarti tidak mengalami inflasi, lho! Buktinya, di Jember, kenaikan harga emas sempat menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada Februari 2012 lalu. Komoditas emas menyumbang inflasi 0,10 persen untuk angka inflasi 0,27 persen. Kenaikan ini meningkat seiring dengan meningkatnya harga emas dunia saat itu.

Nah, gara-gara banyak yang meyakini bahwa harga emas akan terus meningkat, kini ada gejala menjamurnya praktik bisnis investasi emas. Sudah sejak dua tahun lalu, saya sering menerima *personal message* yang menanyakan investasi emas di perusahaan X, Y, Z, dan lain-lain. Mereka yang bertanya kebanyakan justru yang tinggal di Jabodetabek. Hal ini menyiratkan bahwa kota metropolitan tengah digempur oleh beragam model bisnis investasi emas.

Berdasarkan pengalaman, jika pasar di kota metropolitan sudah mulai jenuh, maka pebisnis akan ekspansi ke daerah-daerah. Saya tidak tahu apakah bisnis demikian sudah masuk ke tapal kuda, terutama ke Lumajang, Jember, dan Bondowoso. Saya menulis artikel ini, bermaksud untuk mengingatkan kepada siapa saja yang berorientasi pada investasi emas untuk selektif.

Jangan mudah tergiur oleh tawaran imbal hasil tinggi atas sebuah bisnis yang berlabel investasi emas. *Too good to be true*. Tidak jarang kita menemukan pemberitaan tentang perusahaan investasi yang menjamin keuntungan besar dalam jangka waktu pendek yang ujung-ujungnya ternyata adalah *money game*. Fokus mereka bukan untuk memproduksi sesuatu atau aktivitas lain yang menghasilkan, tetapi lebih menekankan kepada *member get member*.

Ramadan dan Pengendalian Diri

Seperti yang sudah-sudah, inflasi umumnya sulit lepas dari bulan Ramadan. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) biasanya akan sergap bekerja memantau inflasi. Fakta empiris menunjukkan permintaan sembako pada hampir seluruh mata rantai distribusi akan melonjak. Hal ini sebenarnya kontradiktif karena puasa yang sejatinya mengurangi konsumsi sembako, tetapi justru mengalami peningkatan permintaan sembako.

Bagi mereka yang menggadaikan atau menjual emas menjelang bulan Ramadan, seharusnya tidak perlu pula menjadikan bulan ini sebagai beban keuangan sehingga mereka harus berkorban sedemikian rupa. Lain halnya jika mereka sengaja dengan tujuan meningkatkan nilai sedekah dan infak di bulan tersebut.

Bagi mereka yang membeli emas menjelang bulan Ramadan dan menjualnya kembali setelah lebaran, seharusnya juga tidak perlu menjadikan bulan puasa atau lebaran sebagai ajang untuk

menampilkan aset ketika bersilaturahmi. Hal-hal demikian tentu tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

Bagi mereka yang berorientasi pada emas, tentu tidak dilarang jika bermaksud untuk menabung. Menabung ya, bukan menimbun! Islam melarang penimbunan. Harta harus berputar di sektor riil agar terdistribusi.

Bagi mereka yang tergiur dengan investasi emas, berhati-hatilah. Pergerakan harga emas sulit ditebak belakangan ini. Wacana tentang emas yang tengah mengalami *bubble* perlu diperhatikan. Jangan manfaatkan gadai emas sebagai jalan berinvestasi emas dengan aksi spekulasi. Kendati terbukti andal mengimbangi inflasi, investasi emas bukan tanpa risiko. Volatilitasnya cukup tajam dalam jangka pendek. Silahkan menabung emas dengan tujuan untuk berjaga-jaga. Emas sejatinya berfungsi sebagai alat pembayaran, bukan alat spekulasi. Yang terbaik tetaplah kembali pada sektor riil. Mumpung Ramadan, yuk, kita belajar mengendalikan diri!

57

BERPIHAKLAH PADA SEKTOR PERTANIAN![55]

Sepekan terakhir ini, terdapat dua persoalan di sektor pertanian yang menjadi berita panas. **Pertama,** melonjaknya harga kedelai impor yang berujung pada aksi mogok produksi massal yang dimotori para perajin tahu tempe di ibu kota selama tiga hari. **Kedua,** gagal panennya petani tembakau dan cabai di Jember Selatan karena banjir. Yang mengenaskan, gagal panen ini ternyata menggunakan dana pinjaman perbankan sekitar Rp70-90 juta untuk membiayai penanamannya.

Dalam kasus pertama, jika kita kilas balik ke belakang, ketergantungan terhadap impor kedelai terkait langsung dengan krisis ekonomi 1997/1998 yang berujung pada penandatanganan *letter of intent* (LoI) antara International Monetary Fund (IMF) dan pemerintah Indonesia. Saat itu, kesepakatan tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa pemerintah harus mengurangi dan meniadakan proteksi terhadap sektor pertanian.

55 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 30 Juli 2012.

Dalam jangka pendek, kebijakan tersebut menguntungkan konsumen karena harga komoditas menjadi rendah. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menimbulkan disinsentif bagi petani untuk menanam komoditas pertanian. Tidak ada pemihakan bagi sektor pertanian. Pelaku ekonomi di sektor hulu tidak memiliki insentif untuk melakukan kegiatan di sektor ini. Akibatnya, seperti yang kita lihat sekarang, pangan Indonesia dalam satu dekade sesudahnya menjadi sangat tergantung pada produk impor.

Dalam kasus kedua, persoalan ini seharusnya dapat diatasi jika pemerintah merumuskan kelembagaan sektor pertanian yang antisipatif dan berpihak. Rentannya kelembagaan sektor pertanian di Indonesia merupakan dampak ikutan dari cerita kilas balik pada kasus pertama. Berbagai perubahan di dalamnya banyak terabaikan. Alhasil, degradasi sektor pertanian bukanlah isapan jempol. Kepemilikan lahan petani semakin menciut karena pola warisan, tekanan pendapatan, dan penetrasi sektor industri/jasa. Akses kredit kian sulit karena persyaratan prosedur yang berat. Sementara itu, relasi kerja di sektor pertanian tidak terstruktur dengan mekanisme yang kooperatif.

Secara keseluruhan, kedua kasus di atas merupakan ironi sektor pertanian di Indonesia. Indonesia yang membawa nama besar negara agraris dengan semangat membangun ketahanan pangan nyatanya kini hanya menjadi retorika politik. Dapat dimafhumi jika banyak yang membandingkan bahwa urusan pangan terasa lebih mudah di zaman Soekarno dan Soeharto. Di kedua pemerintahan tersebut, sektor pertanian memang menjadi

prioritas kerja pemerintah. Bahkan, Soekarno menyatakan, urusan pangan adalah menyangkut mati dan hidupnya bangsa ini.

Minim Perhatian

Kurang perhatiannya pemerintah saat ini terhadap sektor pertanian tecermin salah satunya dari minimnya anggaran. Tahun 2012, anggaran pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp18 triliun. Bandingkan dengan anggaran keagamaan yang mencapai Rp37 triliun. Anggaran di kelautan malah lebih memprihatinkan, hanya sebesar Rp5 triliun.

Tidak hanya di pusat, di daerah pun tak berbeda jauh. Di Jember, sektor pertanian yang menjadi kontributor terbesar bagi produk domestik regional bruto (PDRB) juga belum mendapat perhatian yang memadai. Sepanjang 2005-2009, sektor pertanian terhadap perekonomian Jember menyumbang rata-rata 44,35 persen. Di Lumajang, sepanjang 2000-2007, sumbangan sektor pertanian rata-rata 34,13 persen. Di Bondowoso, sepanjang 2006-2008, sumbangan sektor pertanian mendominasi di kisaran 48,43 persen. Saya tidak memiliki data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi saya yakin alokasi APBD untuk sektor pertanian di masing-masing wilayah pun tidak dominan.

Jika sektor pertanian tidak mendapat tempat di APBN maupun APBD, demikian pula di perbankan. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan besaran pembiayaan perbankan bagi sektor pertanian relatif minim. Di Bondowoso, pembiayaan yang diberikan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada

sektor pertanian kurang dari 20 persen. Bahkan, tren yang terjadi sepanjang 2006 hingga 2011 menunjukkan penurunan menjadi 11 persen. Dalam periode yang sama, pinjaman yang diberikan pada sektor pertanian di Jember sempat mengalami kenaikan pada 2010 menjadi 26 persen, tetapi kemudian turun menjadi 11 persen pada 2011. Di Lumajang, situasinya lebih minim lagi. Pada periode yang sama, pinjaman bagi sektor pertanian rata-rata hanya delapan persen. Barulah pada 2011 mengalami sedikit kenaikan menjadi sepuluh persen.

Insentif Sektor Pertanian

Tidak bisa dimungkiri, konflik ketidakadilan sumber daya dapat memicu krisis sosial. Terlebih lagi, persoalan komoditas pertanian sangat mudah untuk masuk ke dalam ranah ekonomi politik. Persoalan ini signifikan dalam memengaruhi ekonomi masyarakat. Jika berkepanjangan, dapat mengancam ketahanan ekonomi dan keamanan nasional. Buruknya manajemen dan keberpihakan adalah kunci persoalan.

Tahun 2005, pemerintah sesungguhnya telah mencanangkan revitalisasi pertanian untuk membangun industrialisasi pertanian. Tapi, program ini tidak efektif karena yang terjadi di lapangan malah menunjukkan ekspor bahan baku di sektor pertanian kian meningkat. Kebijakan ekspor bahan baku selama ini hanya menguntungkan pengusaha besar. Kesadaran untuk membuat produk yang memberikan nilai tambah masih minim. Untuk itu, pemerintah perlu memberi insentif bagi sektor pertanian.

Pemberian *tax holiday* seharusnya diperuntukkan bagi sektor industri pertanian yang bisa memberikan kesempatan dan lapangan kerja yang luas. Pertanian bisa diandalkan untuk menumbuhkan optimisme bangsa karena pemberdayaan ekonomi petani adalah jalan cepat mengentaskan masalah pengangguran dan kemiskinan.

Tentu dapat dipahami jika petani saat ini perlahan tapi pasti meninggalkan pekerjaan utamanya. Selain rata-rata penguasaan lahan pertanian per petani yang kian mengecil, nilai tukar petani (NTP) pun relatif paling rendah daripada nilai tukar sektor ekonomi lainnya. Jelas, negara harus turut campur dalam hal ini. Tidak adanya keberpihakan pemerintah akan mengakibatkan krisis pada produksi pertanian itu sendiri. Tidak hanya dari *output* pertanian, tetapi juga dalam hal ketenagakerjaan. Terapi jangka pendek hanya membantu sesaat. Pemerintah harus menelurkan kebijakan berdimensi jangka panjang.

Terdapat beberapa langkah urgen yang harus diambil oleh pemerintah. **Pertama,** kebijakan liberalisasi di sektor pertanian harus dihadapi dengan proteksi yang memadai. Tanpa pola pemihakan yang jelas, perekonomian nasional hanya akan menjadi permainan liberalisasi yang didorong oleh negara-negara maju. **Kedua,** basis ekonomi domestik adalah sektor pertanian sehingga pembangunan seyogyanya bertumpu pada sektor pertanian yang diarahkan untuk memberi dampak ikutan pada perkembangan sektor industri dan jasa berbasis komoditas pertanian. **Ketiga,** pembangunan infrastruktur pertanian secara masif, seperti jalan, irigasi, penyuluhan, pengadaan bibit/ pupuk, sistem informasi,

dan jaringan pemasaran yang sederhana sehingga dapat menjadi sumber kegairahan baru pelaku ekonomi hulu untuk beraktivitas di sektor pertanian. **Keempat,** stabilitas pasar melalui perubahan struktural untuk menjamin kepastian bagi konsumen komoditas pangan. Dalam hal ini, dibutuhkan interaksi strategis antara sektor publik dan swasta untuk mencegah instabilitas pasar dan krisis hasil pertanian. **Kelima,** alokasikan dana subsidi bagi petani, mulai dari pendanaan penanaman dengan biaya murah tanpa jaminan, mengamankan stok pupuk, penyediaan benih dan bibit tepat waktu dengan harga terjangkau, pendampingan berbasis petani kecil, dan alokasikan subsidi gagal panen.

Petani Tembakau dan Cabai?

Lalu, bagaimana dengan nasib petani tembakau dan cabai yang mengalami gagal panen dan harus membayar cicilan utang kepada bank?

Dalam jangka pendek, saya kira yang dapat dilakukan adalah: **Pertama,** pemerintah daerah (Pemda) perlu melakukan intervensi untuk membantu petani atau kelompok tani untuk bernegosiasi dengan perbankan guna penundaan pembayaran. **Kedua,** gerakkan Dinas Pengairan untuk mengeruk sungai yang dangkal sehingga air dari lahan pertanian dapat mengalir ke sungai. Perbaiki irigasi. Gerakkan pihak ketiga untuk membantu pendanaan atau segerakan serap dana yang sudah dialokasikan untuk memperbaiki sistem pengairan. **Ketiga**, Pemda dapat menggandeng lembaga amil zakat sedekah infak wakaf (LAZISWA)

untuk memberi bantuan murah bagi petani yang benar-benar mengalami kejatuhan dan sangat membutuhkan. Pemda dapat juga mencarikan dana *corporate social responsibility* (CSR) tak bersyarat untuk dialokasikan bagi petani tersebut. **Keempat,** dekati petani untuk tetap bertahan dengan pekerjaannya. Benahi pola pikir petani kecil yang kerap berspekulasi untuk tidak melakukan pertanian berisiko tinggi. Apalagi, dengan basis utang, petani seyogyanya harus memilih pertanian yang relatif aman. **Kelima,** temuilah korporasi-korporasi yang melakukan kemitraan dengan petani untuk memperbaiki kontrak agar memenuhi *win-win solution*. Tidak bisa dimungkiri, mekanisme ijon tidak hanya digunakan oleh tengkulak secara individu, korporasi besar kerap juga menggunakannya kepada organisasi petani.

Dalam jangka menengah, jika memang terdapat APBD Perubahan, alihkan dana yang tidak terserap atau yang teralokasi pada pos-pos tidak prioritas kepada sektor pertanian. Cadangkan dana subsidi gagal panen. Saya tahu, dana subsidi gagal panen rawan untuk dikorupsi. Oleh karena itu, ajak semua pihak untuk terlibat dalam mengawasi mekanisme pemberiannya agar tepat sasaran. Transparansi adalah kuncinya. Dana ini tidak terelakkan karena *global warming* secara nyata memberi pengaruh bagi cuaca yang *unpredictable* bagi sektor pertanian.

Dalam jangka panjang, saya kira artikel ini tidak akan cukup untuk mendiskusikannya. Tapi, yang substansial untuk disampaikan adalah arah kebijakan ekonomi daerah dan nasional yang harus ditujukan kepada sektor-sektor yang sarat dengan kepentingan rakyat, terkait dengan potensi dan kapasitas rakyat,

serta sesuai dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Sektor perekonomian yang harus dikuatkan dan menjadi pilihan strategis hendaknya berbasis SDM dan SDA domestik, bertitik sentral pada rakyat, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Sektor manakah yang harus dikuatkan? Saya percaya hadis Nabi, 'air, padang rumput, dan api' adalah tiga elemen dasar yang menempatkan manusia berserikat di dalamnya. Wilayah kita diberkahi sumber daya tersebut. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang baik (manajemen) dan keberpihakan. *Wallahua'lam bish showab.*

58

SWASEMBADA KEDELAI, MUNGKINKAH?[56]

"Kedelai langka, eh petani disuruh tanam kedelai. Kalau harga rendah dan produktivitas kecil, masa kita para petani mau nanam? Mending tanam palawija yang lain. Kalau mau nekan, tinggal mau beli dengan harga mahal, kagak? Wani piro*? Saran saya, mending gak usah makan tempe dan tahu, ganti saja dengan kangkung, simbukan, daun bluntas, lele, wader, dan belut. Murah. Tidak repot!"*

Itulah secuplik status Fesbuk dari Pak Soegito asal Puger, Jember Selatan. Pascapemberitaan mogok produksi tahu tempe di ibu kota beberapa waktu lalu, yang diikuti dengan pencanangan pemerintah untuk berswasembada kedelai tahun 2014, Pak Soegito menyampaikan unek-uneknya di status Fesbuk.

Pak Soegito mungkin bukan petani sejati. Usahanya lebih banyak berkonsentrasi pada bisnis ayam pelung. Tetapi, keluarga

56 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 10 September 2012.

besarnya menanam kol dan jagung. Bagi Pak Soegito dan keluarga, menanam kedelai tidak ada menariknya. Menanam jagung terbukti jauh lebih menguntungkan. Meski biaya produksi kedelai lebih rendah daripada jagung, tetapi hasilnya sedikit. Dalam lahan satu hektar yang sama, produksi jagung dapat mencapai tiga sampai empat kali lipat dari kedelai. Meski harga jual kedelai lebih tinggi daripada jagung, tetapi biasanya harga kedelai jatuh saat panen. Belum lagi tenaga yang harus dikeluarkan untuk menjemur, menumpuk, dan menjemur lagi sampai kira-kira seminggu, baru bisa didores dan dijual.

"Dulu tuh Mbak, yang namanya jagung itu besarnya cuma sebesar jempol kaki. Jadi, hasilnya di bawah kedelai. *Lha,* kalau sekarang jagungnya *sak* lengan-lengan dan hasilnya berlipat-lipat! Di Amerika, kan, juga begitu kejadiannya. Banyak petani kedelai yang pindah ke jagung karena hasilnya lebih besar. Makanya, *supply* turun dan *demand* tetap. *So,* mau nggak mau, harga kedelai jadi naik. Sekarang tinggal kita saja yang menyiasati tempe diganti dengan perkedel jagung atau *iwak peyek*!" papar Pak Soegito kepada saya.

Saya tidak menampik pendapat Pak Soegito karena jawaban senada juga ditemukan dari pihak lain yang banyak berkecimpung di sektor pertanian. Mereka lebih tertarik menanam jagung daripada menanam kedelai. Meskipun harga kedelai saat ini mencapai Rp8 ribu per kilogram, tetapi petani lebih tertarik menanam jagung. Beberapa alasan yang dikemukakan di antaranya karena sulitnya mendapat benih kedelai, sulitnya

memenuhi kebutuhan air, perawatan yang harus intensif, harga yang tak stabil, dan tidak ada jaminan pasar.

Kedelai dan Perut Rakyat

Pemerintah sejauh ini menyatakan optimismenya bahwa Indonesia dapat meningkatkan produksi kedelai dalam negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar 2,6 juta ton kedelai. Untuk itu, pemerintah akan menambah luas areal tanam. Luas areal tanam kedelai saat ini sekitar 600 ribu hektar dengan kapasitas produksi 1,5 juta ton. Direncanakan akan ada penambahan lahan seluas 400 ribu hektar lagi dengan kemampuan produksi 2,5 ton per hektar.

Produk turunan utama dari kedelai di Indonesia memang adalah tahu tempe. Porsinya mencapai 85 persen. Yang menjadi persoalan, makanan yang menguasai perut orang banyak ini bersumber utama dari impor hingga mencapai 70 persen. Pada titik inilah, kedelai impor berhasil menjadi perangkap bagi Indonesia. Pada situasi ini, pemerintah seharusnya melakukan intervensi. Intervensi tidak melulu diartikan campur tangan terhadap harga pasar, tetapi yang utama adalah mengondisikan agar pasar tidak mengalahkan daulat rakyat kebanyakan. Jika Indonesia tak mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan rakyat banyak, maka seharusnya diupayakan agar rakyat tidak bergantung padanya. Perlu dicarikan jalan keluar agar ada substitusi yang dapat memenuhinya.

Jika disimak, kedelai lokal sesungguhnya juga memiliki keunggulan atas kedelai impor. Pada kedelai lokal, rendemennya

lebih tinggi dan tidak berasal dari benih transgenik sehingga minim risiko terhadap kesehatan. Sejumlah peneliti pemulia kedelai juga menyatakan, kandungan gizi kedelai lokal lebih unggul ketimbang impor. Sejumlah pihak bahkan ada yang menduga bahwa kedelai impor sarat ampas dengan sari pati yang rendah. Tak sedikit yang mengatakan bahwa tahu tempe yang berasal dari kedelai lokal ternyata juga jauh lebih *maknyus*.

Namun demikian, kedelai lokal punya masalah dalam hal fisik. Selain ukurannya yang kecil, kulit ari kacang sulit terkelupas saat proses pencucian sehingga proses peragiannya lebih lama. Setelah berbentuk tempe, proses pengukusannya agar menjadi empuk membutuhkan waktu lama. Dalam hal produksi, umur tanaman kedelai lokal lebih singkat 2,5-3 bulan daripada impor yang mencapai 5-6 bulan. Namun, kapasitas produksi kedelai impor lebih besar. Selain bijinya yang lebih besar, kemampuan produksi dapat mencapai dua kali lipat dari kedelai lokal per hektarnya. Ditambah lagi dengan kurang memadainya prasarana dan sarana industri, seperti minimnya penyediaan pembenihan, terbatasnya areal tanam, dan mekanisasi usaha tani yang bersifat tradisional, menyebabkan produksi kedelai secara nasional menjadi tak memikat.

Kedelai dan Jember

Dalam kunjungan Menteri Perdagangan pertengahan Agustus lalu ke Desa Curahlele Kidul, Jember, saya baru mengetahui bahwa setengah dari produksi kedelai nasional berasal dari Jember.

Subhanallah! Kemampuan produksi kedelai Jember diberitakan mencapai 2-2,5 ton per hektar. Pak Menteri mengharapkan agar bibit yang digunakan di Jember ini dapat disebarkan ke daerah lain.

Bisa jadi, potensi kedelai Jember ini pula yang menjadi salah satu alasan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember mendirikan Gabungan Koperasi Petani (Gakoptan) untuk turut serta mengembangkan komoditas kedelai sebagai salah satu produk pertanian andalan Jember. Gakoptan yang awalnya diorientasikan untuk pengembangan kakao sebagai tanaman rakyat unggulan, dalam perkembangannya, ternyata juga menjadikan kedelai sebagai bisnis komplemen.

Dengan keterbatasan sumber daya untuk menginisiasi, Dinas Koperasi mengajak koperasi-koperasi petani untuk tanggung renteng memodali usaha ini. Modal yang saya maksud di sini bukan hanya finansial, tetapi juga dalam menyediakan lahan dan pelaku usaha. Tentu saja hal tersebut patut diapresiasi.

Namun demikian, realitas menunjukkan adanya kendala pengembangan kakao dan kedelai jika tidak disertai dengan penambahan lahan baru. Jika harus menggunakan lahan produktif yang lama, petani harus benar-benar diyakinkan untuk bersedia menanam secara khusus dan pemerintah daerah harus dapat menjamin pasar serta tidak mengurangi tanaman komoditas lain yang lebih menguasai hajat perut orang banyak.

Jalan tengah yang paling mungkin dilakukan adalah menerapkan kebijakan tumpang sari atau pemanfaatan lahan tak produktif. Dalam hal ini, Gakoptan diharapkan dapat

menjadi pionir dalam upaya menjamin pasar. Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan pula dapat memberi insentif harga pokok penjualan maupun harga pembelian pemerintah yang menguntungkan petani, perajin, maupun konsumen.

Terakhir, saya ingin mengutip pidato Bung Hatta saat perayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 1954. *"... Pada dasarnya, kita harus menghasilkan barang-barang keperluan hidup bangsa yang bahannya terdapat di tanah air sendiri".* Sebuah hadis menyatakan, 'padang rumput, air, dan api' adalah tiga elemen substansi kehidupan orang banyak. Tak pelak lagi, siapa yang menguasainya, maka seharusnya dialah yang menguasai kehidupan. Sayang, kebanyakan dari kita baru menyadari ketika krisis telah terjadi. Pangan, air, dan energi menjadi masalah nyata di dunia. Lagi-lagi, respons yang muncul di negeri ini biasanya bersifat jangka pendek. Jika tak disertai komitmen dan keistikamahan, jangan heran jika swasembada kedelai 2014 hanya menjadi mimpi. *Wallahua'lam bish showab.*

59

APA KABAR PEGIAT KAKAO JEMBER?[57]

Akhir pekan lalu, saya kedatangan tamu istimewa. Ketika Simposium Kakao Nasional di Padang selama lima hari tengah berlangsung, saya memperoleh kabar bahwa ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) Pusat ingin berkunjung ke Lumajang untuk menemui saya. Wah, kabar ini tentu mengejutkan. Selain karena saya memang tidak mengenal sosok sang ketua, saya juga tidak tahu apa yang beliau ingin sampaikan hingga jauh-jauh dari Padang mengupayakan mampir ke Lumajang untuk menemui saya.

Sesuai waktu yang disepakati, akhirnya saya bertemu ketua APKAI. Setelah berkenalan, saya langsung menanyakan mengapa Pak Arif Zamroni namanya, tiba-tiba ingin menemui saya. Akhirnya, berceritalah beliau. Semua bermula dari seorang sahabatnya yang mengalami kebangkrutan. Namun, berkat pohon kakao yang saat itu tumbuh liar di halaman rumahnya, sahabat Pak Arif secara

57 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 12 November 2012. Judul Asli "Belajar Kakao dari Blitar: Bagaimana Kabar Pegiat Kakao Jember?"

bertahap dapat memulihkan perekonomian keluarga. Bahkan, sang sahabat kini telah dapat menjadikan pohon kakao sebagai tulang punggung banyak kepala keluarga di Blitar dan Jawa Timur.

Tidak banyak yang saya ketahui tentang Blitar. Tidak banyak yang saya ketahui pula tentang Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Guyub Santoso di Blitar. Saya pernah membaca kiprahnya, tetapi tidak mendalaminya. Saya baru mengetahui kemarin bahwa Guyub Santoso konsen pada pengelolaan kakao, mulai dari pembibitan, pemeliharaan, perbaikan mutu hasil, sampai penjualan hasil panen biji kakao untuk pasar lokal dan ekspor. Saya baru mengetahui kemarin, bahwa kiprah Guyub Santoso terhadap budidaya kakao di Blitar dan Jawa Timur menorehkan prestasi juara kedua *Pro Poor Award* 2011 dari Gubernur Jawa Timur, bersaing dengan Koperasi Peternak Sapi Perah (KPSP) Pasuruan, YDSF Al-Falah Surabaya, dan PT Timber Indonesia Probolinggo. Ya, Pak Arif bersama sahabatnya yang dulu bangkrut itu adalah pendiri dari Guyub Santoso.

Mempelajari rekam jejak Guyub Santoso, saya merasa Gapoktan ini mungkin dapat menjadi bahan belajar bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Jember serta Dinas Perkebunan yang beberapa bulan lalu tampak bersemangat menggagas kakao sebagai komoditas unggulan Jember. Assalamualaikum, Pak Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Assalamualaikum, Pak Kepala Dinas Perkebunan. Bagaimana kabarnya? Bagaimana progres gagasan untuk menjadikan kakao sebagai komoditas unggulan Jember? Mengapa sekarang menjadi sunyi senyap?

Belajar dari Gapoktan Blitar

Setidaknya, ada lima pembelajaran yang dapat diambil dari kiprah Gapoktan Guyub Santoso, Kademangan, Blitar, yang dapat dipetik untuk Gapoktan di tapal kuda ini. **Pertama,** dalam hal mengatasi masalah pembiayaan yang sulit mengakses perbankan. **Kedua,** dalam hal memutus mata rantai yang panjang agar petani dapat menikmati keuntungan dari harga jual. **Ketiga,** dalam hal transparansi harga hulu hingga hilir. **Keempat**, dalam hal membangun jaringan. **Kelima**, dalam hal istikamah meraih mimpi dan cita-cita untuk ummat, utamanya bagi petani untuk lebih bermartabat dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Untuk mengatasi kesulitan pembiayaan perbankan, utamanya juga guna menghindari pinjaman berbunga, Guyub Santoso menerbitkan surat berharga. Surat berharga ini adalah instrumen penyertaan modal bagi investor untuk membantu pembiayaan usaha kakao. Dengan akad *mudharabah,* Guyub Hasan dapat memberi bagi hasil kepada investor.

Mengetahui selisih harga yang terlampau besar antara harga di petani dengan harga tengkulak dan harga di pelabuhan, Guyub Santoso berusaha mendekatkan harga petani dengan harga di pelabuhan. Secara mandiri, Guyub Santoso mengupayakan agar petani dapat berinteraksi langsung dengan eksportir. Agar petani di seluruh jaringannya yang menyebar dari kota hingga ke tempat terpencil dapat mengetahui harga pasar, Guyub Santoso menyediakan situs yang selalu *update* setiap pukul satu malam untuk memberikan informasi harga terbaru. Guyub Santoso

juga mengedukasi serta memberi fasilitas *mobile phone* berbasis internet bagi petani untuk mengakses situs tersebut.

Dalam membangun jaringan, Guyub Santoso merangkul banyak pihak, mulai dari tataran petani hingga lingkaran lintas kementerian untuk membantu pengembangan industri kakao hulu. Bersama APKAI, Guyub Santoso kini mencoba merealisasikan mimpi dan cita-citanya untuk menjadikan biji kakao memiliki nilai tambah sehingga petani dapat menikmati harga jualnya dengan lebih baik. Dengan harga kakao saat ini yang mencapai Rp20 ribu per kilogram, Guyub Santoso mengambil untung Rp2-3 ribu yang dibayarkan untuk zakat, biaya produksi, pengiriman, dan keuntungan.

Saat ini, Guyub Santoso memiliki anggota yang *ready on call* di Lumajang, Malang, Kediri, Jombang, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Pacitan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, dan tentu saja Blitar. Tidak sedikit yang memperoleh manfaat atas keberadaan Gapoktan Guyub Santoso ini. Di Blitar, Guyub Santoso membawahi 48 kelompok tani yang menaungi sekitar 16.500 petani kakao.

Apa Kabar Pegiat Kakao Jember?

Setidaknya terdapat tujuh persoalan utama yang masih mengemuka dalam industri kakao, utamanya di Jember dan tapal kuda. **Pertama**, keterbatasan permodalan. **Kedua,** kelembagaan petani yang belum berfungsi optimal. **Ketiga,** terbatasnya akses pasar dan informasi. **Keempat,** tata niaga yang panjang. **Kelima,** masih terbatasnya kemitraan antara pengusaha dan industri

dengan petani. **Keenam**, rendahnya diseminasi teknologi karena minimnya tenaga penyuluh, luasan, dan terbatasnya sarana dan prasarana. **Ketujuh,** masih rendahnya pemanfaatan kapasitas terpasang dari lahan yang tersedia.

APKAI memberikan sejumlah penawaran sekaligus gagasan tentang bagaimana menjadikan petani kakao dapat sejahtera dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Setidaknya, terdapat dua poin penting yang harus diperjuangkan. **Pertama,** bagaimana mengupayakan agar produk kakao petani dapat memiliki nilai tambah. **Kedua,** bagaimana menciptakan pasar domestik. Dua poin ini menjadi kunci dari pertemuan saya dengan Ketua APKAI.

Jadi, apa kabar pegiat kakao Jember? Masihkah tergerak untuk mengembangkan kakao di tapal kuda? Wacana untuk menjadikan Jember sebagai kota industri seyogyanya berbasis pada sumber daya lokal. Dalam hal ini, upaya memberi nilai tambah produk petani adalah targetnya. Kita memiliki Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka). Ketua Dewan Kakao Nasional (DKN) juga berasal dari Jember. Terdapat pula Universitas Jember dengan Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknologi Pertanian serta Lembaga Penelitian yang konsen membangun perekonomian dan sektor pertanian di Jember. Yang mungkin kita belum miliki adalah keistikamahan untuk memperjuangkan mimpi dan cita-cita.

Ya, kita memiliki banyak sumber daya di sini. Bagi saya, persoalannya bukan sekadar kakao atau bukan kakao. Kakao hanyalah kail. Yang lebih penting adalah komitmen untuk menjadikan petani dan sektor pertanian lebih bermartabat dan

dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. *Wallahua'lam bish showab.*

60

ANOMALI EKONOMI RAKYAT[58]

Salah satu pemberitaan media nasional dalam sepekan ini yang menarik perhatian adalah kasus bakso babi oplosan di Jakarta. Bermula dari langka dan mahalnya daging sapi di ibu kota selama beberapa bulan menyebabkan pedagang bakso kelimpungan. Mereka harus mencari akal agar bahan bakunya tetap tersedia dengan murah dan tidak perlu menjual dengan harga lebih mahal.

Setelah tiga pedagang bakso dan satu lokasi penggilingan bakso ditemukan memakai oplosan daging babi, hampir seluruh pedagang bakso di wilayah Jakarta menjadi resah. Sampel bakso mengandung babi ditemukan di semua wilayah Jakarta, baik selatan, timur, utara, dan barat. Pedagang yang tetap mempertahankan keaslian daging sapi sebagai bahan baku baksonya ikut terimbas. Jualannya menurun. Dalam satu waktu, mereka umumnya dapat menjual ratusan mangkok. Pasca terkuaknya oplosan daging babi membuat mereka hanya mampu menjual sepuluh mangkok.

58 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 18 Desember 2012. Judul asli "Fenomena Bakso Sapi dan Kerang Hijau: Potret Anomali Ekonomi Rakyat".

Tak berbeda jauh dengan Jakarta, di Surabaya pun pedagang bakso mengakui harga daging sapi cukup mahal, meski tidak sampai selangka di Jakarta. Untuk menyiasati, mereka mengurangi ukuran bakso atau menambahkan jualan siomay.

Di Jember, awal Desember lalu, harga daging sapi yang sempat mencapai Rp85.000 per kilo mulai berangsur normal di kisaran Rp 75.000 per kilo untuk daging sapi biasa dan Rp78.000 per kilo untuk daging sapi super. Penurunan ini didorong oleh menurunnya permintaan dan berkurang jumlah sapi yang dipotong di rumah pemotongan hewan (RPH) akibat mahalnya harga sapi.

Anomali ekonomi rakyat yang tecermin dari perilaku pedagang bakso di Jakarta disebabkan oleh motif ekonomi pedagang sebagai dampak kebijakan pemerintah. Terdesak oleh kebutuhan, mereka mencari jalan untuk dapat bertahan hidup. Sejumlah imbauan telah dilakukan pemerintah maupun asosiasi terkait agar masyarakat tidak resah dan tetap mau mengonsumsi bakso, asal berhati-hati. Bagaimanapun, bakso sebagai makanan keseharian masyarakat Indonesia merupakan tulang punggung banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya dari perdagangan ini.

Anomali ekonomi rakyat lain yang dapat kita simak adalah kegiatan perdagangan kerang sebagai hasil laut dan perikanan. Kerang hijau (*Mytilus viridis* atau *Perna viridis*), kerang darah (*Anadara granosa L.*), dan kerang bakau *(Polymesoda bengalensis L.)* adalah salah satu jenis kerang yang paling sering dikonsumsi masyarakat. Kerang selama ini dipahami sebagai sumber nutrisi

yang baik karena kandungan mineral, protein, asam lemak omega 3, dan lemak jenuh yang rendah.

Namun, mungkin tak banyak yang mengetahui, layaknya penyedot debu, kerang mampu mengisap apa pun yang ada di dekatnya, termasuk menjaring racun, logam berat, dan sedimen lumpur. Sebagai kelompok *mollusca,* kerang yang diapit cangkang ini tidak memiliki organ hati untuk menghancurkan benda asing. Akibatnya, semua benda asing ditampung di dalam dagingnya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa kerang-kerangan memiliki potensi bahaya. Kerang hidup berkelompok di dasar laut dangkal dekat pantai, di mana sampah manusia dan buangan industri berhimpun. Konsentrasi bakteri dan zat racun di dasar laut menyebabkan kerang mudah tercemar.

Sepuluh tahun lalu, kerang-kerangan Indonesia ditolak oleh negara-negara Uni Eropa. Ekspor kerang terganjal oleh adanya indikasi banyaknya racun di kerang perairan Indonesia. Sejumlah psikiater, psikolog, dokter anak, dan orang tua yang memiliki anak autis dalam sejumlah forum juga memberi imbauan agar kerang dihindari, terutama bagi ibu hamil dan anak autis. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan, kerang di Indonesia timur yang tercemar mencapai sepuluh hingga dua puluh kali lipat dibandingkan dengan Pulau Jawa.

Informasi tentang potensi bahaya mengonsumsi kerang sudah mulai berani dinyatakan terbuka oleh Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta yang mengimbau agar masyarakat Jakarta tidak mengonsumsi kerang hijau. Sebelumnya, hal ini tidak pernah diumumkan lantaran argumen penyelamatan pariwisata.

Ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang menguak potensi bahaya kerang sesungguhnya sudah lama diketahui oleh institusi pemerintah terkait. Namun, tak banyak yang berani menyampaikannya kepada publik. Di Surabaya dan Sidoarjo, justru aktivis lingkungan hiduplah yang memberikan edukasi bagi masyarakat tentang potensi bahaya ini. Meski hal tersebut diamini oleh dinas setempat yang menyatakan bahwa bentos menyerap polutan di tempat ia hidup sehingga tubuhnya mengandung racun, tapi mereka belum berani menyampaikan secara terbuka.

Ekonomi Tanpa Negara

Fenomena bakso babi oplosan dan perdagangan kerang adalah salah satu bentuk konfirmasi tentang adanya anomali sosial-ekonomi di negeri ini. Anomali mengindikasikan adanya gangguan konstruksi stabilitas ekonomi dalam mencapai peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Motif utama di baliknya adalah dorongan kebutuhan ekonomi. Dorongan inilah yang membuat seseorang atau sekelompok orang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan tindakan penyimpangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam hal ini, negara tanpa sadar turut ambil bagian dalam mendistorsi daya tahan ekonomi masyarakat. Keterlibatan negara melalui perangkat birokrasinya tidak jarang juga menjadi pemicu *high cost economy* yang menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Banyak bukti empiris, pada level kebijakan di pemerintahan daerah, negara justru melumpuhkan

kekuatan ekonomi lokal, yang kemudian diganti dengan paradigma pragmatis eksploitatif dengan dalih peningkatan investasi atau pertumbuhan ekonomi.

Jika bakso babi oplosan dapat dinilai sebagai 'gangguan' karena terkait dengan kehalalannya bagi mayoritas penduduk muslim Indonesia, maka perdagangan kerang menjadi 'gangguan' karena terkait dengan masa depan anak bangsa. Meski kerang tidak bisa dituding sebagai penyebab utama lahirnya anak-anak autis, namun potensinya yang dapat mengganggu kesehatan seharusnya menjadi catatan bagi pemerintah.

Jelas, dalam hal ini dibutuhkan edukasi dan sosialisasi untuk menyampaikan informasi bagi publik. Untuk bersiasat atas mahalnya harga daging sapi, pakar kuliner dan gizi tentu dapat menawarkan sejumlah opsi ketimbang daging celeng sebagai campuran bakso. Jika pemerintah tidak dapat menjamin tidak adanya kontaminasi bagi hasil laut dan perikanan, maka pemerintah seyogyanya mencarikan jalan keluar bagi pembudidaya untuk beralih profesi. Kalaupun ada upaya lain untuk mereduksinya, misalnya dengan melakukan purifikasi, maka opsi ini pun dapat dipilih, meski menuntut kerja berat dan biaya besar untuk pembelajaran masyarakat.

Apa pun itu, tidak mungkin dibiarkan ekonomi rakyat berjalan tanpa negara, meski pada praktiknya justru hal itu banyak terjadi. Tidak jarang, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak mendesak rakyat kecil berada pada posisi sebagai oknum atau korban.

Perdagangan bakso babi oplosan dan kerang hanyalah studi kasus dari potret anomali ekonomi rakyat di mana tidak terjadi

sinergi komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara pemerintah dan elemen masyarakat. Namun, bagi mereka yang berpegang pada ilmu pengetahuan dan meyakini ilmu ekonomi sebagai ilmu moral, maka yakinlah bahwa ilmu itu netral. Ilmu menjadi tidak netral ketika dimasuki oleh kepentingan. Namun, ilmuwan tidak boleh netral. Ilmuwan harus punya nurani dan berpihak pada kebenaran ilmiah yang diyakini kebaikannya bagi umat. *Wallahua'lam bish showab.*

BIOGRAFI PENULIS

Khairunnisa Musari adalah Doktor Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Saat ini dia adalah Lektor pada Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana dan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Dia juga saat ini menjadi Wakil Koordinator Indonesia Tengah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Sekretaris II Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IAEI Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jember, dan Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pimpinan Daerah (PD) Lumajang. Dia memiliki perhatian besar untuk isu-isu terkait sukuk, wakaf, *esham,* kebijakan fiskal & moneter, dan *Islamic microfinance/nano-finance.* Tulisannya lebih dari 170 artikel telah diterbitkan pada koran harian lokal dan nasional, majalah, dan jurnal internasional. Pada 2019, ia masuk dalam *Top 300 Most Influential Women in Islamic Business & Finance 2019* yang diselenggarakan oleh Cambridge-IFA.